

BUPATI BONE

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 31 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2020 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 berisi program-program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023, serta memperhatikan dokumen Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab VII : Penutup

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di DPRD.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 7

Isi beserta uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 31

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>v</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>xi</i>
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-5
1.4 Sistematikaa Dokumen RKPD	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
A. 1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
1. Luas dan Batasan Wilayah	II-1
2. Letak dan Kondisi Geografis	II-1
3. Topografi dan Hidrologi	II-2
4. Geologi	II-2
5. Kalimatografi	II-2
6. Penggunaan Lahan	II-3
B. Wilayah Rawan Bencana	II-3
B. 1.2 Demografi	II-5
C. 1.3 Potensi Sumber Daya	II-10
D. 1.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..	II-13

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018	III-6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1 Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2019	III-11
3.2.2 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah	III-13
3.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-30
3.2.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-31
3.2.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-33
3.2.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-35
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019	IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		<i>Hal</i>
Tabel 1	Indikator Klimatologi Kabupaten Bone 2016	II-2
Tabel 2	Rincian kawasan rawan benca alam merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone	II-4
Tabel 3	Demografi	II-5
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bone 2013-2017	II-9
Tabel 5	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di kabupaten Bone, 2016	II-10
Tabel 6	Keseimbangan Jumlah Guru dan Murid	II-11
Tabel 7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 (Persen)	II-12
Tabel 8	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Tahun 2016 (Persen)	II-13
Tabel 9	Pencapaian IPM Kabupaten Bone 2014-2016	II-27
Tabel 10	Persenatse Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas menurut Kemampuan Baca Tulis di Kabupaten Bone, 2016	II-29
Tabel 11	Penduduk Kabupaten Bone Usia 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 12	Perkembangan Capaian APK PAUD Kab. BoneTahun 2013 -2016	II-43
Tabel 13	Angka Partisipasi Kasar	II-44
Tabel 14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	II-44
Tabel 15	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	II-44
Tabel 16	Angka Paritisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	II-45
Tabel 17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	II-45
Tabel 18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	II-45

Tabel 19	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	II-45
Tabel 20	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	II-46
Tabel 21	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	II-46
Tabel 22	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	II-46
Tabel 23	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-47
Tabel 24	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	II-75
Tabel 25	Tabel Data Kondisi Jalan Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 26	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	II-92
Tabel 27	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	II-93
Tabel 28	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran	II-94
Tabel 29	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	II-114
Tabel 30	Timbulan Sampah Yang Ditangani	II-117
Tabel 31	Akta Catatan Sipil	II-121
Tabel 32	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	II-126
Tabel 33	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	II-137
Tabel 34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	II-137
Tabel 35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	II-137
Tabel 36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	II-138
Tabel 37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	II-138
Tabel 38	Jumlah Atlet Berpartisipasi	II-142
Tabel 39	Jumlah Prestasi Olahraga	II-142
Tabel 40	Tersediannya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	II-143
Tabel 41	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	II-143
Tabel 42	Buku "PDRB"	II-143

Tabel 43	Lama Kunjungan Wisata	II-152
Tabel 44	Dalam hal cakupan Bin Kelompok Pedagang/Usaha Informasi (%)	II-155
Tabel 45	Indikator Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan	II-160
Tabel 46	Penetapan APBD	II-170
Tabel 47	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	II-171
Tabel 48	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2012	II-174
Tabel 49	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2013	II-175
Tabel 50	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2014	II-176
Tabel 51	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2015	II-176
Tabel 52	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2016	II-177
Tabel 53	Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural berdasarkan Jabatan Tahun 2017	II-178
Tabel 54	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	II-183
Tabel 55	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	II-184
Tabel 56	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.	II-185
Tabel 57	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah.	II-186
Tabel 58	Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI beserta Tindak Lanjut Temuannya Tahun 2006-2017	II-187
Tabel 59	Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan yang Merata	II-190
Tabel 60	Tersebar nya Tenaga Medis Terlatih dan Responsif Gender	II-191
Tabel 61	Terjalannya Hubungan Sinergis Antar Penyedia Layanan	II-193

	Kesehatan	
Tabel 62	Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal	II-194
Tabel 63	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	II-195
Tabel 64	Berkurangnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	II-196
Tabel 65	Berkurangnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit	II-199
Tabel 66	Meningkatnya Status gizi masyarakat	II-204
Tabel 67	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi	II-205
Tabel 68	Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif	II-206
Tabel 69	Meningkatnya Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi	II-207
Tabel 70	Meningkatnya Akses Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat yang Makin Setara dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai	II-208
Tabel 71	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	II-213
Tabel 72	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kemajuan Organisasi Pemuda Serta Jiwa Kewirausahaan Pemuda	II-216
Tabel 73	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	II-217
Tabel 74	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Berskala Nasional	II-222
Tabel 75	Tersedianya Lapangan Kerja dan Berkurangnya Pengangguran, serta Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	II-224
Tabel 76	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan di Berbagai Obyek Wisata Daerah	II-227
Tabel 77	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	II-229

	yang Berkembang dan Bertambahnya Jumlah Wirausahawan Baru	
Tabel 78	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	II-230
Tabel 79	Meningkatnya Jumlah IKM yang Berkembang dan Menyerap Tenaga Kerja	II-231
Tabel 80	Meningkatnya Aktivitas Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	II-233
Tabel 81	Meningkatnya Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	II-235
Tabel 82	Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Ikutannya	II-243
Tabel 83	Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan	II-247
Tabel 84	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman	II-249
Tabel 85	Terwujudnya Perlindungan lahan-Lahan Produktif Sebagai Cadangan Pangan dan Pendukung Ekonomi Lokal	II-250
Tabel 86	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik/Pertanahan	II-251
Tabel 87	Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air	II-252
Tabel 88	Terwujudnya Watampone Sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone)	II-258
Tabel 89	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan	II-259
Tabel 90	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan Berkondisi Baik	II-260
Tabel 91	Meningkatnya Luas dan Tingkat Pelayanan Jaringan Irigasi	II-262
Tabel 92	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	II-263

Tabel 93	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	II-264
Tabel 94	Berkurangnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Cakupan Keluarga Memiliki Sarana Air Bersih dan Sanitasi	II-265
Tabel 95	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-268
Tabel 96	Meningkatkan Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-271
Tabel 97	Semakin Berkembangnya Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayanan Administrasi Desa	II-272
Tabel 98	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	II-273
Tabel 99	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	II-274
Tabel 100	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Transmigrasi di Lokasi Permukiman Transmigrasi	II-277
Tabel 101	Meningkatnya Penyelenggaraan Event-Event Seni Budaya Daerah dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah	II-278
Tabel 102	Meningkatnya Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum dan Kesadaran Bela Negara	II-279
Tabel 103	Meningkatnya keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di lingkungan Masyarakat (Menurunnya Gangguan Kantibmas)	II-280
Tabel 104	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK	II-282
Tabel 105	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya	II-286
Tabel 106	Terjalannya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan	II-287

	Masyarakat untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Terjalannya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
Tabel 107	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	II-288
Tabel 108	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informatika sesuai kebutuhan	II-289
Tabel 109	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-291
Tabel 110	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Sektoral dan Perencanaan-Perencanaan Normatif Lainnya Sesuai Kebutuhan	II-292
Tabel 111	Tersusunnya Data dan Informasi Statistik Daerah yang Valid dan up to date Sesuai Kebutuhan	II-293

DAFTAR GRAFIK

		<i>Hal</i>
Grafik 1	Penduduk Kabupaten Bone Menurut Kelompok Umur (Persen) 2016	II-6
Grafik 2	Struktur umur penduduk Kabupaten Bone digambarkan pada grafik penduduk menurut kelompok umur dan piramida penduduk	II-6
Grafik 3	Indikasi turunnya tingkat kelahiran terkait dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi	II-7
Grafik 4	Jumlah penduduk (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kabupaten Bone 2013-2017	II-8
Grafik 5	Jumlah Sekolah di kabupaten Bone Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016	II-11
Grafik 6	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Tahun 2014-2016 (Persen)	II-12
Grafik 7	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-14
Grafik 8	Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 (PDRB Atas Harga Berlaku)	II-15
Grafik 9	Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 (PDRB Atas Harga Konstan)	II-16
Grafik 10	Pertumbuhan Ekonomi	II-17
Grafik 11	Inflasi/deflasi	II-18
Grafik 12	Perbandingan Inflasi/Deflasi Kabupaten Bone, Bulukumba, Makassar, Pare-pare, dan Palopo tahun 2016	II-19
Grafik 13	PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2013-2017	II-20
Grafik 14	Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Bone Tahun 2013-2017.	II-21

Grafik 15	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017	II-22
Garik 16	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bone Tahun 2013-2017	II-23
Grafik 17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone dan Sulsel 2012-2016	II-25
Grafik 18	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016	II-25
Grafik 19	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2016	II-26
Grafik 20	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone, 2013-2017	II-30
Grafik 21	Harapan Lama Sekolah kabupaten Bone, 2013-2017	II-33
Grafik 22	Angka harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Bone, 2013-2017	II-34
Grafik 23	Grafik Dan Narasi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan	II-36
Grafik 24	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2013-2014	II-36
Grafik 25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-38
Grafik 26	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-38
Grafik 27	Rasio Penduduk yang Bekerja	II-39
Grafik 28	Proporsi Pad Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 – Tahun 2017	II-39
Grafik 29	Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-41
Grafik 30	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	II-41
Grafik 31	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	II-47
Grafik 32	Angka Kelangsungan Hidup bayi	II-48
Grafik 33	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	II-48
Grafik 34	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	II-49
Grafik 35	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	II-50
Grafik 36	Rasio Posyandu Per Satuan Ballita	II-50
Grafik 37	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk	II-51
Grafik 38	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	II-52

Grafik 39	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidan	II-53
Grafik 40	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-54
Grafik 41	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	II-55
Grafik 42	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunasi Campak	II-55
Grafik 43	Non Polio AFP rate Per 100.000 Penduduk	II-56
Grafik 44	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	II-57
Grafik 45	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-57
Grafik 46	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-58
Grafik 47	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-59
Grafik 48	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis dalam Program Dots	II-60
Grafik 49	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program Dots	II-61
Grafik 50	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	II-62
Grafik 51	Penderita Diare yang Ditangani	II-62
Grafik 52	Tingkat Kematian Akibat Malaria	II-63
Grafik 53	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang tepat	II-64
Grafik 54	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	II-65
Grafik 55	Cakupan Kunjungan Bayi	II-65
Grafik 56	Cakupan Puskesmas	II-66
Grafik 57	Cakupan Pembantu Puskesmas	II-67
Grafik 58	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	II-67
Grafik 59	Cakupan Pelayanan Nifas	II-68

Grafik 60	Cakupan Noenatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	II-69
Grafik 61	Cakupan Pelayanan Anak Balita	II-70
Grafik 62	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	II-71
Grafik 63	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	II-72
Grafik 64	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	II-72
Grafik 65	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	II-73
Grafik 66	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	II-75
Grafik 67	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	II-76
Grafik 68	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	II-77
Grafik 69	Persentase Sasnitasi	II-78
Grafik 70	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	II-79
Grafik 71	Rasio Jaringan Irigasi	II-80
Grafik 72	Persentase Sair Minum	II-81
Grafik 73	Persentase Kawasan Kumuh	II-82
Grafik 74	Ketaatan Terhadap RTRW	II-87
Grafik 75	Persentase RTLH	II-88
Grafik 76	Persentase Korangnya Backlog	II-89
Grafik 77	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	II-90
Grafik 78	Persentase Penegakan PERDA	II-91
Grafik 79	Jumlah Bantuan	II-92
Grafik 80	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	II-92
Grafik 81	Jumlah Bantuan	II-93
Grafik 82	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan	II-93

	Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	
Grafik 83	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama masa tanggap Darurat	II-94
Grafik 84	Persentase Capaian Tingkat Waktu tanggap (Response Time Rat) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	II-94
Grafik 85	Persentase Penegakan PERDA	II-95
Grafik 86	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-96
Grafik 87	Persentase PMKS Yang Tertangani	II-97
Grafik 88	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	II-98
Grafik 89	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	II-99
Grafik 90	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	II-99
Grafik 91	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	II-100
Grafik 92	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	II-101
Grafik 93	Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	II-101
Grafik 94	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	II-102
Grafik 95	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun	II-103
Grafik 96	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-103

Grafik 97	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	II-104
Grafik 98	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	II-104
Grafik 99	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	II-105
Grafik 100	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	II-105
Grafik 101	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	II-106
Grafik 102	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-106
Grafik 103	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR	II-107
Grafik 104	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	II-108
Grafik 105	Rasio KDRT	II-108
Grafik 106	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-109
Grafik 107	Sertifikasi Tanah Pemerintah	II-111
Grafik 108	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	II-115
Grafik 109	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LHD Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	II-115
Grafik 110	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	II-116
Grafik 111	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	II-117
Grafik 112	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota.	II-117
Grafik 113	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	II-119

Grafik 114	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-120
Grafik 115	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	II-120
Grafik 116	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	II-122
Grafik 117	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-123
Grafik 118	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	II-124
Grafik 119	Persentase LSM Aktif	II-124
Grafik 120	Persentase LPM Berprestasi	II-125
Grafik 121	Persentase PKK Aktif	II-125
Grafik 122	Persentase Posyandu Aktif	II-125
Grafik 123	Swadaya masyarakatter hadap program pemberdayaan masyarakat	II-126
Grafik 124	Laju Pertumbuhan Penduduk	II-126
Grafik 125	Total Fertelity Rate (TFR)	II-127
Grafik 126	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	II-128
Grafik 127	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	II-128
Grafik 128	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Neet)	II-129
Grafik 129	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	II-130
Grafik 130	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	II-130
Grafik 131	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	II-131
Grafik 132	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	II-132
Grafik 133	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	II-132

Grafik 134	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber – KB mandiri	II-133
Grafik 135	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	II-133
Grafik 136	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	II-134
Grafik 137	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	II-134
Grafik 138	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa	II-135
Grafik 139	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	II-135
Grafik 140	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	II-136
Grafik 141	Persentase Koperasi Aktif	II-138
Grafik 142	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	II-139
Grafik 143	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	II-139
Grafik 144	Persentase Wirausaha Muda	II-140
Grafik 145	Cakupan Pembinaan Olahraga	II-140
Grafik 146	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	II-141
Grafik 147	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	II-141
Grafik 148	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	II-144
Grafik 149	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	II-144
Grafik 150	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	II-145
Grafik 151	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	II-145

Grafik 152	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	II-146
Grafik 153	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	II-146
Grafik 154	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	II-147
Grafik 155	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	II-148
Grafik 156	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	II-148
Grafik 157	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	II-149
Grafik 158	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	II-150
Grafik 159	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	II-150
Grafik 160	Kunjungan Wisata (Wisatawan Nusantara)	II-151
Grafik 161	Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)	II-151
Grafik 162	Target PAD Kabupaten Bone Sektor Pariwisata	II-152
Grafik 163	Realisasi PAD Kabupaten Bone Sektor Pariwisata	II-153
Grafik 164	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bone (Kuintal/Ha), 2016	II-153
Grafik 165	Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	II-155
Grafik 166	Produksi Perikanan	II-157
Grafik 167	Konsumsi Ikan	II-158
Grafik 168	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	II-158
Grafik 169	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	II-159
Grafik 170	Persentase SILPADA	II-162
Grafik 171	Persentase Silpa Terhadap APBD	II-165
Grafik 172	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	II-167
Grafik 173	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	II-168
Grafik 174	Persentase Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung	II-169
Grafik 175	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	II-170
Grafik 176	Persentase Asn Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	II-172
Grafik 177	Persentase Pejabat Asn Yang Telah Mengikuti	II-174

Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Grafik 178	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	II-178
Grafik 179	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	II-180
Grafik 180	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	II-182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone tahun 2020 selain berpedoman pada Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Tahun 2020, hal ini karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 ini memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan

daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan kedalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.

Seluruh Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Kabupaten Bone ber kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai manifestasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Bone maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang

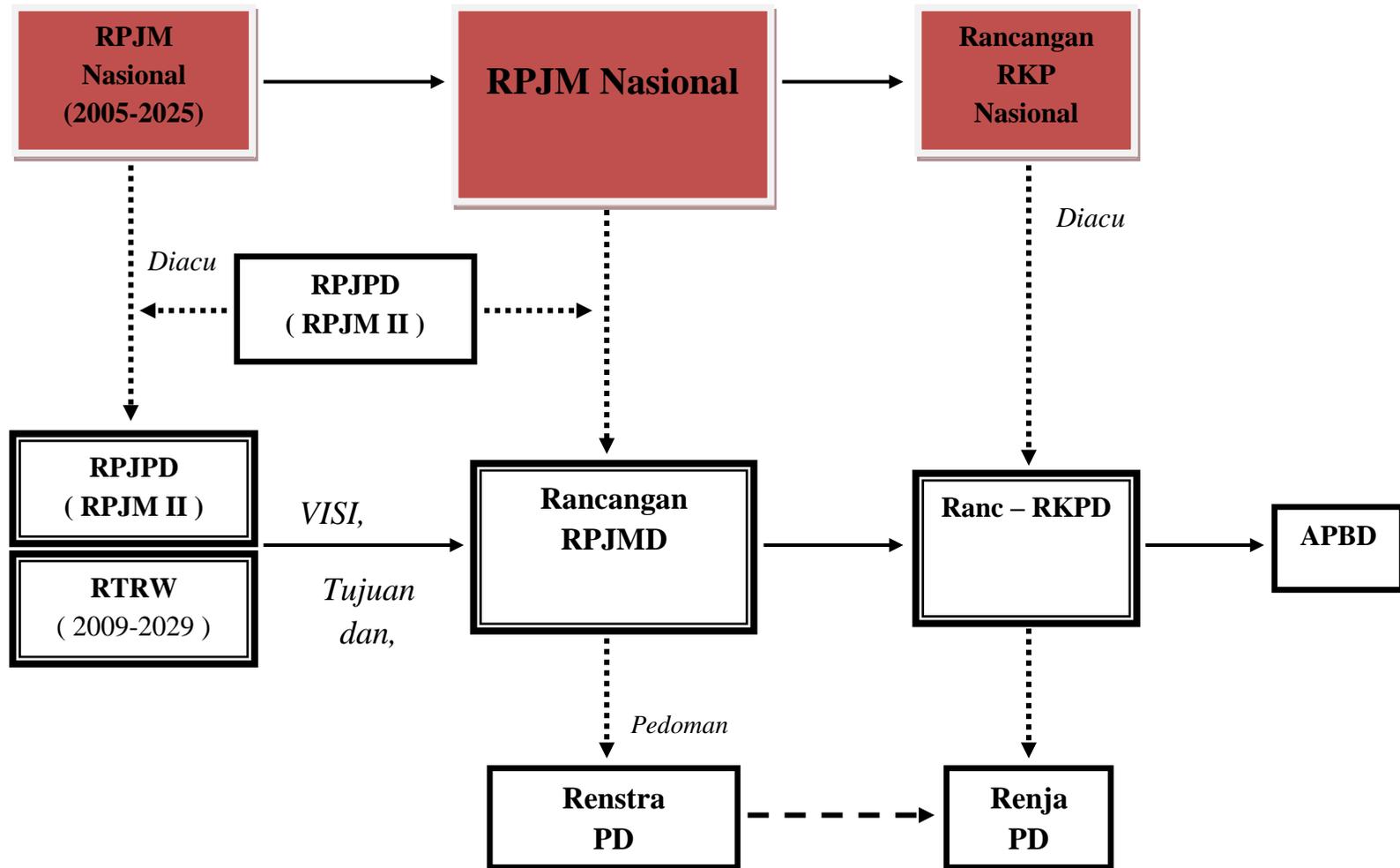
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 91).

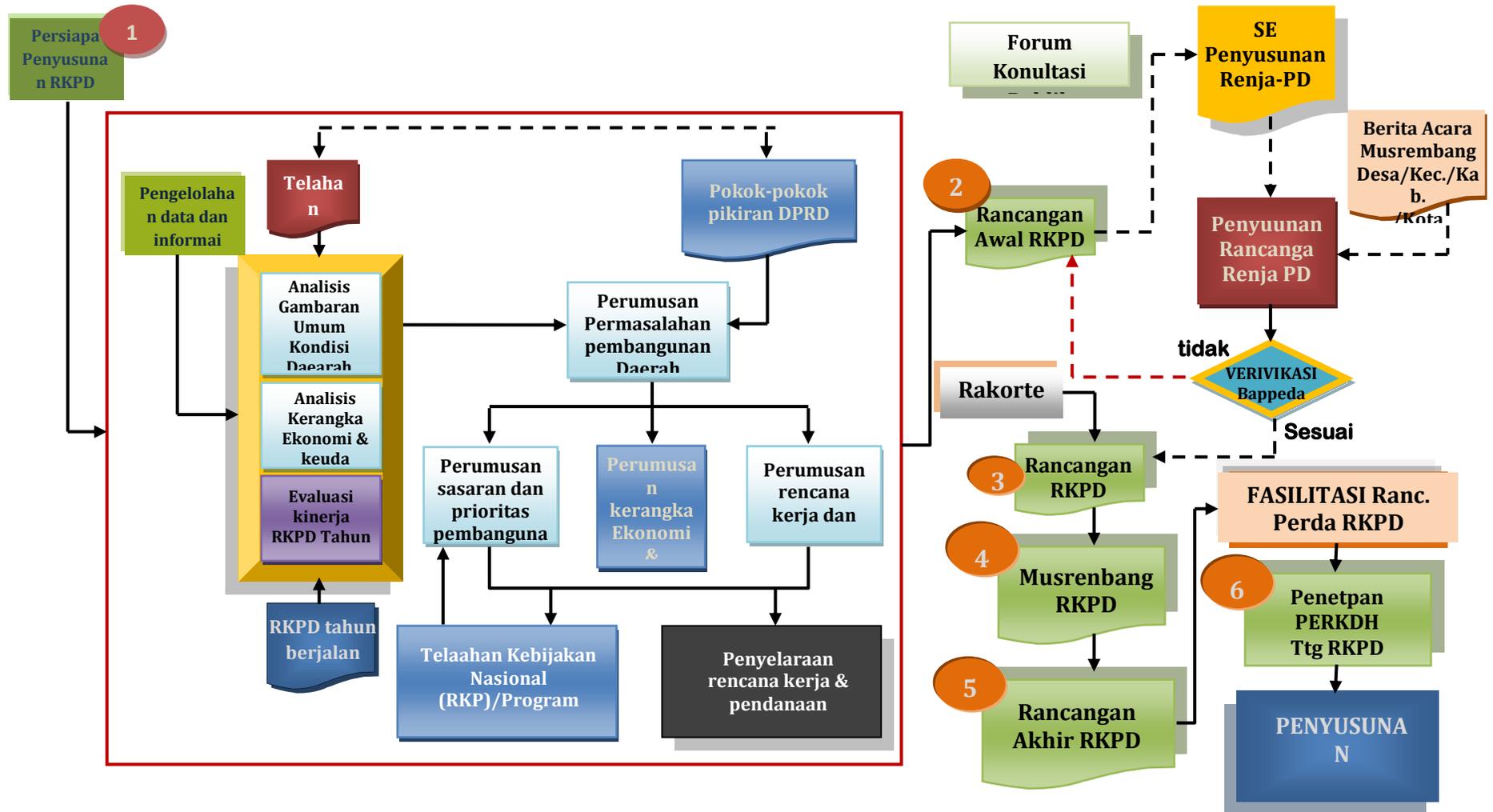
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 2005 – 2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012– 2032, serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Master Plan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi, dan perencanaan sektoral lainnya.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini menguraikan penjelasan tentang Kondisi Umum Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, berisi penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. yang meliputi Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan yang meliputi Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n).

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah, pada bab ini mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII Penutup, berisi ringkasan kesimpulan isi dari dokumen RKPD 2020 Kabupaten Bone .

1.5 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 kedalam rencana program prioritas Kabupaten Bone Tahun 2020 dan mensinkronkan dengan sasaran/program RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.
2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone Tahun 2020; dan
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Bone Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bone Tahun 2020 untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu terlebih dahulu diketahui bagaimana gambaran umum kondisi daerah sebagai landasan perumusan kebijakan. Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahaman tentang kondisi dan potensi sumber daya alam serta kependudukan dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi Kabupaten Bone diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan uraian tentang aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1. Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Letak wilayah kabupaten ini berjarak 174 km dari Kota Makassar. Lokasi Kabupaten Bone terletak pada posisi $4^{\circ}13'56''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42' - 120^{\circ}30'$ Bujur Timur serta mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bone berada pada wilayah tropis. Kondisi ini menunjukkan ada potensi pengembangan berbagai jenis tanaman tropis.

Secara administratif, Kabupaten Bone berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Kabupaten Bone memiliki posisi strategis di Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Bone pada Bagian Timur Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Bone memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara. Posisi tersebut juga menempatkan Kabupaten Bone sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pengembangan perekonomian di kawasan tersebut.

Tabel 2.1
Jarak dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2018

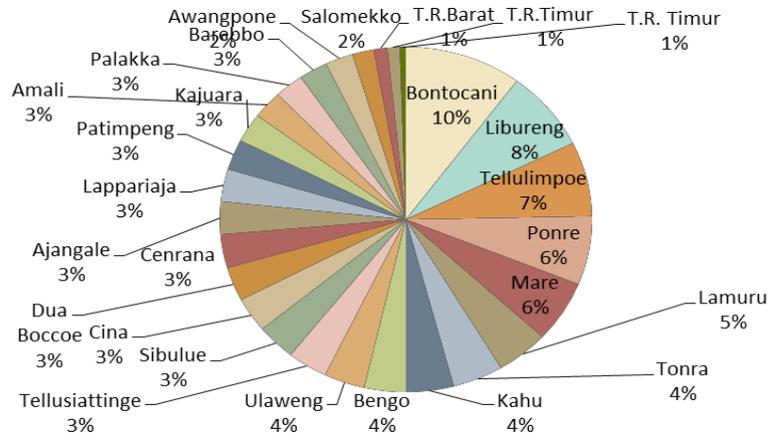
No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Jarak (Km)	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bontocani	Kahu	112	463,35	10,16
2	Kahu	Palattae	100	189,50	4,16
3	Kajuara	Bojo	70	124,13	2,72
4	Salomekko	Manera	62	84,91	1,86
5	Tonra	Bulu-bulu	52	200,32	4,39
6	Patimpeng	Latobang	77	130,47	2,86
7	Libureng	Camming	83	344,25	7,55
8	Mare	Kadai	37	263,50	5,78
9	Sibulue	Pattiro Bajo	15	155,80	3,42
10	Cina	Tanete Harapan	17	147,50	3,24
11	Barebbo	Apala	9	114,20	2,50
12	Ponre	Lonrong	30	293,00	6,43
13	Lappariaja	Matango	51	138,00	3,03
14	Lamuru	Lalebata	62	208,00	4,56
15	Tellu Limpoe	Tujue	74	318,10	6,98

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Jarak (Km)	Luas (Km ²)	Persentase
16	Bengo	Bengo	44	164,00	3,60
17	Ulaweng	Taccipi	17	161,67	3,55
18	Palakka	Passippo	12	115,32	2,53
19	Awangpone	Componge	8	110,70	2,43
20	Tellu Siattange	Tokaseng	17	159,30	3,49
21	Amali	Taretta	36	119,13	2,61
22	Ajangale	Pompanua	46	139,00	3,05
23	Dua Boccoe	Uloe	30	144,90	3,18
24	Cenrana	Ujung Tanah	38	143,60	3,15
25	TR Barat	Macanang	0	53,68	1,18
26	Tanete Riattang	Salekoe	3	23,79	0,52
27	TR Timur	Lonrae	8	48,88	1,07
	Kabupaten Bone	Watampone		4.559,00	100,00

Sumber : Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone kurang lebih 4.559 Km² atau 7,30 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan, dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. Wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten Bone adalah Kecamatan Bontocani dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

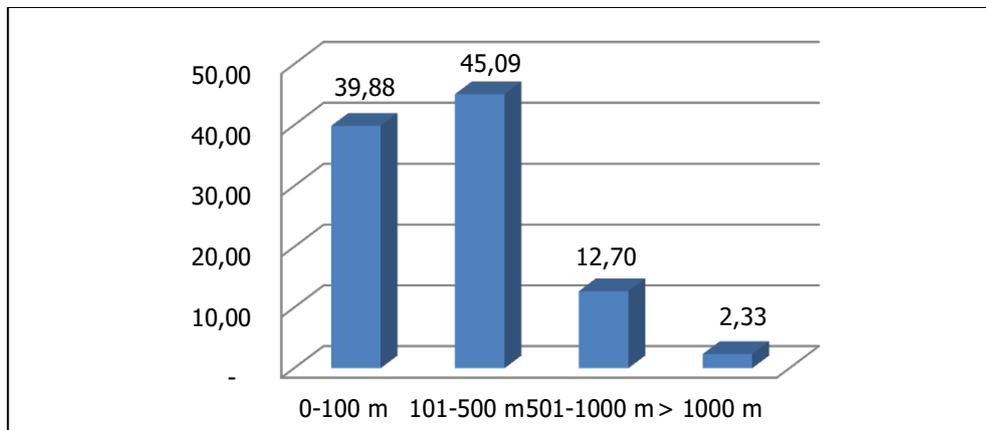
Grafik 2.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Kecamatan Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

2.1.1.2. Topografi

Grafik 2.2
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Ketinggian Lokasi Diatas Permukaan Laut Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Kabupaten Bone memiliki wilayah pedalaman, pegunungan dan pesisir. Wilayah bagian barat Kabupaten Bone pada umumnya merupakan wilayah pedalaman dan pegunungan, sedangkan wilayah bagian timur pada umumnya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dapat dilihat bahwa pada umumnya wilayah Kabupaten Bone berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Hal ini menunjukkan

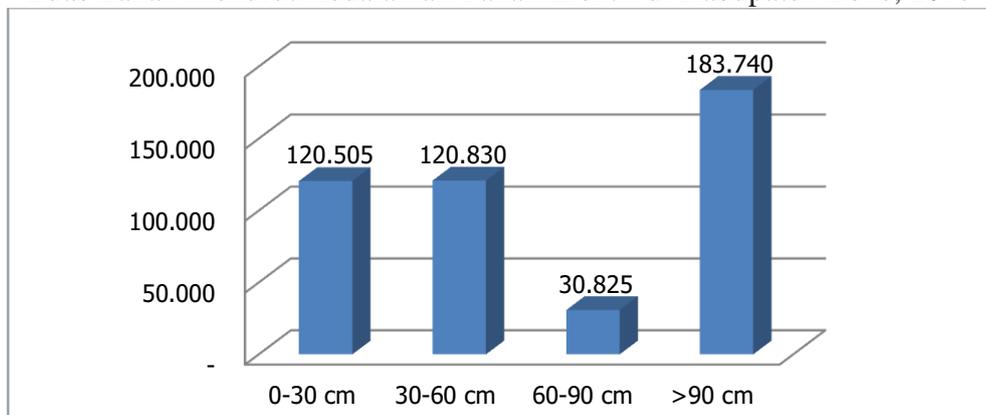
bahwa rencana pengembangan komoditas pada wilayah tersebut mayoritas sesuai untuk tanaman dataran rendah.

2.1.1.3. Geologi

Kondisi kedalaman efektif tanah di Kabupaten Bone cukup baik untuk pertumbuhan tanaman. Pada umumnya (40,30%) luas lahan memiliki kedalaman di atas 90 Cm. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedalaman tanah pada umumnya cukup baik untuk berbagai jenis tanaman termasuk tanaman tahunan.

Kabupaten Bone memiliki berbagai jenis tanah yang memungkinkan tumbuh berbagai jenis tanaman. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6 persen dari total wilayah kemudian Renzina 9,59 persen, dan Litosol 9 persen. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

Grafik 2.3
Luas Lahan Menurut Kedalaman Tanah Efektif di Kabupaten Bone, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

2.1.1.4. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembapan udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C - 43°C . Suhu cukup tinggi rata-rata terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus di musim kemarau. Pada periode April-September bertiup Angin Timur yang membawa hujan, sebaliknya pada

Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu : Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur.

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bone, 2017

No.	Bulan	Suhu (⁰ C)	Kelembaban (%)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	27,6	80	40
2	Februari	26,2	83	184
3	Maret	26,3	83	148
4	April	26,4	82	150
5	Mei	25,6	85	589
6	Juni	25,2	88	482
7	Juli	25,1	87	272
8	Agustus	25,3	84	114
9	September	25,9	81	49
10	Oktober	27,1	79	59
11	November	26,6	81	197
12	Desember	27,0	82	102

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

2.1.1.5. Hidrologi

Ketersediaan air untuk pengembangan sektor pertanian dan pemukiman bersumber dari sungai dan jaringan irigasi. Kondisi ketersediaan air di wilayah Kabupaten Bone dapat dilihat dari banyaknya sungai, baik yang langsung bermuara ke laut, maupun bermuara di Danau Tempe di Kabupaten Wajo (melalui Sungai Walanae) dan sungai-sungai besar lainnya.

Beberapa lokasi-lokasi yang berkontribusi terhadap ketersediaan sumber-sumber air baku di Kabupaten Bone, diantaranya bersumber dari sungai-sungai besar dan prasarana jaringan irigasi. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Bone seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo. Sedangkan

Wilayah Kabupaten Bone memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pada beberapa wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian dengan sistem irigasi teknis. Beberapa kawasan pertanian tersebut didukung oleh ketersediaan air yang memadai namun beberapa kawasan lainnya masih memiliki keterbatasan terutama pada musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan air, maka beberapa prasarana dan potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah:

1. Beberapa sungai besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk irigasi.
2. Perluasan irigasi guna mengembangkan penggunaan air, melindungi areal produksi dan menghindari kerusakan lahan akibat banjir dan kekeringan serta mendukung pemanfaatan areal pertanian baru dan penyediaan air bagi masyarakat.
3. Sistem Prasarana Penyediaan Air Bersih, baik untuk permukiman maupun untuk keperluan industri dan kegiatan lainnya.
4. Sistem Prasarana Irigasi Pertanian dan Sistem Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.
5. Sistem Prasarana Konservasi Sungai dan Waduk.

Potensi lain yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya di Kabupaten Bone adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bone bermuara pada pesisir pantai Timur Kabupaten Bone, sedangkan hulu DASnya berada di kabupaten lain, seperti Kabupaten Wajo, Sinjai, Maros dan Soppeng. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten lain disekitarnya dalam mengelola sumberdaya air tersebut.

Pengelolaan air di Kabupaten Bone dilakukan dengan pembentukan waduk dan embung, yang secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bone

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Wilayah Kecamatan
1	Lonrong	37.009,37	Kec. Tonra, Sibulue, Cina, Ponre dan Barebbo
2	Bulu-Bulu	8.558, 84	Kec. Salomekko, Tonra, Mare
3	Marek	35.489,71	Kec. Tonra, Mare, Libureng, Cina, Ponre
4	Baleng	21.581,59	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Lappariaja, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone, Ulaweng.
5	Awangpone	12.760,84	Kec. Cina, Ponre, Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Palakka, Awangpone
6	Lisu	667,67	Kec. Lamuru
7	Tippulue	736,88	Kec. Tanete Riattang Timur
8	Bajoe	379,98	Kec. Tanete Riattang Timur
9	Barebbo	2.812,56	Kec. Cina, Barebbo, Palakka
10	Boarenge	2.039,74	Kec. Sibulue dan Barebbo
11	Boto	202,06	Kec. Sibulue
12	Cumene	577,57	Kec. Sibulue
13	Maros	134,51	Kec. Bontocani
14	Lab Lang	10.199,88	Kec. Kajuara, Salomekko, Tonra
15	Matuju	15.677,37	Kec. Palakka, Awangpone, Ulaweng, Tellu Siattinge
16	Benteng Barang	1.883,00	Kec. Sibulue
17	Marek Ds	14.077,22	Kec. Mare, Sibulue, Cina, Ponre
18	Tangka	9.715,81	Kec. Kajuara, Bontocani, Kahu
19	Salomekko Ds	21.040,71	Kec. Kajuara, Salomekko, Bontocani, Kahu dan Tonra
20	Sigeri	4,20	Kec. Lamuru
21	Bila Walannae	257.531,25	Kec. Salomekko, Bontocani, Kahu, Tonra, Libureng, Ponre, lappariaja, Lamuru, Awangpone, Ulaweng, Tellusiattinge, Dua Bocoe, Cenrana, Ajangale
22	Pangkajenne	4.843,57	Kec. Lamuru
23	Tanete Riattang	2.341,44	Kec. Barebbo, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, Palakka.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2017

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bone berdasarkan fungsi utama lahan. Secara makro penggunaan lahan dibagi kedalam beberapa kawasan yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan pada kawasan lindung diarahkan pada pemantapan kawasan yang berfungsi lindung, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman/perkotaan maupun budidaya produktif (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan sebagainya) sesuai arahan dalam RTRW.

2.1.1.7. Arahan Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah menurut arahan dalam RTRW di Kabupaten Bone, meliputi beberapa kawasan diantaranya adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Bone dijadikan titik tolak didalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya ditetapkan guna mengakomodasi kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya produksi maupun permukiman. Pengelolaan kawasan lindung yang ada perlu dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim pada wilayah belakangnya.

Pengelolaan kawasan lindung mengacu pada Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Bone meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam dan Kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana alam, Kawasan lindung geologi dan Kawasan lindung lainnya. Sesuai dengan kondisi wilayah, kawasan lindung yang perlu ditetapkan di Kabupaten Bone sesuai dengan kriterianya masing-masing adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
2. Kawasan Perlindungan Setempat, yang terdiri dari: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, meliputi: kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar alam.
4. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi: kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin puting beliung dan kawasan rawan tanah longsor.
5. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
6. Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kawasan konservasi terumbu karang yang terdiri atas: zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Kawasan hutan lindung tersebar pada beberapa kecamatan dan luasnya bervariasi antar kecamatan. Luas kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Bone seluas 37.942,12 Ha dan tersebar di Kecamatan Awangpone seluas 456,89 Ha (1,20%), Kecamatan Tellu Siattinge seluas 396,57 Ha (1,05%), Kecamatan Cenrana seluas 2.046,72 Ha (5,39%), Kecamatan Mare seluas 4.680,66 Ha (12,34%), Kecamatan Sibulue seluas 1.605,96 Ha (4,23%), Kecamatan Barebbo seluas 235,95 Ha (0,62%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 303,10 Ha (0,80%), Kecamatan Lamuru seluas 15.824 Ha (41,71%), Kecamatan Ponre seluas 1.100,88 Ha (2,90%), Kecamatan Lappariaja seluas 2.505,65 Ha (6,60%), Kecamatan Tonra seluas 6.129,28 Ha (16,15%), Kecamatan Libureng seluas 2,81 Ha (0,01%), Kecamatan Cina seluas 2.361 Ha (6,22%), Kecamatan Dua Boccoe seluas 223,56 Ha (0,59%) dan Kecamatan Bontocani seluas 68,46 Ha (0,18%). Upaya dan arahan untuk melestarikan kawasan hutan lindung yang perlu dipertahankan dan tingkatkan dapat dilakukan melalui kebijakan yang sifatnya mengikat, antara lain:

- Pemantapan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang masih dipertahankan,
- Pengembalian fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah mengalami tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dapat mengganggu fungsi lindung,
- Pelarangan/pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang telah ditetapkan,
- Pembatasan kegiatan budidaya yang ada dengan tindakan konservasi secara intensif,
- Pemindahan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

Kawasan resapan air ditetapkan pada Daerah Aliran Sungai disebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dan sebagian wilayah Kecamatan Lamuru.

Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bone di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Cenrana, Tellu Siattinge, Awangpone, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara dengan ketentuan : daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan Sempa dan Sungai ditetapkan dan tersebar disepanjang tepian sungai di kabupaten Bone dengan kriteria : daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan Sekitar Mata Air ditetapkan di mata air Wollangi 1, Wollangi 2 dan Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan

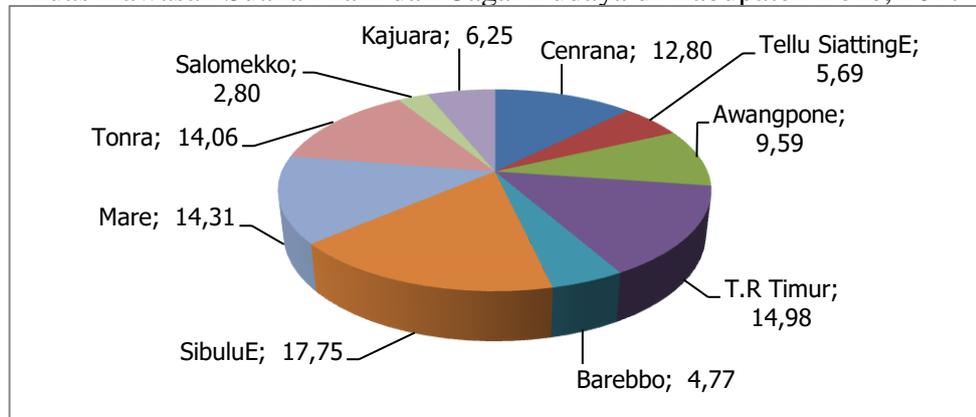
Ulaweng, mata air Batu-batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan Sekitar Mata Air perlu mendapat perlindungan dan pelestarian. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Watampone dan sekitarnya sangat tergantung pada sumber mata air ini. Kemampuan cadangan air yang bersumber dari mata air, diperkirakan sebesar 293 Liter/Detik, dimana yang dimanfaatkan baru 36,86 persen (108 Detik/Liter).

Kawasan Ruang Terbuka Hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp, PPK dan PPL.

Kawasan taman wisata alam dengan luasan sekitar 3.770 Ha tersebar di beberapa kecamatan diantaranya disebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagaian wilayah Kecamatan Bengo, sebagaian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng. Sedangkan Kawasan cagar alam yang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Cani Sirenreng yang berada disebagian wilayah Kabupaten Bone dengan luas sekitar 712,7 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Lappariaja seluas 108,93 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe seluas 603,77 Ha.

Grafik 2.4
Luas Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Bone, 2017



Sumber: RTRW Kabupaten Bone, 2012-2032

Kawasan Rawan Bencana Alam merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terjadinya bencana alam. Kawasan rawan banjir ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.

Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue dan Libureng. Sedangkan kawasan rawan tanah longsor ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre.

Kawasan Lindung Geologi merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi agar fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak saling merugikan. Kawasan rawan bencana alam geologi merupakan kawasan rawan gempa bumi ditetapkan

disebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas: kawasan sempadan mata air ditetapkan di mata air Wollangi 1, mata air Wollangi 2, mata air Panyili di Kecamatan Palakka, mata air Cinnong di Kecamatan Ulaweng , mata air Batu-Batu di Kecamatan Kajuara, mata air Barebbo di Kecamatan Barebbo, mata air Lamuru di Kecamatan Lamuru dan mata air Maccedde di Kecamatan Tanete Riattang Timur serta kawasan imbuhan air tanah ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Cina dan sebagian wilayah Kecamatan Tellu Siattinge.

Pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah, diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya. Dikaitkan dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting, delineasi kawasan lindung kemungkinan akan berhadapan dengan permasalahan tumpang tindih dengan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindungnya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pengendaliannya agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan. Di samping untuk mencegah erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjada hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Beberapa kasus permasalahan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bone adalah:

- Perambahan atau intervensi hutan lindung oleh masyarakat untuk kegiatan perlandangan berpindah, sehingga menyebabkan semakin meluasnya lahan-lahan kritis,
- Kondisi eksisting pada kawasan hutan lindung yang ternyata sudah tidak mempunyai fungsi lindung lagi,

- Kegiatan budidaya yang telah lama berkembang yang menurut kriteria fisik merupakan kawasan lindung, dan
- Permukiman yang telah berkembang lama di dalam kawasan lindung.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya secara umum merupakan kawasan di luar yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan manusia serta sumberdaya buatan. Kawasan ini perlu dimanfaatkan secara terencana dan terarah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan budidaya yang akan diarahkan pengembangannya meliputi:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang mencakup; kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan 16.309,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Sibulue, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Salomekko, Libureng dan Mare.

Kawasan hutan produksi terbatas seluas 80.471 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tonra, Cina, Ponre, Lappariaja, Ulaweng, Libureng, Mare, Kahu, Bontocani, Lamuru, Tellu Siattinge, Awangpone, Palakka dan Barebbo

2. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas : kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas 119.216 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ajangale seluas 5.626 Ha (4,72%), Kecamatan Awangpone seluas 5.525,31 Ha (4,63%), Kecamatan Barebbo seluas 3.053,14 Ha (2,56%), Kecamatan Bontocani seluas 4.286,40 (3.60%), Kecamatan Cenrana seluas 5.162,60 Ha (4.33%), Kecamatan Cina seluas 4.970,85 Ha (4,17%), Kecamatan Dua Boccoe seluas 1.295,15 Ha (1,09%), Kecamatan Kahu seluas 9.767,08 Ha (8,19%), Kecamatan Kajuara seluas 4.026,44 (3,38%), Kecamatan

Lamuru seluas 6.341,08 Ha (5,32%), Kecamatan Lappariaja seluas 5.765,48 Ha (4,84%), Kecamatan Libureng seluas 19.731,70 Ha (16,55%), Kecamatan Mare seluas 3.884,50 Ha (3,26%), Kecamatan Palakka seluas 10.310,70 Ha (8,65%), Kecamatan Ponre seluas 1.700,02 Ha (1,43%), Kecamatan Salomekko seluas 8.915,28 Ha (7,48%), Kecamatan Sibulue seluas 6.009,37 Ha (5,04%), Kecamatan Tanete Riattang seluas 276,04 Ha (0,23%), Kecamatan Tanete Riattang Barat seluas 908,28 Ha (0,76%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 1.209,87 Ha (1,01%), Kecamatan Tellu Siattinge seluas 1.915,77 Ha (1,61%), Kecamatan Tonra seluas 7.284,82 Ha (6,11%) dan Kecamatan Ulaweng seluas 1.249,96 Ha (1,05%).

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan 185.881,18 Ha ditetapkan disebagian Kecamatan Ajangale seluas 11.720,02 Ha (6,31%), Kecamatan Awangpone seluas 6.455,30 Ha (3,47%), Kecamatan Barebbo seluas 6.298,69 Ha (3,39%), Kecamatan Bontocani seluas 10.363,24 Ha (5,58%), Kecamatan Cenrana seluas 2.615,38 Ha (1,41%), Kecamatan Cina seluas 8.852,20 Ha (4,76%), Kecamatan Duaboccoe seluas 14.247,05 Ha (7,66%), Kecamatan Kahu seluas 7.358,54 Ha (3,96%), Kecamatan Kajuara seluas 4.125,58 Ha (2,22%), Kecamatan Lamuru seluas 19.524,29 Ha (10,50%), Kecamatan Lappariaja seluas 18.220,33 Ha (9,80%), Kecamatan Libureng 8.524,18 Ha (4,59%), Kecamatan Mare seluas 9.438,67 Ha (5,08), Kecamatan Palakka seluas 146,10 Ha (0,08%), Kecamatan Ponre seluas 8.824,40 Ha (4,75%), Kecamatan Salomekko seluas 3.730,98 Ha (2,01%), Kecamatan Sibulue seluas 4.682,12 Ha (2,52%), Kecamatan Tanete Riattang seluas 574,14 Ha (0,31%), Kecamatan Tante Riattang Barat seluas 1.507,82 Ha (0,81%), Kecamatan Tanete Riattang Timur seluas 431,07 Ha (0,23%), Kecamatan Tellusiattinge seluas 12.963,93 Ha (6,97%), Kecamatan Tonra seluas 5.876,43 Ha (3,16%), dan Kecamatan Ulaweng seluas 19.400,73 Ha (10,44%).

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi : kawasan perkebunan komoditas kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada dan kelapa hibrida ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra dan Ulaweng serta Kawasan perkebunan komoditi tebu untuk kebutuhan industri pabrik Gula Camming dan pabrik Gula Arasoe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Libureng, Ponre, Kahu, Patimpeng, Tonra, Cina, Mare dan Salomekko.

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, Awangpone, Barebbo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Mare, Palakka, Ponre, Salomekko, Sibulue, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Tonra, Amali, Bengo, Tellu Limpoe, Patimpeng, dan Ulaweng.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas 119.216 Ha.

3. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan dan pelabuhan perikanan.
4. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara serta kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
5. Kawasan peruntukan industri , terdiri atas kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.
6. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.

7. Kawasan peruntukan pemukiman, terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman pedesaan.
8. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan perdagangan, olahraga, pertahanan dan keamanan serta keselamatan operasi penerbangan.

2.1.1.8. Demografi

Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang relatif luas. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 751.026 jiwa sedangkan luas wilayah Kabupaten Bone mencapai 4.559 Km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2017 mencapai 165 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.214 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/km². Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Fenomena demografi yang menarik diungkap di Kabupaten Bone adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk karena kelahiran maupun karena migrasi. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 734.119 jiwa menjadi 751.026 jiwa. Meskipun demikian laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu hanya bertumbuh 2,30 persen.

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017

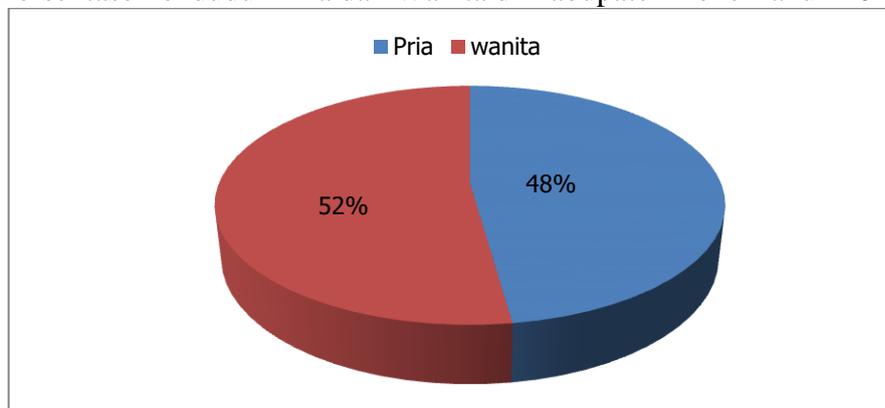
No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Sex Ratio
1	2013	734.119	0,60	161	
2	2014	738.515	0,60	162	91,11
3	2015	742.912	0,60	163	91,27
4	2016	746.973	0,55	164	91,39

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Sex Ratio
5	2017	751.026	0,54	165	91,52

Sumber : BPS Kabupaten Bone, 2018.

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bone lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 358.889 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 392.137 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah 91,52 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,62 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,48 persen. Proporsi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.5
Persentase Penduduk Pria dan Wanita di Kabupaten Bone Tahun 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Penduduk Kabupaten Bone tersebar di 27 kecamatan, dimana jumlah penduduk paling banyak berada di sembilan kecamatan yaitu Tanete Riattang dengan 52.677 jiwa, Tanete Riattang Barat sebanyak 49.143 jiwa, Tanete Riattang Timur 43.574 jiwa, Tellu Siattinge 40.135 jiwa, Kahu 38.947 jiwa, Kajuara 36.688 jiwa, Sibulue 34.418 jiwa, Dua Boccoe 30.242 jiwa, dan Libireng sebanyak 30.010 jiwa. Penduduk Kabupaten Bone yang menetap di

kecamatan ini mencapai 47,38 persen atau akumulasinya mencapai 355.834 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah di Kabupaten Bone adalah Tonra, Ponre, Tellu Limpoe, Salomekko, Bontocani, Patimpeng, Amali, Palakka, dan Lappariaja. Total penduduk di sembilan kecamatan ini hanya 157.341 jiwa atau 20,95 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Bone.

Tabel 2.5
Penduduk Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan, 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan	
1	Bontocani	7.858	7.911	15.769	49,83	50,17	99,33
2	Kahu	18.728	20.219	38.947	48,09	51,91	92,63
3	Kajuara	17.912	18.776	36.688	48,82	51,18	95,40
4	Salomekko	7.687	7.930	15.617	49,22	50,78	96,94
5	Tonra	6.672	7.093	13.765	48,47	51,53	94,06
6	Patimpeng	8.106	8.596	16.702	48,53	51,47	94,30
7	Libureng	15.108	14.902	30.010	50,34	49,66	101,38
8	Mare	13.110	13.846	26.956	48,63	51,37	94,68
9	Sibulue	16.248	18.170	34.418	47,21	52,79	89,42
10	Cina	12.744	13.843	26.587	47,93	52,07	92,06
11	Barebbo	12.944	14.799	27.743	46,66	53,34	87,47
12	Ponre	6.826	7.140	13.966	48,88	51,12	95,60
13	Lappariaja	11.420	12.491	23.911	47,76	52,24	91,43
14	Lamuru	11.669	13.390	25.059	46,57	53,43	87,15
15	Tellu Limpoe	7.086	7.057	14.143	50,10	49,90	100,41
16	Bengo	12.295	13.217	25.512	48,19	51,81	93,02
17	Ulaweng	11.563	13.199	24.762	46,70	53,30	87,61
18	Palakka	10.543	12.170	22.713	46,42	53,58	86,63
19	Awangpone	13.707	15.788	29.495	46,47	53,53	86,82
20	Tellu Siattinge	18.682	21.453	40.135	46,55	53,45	87,08
21	Amali	9.458	11.297	20.755	45,57	54,43	83,72
22	Ajangale	12.767	14.707	27.474	46,47	53,53	86,81
23	Dua Boccoe	13.963	16.279	30.242	46,17	53,83	85,77
24	Cenrana	11.536	12.727	24.263	47,55	52,45	90,64
25	TR Barat	23.643	25.500	49.143	48,11	51,89	92,72

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Laki-Laki	Persentase Perempuan	
26	Tanete Riattang	24.776	27.901	52.677	47,03	52,97	88,80
27	TR Timur	21.838	21.736	43.574	50,12	49,88	100,47
Total		358.889	392.137	751.026	47,79	52,21	91,52

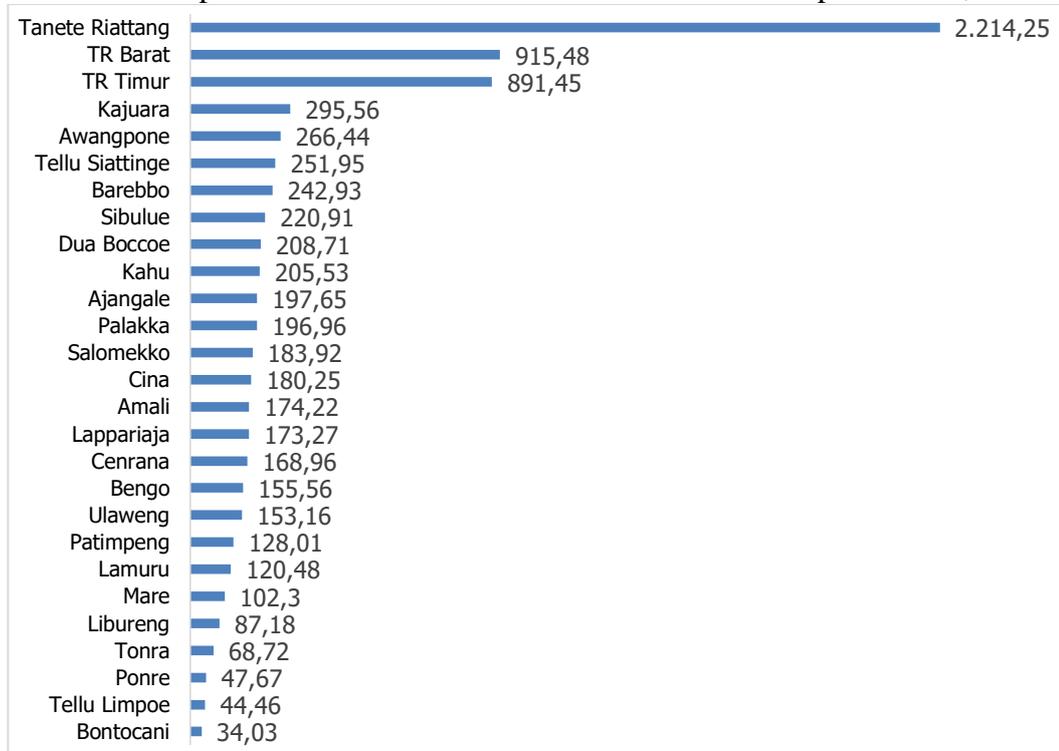
Sumber : BPS Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

Proporsi penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Bone tahun 2017 menunjukkan angka 91,52. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Jika $SR > 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, $SR = 100$ berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan, dan $SR < 100$ berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin yang berada dibawah 100 menunjukkan bahwa jumlah perempuan relatif lebih banyak daripada laki-laki. Hanya tiga kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki rasio jenis kelamin diatas 100 atau jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan yaitu Tanete Riattang Timur, Tellu Limpoe, dan Libureng dengan masing-masing angka rasio jenis kelamin mencapai 100,47, 100,41, dan 101,38.

Banyaknya jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur dan wilayah yang relatif sempit, menyebabkan ketiganya menjadi wilayah terpadat di Kabupaten Bone.

Grafik 2.5

Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

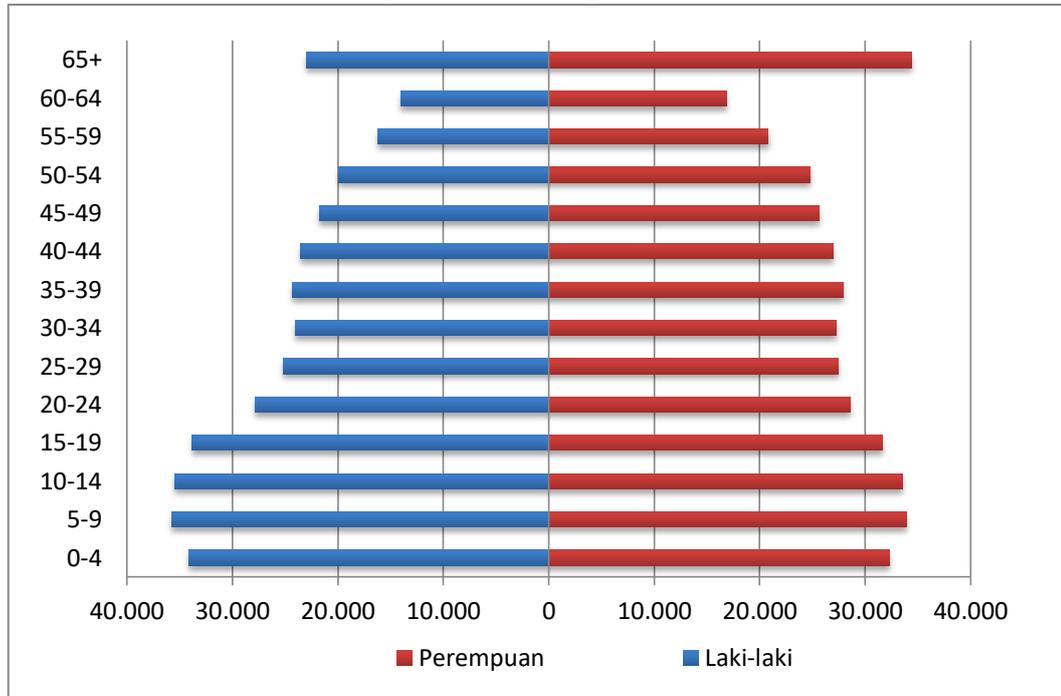


Sumber : BPS, Kabupaten Bone dalam Angka 2018

Setiap Km² wilayah di Kecamatan Tanete Riattang dihuni oleh 2.214,25 jiwa, sementara Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur masing-masing 915,48 jiwa dan 891,45 jiwa per Km². Kecamatan lain yang juga memiliki tingkat kepadatan diatas 200 jiwa per Km² adalah Kajuara, Awangpone, Tellu Siattinge, Barebbo, Sibulue, Dua Boccoe, dan Kahu. Masing-masing kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk per Km² sebanyak 295,56 jiwa, 266,44 jiwa, 251,95 jiwa, 242,93 jiwa, 220,91 jiwa, 208,71 jiwa, dan 205,53 jiwa. Sedangkan lima kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk per Km² dibawah 100 adalah Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng. Di Kecamatan Bontocani, setiap Km² wilayahnya dihuni oleh 34,03 penduduk, sehingga menjadikanya wilayah dengan tingkat kepadatan paling rendah di Kabupaten Bone. Setelah Kecamatan Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Tonra, dan Libureng hanya memiliki tingkat kepadatan

sebanyak 44,46 jiwa, 47,67 jiwa, 68,72 jiwa, dan 87,18 jiwa untuk setiap Km² dari luas wilayahnya.

Grafik 2.6
Piramida penduduk Kabupaten Bone, 2017



Sumber : Data Diolah, BPS Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Kabupaten Bone juga sepertinya sudah mulai memasuki periode bonus demografi dilihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-44 tahun) sebesar 43,73 persen pada tahun 2017. Meski persentasenya masih dibawah 50 persen, namun diperkirakan kedepan Kabupaten Bone akan memasuki periode emas seperti yang dialami Indonesia saat ini, dimana penduduk usia produktif akan mendominasi piramida penduduk.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penduduk usia tidak produktif (usia pensiun dan anak-anak) jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan penduduk produktif. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Bone jumlahnya mencapai 204.900 jiwa atau 27,29 persen dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 60 tahun ke atas) totalnya mencapai 88.282 jiwa atau 11,75 persen. Jika kelompok usia tidak produktif ini

ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 39,04 persen.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun), atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Terdapat dua perhitungan PDRB yakni berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pasar pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kabupaten Bone menurut Harga Konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Pada tahun 2013, PDRB Harga konstan Kabupaten Bone sebesar Rp. 13,53 Trillium meningkat menjadi Rp. 18,97 Trillium pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata Rp. 1,36 trillium setiap tahunnya. PDRB Harga Konstan Kabupaten Bone yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.6
Nilai PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.200.476	7.025.787	7.654.002	8.454.418	9.161.587
2	Pertambangan dan Penggalian	352.962	403.602	458.872	507.048	563.003
3	Industri Pengolahan	968.557	1.047.185	1.123.606	1.225.643	1.315.917
4	Pengadaan Listrik, Gas	16.805	20.563	19.798	22.591	23.893
5	Pengadaan Air	7.045	7.051	7.084	7.411	7.787
6	Konstruksi	1.408.360	1.435.943	1.550.585	1.661.701	1.809.377
7	Real Estate	482.653	519.066	557.384	571.167	598.212
8	Perdagangan Besar dan Eceran, d Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.732.887	1.883.107	2.000.488	2.213.676	2.449.477
9	Transportasi dan Pergudangan	343.470	374.856	401.171	413.906	442.960
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.753	85.155	88.617	94.562	105.612
11	Informasi dan Komunikasi	294.900	303.913	335.636	372.027	410.727
12	Jasa Keuangan	406.323	429.133	462.260	522.869	550.048
13	Jasa Perusahaan	9.396	9.999	10.656	11.416	12.328
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	684.238	697.328	762.835	754.192	793.690
15	Jasa Pendidikan	357.224	375.489	399.960	429.187	470.396
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.161	153.465	165.214	177.883	194.117
17	Jasa lainnya	46.641	49.735	53.704	58.484	64.923
	PDRB	13.531.849	14.821.376	16.051.871	17.498.179	18.974.053

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Tabel 2.7
Nilai PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku

NO	Sektor	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.947.853	9.815.107	11.470.718	12.970.861	14.518.220
2	Pertambangan dan Penggalian	489.674	664.942	866.106	985.688	1.066.132
3	Industri Pengolahan	1.169.670	1.379.734	1.615.162	1.791.531	2.017.319

NO	Sektor	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)				
		2013	2014	2015	2016	2017
4	Pengadaan Listrik, Gas	15.956	18.229	17.416	20.108	23.815
5	Pengadaan Air	7.611	7.869	8.095	8.730	9.321
6	Konstruksi	1.710.143	1.899.379	2.235.912	2.558.767	2.878.691
7	Real Estate	652.781	752.424	885.068	979.273	1.055.711
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.990.764	2.212.186	2.555.956	3.045.777	3.489.725
9	Transportasi dan Pergudangan	390.051	473.861	589.663	608.304	648.179
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.699	108.691	118.090	129.814	148.551
11	Informasi dan Komunikasi	281.333	297.932	324.985	382.903	432.319
12	Jasa Keuangan	539.079	612.707	698.817	811.429	895.770
13	Jasa Perusahaan	11.714	12.901	14.583	15.945	17.935
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	818.425	909.189	1.100.997	1.127.273	1.218.453
15	Jasa Pendidikan	415.795	466.511	520.234	558.995	639.952
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.354	170.728	199.311	220.701	249.088
17	Jasa lainnya	55.306	64.555	75.005	84.939	96.214
	PDRB	16.734.207	19.866.945	23.296.118	26.301.035	29.405.396

Sumber: BPS Kabupaten Bone , 2018

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan permintaan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap berbagai barang dan jasa serta perbedaan elastisitas permintaan dari berbagai barang dan jasa berimplikasi terhadap peningkatan jumlah produksi dan harga barang dan jasa setiap sektor juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian. Uraian tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan permintaan masyarakat serta

perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan.

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni (1) struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian, gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa; (2) analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi.

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Bone dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan struktur perekonomian daerah ini terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 masih bertumpu pada dominasi sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bone pada tahun 2017 mencapai 47,49 persen. Kemudian sektor penyumbang terbesar kedua dalam PDRB daerah ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, dengan kontribusi sekitar 11,87 persen, selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sekitar 9,79 persen dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 6,86 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku

NO	Sektor	Struktur PDRB Menurut Harga Berlaku				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,49	49,40	49,24	49,32	49,37
2	Pertambangan dan Penggalian	2,93	3,35	3,72	3,75	3,63
3	Industri Pengolahan	6,99	6,94	6,93	6,81	6,86
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
5	Pengadaan Air	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	10,22	9,56	9,60	9,73	9,79
7	Real Estate	3,90	3,79	3,80	3,72	3,59
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,90	11,14	10,97	11,58	11,87
9	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,39	2,53	2,31	2,20
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,55	0,51	0,49	0,51
11	Informasi dan Komunikasi	1,68	1,50	1,40	1,46	1,47
12	Jasa Keuangan	3,22	3,08	3,00	3,09	3,05
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	4,58	4,73	4,29	4,14
15	Jasa Pendidikan	2,48	2,35	2,23	2,13	2,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,86	0,86	0,84	0,85
17	Jasa lainnya	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir (2013-2017), terlihat bahwa terdapat dua sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah mengalami peningkatan yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian, kedua sektor ini sering juga diklasifikasikan sebagai sektor primer. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB meningkat 1,88 poin atau meningkat dari 47,49 persen tahun 2013 menjadi 49,37 persen tahun 2017. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat 0,70 poin dalam periode yang sama atau meningkat dari 2,93

persen tahun 2013 menjadi 3,63 persen tahun 2017. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap PDRB semuanya mengalami penurunan. Sebagai sektor sekunder, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan yakni dari 6,99 persen tahun 2013 turun menjadi 6,86 persen tahun 2017.

Demikian pula sektor-sektor tersier atau sektor jasa semuanya mengalami penurunan dalam memberikan andil terhadap PDRB daerah. Sektor tersier (jasa) yang mengalami penurunan paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah ditempati oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan penurunan kontribusi sekitar 0,75 poin dalam kurun waktu 2013-2017, atau menurun kontribusi dari 4,89 persen tahun 2013 menurun menjadi 4,14 persen tahun 2017. Selain itu kontribusi Sektor konstruksi juga mengalami penurunan yang signifikan yakni sekitar 0,43 poin selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2013 sektor konstruksi berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bone sekitar 10,22 persen menurun menjadi 9,79 persen tahun 2017.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bone yang disertai dengan kontribusi yang cenderung meningkat mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Bone seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementara sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang

dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.

Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,31 persen pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,4 persen per tahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Bone, maka terdapat enam (6) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing masing adalah sektor pertambangan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,06 persen pertahun, kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10,41 persen), sektor informasi dan komunikasi (9,20 persen), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (9,05 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,85 persen) dan sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,47 persen.

Tabel 2.9

Pertumbuhan PDRB atas Dasar harga Konstan Tahun 2013- 2017 Kabupaten Bone

No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata2
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	13,31	8,94	10,46	8,36	9,05
2	Pertambangan dan Penggalian	10,74	14,35	13,69	10,50	11,04	12,06
3	Industri Pengolahan	7,13	8,12	7,30	9,08	7,37	7,80
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,30	22,37	(3,72)	14,11	5,77	7,97
5	Pengadaan Air	4,79	0,08	0,47	4,61	5,08	3,01
6	Konstruksi	9,88	1,96	7,98	7,17	8,89	7,18
7	Real Estate	5,52	7,54	7,38	2,47	4,73	5,53
8	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,06	8,67	6,23	10,66	10,65	8,85
9	Transportasi dan Pergudangan	7,53	9,14	7,02	3,17	7,02	6,78
10	Penyediaan Akomodasi dan	10,38	6,77	4,07	6,71	11,69	7,92

No	Sektor	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata2
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Makan Minum						
11	Informasi dan Komunikasi	11,28	3,06	10,44	10,84	10,40	9,20
12	Jasa Keuangan	10,70	5,61	7,72	13,11	5,20	8,47
13	Jasa Perusahaan	7,60	6,42	6,57	7,13	7,99	7,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,50	1,91	9,39	(1,13)	5,24	3,58
15	Jasa Pendidikan	9,65	5,11	6,52	7,31	9,60	7,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,10	9,49	7,66	7,67	9,13	10,41
17	Jasa lainnya	6,46	6,63	7,98	8,90	11,01	8,20
	PDRB	6,30	9,53	8,30	9,01	8,43	8,31

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

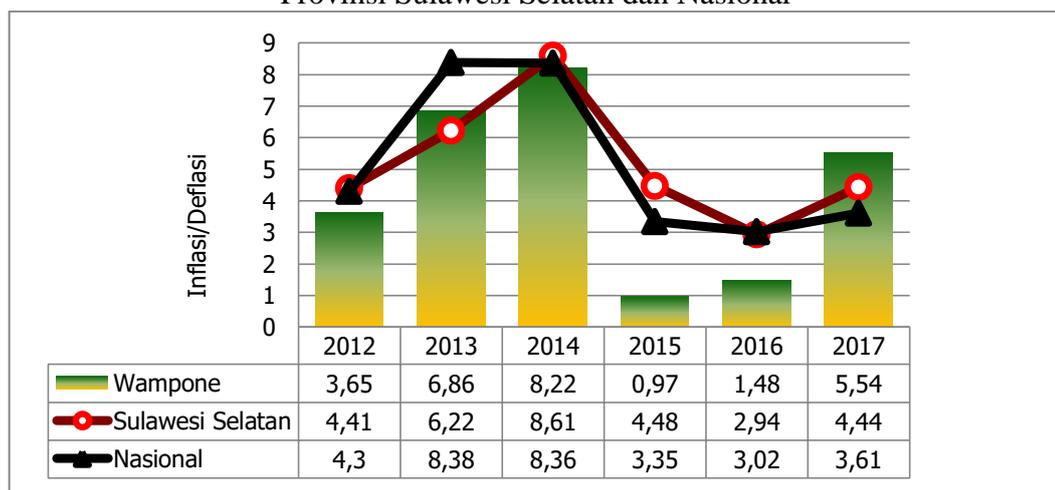
Karena kontribusinya yang cukup besar dalam pembentukan PDRB, maka sektor yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan di daerah ini masing masing ditempati oleh sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone sebesar 8,47 persen per tahun, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil sekitar 4,47 persen dalam rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah ini, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil sekitar 1,05 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone, sementara andil sektor lainnya berada dibawah angka 1 persen.

2.1.2.2. Laju Inflasi

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian. Tingginya inflasi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang

domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor. Merujuk pada data inflasi di Kota Watampone, memperlihatkan bahwa tren inflasi tahun ke tahun (yoy) Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 inflasi daerah ini hanya sekitar 3,65 persen, meningkat hingga mencapai puncaknya menjadi 8,22 persen pada tahun 2014, kemudian menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 0,97 persen dan pada tahun 2017 inflasi didaerah ini mencapai 5,54 persen. Selama periode tahun 2014-2016, inflasi tahunan Kota Watampone berada di bawah inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun pada tahun 2017 justru terjadi sebaliknya.

Grafik 2.7
Perkembangan inflasi rata-rata Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BPS, *Inflasi Sulawesi Selatan, 2017*

Pada tahun 2017 Kabupaten Bone telah mengalami inflasi bulanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan deflasi sebanyak 3 (tiga) kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1,83 persen, sedangkan deflasi tertinggi berada pada bulan Oktober sebesar 0,51 persen. Adapun yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kabupaten Bone sepanjang tahun 2017 adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar 2,20 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran sandang menjadi kelompok pengeluaran dengan andil terkecil, yaitu sebesar 0,12 persen.

2.1.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp. 22,79 juta per tahun meningkat menjadi Rp. 39,15 juta per tahun pada tahun 2017. Jika PDRB perkapita tahun 2017 dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun diperoleh nilai PDRB perkapita per bulan sebesar Rp. 3,26 juta per kapita per bulan, yang berarti setiap penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2017 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3,26 juta per bulan.

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

Uraian	PDRB Per Kapita Kabupaten Bone				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai PDRB (HB : Rp juta)	16.734.207	19.866.945	23.296.118	26.301.035	29.405.396
Jumlah Penduduk (jiwa)	734.119	738.515	742.912	746.973	751.026
PDRB perkapita (HB: Rp Juta/ jiwa)	22,79	26,90	31,36	35,21	39,15

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

2.1.2.4. Indeks Gini

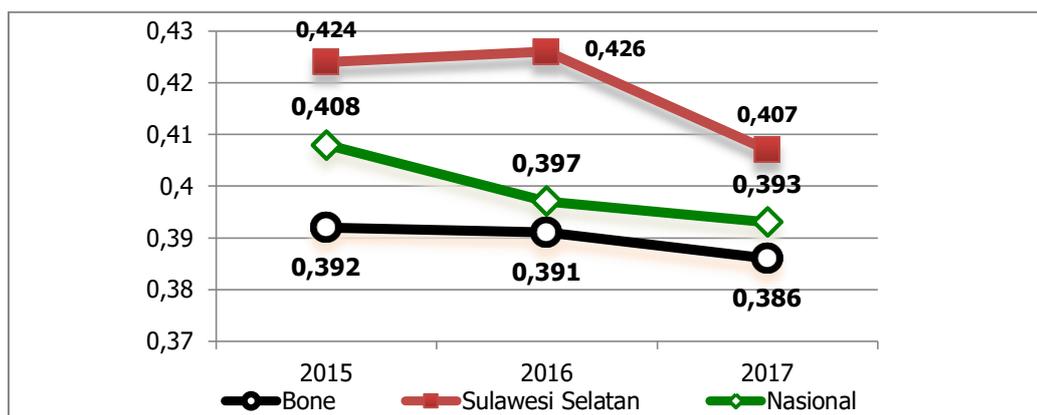
Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini

didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio sebagai berikut:

- Gini Rasio $< 0,35$: Kategori ketimpangan “rendah”;
- Gini Rasio $0,35 - 0,5$: Kategori ketimpangan “moderat”
- Gini Rasio $> 0,5$: Kategori ketimpangan “tinggi”

Nilai Gini rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2017 memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan nilai Gini rasio Sulawesi Selatan dan nasional. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan nasional.

Grafik 2.8
Perkembangan Nilai Gini Ratio Tahun 2015-2017 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2017

Selanjutnya, nilai Gini Rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2015-2017 juga menunjukkan kecenderungan yang semakin kecil. Pada tahun 2015 nilai Gini Rasio Kabupaten Bone sebesar 0,392 menurun menjadi 0,386

pada tahun 2017, yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik. Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Gini Rasio yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori “moderat”.

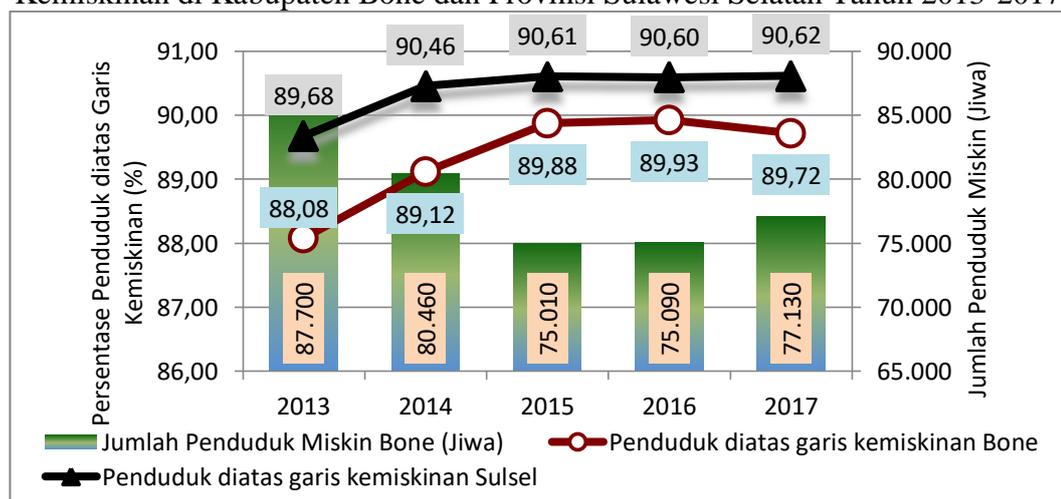
2.1.2.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan data jumlah dan prosentase penduduk miskin yang dirilis BPS, menunjukkan bahwa jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di daerah ini berjumlah 87.700 jiwa menurun menjadi 77.130 jiwa pada tahun 2017, yang berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 10.570 jiwa. Data tingkat kemiskinan yang diukur dari Perosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan juga kecenderungannya menurun. Pada tahun 2013 prosentase penduduk miskin di daerah ini mencapai 11,92 persen, menurun menjadi 10,28 persen tahun 2017. Meskipun ada penurunan jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir, namun dari tingkat prosentase penduduk miskin di

Kabupaten Bone masih tinggi, karena lebih tinggi dari tingkat kemiskinan rata-rata daerah di Sulawesi Selatan. Selama periode 2013-2017 Kabupaten Bone selalu menjadi kontributor terbesar dalam jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone berkontribusi sekitar 9,49 persen dari total kemiskinan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan yang selanjutnya dikonversi ke angka persentase penduduk di atas garis kemiskinan dengan menggunakan formula: $100 - \text{tingkat kemiskinan}$, maka diperoleh persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Grafik 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



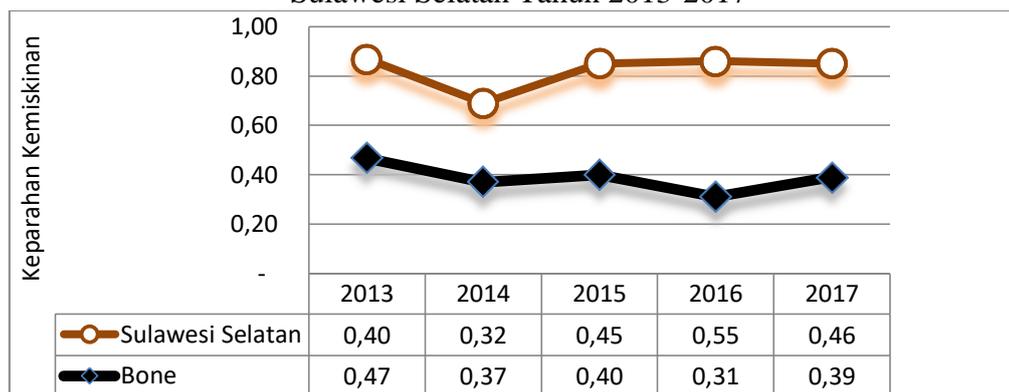
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2018

2.1.2.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk. indikator ini sering pula disebut sebagai ndeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone, terlihat bahwa dalam periode

2013-2015, nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan indeks serupa di Sulawesi Selatan, akan tetapi dalam dua tahun terakhir kondisi sebaliknya terjadi dimana rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan nilai indikator serupa di Sulawesi Selatan. Berdasarkan perkembangan nilai indeks kesenjangan kemiskinan selama periode 2013-2017, terlihat bahwa nilai indeks kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone cenderung menurun, sedangkan di Sulawesi Selatan cenderung meningkat. Gambaran perkembangan rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan periode tahun 2013-2017 tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.10
Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



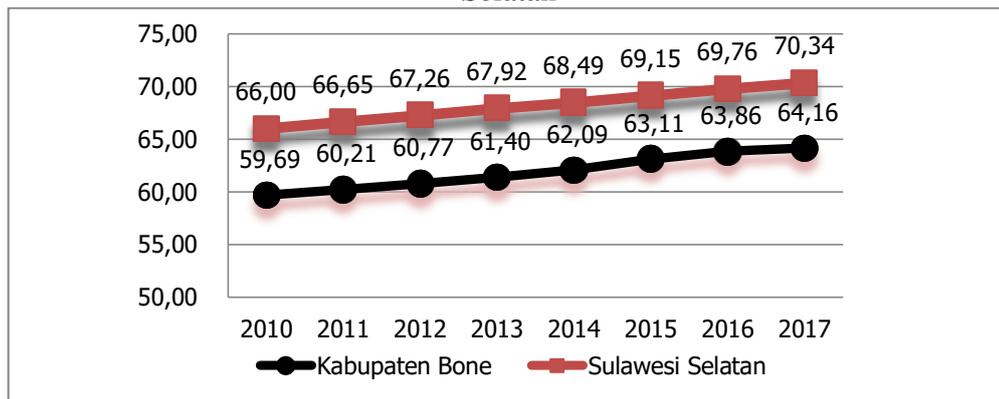
Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2018

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu Negara atau daerah. IPM memiliki 3 (tiga) aspek utama, antara lain : Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta daya beli riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone meski mengalami peningkatan namun capaian skor IPM masih tertinggal dari skor IPM Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Nilai IPM Kabupaten Bone hanya sebesar 64,16, sementara Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,34.

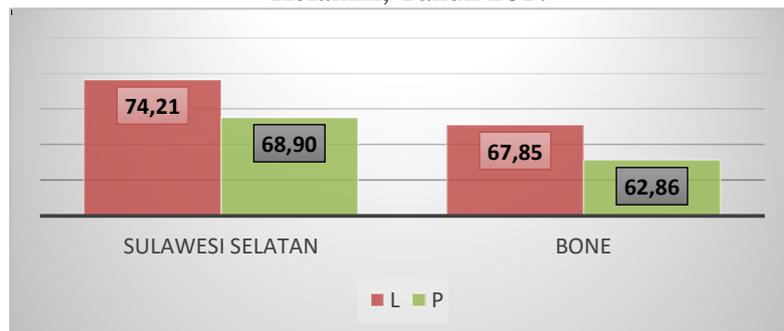
Grafik 2.11
Perkembangan nilai IPM Tahun 2010-2017 Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan



Sumber: BPS IPM Kabupaten Kota di Indonesia, 2018

Berdasarkan jenis kelamin, IPM Laki-laki Kabupaten Bone masih lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan perbedaan 4,99. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Laki-laki Kabupaten Bone lebih rendah 6,36 dan perempuan 6,04.

Grafik 2.12
Nilai IPM Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



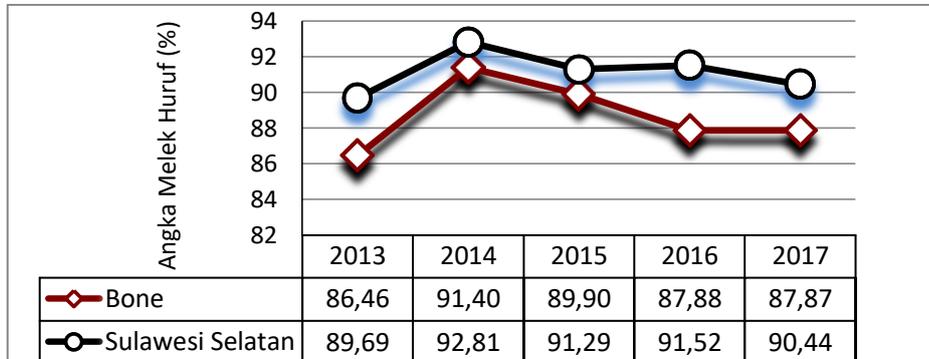
Sumber : BPS, 2018

2.1.2.8. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, karena itu, Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan terwujudnya sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

Kemampuan membaca penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Bone tampaknya masih tertinggal dari rata-rata kemampuan membaca penduduk di daerah lainnya di Sulawesi Selatan, hal ini tercermin dari capaian angka melek huruf Kabupaten Bone selama periode 2013-2017 masih dibawah rata-rata angka melek huruf penduduk di Sulawesi Selatan. Berdasarkan statistik kependidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 tercatat penduduk Kabupaten Bone yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 87,87 persen, yang berarti pemerintah Kabupaten Bone masih mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 12,13 persen. Selengkapnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan, tahun 2013-2017 terlihat pada gambar berikut.

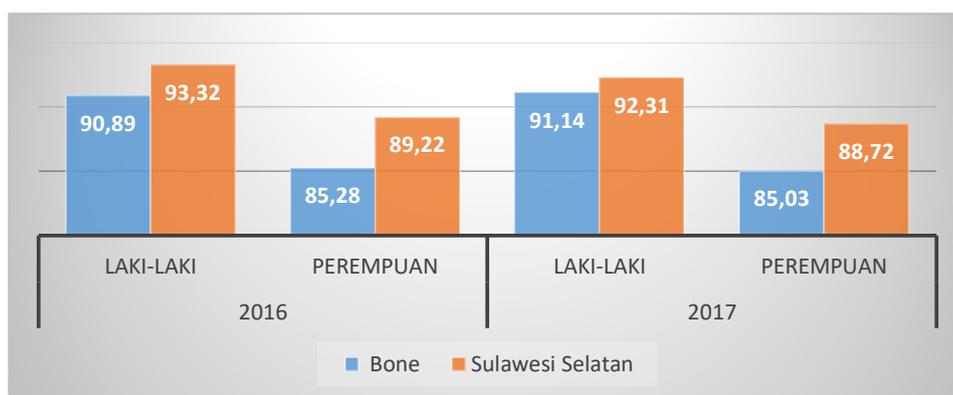
Grafik 2.13
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone dan Provinsi Sulaesi Selatan



Sumber : BPS, Kabupaten Bone dalam Angka 2014-2015, Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017

Berdasarkan jenis kelamin, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone baik pada tahun 2016 maupun 2017, masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing 5,61 dan 6,11 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Angka Melek Huruf laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah 2,43 persen dan perempuan 3,94 persen pada tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2017 laki-laki lebih rendah 1,17 persen dan perempuan 3,69 persen.

Grafik 2.14
Angka Melek Huruf Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, BPS tahun 2016 dan 2017

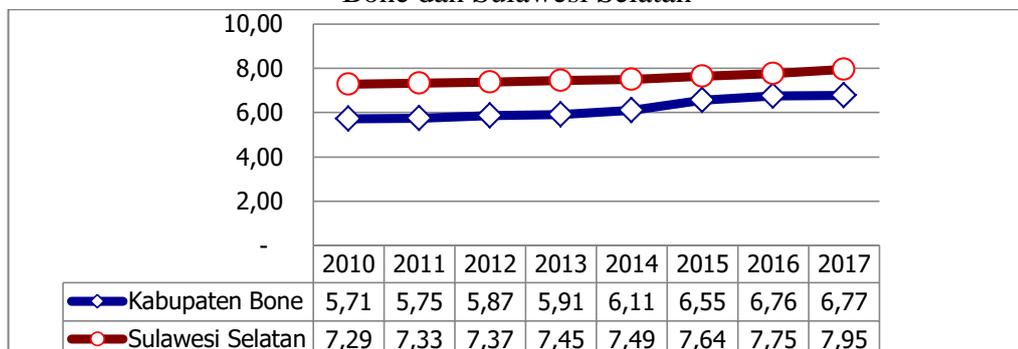
2.1.2.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 5,71 tahun kemudian meningkat menjadi 6,77 tahun, ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Bone memiliki pendidikan forma baru setara dengan duduk dibangku kelas satu SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2017 mencapai 7,95 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bone relatif tertinggal dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya.

Grafik 2.15

Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2017 Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan

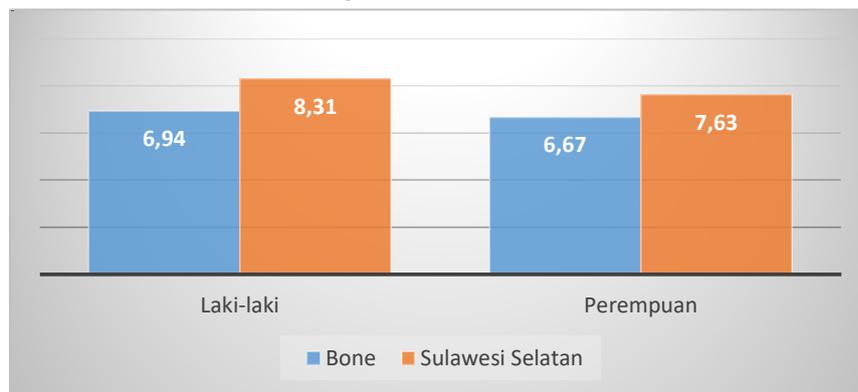


Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2018

Berdasarkan jenis kelamin, seperti halnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Rata-rata Lama Sekolah perempuan di Kabupaten Bone masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2017, perempuan berada di 6,67 tahun sedangkan laki-laki 6,94 tahun.

Grafik 2.16

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, tahun 2017



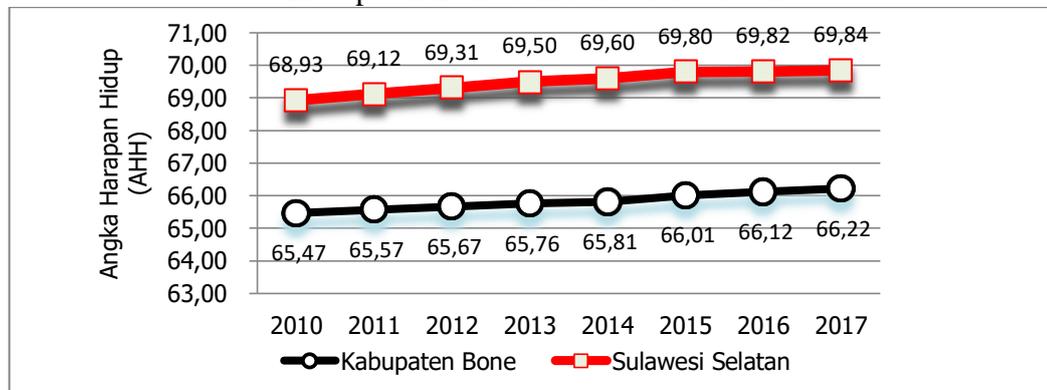
Sumber : BPS, 2018

2.1.2.10. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu wilayah, maka derajat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi.

Grafik 2.17

Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2010-2017 Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan

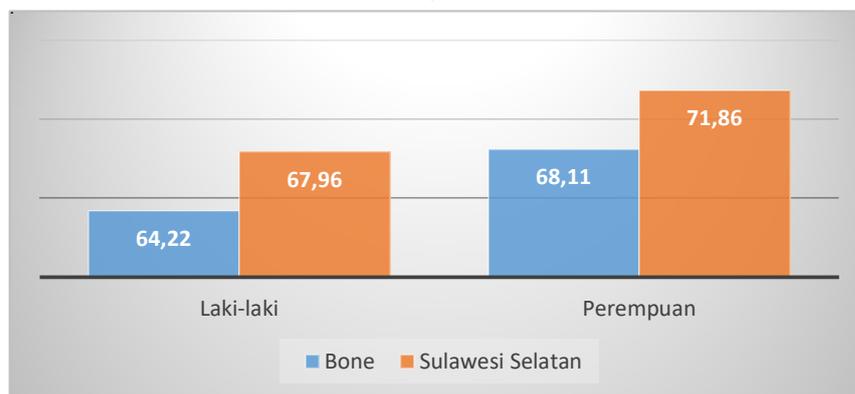


Sumber: BPS Kabupaten Bone

Perkembangan AHH penduduk di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 AHH penduduk di daerah ini sebesar 65,47 tahun kemudian meningkat menjadi 62,22 tahun, yang berarti derajat kesehatan penduduk di daerah ini terus membaik. AHH pada tahun 2017 sebesar 62,22 tahun diartikan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 62,22 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata yang pada tahun 2017 mencapai 69,87 tahun, menunjukkan bahwa peluang untuk bern hidup penduduk di Kabupaten Bone relatif lebih pendek dibandingkan dengan penduduk Sulawesi Selatan secara rata-rata.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 AHH laki-laki di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu 64,22 tahun bagi laki-laki dan 68,11 tahun bagi perempuan. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, namun AHHnya masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bone baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Grafik 2.18
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



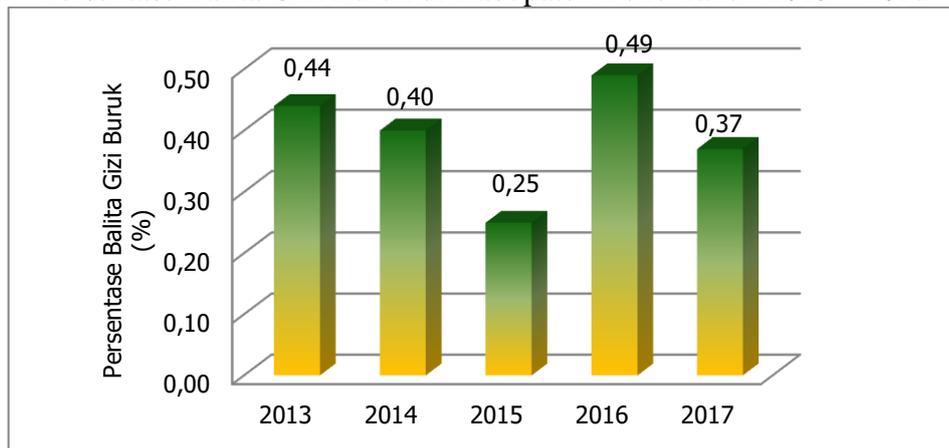
Sumber : BPS, 2018

2.1.2.11. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Porsi Balita yang mengalami gizi buruk di

Kabupaten Bone cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 porsi balita pada usia yang sama mengalami gizi buruk sebesar 0,44 persen, kemudian menurun menjadi 0,37 persen tahun 2017.

Grafik 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

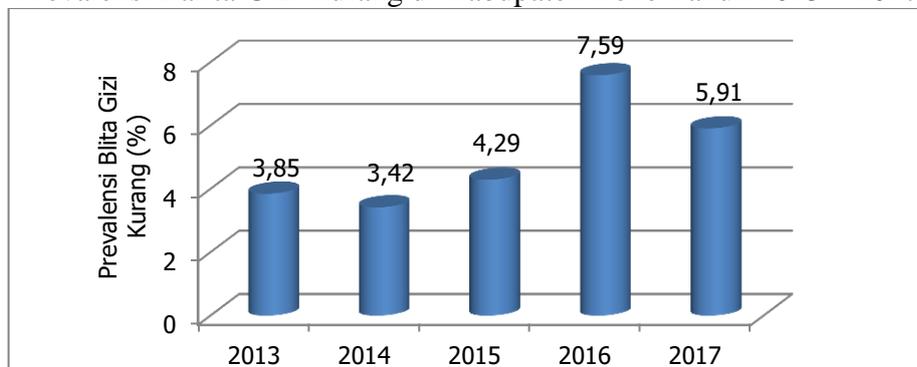


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2.1.2.12. Persentase Balita Gizi Kurang

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Berdasarkan data diatas dari tahun 2013 – 2017 balita yang mengalami gizi kurang tertinggi pada tahun 2016 dengan 7,59 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,91 persen. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Bone masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Grafik 2.20
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

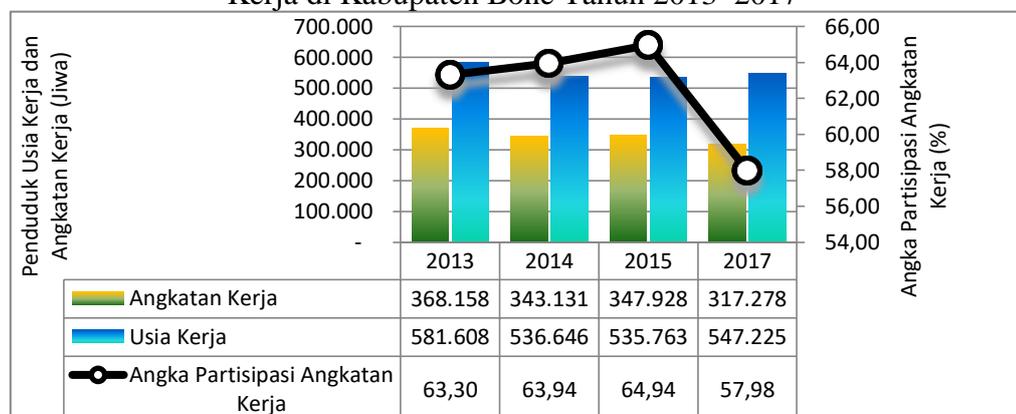


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2.1.2.13. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas yang tergolong dalam usia kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja menurut kegiatan utamanya dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Grafik 2.21
Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

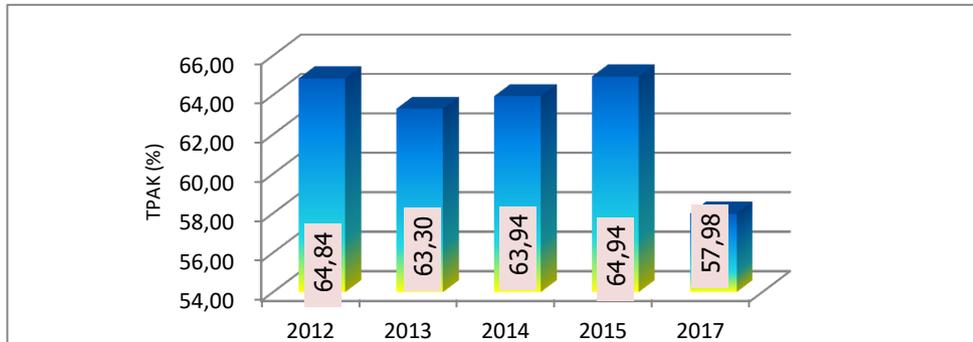
Berdasarkan data Sakernas tahun 2017 penduduk usia kerja di Kabupaten Bone mencapai 547.225 jiwa, dimana sekitar 57,98 persen diantaranya merupakan penduduk 15 tahun keatas yang digolongkan sebagai golongan angkatan kerja.

2.1.2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan data ketenaga kerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bone mencapai hampir 64,84 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 65 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah ini menurun menjadi 57,98 persen. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa ada kecenderungan penurunan dari jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja, penyebabnya diantaranya adalah terbatasnya kesempatan kerja, atau kecenderungan meningkatnya penduduk yang lebih memilih masuk golongan bukan angkatan kerja, seperti melanjutkan sekolah atau mengurus rumah tangga. Gambaran terhadap perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, tersaji pada gambar berikut.

Grafik 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

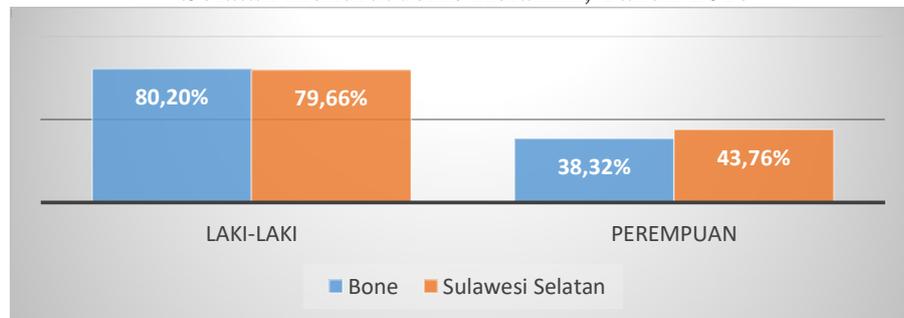


Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017, TPAK laki-laki di Kabupaten Bone jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari TPAK 57,98 persen, laki-laki mencapai 80,2 persen dan perempuan hanya 38,73 persen.

Dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK laki-laki di Kabupaten Bone lebih tinggi sedikit sedangkan perempuan lebih rendah.

Grafik 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017



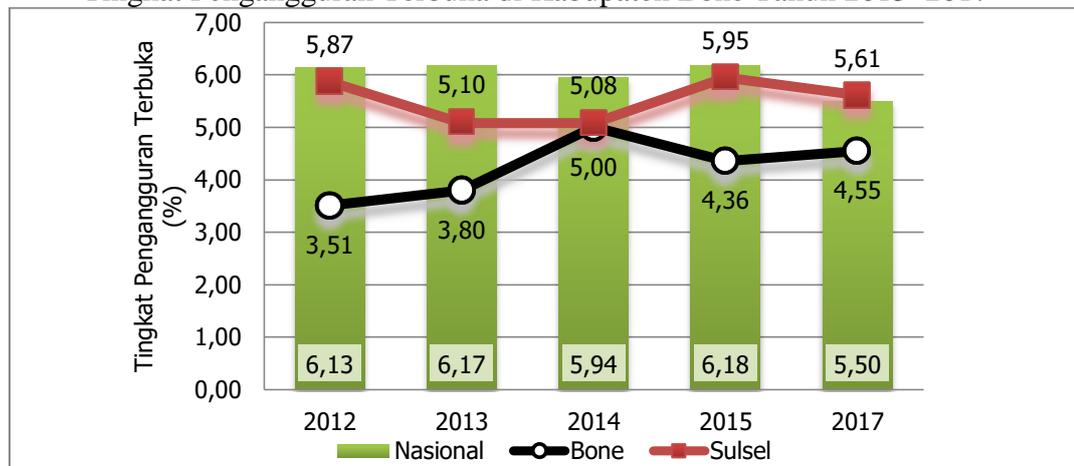
Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2018

2.1.2.15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat akan tinggi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran yang dicapai daerah Sulawesi Selatan. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di daerah ini dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung meningkat. Pada Tahun 2013, tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone sebesar 3,51 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 3,51 persen orang termasuk dalam golongan angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat Pengangguran Terbuka di daerah ini meningkat menjadi 4,55 persen. Gambaran tentang perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, tersaji pada gambar berikut.

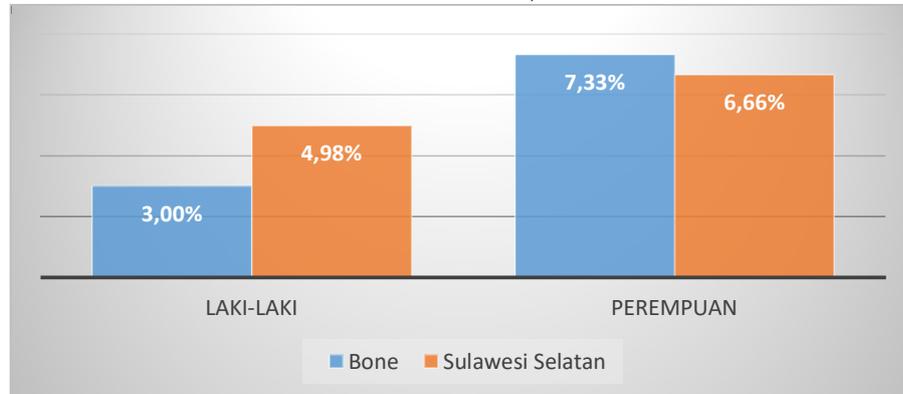
Grafik 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

Berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan di Kabupaten Bone lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing 7.33 persen dan 3.00 persen. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, TPT laki-laki di Kabupaten Bone masih lebih rendah, tetapi perempuan tetap lebih tinggi

Grafik 2.25
Tingkat Partisipasi Terbuka di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017

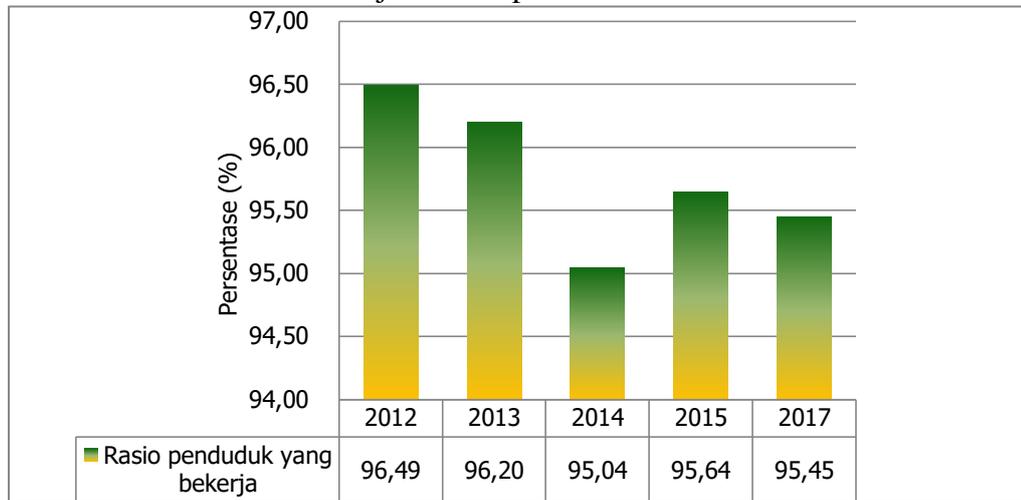


Sumber : Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Bone, 2018

2.1.2.16. Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja. Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bone memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 rasio penduduk bekerja di daerah ini mencapai 96,49 persen menurun menjadi 95,45 persen pada tahun 2017. Menurunnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir mengisyaratkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya.

Grafik 2.26
Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2017



Sumber: BPS, Bone dalam Angka Tahun 2013-2018

2.1.2.17. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, dikembangkan 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Adapun ke 14 unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Bone yang telah dikonversi ke nilai skor indeks 25-100, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 skor IKM sebesar 75,66 yang berarti masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau dengan kinerja unit pelayanan tergolong baik, namun pada tahun 2016 skor IKM menurun menjadi 55,03 atau dengan kinerja pelayanan berkategori kurang baik, akan tetapi pada tahun 2017 kinerja pelayanan di daerah ini kembali berkategori baik. Selengkapnya skor konversi IKM dan kategori mutu dan kinerja unit pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
Skor IKM dan Kategori Mutu dan Kinerja Unit Pelayanan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

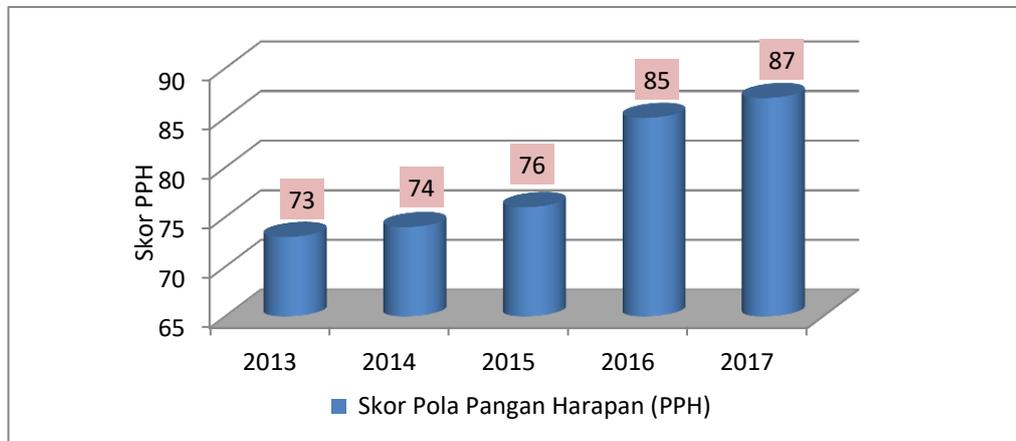
No.	Uraian	Indek Kepuasan Masyarakat				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Skor Konversi IKM	Na	75.66	76,00	58,22	78.00
2	Mutu Pelayanan	Na	A-	A-	B	A-
3	Kinerja Unit Pelayanan	Na	Baik	Baik	Kurang Baik	Baik

Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.2.18. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.

Grafik 2.27
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018

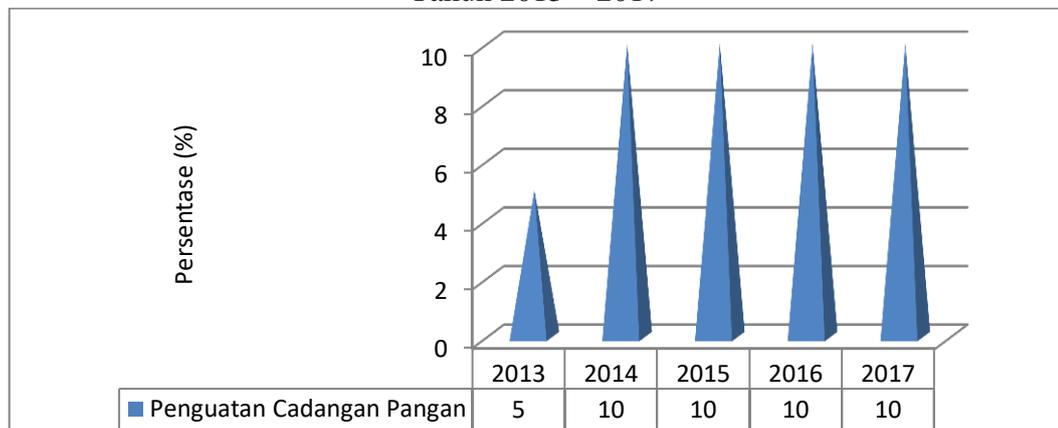
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 skor PPH di daerah ini sebesar 73 poin meningkat menjadi 87 pada tahun 2017 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi berdasarkan skor yang dicapai tahun 2017, skor PPH daerah ini belum mencapai pola pangan yang ideal (skor 100).

2.1.2.19. Penguatan Cadangan Pangan

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Dasar hukum penguatan cadangan pangan telah diamanatkan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Grafik 2.28
Proporsi Jumlah Cadangan Pangan per 100 Ton dalam Persen Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018

Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah cadangan pangan per 100 ton di Kabupaten Bone pada tahun 2013 sebesar 5 persen kemudian pada tahun 2014-2017 sebesar 10 persen, yang berarti selama kurun waktu 4 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Bone menyediakan cadan pangan sebesar 10 ton per tahun.

2.1.2.20. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat

pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Target penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bone lebih diutamakan pada daerah rawan pangan kronis dan daerah rawan pangan Transien. Daerah rawan pangan kronis adalah daerah yang mengalami keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh ketersediaan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

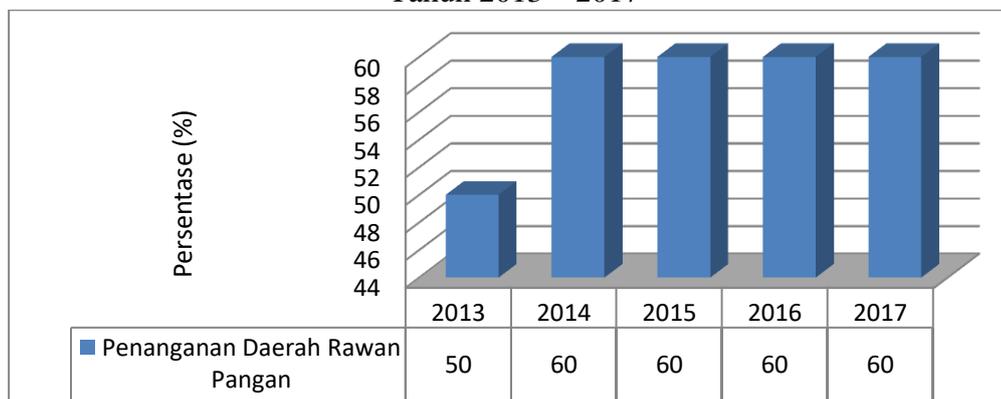
Penanganan rawan pangan di Kabupaten Bone dilakukan dengan dua bentuk, pertama upaya pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis dan daerah rawan pangan transien. Adapun upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan
2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pengolahan pangan
3. Identifikasi balita yang mengalami gizi buruk
4. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pakarangan
5. Penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami kerawanan pangan Transien
6. Pemberian bantuan medis pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk
7. Dll.

Persentase penangana daerah yang berpotensi rawan pangan serta daerah rawan pangan kronis maupun daerah rawan transien di Kabupaten

Bone mencakup 50 persen tahun 2013 kemudian meningkat 60 persen pada tahun 2014-2017.

Grafik 2.29
 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Bone
 Tahun 2013 – 2017



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, 2018

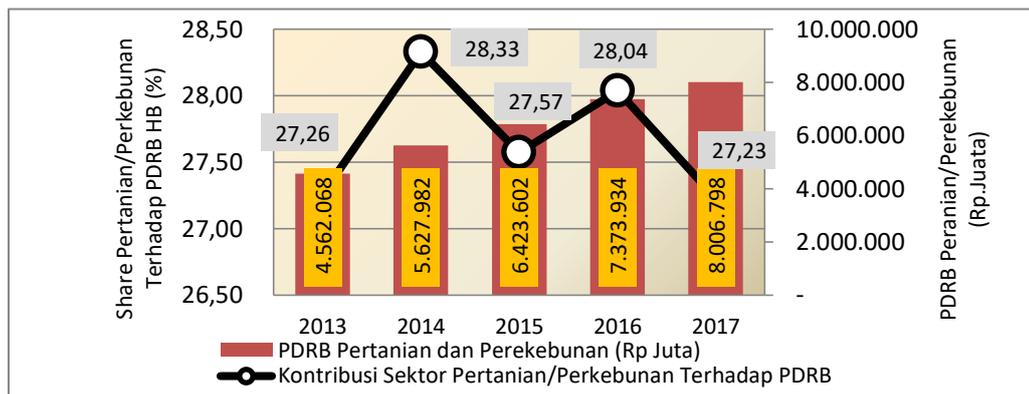
2.1.2.21. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian.

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp. 4,56 Trillion meningkat menjadi Rp. 8,01 trillion pada tahun 2017. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan dalam PDRB harga berlaku Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013-2014 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB meningkat yakni dari 27,26 persen

tahun 2013 meningkat menjadi 28,33 persen tahun 2014. Akan tetapi pada periode berikutnya cenderung menurun bahkan pada tahun 2017 kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara tajam yakni hanya sekitar 27,23 persen. Penurunan tajam kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2017, terkait berbagai kondisi sepanjang tahun 2017, seperti trut herjadinya anomali cuaca El Nino di awal tahun dan berlanjut El Nina di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karenabanyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit dan bencana alam berupa banjir di daerah Bone bagian utara.

Grafik 2.30
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.1.2.22. Produksi Sektor Pertanian

Kabupaten Bone merupakan sentra utama pengembangan komoditi pangan dan palawija di Sulawesi Selatan, terutama komoditi padi, jagung dan kedelai. Peran ini didukung oleh sumberdaya lahan yang cukup luas. daerahKondisi tanaman pangan di Kabupaten Bone didukung dengan lahan sawah yang ada di beberapa kecamatan. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultra Kabupaten Bone, pada tahun 2015 dihasilkan 983.219 ton padi sawah dan 284.071 ton jagung.

Tabel 2.12
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija di Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi	Jumlah Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi	777.733	885.654	983.219	1.057.381	1.207.187
2	Jagung	136.310	209.963	284.071	67.824	424.445
3	Kedelai	17.616	32.616	28.546	29.141	12.958
4	Kacang Tanah	11.229	20.254	16.953	7.806	1.969
5	Kacang Hijau	3.092	5.580	1.485	1.210	704
6	Ubi Kayu	4.788	7.069	3.497	289	2.958
7	Ubi Jalar	4.016	5.439	2.225	1.148	1.265

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

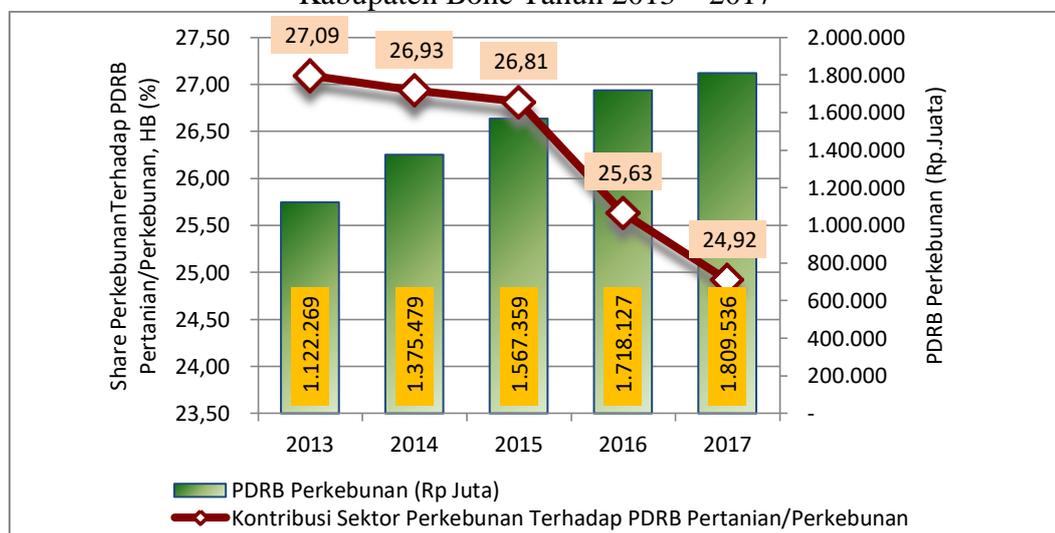
2.1.2.23. Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp. 1,12 Triliun meningkat menjadi Rp. 1,81 triliun pada tahun 2017. Meskipun demikian sektor perkebunan

merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan palwija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,09 persen sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 24,92 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

Grafik 2.31
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan
Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.1.2.24. Produksi Sektor Perkebunan

Kabupaten Bone selain sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan, seperti padi dan jagung, daerah ini juga menjadi sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan,

maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone adalah sebagai sentra produksi kelapa terbesar kedua di Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Selayar dengan kontribusi produksi sekitar 20,19 persen terhadap produksi kelapa Sulawesi Selatan. Pada tahun yang sama daerah ini juga sebagai produsen Cengkeh terbesar ke dua setelah Kabupaten Luwu dengan kontribusi sekitar 23,47 persen, juga terbesar kedua dalam produksi Aren setelah Kabupaten Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 24,53 persen, sebagai produsen kakao terbesar ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara dengan kontribusi sekitar 11,47 persen, bahkan daerah ini menduduki peringkat pertama sebagai produsen jambu mete dengan kontribusi produksi sekitar 14,57 persen terhadap produksi jambu mete Sulawesi Selatan. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahun di Kabupaten Bone, tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel berikut

Tabel 2.13
Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tanaman Tahunan (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelapa Dalam	14.046,00	13.647,70	13.795,72	15.040,00	15.567,37
3	Kopi	285,00	271,00	289,72	275,00	277,65
4	Kakao	15.791,00	16.412,00	17.474,30	18.079,00	12.183,03
5	Kemiri	9.453,00	2.916,00	2917,925	2.974,00	2.998,55
6	Kapuk	755,00	304,00	304,09	311,00	193,87
7	Jambu Mete	2.854,00	2.168,00	2.175,35	2.199,00	2.199,01
8	Cengkeh	2.968,00	2.197,00	3.753,31	4.748,00	4.737,89
9	Lada	93,00	76,00	150,00	152,00	152,03
10	Pala	0,90	0,71	12,60	12,87	12,88
11	Vanili	40,00	29,00	27,64	29,00	29,00
12	Pinang	492,00	204,26	200,14	212,00	182,57
13	Aren	4.692,00	1.017,00	953,56	1.011,00	1.011,03
14	Siwalan	815,00	534,00	623,35	641,00	641,03
15	Sagu	58,00	55,00	65,31	66,00	66,01
16	Asam Jawa	49,00	50,00	49,57	51,00	51,00

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tanaman Tahunan (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
17	Nipa	35,00	35,00	35,45	36,00	36,24
18	Kayu Manis	160,00	160,00	17,07	18,00	18,46
	TOTAL	52.586,90	40.076,67	42.845,10	45.854,86	40.357,61

Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2014-2018

Tabel 2.14
Produksi Tanaman Perkebunan Semusim Kabupaten Bone 2013-2017

No.	Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Tanaman Semusim (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tebu Rakyat	44.890,20	50.248,20	37.033,80	36.238,80	40.133,70
2	Tembakau	534,97	331,46	373,53	373,53	530,37
3	Kapas	118,89	168,00	168,00	0,80	20,96
4	Jahe	254,00	120,00	130,91	133,53	Na
5	Kunyit	856,00	113,10	303,11	266,02	Na
6	Kencur	23,00	0,90	1,40	1,25	Na
7	Sereh Wangi	76,00	104,70	118,30	23,61	Na
8	Temu Lawak	14,00	16,20	16,00	21,65	Na
9	Lempuyang	11,00	11,20	11,00	12,50	Na
10	Lengkuas	220,00	220,00	280,10	259,56	Na
11	Wijen	146,00	137,50	137,95	139,33	144,37
12	Nilam		46,40	30,25	21,29	22,43
	TOTAL	47.144,06	51.517,66	38.604,35	37.491,84	40.851,82

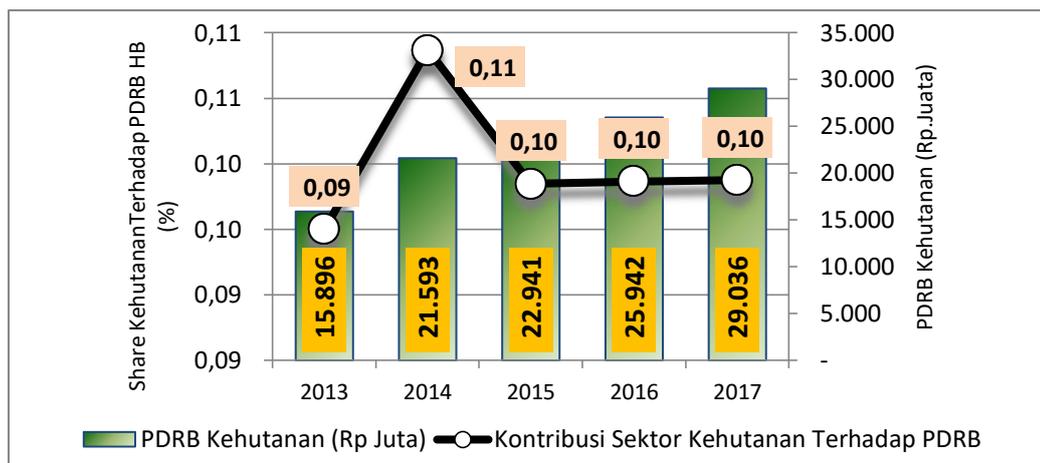
Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2014-2018

Selain potensi perkebunan tahunan, daerah ini juga memiliki potensi komoditi perkebunan semusim yang cukup besar. Pada tahun 2017 Kabupaten Bone tercatat sebagai penghasil tebu rakyat paling besar di Sulawesi Selatan, dengan kontribusi sekitar 70,84 persen dari produksi tebu rakyat di Sulawesi Selatan, Selain itu daerah ini juga masih tercatat sebagai peringkat pertama dalam memproduksi komoditi kemiri dengan kontribusi sekitar 21,29 persen terhadap produksi Kemiri Sulawesi Selatan. Selain itu daerah ini juga sebagai sentra utama dalam memproduksi komoditi wijen, vanili, kunyit, jahe dan lain-lain. Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan semusim di Kabupaten Bone tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel yang disajikan diatas.

2.1.2.25. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Luas kawasan hutan di Kabupaten Bone berdasarkan SK Menhut No. : 434/Menhut-II/2009, adalah seluas 145.053 Ha, dari luasan tersebut sekitar 62,85% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan sekitar 22,48 persen merupakan kawasan hutan lindung, sisanya terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan wisata. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini, diantaranya hutan pinus, hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti damar, rotan lebah madu dan lainnya.

Grafik 2.32
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2013 – 2017



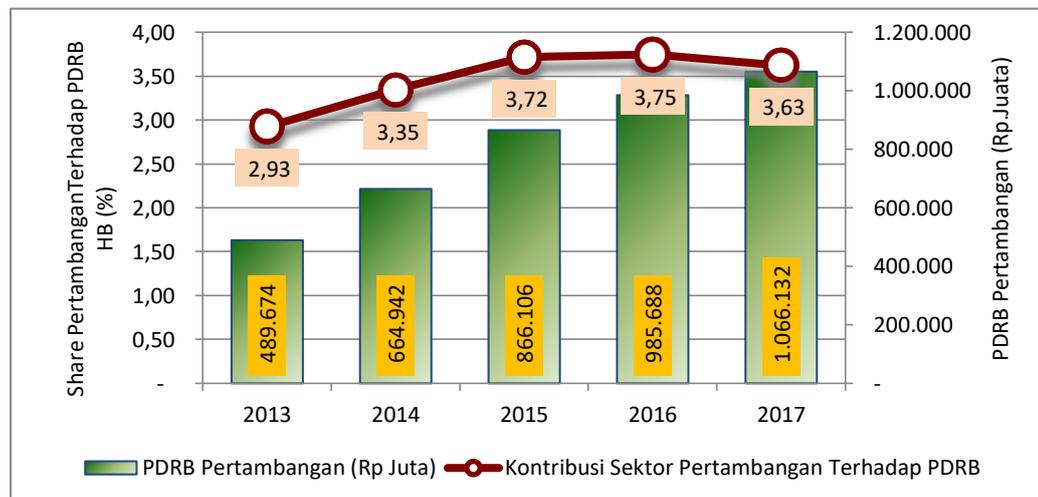
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 15,90 Miliar dan meningkat menjadi 29,04 Miliar tahun 2017. Kontribusi sektor kehutana dalam total PDRB harga berlaku Kabupaten Bone juga mengalami peningkatan tipis. Pada tahun 2013 Sektor kehutanan berkontribusi sekitar 0,09 persen dan meningkat menjadi 0,10 persen tahun 2017.

2.1.2.26. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Sektor pertambangan Kabupaten Bone memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi batu bara dan berbagai mineral non logam seperti Batugamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar di beberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, batubara, pasir, sirtu, tanah timbun, batu gamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bone.

Grafik 2.33
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2013 – 2017



Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Selama kurun waktur 2013-2017, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Bone memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Bone pada tahun 2013 sebesar Rp. 489,67 Milliar meningkat menjadi Rp. 1.066,13 Milliar pada tahun 2017.

Dengan kinerja pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 12,06 persen per tahun menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kabupaten Bone sebesar 2,93 persen meningkat menjadi 3,63 persen tahun 2017.

2.1.2.27. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kabupaten Bone memiliki banyak kawasan-kawasan wisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Objek wisata yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari objek wisata alam, seperti Tanjung Pallette, Gua Mampu, Gua Jepang, Gua Janci, Pantai Ujung Pattiro dan lain-lain. Objek wisata budaya meliputi Mesium Arajange, Kawasan Manurun, Bola Soba, Tana Bangkalae, Makam Kalokkoe dll selain itu juga terdapat objek wisata buatan seperti Waterboom Tanjung Pallette, Wisata Kuliner Pusat Jajan dan Wisata Kuliner Pantai Kering dll.

Menurut Hysa (2012) dua komponen utama yang mempengaruhi Pergerakan pariwisata adalah jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan besarnya perolehan nilai tambah dari sektor pariwisata. Secara Teoritis, semakin lama seorang wisatawan berada di suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) akan semakin banyak uang yang dikeluarkan di daerah tersebut (Wijaya, 2011). Uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan dapat berupa pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, makan, minum dan cinderamata.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir secara umum kontribusi sector pariwisata dalam PDRB Kabupaten Bone trus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,133 persen terhadap PDRB meningkat menjadi 0,165 persen tahun 2017. Selengkapnya gambaran perkembangan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone tahun 2014-2017 terlihat pada Gambar berikut.

Grafik 2.34

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2014–2017



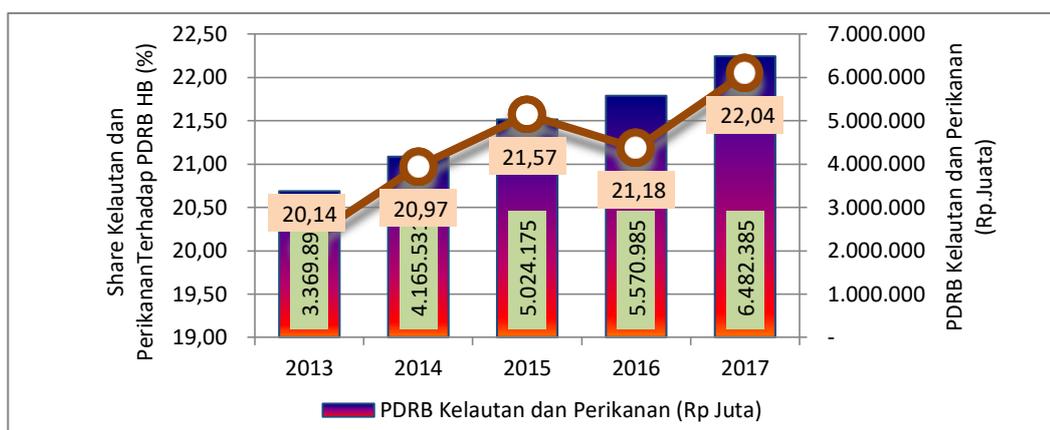
Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.2.28. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki garis pantai sepanjang 138 Km dari arah selatan ke arah utara. Dengan kondisi geografis yang dimiliki daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Potensi penangkapan dan budidaya laut tersebar di 10 kecamatan yang memiliki wilayah pesisir, potensi budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.

Grafik 2.35

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bone, Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

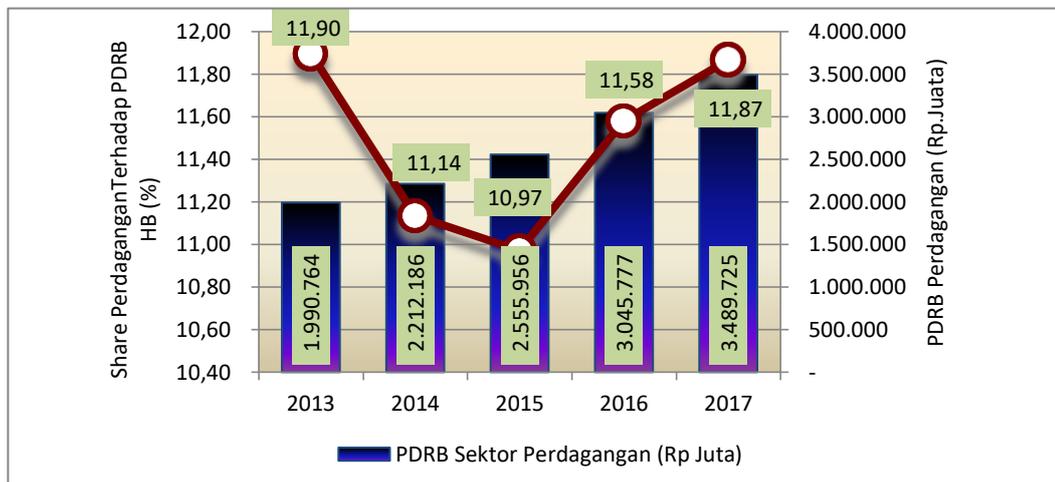
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bone.

Pada tahun 2013 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 3.37 trillium kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 6,48 trillium. Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Bone. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi nilai tambah sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bone berkontribusi terhadap PDRB sekitar 20,13 persen, kemudian meningkat menjadi 22,04 persen tahun 2017.

2.1.2.29. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Bone menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di kabupaten Bone, tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,99 trillium kemudian meningkat menjadi Rp. 3,49 trillium tahun 2017. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah juga cukup pliktuatif, paruh pertama dalam lima tahun terakhir (2013-2015) kontribusi sektor ini merosot dari 11,90 persen tahun 2013 menjadi sekitar 10,97 persen tahun 2015. Akan tetapi paruh berikutnya meningkat hingga 11,87 persen pada tahun 2017. Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang fluktuatif menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini tidak stabil.

Grafik 2.36
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2013-2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.1.2.30. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

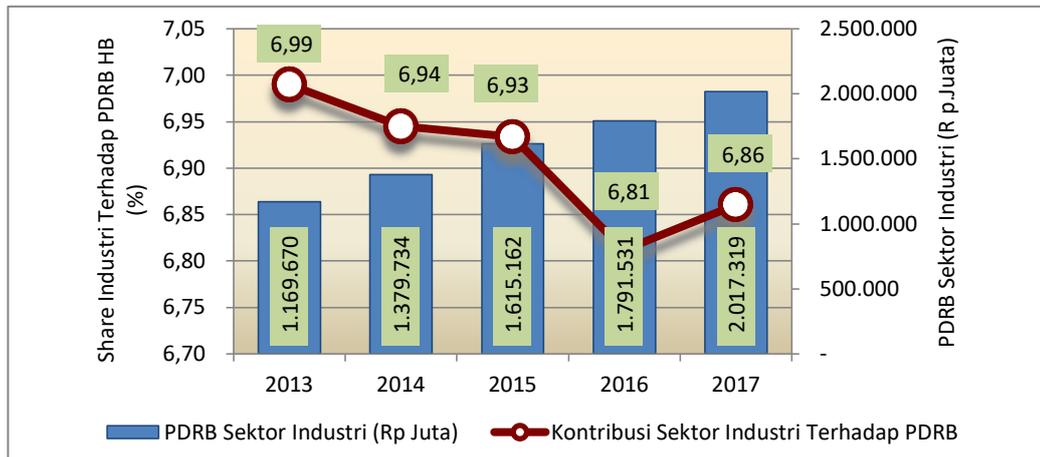
Perkembangan sektor industri disetiap wilayah memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah, karena sektor industri seringkali dianggap memiliki kemampuan untuk menciptakan keterkaitan dan angka pengganda yang besar. Kabupaten Bone memiliki beberapa industri besar dan sejumlah industri kecil yang tersebar diberbagai kecamatan. Industri besar yang ada di daerah ini terdiri dari Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Arasoe dan industri pengolahan alkohol/Spritus di Kecamatan Cina. Sedangkan berbagai ragam industri kecil seperti industri pengolahan pertanian, industri makanan, kerajinan, Meubel dan lainnya. Berbagai industri yang ada di daerah ini telah berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah di sektor ini.

Berdasarkan nilai PDRB harga berlaku sektor industri, tercatat bahwa nilai tambah yang diciptakan sektor ini selama periode 2013-2017 terus meningkat, yakni meningkat dari Rp 1,17 trillium tahun 2013 menjadi Rp. 2,02 Trillium tahun 2017. Namun demikian kontribusi nilai tambaha yang bersumber dari sektor ini terhadap total PDRB daerah cenderung merosot dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang berarti kinerja pertumbuhan sektor ini lebih lambat dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya.

Pada tahun 2013 kontribusi sektor industri terhadap total PDRB sebesar 6,99 persen turun menjadi 6,86 persen tahun 2017.

Grafik 2.37

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRBKabupaten Bone Tahun 2013 – 2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

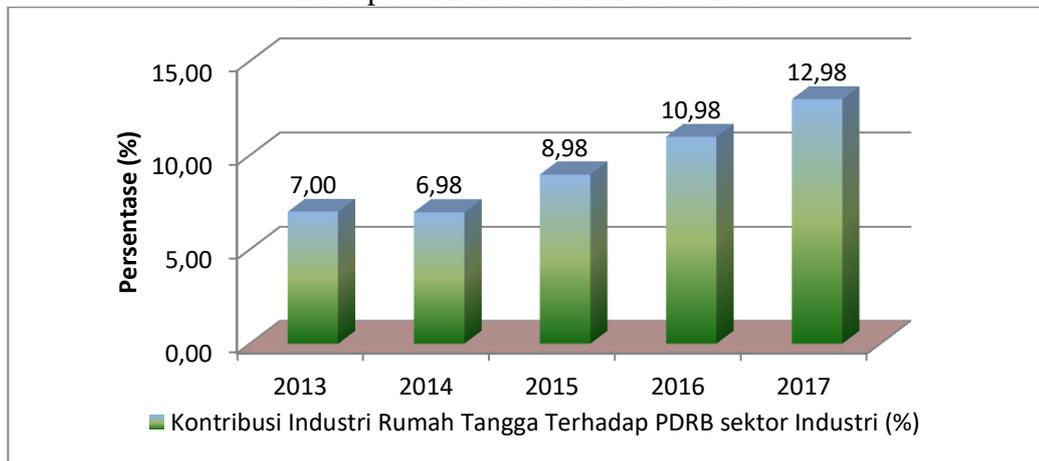
2.1.2.31. Kontribusi Sektor Industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

Industri kecil dan industri rumah tangga di Kabupaten Bone beragam dan tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, hanya saja kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industri tidak dipublikasi oleh BPS. Di daerah ini terdapat beberapa konsentrasi (aglomerasi) Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga dengan kegiatan usaha : Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Makanan, Industri Kerajinan, Industri Meubel dan Industri Pertukangan.

Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sektor industri rumah tangga hanya memberikan kontribusi sekitar 7,0 persen terhadap PDRB sektor industri, namun pada tahun 2017 perenannya meningkat menjadi 12,98 persen. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa perkembangan sektor industri rumah tangga didaerah berkembang lebih cepat dibandingkan kelompok industri lainnya. Gambaran perkembangan kontribusi sektor industri rumah tangga di

Kabupaten Bone selama kurun waktu 2013-2017, terlihat pada Gambar berikut.

Grafik 2.38
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017

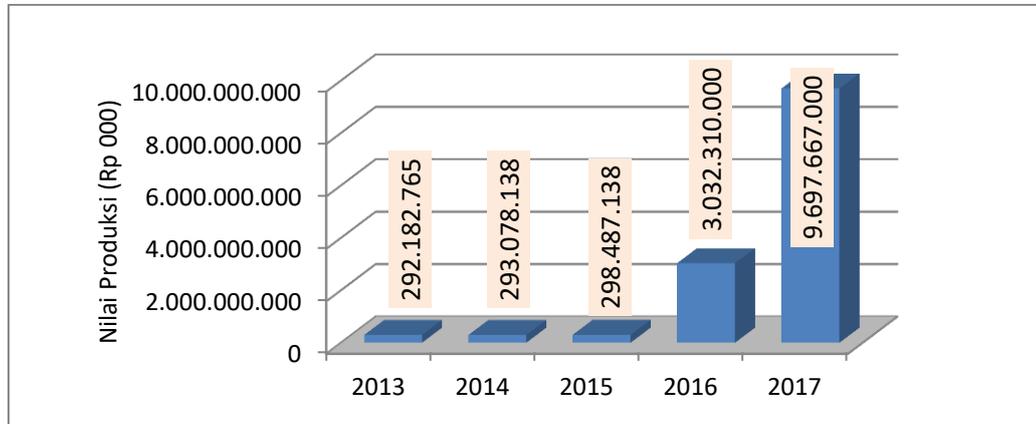


Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.2.32. Pertumbuhan Industri

Kabupaten memiliki sejumlah industri, baik yang berkategori besar dan sedang, maupun industri yang berkategori industri kecil dan rumah tangga. Industri besar yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng, Pabrik Gula Arasoe di Kecamatan Cina, Pengolahan Alkohol/Spritus di Kecamatan Cina. Sedangkan industri kecil beragam seperti Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Makanan, Industri Kerajinan, Industri Meubel dan Industri Pertukangan. Perkembangan industri di Kabupaten Bone digambarkan berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri di Kabupaten Bone, seperti yang digambarkan pada Gambar berikut.

Grafik 2.39
Perkembangan Nilai Produksi Industri (Rp.000) Di Kabupaten Bone
Tahun 2013–2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pemerintah Daerah sebagai supporting sistem demokrasi daerah mempunyai andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak-hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harus dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan Pendidikan sebagai orientasi pendidikan guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar. Adapun peran pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut melalui beberapa indikator terkait pendidikan mulai tingkat pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah, baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya.

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik maupun non fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spritual), motorik, akal pikiran, emosional dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Upaya penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Bone terus dikembangkan, melalui program dan kegiatan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan mutu layanan PAUD, diantaranya penancangan PAUD yang holistik dan terintegrasi yang dikenal dengan Taman Paditungka.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan PAUD di Kabupaten Bone adalah sebagaimana semua Desa dan Kelurahan memiliki layanan PAUD yang holistik dan terintegratif serta berbasis masyarakat agar kepastian dapat diperoleh yaitu semua anak yang akan masuk kejenjang Sekolah Dasar sudah melewati Pendidikan pra sekolah.

Tabel 2.15
Perkembangan Capaian APK PAUD Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
1	Jumlah Sekolah	517	545	538	538	553
2	Jumlah Siswa	22.956	23.773	22.830	22.279	22.232
3	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	34.485	35.283	36.099	36.895	37.695
4	Jumlah Guru	1.944	1.743	1.696	1.830	1.746
5	Jumlah Kelas / Rombel	1.569	1.562	1.374	1.371	1.371
6	Ruang Kelas menurut Kondisi					
	• Baik	851	891	897	930	925
	• Rusak Ringan	273	275	257	257	262
	• Rusak Berat	173	144	118	120	120
7	Rasio Siswa / Sekolah	44	44	42	41	40

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
8	Rasio Siswa / Guru	12	14	13	12	13
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK	66,57	67,38	63,24	60,38	59,00

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Bone) 2013-2017

2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar (APK) di kabupaten bone cenderung terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan drastis dari 99,56% daya serap partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurun menjadi 77,36%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs nilai tertinggi sebesar 86,87% menurun menjadi 60,42%, dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tertinggi 70,59 % turun menjadi 58,22%. Ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut semakin menurun setiap tahunnya.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017
Kabupaten Bone

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	96.674	94.657	92.034	88.236	80.195
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	97.591
1.3.	APK SD/MI	103,40	99,56	95,87	91,16	82,17
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	38.225	39.701	39.974	40.005	40.071
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	48.217
2.3.	APK SMP/MTs	85,08	86,87	85,74	84,37	83,10
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	27.148	29.093	29.716	30.504	22.757
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18	41.739	42.185	42.779	43.213	39.088

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
	tahun					
3.3.	APK SMA/MA/SMK	65,04	68,97	69,46	70,59	58,22

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2013-2017

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bone pada tahun 2017 secara umum belum berhasil dalam program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Kecamatan yang tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 112,5 % namun Kecamatan yang terendah menyerap pendidikan sebesar 59,69 %. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs kecamatan yang tertinggi menyerap pendidikan sebesar 110,29 % dan terendah adalah 28,39 %. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK kecamatan yang mempunyai nilai tertinggi dalam menyerap pendidikan sebesar 1,21 % dan yang terendah sebesar 0,13 %. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih sangat kurang dalam mengelola penduduk untuk program pembangunan pendidikan warganya.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APK
1	Bontocani	1.983	2.589	76,59	678	1.087	62,37	358	587	0,61
2	Kahu	3.490	4.805	72,63	1.727	2.399	71,99	1.478	1.869	0,79
3	Kajuara	3.912	4.256	91,92	1.325	2.217	59,77	1.285	2.009	0,64
4	Salomekko	1.842	2.419	76,15	744	1.051	70,79	308	815	0,38
5	Tonra	1.632	1.829	89,23	466	921	50,60	600	654	0,92
6	Patimpeng	1.583	2.288	69,19	709	1.096	64,69	487	883	0,55
7	Libureng	3.274	3.878	84,42	1.123	1.914	58,67	1.032	1.481	0,70
8	Mare	3.284	3.468	94,69	1.386	1.653	83,85	1.553	1.423	1,09
9	Sibulue	3.682	4.341	84,82	1.243	2.109	58,94	893	1.892	0,47
10	Cina	3.964	3.524	112,5	1.195	1.684	70,96	676	1.402	0,48
11	Barebbo	2.763	3.515	78,61	1.261	1.738	72,55	241	1.483	0,16

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APK
12	Ponre	1.472	2.115	69,6	455	954	47,69	326	665	0,49
13	Lappariaja	2.075	3.437	60,37	1.344	1.549	86,77	1.015	1.173	0,87
14	Lamuru	2.064	3.458	59,69	632	1.630	38,77	514	1.139	0,45
15	Tellu Limpoe	1.749	2.054	85,15	453	982	46,13	165	1.251	0,13
16	Bengo	2.199	3.126	70,35	610	1.686	36,18	411	1.330	0,31
17	Ulaweng	2.477	3.378	73,33	1.033	1.650	62,61	893	1.273	0,70
18	Palakka	2.370	2.816	84,16	942	1.485	63,43	253	1.254	0,20
19	Awangpone	2.841	4.185	67,89	1.069	1.884	56,74	539	1.683	0,32
20	Tellu Siattinge	4.001	5.027	79,59	1.367	2.571	53,17	718	592	1,21
21	Amali	1.885	2.926	64,42	567	1.410	40,21	435	927	0,47
22	Ajangale	2.928	3.584	81,7	890	1.811	49,14	845	1.405	0,60
23	Dua Boccoe	3.165	4.235	74,73	686	1.973	34,77	260	1.587	0,16
24	Cenrana	2.912	3.777	77,1	901	1.579	57,06	777	1.281	0,61
25	TR Barat	3.742	4.764	78,55	778	2.740	28,39	3.338	3.121	1,07
26	Tanete Riattang	3.606	6.012	59,98	3.376	3.061	110,29	1.810	3.121	0,58
27	TR Timur	3.979	4.985	79,82	1.655	2.583	64,07	1.547	2.788	0,55
	Jumlah	74.874	96.791	77,36	28.615	47.417	60,35	22.757	39.088	0,58

Sumber: Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016

2.1.3.1.1.3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Aspek layanan pendidikan pada penduduk 5 tahun ke atas sampai dengan tingkat perguruan tinggi di tahun 2017 telah menghasilkan masyarakat terdidik sebesar 591.618 orang. Penduduk yang sempat menyelesaikan sampai pada jenjang pendidikan tinggi hanya 4,48 % saja, dan terdapat penduduk yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD sebesar 33,34 %. Ini adalah dua permasalahan yang sangat serius harus diselesaikan dalam sistem peleyanan pendidikan di Kabupaten Bone.

Tabel 2.18
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi
Kabupaten Bone Tahun 2017

No	Pendidikan yang Ditamatkan	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tidak punya Ijazah SD	67.218	133.733	200.951	33,45
2	SD/MI Sederajat	70.091	139.450	209.541	34,88
3	SMP	24.074	47.896	71.970	11,98
4	SMA	26.706	53.134	79.840	13,29

5	Perguruan Tinggi	9.806	19.510	29.316	4,88
	Jumlah	197.896	393.722	591.618	98,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Perkembangan pendidikan yang ditamatkan (APT) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Bone pada tingkat pendidikan SD dan SMP sangat berfluktuasi dan cenderung stagnan di tahun 2017. Jika dilihat dari perkembangan siswa SD yang ditamatkan di tahun 2013 sebanyak 14.952 terjadi peningkatan ditahun selanjutnya, namun di tahun 2017 turun menjadi 14.247. demikian juga untuk tingkat pendidikan SMP. Hal yang menjadi masalah adalah pada jenjang pendidikan SMA yang memperlihatkan angka fluktuasi yang sangat serius karena di tahun 2013 Kabupateb Bone menamatkan sebanyak 7.862 orang dan meningkat tajam di tahun 2015 sebesar 9.020, namun terjadi penurunan yang sangat tinggi di tahun 2017 hingga hanya mampu menamatkan 6.285 orang.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone

No	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	14.952	15.182	15.449	14.915	14.247
2	SMP	11.596	12.069	12.735	12.584	11.248
3	SMA	7.862	8.551	9.020	8.913	6.285
4	Perguruan Tinggi					

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

2.1.3.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) yang ada di Kabupaten Bone terjadi penurunan setiap tahunnya terutama pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Untuk tingkat pendidikan SD/MI angka partisipasi Murni pada tahun 2013 sebesar 103,40% dan turun menjadi 87,16 % di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa masih ada 12,84 % anak usia sekolah 7 – 12 tahun yang belum tersepa dalam dunia pendidikan. Demikian juga halnya pada tingkat pendidikan SMP/MTs ditahun 2015 angka partisipasi murni sebesar 85,91% dan turun

menjadi 81,53 % di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa masih ada 18% lebih usia anak sekolah 13 – 15 tahun yang belum terserap pada tingkat pendidikan SMP/MTs. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dalam kurun 3 tahun terakhir cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Dalam jumlah siswa yang berumur 16 – 18 tahun masih terdapat sekitar 30% yang tidak atau belum ikut serta dalam pendidikan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	96.674	95.170	92.034	87.987	84.361
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	96.791
1.3.	APM SD/MI	103,40	100,10	95,87	90,90	87,16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	38.045	38.911	40.054	39.614	38.658
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	47.417
2.3.	APM SMP/MTs	84,68	85,14	85,91	83,54	81,53
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	27.198	28.478	29.656	30.051	31.872
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	41.739	42.185	42.779	43.213	44.754
3.3.	APM SMA/MA/SMK	65,16	67,51	69,32	69,54	71,21

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bone di tahun 2017 masih relatif rendah, terutama pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Untuk jenjang pendidikan SD/MI terdapat variasi APM dimasing-masing kecamatan. APM tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI ditunjukkan oleh Kecamatan Mare (98,86%) dan angka yang terendah di Kecamatan Amali (76,49%). Demikian juga pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dimana masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang belum dapat terserap pada jenjang pendidikan

SMP/MTs. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK memperlihatkan masalah yang sangat serius karena ada kecamatan yang hanya menunjukkan APM sebesar 13,19% (Kecamatan Tellu Limpoe).

Tabel. 2.21
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71	358	587	60,99
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83	1.478	1.869	79,08
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28	1.285	2.009	63,96
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30	308	815	37,79
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26	600	654	91,74
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93	487	883	55,15
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24	1.032	1.481	69,68
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66	1.553	1.423	109,14
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75	893	1.892	47,20
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59	676	1.402	48,22
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49	241	1.483	16,25
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47	326	665	49,02
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25	1.015	1.173	86,53
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21	514	1.139	45,13
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69	165	1.251	13,19
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98	411	1.330	30,90
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21	893	1.273	70,15
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50	253	1.254	20,18
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89	539	1.683	32,03
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37	718	592	121,28
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67	435	927	46,93
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12	845	1.405	60,14
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43	260	1.587	16,38
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99	777	1.281	60,66
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25	3.338	3.121	106,95
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83	1.810	3.121	57,99

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66	1.547	2.788	55,49
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53	22.757	39.088	58,22

Sumber : Profil Pendidikan (Dinas Pendidikan) 2009-2016

2.1.3.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bone setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2013 daya serap sekolah di Kabupaten Bone sebesar 84,68 persen yang menunjukkan bahwa ada sebesar 15,32 persen penduduk usia sekolah yang tidak terserap dalam pendidikan masyarakat di Kabupaten Bone. Hal ini terjadi penurunan tingkat partisipasi dari tahun ketahun yang puncaknya di tahun 2017 angka Partisipasi sekolah menjadi 81,53 persen. Ini menjadi permasalahan utama untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bone.

Tabel. 21
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM
1	Bontocani	2.052	2.589	79,26	823	1.087	75,71
2	Kahu	4.463	4.805	92,88	2.275	2.399	94,83
3	Kajuara	4.165	4.256	97,86	2.068	2.217	93,28
4	Salomekko	2.069	2.419	85,53	886	1.051	84,30
5	Tonra	1.659	1.829	90,71	601	921	65,26
6	Patimpeng	1.943	2.288	84,92	887	1.096	80,93
7	Libureng	3.322	3.878	85,66	1.689	1.914	88,24

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid 7-12 tahun	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM
8	Mare	3.420	3.468	98,62	1.482	1.653	89,66
9	Sibulue	4.112	4.341	94,72	1.682	2.109	79,75
10	Cina	3.142	3.524	89,16	1.374	1.684	81,59
11	Barebbo	3.093	3.515	87,99	1.399	1.738	80,49
12	Ponre	1.686	2.115	79,72	596	954	62,47
13	Lappariaja	2.966	3.437	86,30	2.157	1.549	139,25
14	Lamuru	2.715	3.458	78,51	1.226	1.630	75,21
15	Tellu Limpoe	1.835	2.054	89,34	429	982	43,69
16	Bengo	2.677	3.126	85,64	809	1.686	47,98
17	Ulaweng	2.844	3.378	84,19	1.175	1.650	71,21
18	Palakka	2.476	2.816	87,93	839	1.485	56,50
19	Awangpone	3.754	4.185	89,70	1.524	1.884	80,89
20	Tellu Siattinge	4.328	5.027	86,10	1.912	2.571	74,37
21	Amali	2.238	2.926	76,49	799	1.410	56,67
22	Ajangale	2.978	3.584	83,09	1.288	1.811	71,12
23	Dua Boccoe	3.405	4.235	80,40	1.508	1.973	76,43
24	Cenrana	2.993	3.777	79,24	1.263	1.579	79,99
25	TR Barat	4.685	4.764	98,34	911	2.740	33,25
26	Tanete Riattang	4.564	6.012	75,91	5.076	3.061	165,83
27	TR Timur	4.777	4.985	95,83	1.980	2.583	76,66
	Jumlah	84.361	96.791	87,16	38.658	47.417	81,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Tabel. 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa usia 7-12 tahun	96.674	95.170	92.034	87.987	84.361
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	96.791
1.3.	APS SD/MI	103,40	100,10	95,87	90,90	87,16
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa usia 13-15 tahun	38.045	38.911	40.054	39.614	38.658
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	47.417
2.3.	APS SMP/MTs	84,68	85,14	85,91	83,54	81,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.1.6. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah adalah merupakan bentuk layanan dasar dari sebuah sistem pemerintahan daerah. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah dengan rasio 1:24,7 dan terjadi peningkatan rasio disetiap tahunnya sehingga di tahun 2017 mencapai 1:42,15. Ini menjadi permasalahan berkaitan dengan rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah murid yang semakin bertambah di tahun yang akan datang.

Tabel 2.23

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	756	756	756	758	759
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	93.499	95.077	96.001	96.791	97.591
1.3	Rasio	8,09	7,95	7,87	7,83	7,78
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	209	217	211	211	219
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	44.926	45.704	46.622	47.417	48.215
2.3	Rasio	4,65	4,75	4,53	4,50	4,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Ketersediaan sekolah untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone untuk jenjang sekolah Dasar/MI dan Sekolah Menengah Pertama/MTs cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk disetiap kecamatan. Angka rata-rata perbandingan antara jumlah sekolah dengan penduduk mempunyai rasio 1:19 untuk sekolah Dasar/MI dan untuk tingkat sekolah menengah Pertama /MTs rata-rata perbandingannya adalah 1:35. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruangan menunjukkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan.

Tabel 2.24
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	Bontocani	39	2.589	1:66	27	1.087	1:40
2	Kahu	212	4.805	1:23	79	2.399	1:30
3	Kajuara	230	4.256	1:19	40	2.217	1:55
4	Salomekko	130	2.419	1:19	57	1.051	1:18
5	Tonra	102	1.829	1:18	25	921	1:37
6	Patimpeng	112	2.288	1:20	19	1.096	1:58
7	Libureng	253	3.878	1:15	48	1.914	1:40
8	Mare	230	3.468	1:15	74	1.653	1:22
9	Sibulue	259	4.341	1:17	74	2.109	1:29
10	Cina	220	3.524	1:16	53	1.684	1:32
11	Barebbo	227	3.515	1:15	59	1.738	1:29
12	Ponre	116	2.115	1:18	37	954	1:26
13	Lappariaja	133	3.437	1:26	44	1.549	1:35
14	Lamuru	152	3.458	1:23	42	1.630	1:39
15	Tellu Limpoe	89	2.054	1:23	22	982	1:45
16	Bengo	150	3.126	1:21	28	1.686	1:60
17	Ulaweng	183	3.378	1:18	31	1.650	1:53
18	Palakka	187	2.816	1:15	47	1.485	1:32
19	Awangpone	234	4.185	1:18	58	1.884	1:32
20	Tellu Siattinge	291	5.027	1:17	89	2.571	1:29
21	Amali	157	2.926	1:19	10	1.410	1:141
22	Ajangale	198	3.584	1:18	43	1.811	1:42
23	Dua Boccoe	305	4.235	1:14	39	1.973	1:51
24	Cenrana	229	3.777	1:16	53	1.579	1:30
25	TR Barat	134	4.764	1:36	-	2.740	-
26	Tanete Riattang	301	6.012	1:20	74	3.061	1:41
27	TR Timur	201	4.985	1:25	166	2.583	1:16
	Jumlah	5.074	96.791	1:19	1.338	47.417	1:35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.1.7. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio jumlah Guru dan murid untuk pendidikan SD/MI dan SMP/MTs setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rasio jumlah guru dan murid di tahun 2013 untuk Pendidikan Dasar SD/MI sebesar 1:12,79 meningkat menjadi 1:13,81 di tahun 2017. Sedangkan untuk sekolah SMP/MTs di tahun 2013 adalah 9,98 meningkat menjadi 13,99. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone berada pada titik batas rasio secara nasional untuk SD atau yang sederajat 20:1; dan untuk SMP/MTs sebesar 15:1.

Tabel 2.25
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bone. 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	8.565	6.986	6.633	6.792	7.010
1.2	Jumlah Murid	96.674	95.537	92.034	88.236	88.153
1.3	Rasio	88,60	73,12	72,07	76,98	79,52
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	3.830	3.505	3.386	3.264	3.195
2.2	Jumlah Murid	38.225	39.701	39.974	47.703	47.884
2.3	Rasio	100,20	88,28	84,71	68,42	66,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

Aspek layanan pendidikan disetiap kecamatan masih dalam batas normal. Rata-rata disetiap kecamatan untuk perbandingan Guru dan Murid pada tingkat sekolah Dasar/MI sebesar 1:12 dan untuk SMP/MTs perbandingannya adalah 1:14.

Tabel 2.26
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Bontocani	171	1.983	1:12	53	678	1:13
2	Kahu	283	3.490	1:12	108	1.727	1:16
3	Kajuara	292	3.912	1:13	84	1.325	1:15
4	Salomekko	126	1.842	1:14	53	744	1:14

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
5	Tonra	169	1.632	1:10	41	466	1:17
6	Patimpeng	134	1.583	1:12	59	709	1:14
7	Libureng	266	3.274	1:12	98	1.123	1:11
8	Mare	273	3.284	1:12	106	1.386	1:13
9	Sibulue	290	3.682	1:13	105	1.243	1:11
10	Cina	249	3.964	1:16	84	1.195	1:14
11	Barebbo	282	2.763	1:10	108	1.261	1:12
12	Ponre	157	1.472	1:9	45	455	1:10
13	Lappariaja	160	2.075	1:12	80	1.344	1:17
14	Lamuru	164	2.064	1:13	42	632	1:15
15	Tellu Limpoe	112	1.749	1:16	35	453	1:13
16	Bengo	173	2.199	1:13	47	610	1:13
17	Ulaweng	227	2.477	1:10	55	1.033	1:19
18	Palakka	193	2.370	1:12	86	942	1:11
19	Awangpone	266	2.841	1:11	87	1.069	1:12
20	Tellu Siattinge	329	4.001	1:12	80	1.367	1:17
21	Amali	189	1.885	1:10	51	567	1:11
22	Ajangale	201	2.928	1:15	71	890	1:13
23	Dua Boccoe	297	3.165	1:11	46	686	1:15
24	Cenrana	248	2.912	1:12	56	901	1:16
25	TR Barat	213	3.742	1:17	56	778	1:14
26	Tanete Riattang	392	3.606	1:9	219	3.376	1:15
27	TR Timur	251	3.979	1:16	91	1.655	1:18
	Jumlah	6.107	74.874	1:12	2.046	28.615	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.1.8. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka melek huruf di Kabupaten Bone sudah cukup baik di tahun 2017 karena secara prosentase telah mencapai angka 100 %, namun jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 capaiannya masih berada disekitar 49% sampai dengan 51 %. Namun jika dilihat dari angka mutlak dari angka jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang sudah bisa membaca dibandingkan dengan jumlah

penduduk diatas usia 15 tahun masih ada beberapa yang belum melek huruf secara keseluruhan.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017 Kabupaten Bone

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	313.638	307.852	313.638	326.479	326.479
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	631.406	633.660	628.904	641.724	326.511
3	Angka Melek Huruf	50	49	50	51	100

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 2.28
Angka Melek Huruf Tahun 2017 Menurut Kecamatan Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Bontocani	13.583	13.697	110
2	Kahu	36.426	35.162	110
3	Kajuara	35.980	32.400	259
4	Salomekko	15.539	13.652	497
5	Tonra	13.194	11.985	701
6	Patimpeng	16.488	14.982	1.312
7	Libureng	23.563	26.543	200
8	Mare	25.022	23.297	1.817
9	Sibulue	34.206	30.348	110
10	Cina	25.455	23.376	110
11	Barebbo	27.523	24.708	570
12	Ponre	12.715	12.337	120
13	Lappariaja	23.824	21.619	838
14	Lamuru	24.969	22.826	1.686
15	Tellu Limpoe	14.097	12.258	140
16	Bengo	25.481	23.210	1.665
17	Ulaweng	24.731	22.044	834
18	Palakka	22.639	20.174	949
19	Awangpone	28.560	26.337	149
20	Tellu Siattinge	38.218	35.960	130
21	Amali	19.799	18.774	120
22	Ajangale	26.100	24.631	120
23	Dua Boccoe	28.827	26.971	30

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
24	Cenrana	23.269	21.188	680
25	TR Barat	48.098	44.584	431
26	Tanete Riattang	51.404	45.645	382
27	TR Timur	42.409	39.138	270
	Jumlah	722.119	667.846	14.340

Sumber: Data Diolah, 2018

Angka melek huruf secara keseluruhan di Kabupaten Bone berdasarkan sebaran Kecamatan, maka angka melek huruf diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone sebesar 14.340 Penduduk. Namun besaran angka melek huruf tersebut disetiap Kecamatan mempunyai variasi melek huruf yang sangat timpang dan sangat jauh perbedaanya. Perbedaan tersebut antara setiap kecamatan sangat berbeda, yakni kecamatan yang memiliki angka melek huruf yang paling rendah adalah sebesar 30 Penduduk dan yang paling tinggi adalah 1.817 Penduduk. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pemerataan melek huruf di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone masih sangat Timpang. Ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang belum merata pada sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

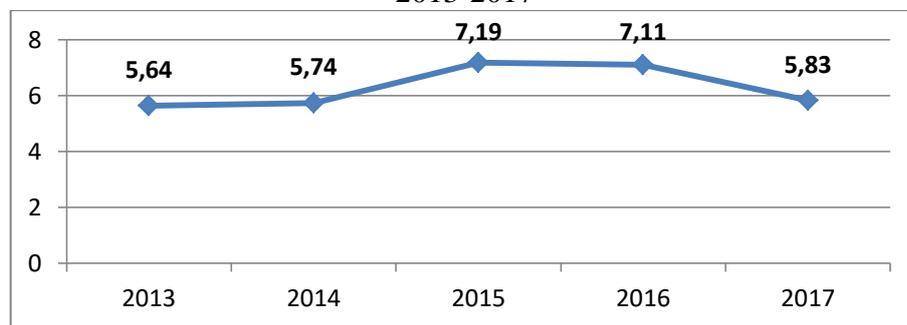
2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 5,64 dan pada tahun berikutnya turun menjadi 5,74. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 7,19 pada tahun 2015, dan pada tahun berikutnya

mengalami penurunan kemabli dari 7,11 pada tahun 2016 menjadi 5,83 pada tahun 2017. Dimana pencapaian tersebut lebih tinggi dari target SDG'S tahun 2017 sebesar 1,02. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait agar di tahun mendatang tangka kematian bayi (AKB) dapat terus ditekan.

Grafik 2.40
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone, 2013-2017

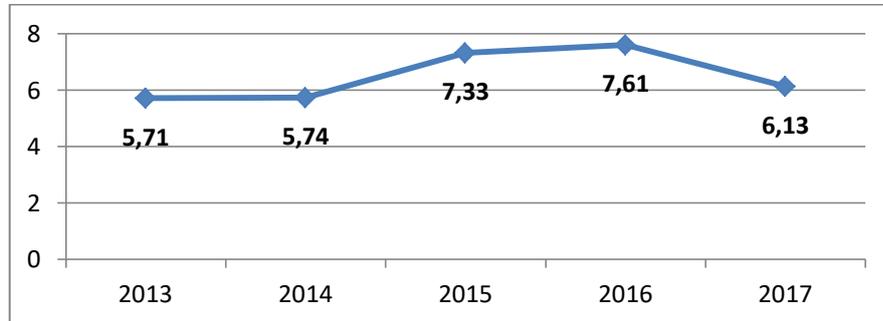


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi fokus utama bagi Dinas Kesehatan. Berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada target tersebut dilanjutkan kembali, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya, mengingat bahwa perlu keterpaduan berbagai kegiatan dan kesinambungan program dari tahun ke tahun. Puncak tertinggi dari angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 7,61 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 6,13.

Grafik 2.41
 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup, 2013-2017

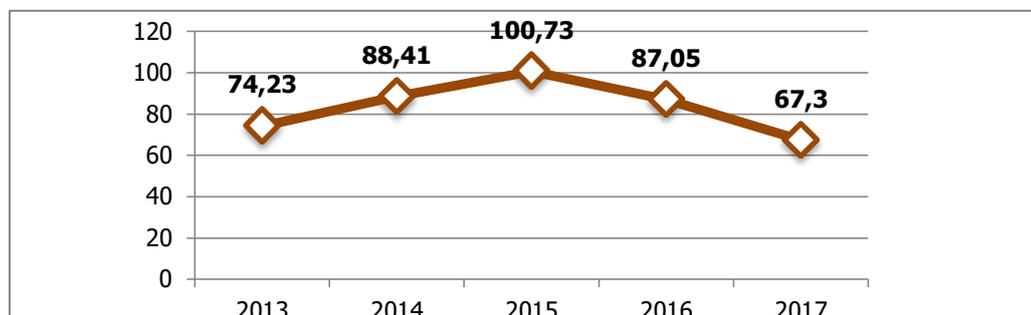


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bone mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 Tahun. Angka kematian ibu pada tahun 2013 yaitu 74,23/100.000 KH menjadi 100,73 pada tahun 2015 dan ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,04 per 100.000 KH, dan pada tahun 2017 berkurang kembali menjadi 67,30. Angka ini jauh dibawah target RPJMD yang mencanangkan 27,1 per 100.000 KH. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia perlu menjadi perhatian serius dan penanganan secara berkesinambungan

Grafik 2.42
 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Bone, 2013-2017



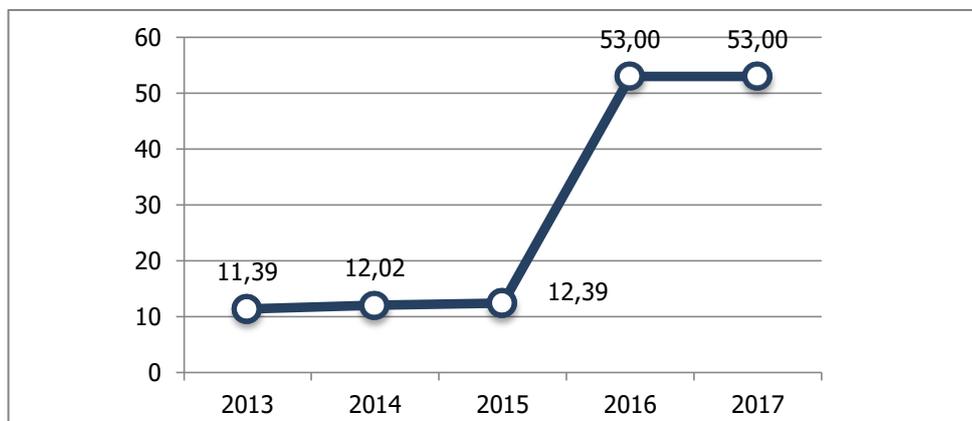
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu dibagi jumlah balita pada tahun tertentu dikalikan 1000. Pada tahun 2017 jumlah Posyandu Aktif yang tersebar di Kabupaten Bone mencapai jumlah 970 dengan rasio meningkat pada tahun 2016 - 2017 sebesar 53 persen.

Grafik 2.43

Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Bone 2013-2017

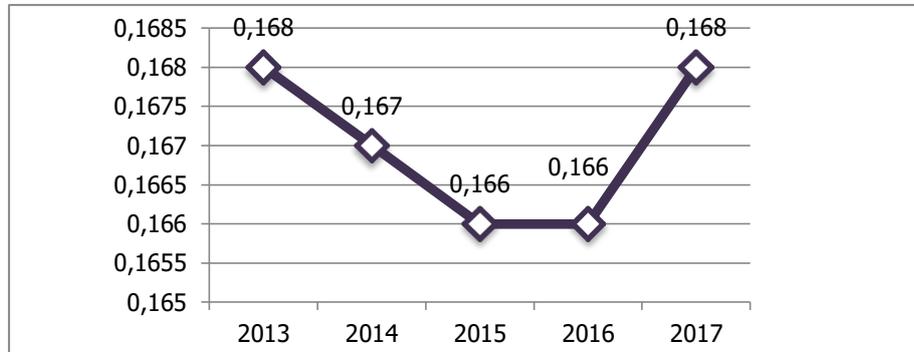


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu PerSatuan Penduduk

Laporan Kementerian Kesehatan dalam Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa pada 2015, rasio ketersediaan Puskesmas terhadap 30.000 penduduk di Indonesia adalah 1,15. Dalam hal ini berarti bahwa, satu puskesmas dapat melayani sekitar 26.000 penduduk di Indonesia. Di Kabupaten Bone jumlah Puskesmas adalah 38, Pustu 74 dan 14 Klinik. Adapun rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Bone tahun 0,168 persen. Hal ini didapatkan dari penjumlahan dari 38 Puskesmas ditambah 74 Pustu dan 14 Klinik totalnya 126 dan di bagi total jumlah penduduk Kabupaten Bone (746.973) dikalikan 1000 dan hasilnya adalah 0,168 persen.

Grafik 2.44
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kabupaten Bone,
2013-2017

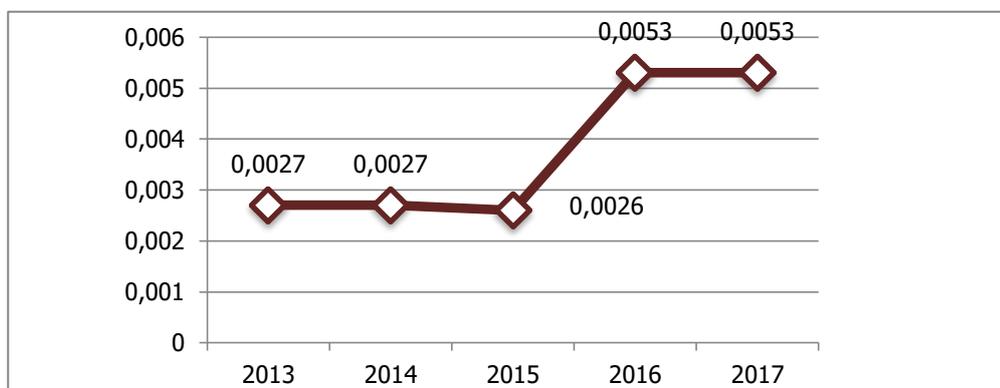


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.6. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Bone sejak 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bone sudah bertambah. Tahun 2013 sampai dengan 2015 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Bone adalah 2 Rumah Sakit Pemerintah. Pada Tahun 2016 ada 2 tambahan Rumah Sakit, 1 Rumah Sakit Swasta dan 1 Rumah Sakit Pemerintah tipe c, sehingga pada tahun selanjutnya diharapkan Rumah Sakit ini mampu menangani permasalahan kesehatan bagi masyarakat Bone.

Grafik 2.45
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan ketersediaan SDM dokter di Kabupaten Bone masih sangat tinggi. Kabupaten Bone memiliki 27 Kecamatan dan penduduk yang besar dan tentunya membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang tinggi dari tenaga kesehatan khususnya dokter.

Tabel.2.29

Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja Kabupaten Bone, 2017

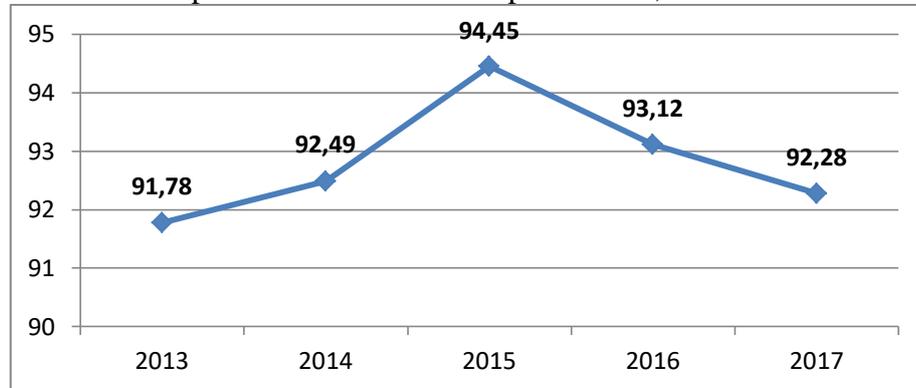
No	Jenis Tenaga	Puskesmas	Rumah Sakit	Balai Kesehatan Gigi	Dinkes
1	Dokter Spesialis	0	12	0	1
2	Dokter Umum	30	15	0	2
3	Dokter Gigi	15	2	4	0
	Total	45	29	4	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.8. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Indikator Cakupan Persalinan yang ditolong oleh Bidan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencapai 110,42 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi mengingat bahwa seringkali penyebab kematian ibu dan bayi saat melahirkan adalah karena ditolong/ditindak oleh dukun atau orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang persalinan. Kejadian pendarahan, infeksi, atau pun timbulnya eklampsia pasca persalinan adalah penyebab utama kefatalan dalam persalinan. Faktor lain yang cukup berhasil dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program adalah indikator gizi buruk, gizi kurang dan penanganannya yang telah sesuai target.

Grafik. 2.46
 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Bone, 2013-2017

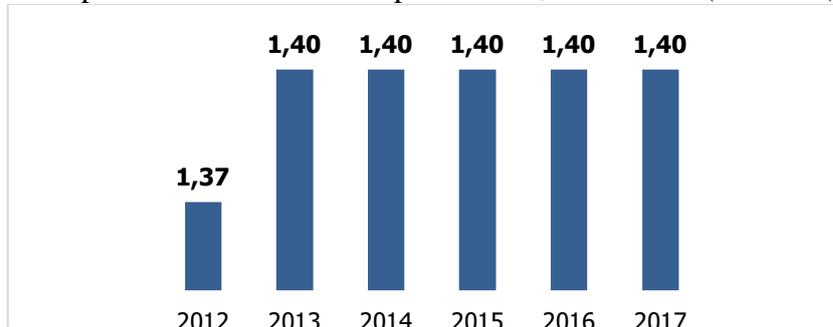


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.9. Cakupan Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah Puskesmas di Kabupaten Bone bertambah menjadi 38 dari 37 Puskesmas di tahun 2013 karena peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. Untuk mendapatkan cakupan Puskesmas adalah jumlah Puskesmas dibagi jumlah seluruh Kecamatan x 100, di Kabupaten Bone jumlah cakupan Puskesmas Tahun 2017 adalah 1,40 persen. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bone adalah 38 dan jumlah kecamatan adalah 27 sehingga rasio Puskesmas di Kabupaten Bone adalah 1 : 1,4 (1 Kecamatan terdapat 1,4 Puskesmas).

Grafik 2.47
Cakupan Puskesmas Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

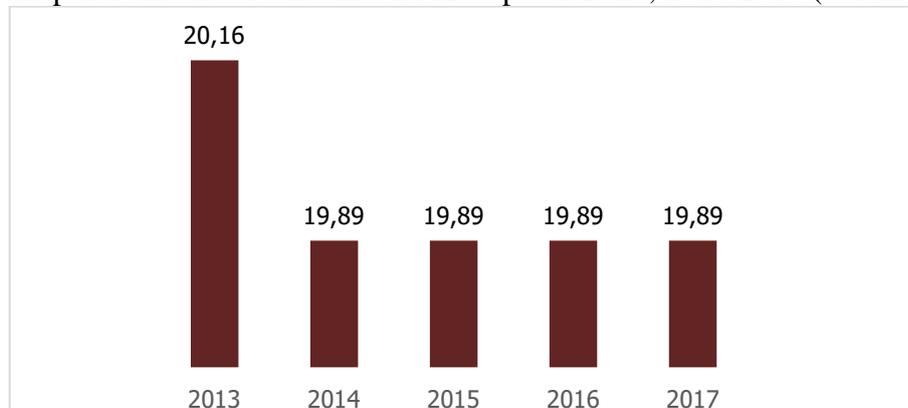


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.2.10. Cakupan Pembantu Puskesmas

Rasio sarana kesehatan Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014 jumlah Pustu di Kabupaten Bone berkurang menjadi 74 dari 75 Pustu di tahun 2013 karena peningkatan Pustu menjadi Puskesmas. Untuk mendapatkan cakupan Pustu adalah jumlah Pustu dibagi jumlah seluruh desa x 100, di Kabupaten Bone jumlah cakupan Pustu Tahun 2017 adalah 19,89 persen dengan perolehan Jumlah Pustu adalah 74 dibagi 372 dan dikali 100 persen, jadi rasio Pustu di Kabupaten Bone 1 : 19,89 (1 Pustu melayani 19 Desa).

Grafik 2.48
Cakupan Pembantu Puskesmas Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)

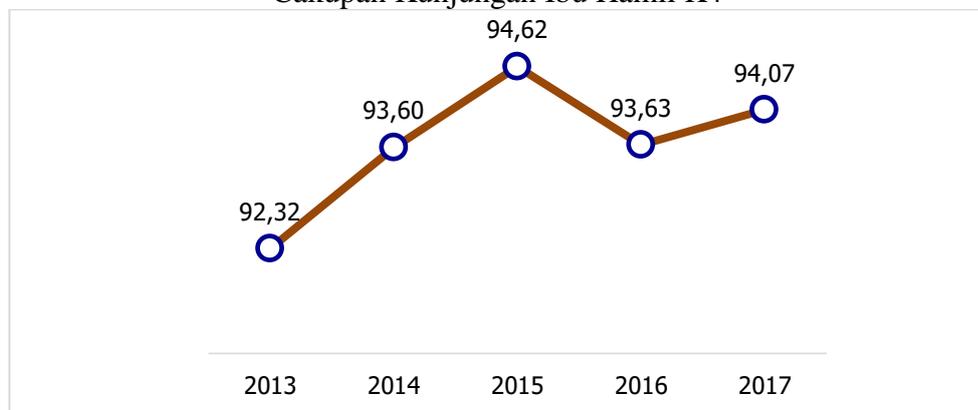


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2.1.3.1.2.11. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Standar pelayanan paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet *Fe* selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah 7T pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Tekanan darah diukur (3) Tetanus Toxoid yaitu Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toxoid), (4) Tinggi fundus uteri diukur, (5) Tablet besi (diberikan 90 tablet selama kehamilan), (6) Temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC). Cakupan kunjungan ibu hamil di pelayanan kesehatan mencapai angka 94,07 persen tahun 2017, naik dibandingkan empat tahun sebelumnya 92,32 persen. Capaian tahun 2017 sudah sesuai dengan target RPJMD yaitu 94 persen.

Grafik 2.49
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

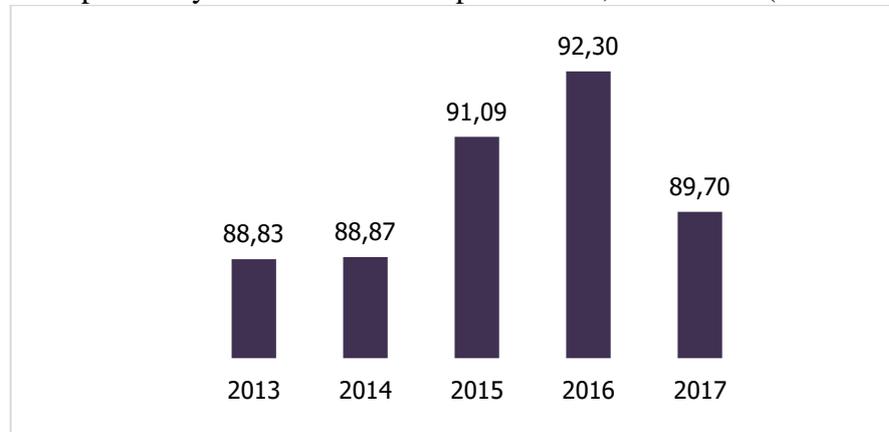


Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2.1.3.1.2.12. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan ibu nifas (Kemenkes RI, 2009). Perawatan nifas adalah perawatan terhadap ibu yang telah selesai melahirkan, salah satunya adalah perawatan payudara (Siregar, 2009) Perawatan nifas mencakup pemeriksaan tanda vital, keadaan umum untuk melihat tanda tanda anemia, pemeriksaan abdomen dan luka, pemeriksaan genitalia, melihat komplikasi persalinan, dan perawatan payudara. Cakupan pelayanan bagi ibu nifas dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2013 dan 2014 pelayanan ibu nifas di Kabupaten Bone hanya 88,83 persen dan 88,87 persen, kemudian mengalami perluasan cakupan tahun 2015 dan 2016 menjadi 91,09 persen dan 92,30 persen. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan tajam ke angka 89,70 persen.

Grafik 2.50
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bone, 2013-2017 (dalam %)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan disuatu wilayah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun bertambah lebih dari separuh (67,06 %) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yakni sepanjang 1559,514 Km. Yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 316,72 Km, dan jalan Propinsi 99,15 Km. Ini menggambarkan bahwa jalan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone hanya sepanjang 1143,644 Km saja.

Tabel. 2.30

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Kondisi	Panjang Jalan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	30,18	32,12	41,04	43,21	44,01
2	Kondisi Sedang	12,92	14,25	16,43	18,47	15,18
3	Kondisi Rusak Ringan	21,66	24,25	22,54	23,34	17,18
4	Kondisi Rusak Berat	35,24	29,38	19,99	14,97	23,63
5	Mantap	43,10	46,37	57,47	61,68	59,18

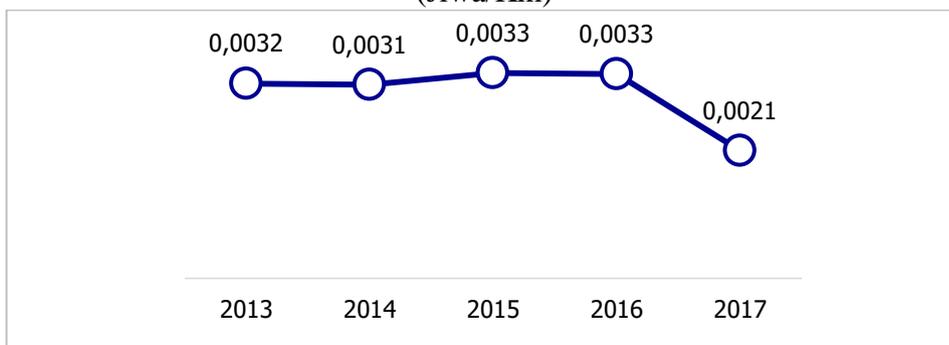
Sumber : 2013-2016=Dinas PU - PTR Kab. Bone; 2017=BPS, Kabupaten Bone Dalam Angka 2018

2.1.3.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum

mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Grafik 2.51
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017
(Jiwa/Km)



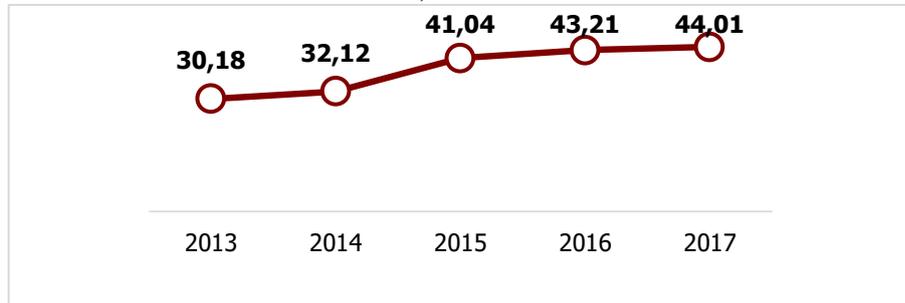
Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Dalam lima tahun terakhir, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bone tidak banyak mengalami perubahan. Tahun 2014, rasio panjang jalan Kabupaten sedikit menurun dari 0,0032 jiwa/Km menjadi 0,0031 per/Km, menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan sementara panjang jalan konstan. Kabupaten Bone menambah panjang jalan di tahun 2015 dan 2016 sehingga rasio panjang jalan naik menjadi 0,0033 jiwa/Km, sebelum akhirnya menurun menjadi 0,0021 karena terjadi pengurangan panjang jalan di tahun 2017. Masih rendahnya angka rasio panjang jalan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan/penggunaan jalan di Kabupaten Bone masih sangat rendah.

2.1.3.1.3.1.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bone terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2013, Kabupaten Bone hanya memiliki panjang jalan dalam kondisi baik sebanyak 30,18 persen, dan kemudian bertambah menjadi 32,12 persen tahun 2014.

Grafik 2.52
 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Kabupaten Bone, 2013-2017

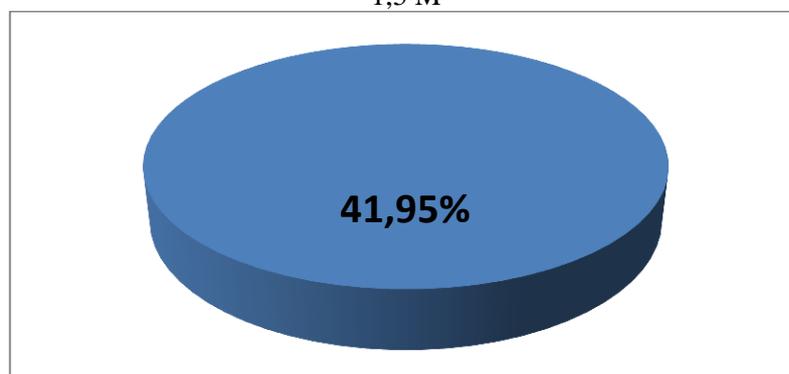


Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik naik signifikan tahun 2015 mencapai 41,04 persen, kemudian meningkat lagi sebesar 43,21 persen dan 44,01 persen masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Angka tahun 2017 merupakan persentase tertinggi sepanjang tahun 2013 sampai 2017 dan menunjukkan bahwa 44,01 persen panjang jalan kabupaten di Kabupaten Bone masih dalam kondisi baik dan 55,99 persen berada dalam kondisi kondisi sedang, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat

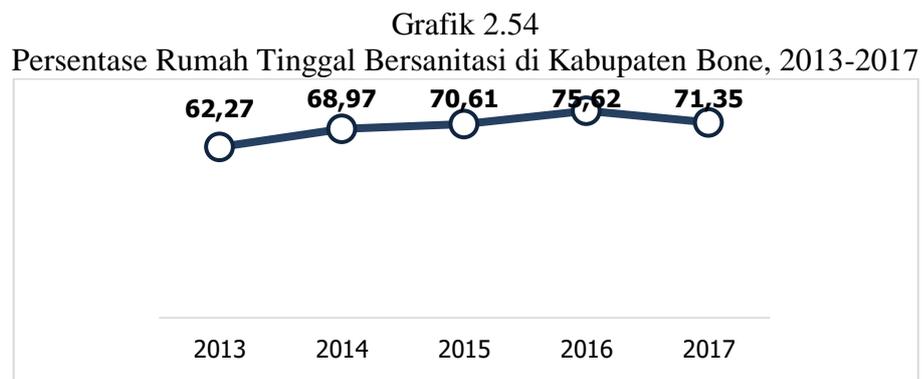
2.1.3.1.3.1.4. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5m)

Grafik 2.53
 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air 1,5 M



2.1.3.1.3.1.5. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat berarti cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Pengertian ini benar tetapi belum memberikan gambaran yang konkrit tentang apa itu sanitasi. Sanitasi pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan tiga komponen untuk dikelola yaitu persampahan, air limbah dan drainase. Sanitasi tidak hanya berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tetapi memiliki manfaat yang luas.



Sumber: Dinas PU - PTR Kab. Bone, 2018

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Bone mampu menaikkan persentase rumah tinggal bersanitasi. Tahun 2013, hanya 62,27 persen rumah tinggal di Kabupaten Bone yang memiliki akses terhadap sanitasi, artinya 37,73 persen rumah tinggal tahun tersebut belum bersanitasi. Persentasenya kemudian terus meningkat dari 68,97 persen tahun 2014 ke 70,61 persen tahun 2015, dan mencapai angka tertinggi 75,62 persen tahun 2016. Setelah capaian tertinggi tahun 2016, angka persentase rumah tinggal bersanitasi sedikit menurun menjadi 71,35 persen tahun 2017, namun setidaknya di tahun ini hanya tersisa 28,65 persen rumah tinggal di Kabupaten Bone yang belum bersanitasi.

Tabel 2.31
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone
 Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	3.144	2.049	65,16
2	Kahu	7.752	5.741	74,06
3	Kajuara	7.287	4.914	67,43
4	Salomekko	3.108	1.918	61,72
5	Tonra	2.730	1.691	61,93
6	Patimpeng	3.315	1.862	56,15
7	Libureng	5.982	5.155	86,18
8	Mare	5.347	3.603	67,39
9	Sibulue	6.841	3.977	58,13
10	Cina	5.290	3.829	72,39
11	Barebbo	5.516	3.908	70,85
12	Ponre	2.775	1.956	70,49
13	Lappariaja	4.765	3.266	68,54
14	Lamuru	4.994	4.727	94,65
15	TelluLimpoe	2.819	1.711	60,67
16	Bengo	5.096	4.296	84,30
17	Ulaweng	4.946	3.398	68,69
18	Palakka	4.528	2.862	63,20
19	Awangpone	5.877	4.442	75,58
20	TelluSiattinge	8.017	4.749	59,23
21	Amali	4.146	3.201	77,20
22	Ajangale	5.488	4.482	81,66
23	DuaBoccoe	6.041	4.937	81,72
24	Cenrana	4.831	2.914	60,31
25	TR Barat	9.688	9.299	95,99
26	TaneteRiattang	10.434	10.110	96,89
27	TR Timur	8.637	5.546	64,21
	Jumlah	149.395	5.546	71,35

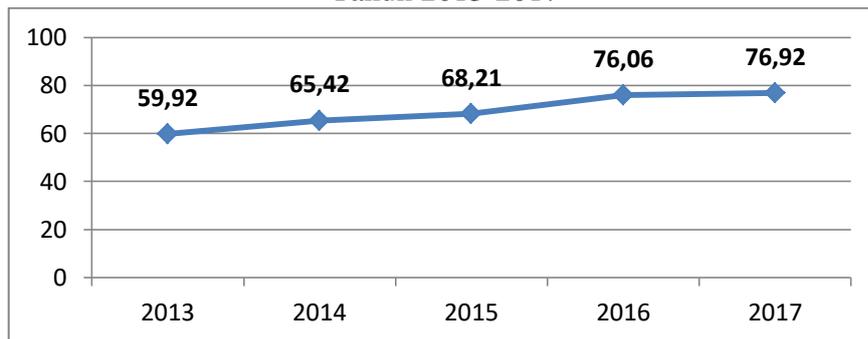
Sumber: Data Olahan, 2018

Lima Kecamatan dengan angka persentase rumah tinggal bersanitasi paling tinggi adalah Tanete Riattang sebesar 96,89 persen, Tanete Riattang Barat 95,99 persen, Lamuru 94,65 persen, Libureng 86,18 persen, dan Bengo sebesar 84,30. Sedangkan lima Kecamatan paling rendah persentase rumah tinggal bersanitasi adalah Tellu Siattinge dengan 59,23 persen, Patimpeng 56,15

persen, Sibulue 58,13 persen, Cenrana 60,31 persen, dan Tellu Limpoe 60,67 persen.

2.1.3.1.3.1.6. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Grafik 2.55
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas PSDA Kab. Bone, 2018

Tingkat capaian kinerja dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pelaksanaan program prioritas hingga 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini terlihat dari capaian kondisi mantap (Kondisi Baik + Kondisi Sedang) pada keseluruhan kondisi jaringan irigasi Kabupaten di tahun 2017 terbesar 76,92 persen dengan luas irigasi Kabupaten 34.379 Ha dan mengalami peningkatan capaian kondisi mantap di tahun 2016 sebesar 76,06 persen yang merupakan kewenangan Kabupaten.

Dari gambar tersebut diatas terlihat adanya peningkatan kondisi baik dari tahun ke tahun, untuk tahun 2013 sebesar 59,92% meningkat menjadi 76,92% pada tahun 2017, artinya dalam 5 (lima) terakhir terjadi peningkatan kondisi baik sebesar 17%. Hal ini disebabkan karena prioritas penanganan pada kondisi rusak berat yang ditingkatkan menjadi kondisi baik.

2.1.3.1.3.1.7. Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain

irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi terdiri dari tiga jenis yaitu jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier.

Jaringan Irigasi Utama / Primer meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuang. Bangunan ini mutlak diperlukan bagi eksplot, meliputi bangunan pembendung, bangunan pembagi dan bangunan pengukur. Bangunan bendung berfungsi agar permukaan air sungai dapat naik dengan demikian memungkinkan untuk disalurkan melalui pintu pemasukan ke saluran pembawa. Bangunan pembagi berfungsi agar air pengairan dapat didistribusikan di sepanjang saluran pembawa (saluran primer) ke lahan-lahan pertanaman melalui saluran sekunder dan saluran tersier.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, ketersediaan jaringan irigasi menjadi sangat penting, terutama bagi daerah seperti Kabupaten Bone yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor pertanian. Sepanjang tahun 2013 sampai 2017 rasio jaringan irigasi Kabupaten Bone terus bertambah. Tahun 2013 Kabupaten Bone memiliki rasio jaringan irigasi 3,60 Meter jaringan irigasi kewenangan kabupaten per Hektar total luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Bone, kemudian bertambah menjadi

3,15 M/Ha tahun 2014 yang bertahan hingga tahun 2015. Pemerintah daerah menambah jaringan irigasi, sehingga tahun 2016 rasio jaringan irigasinya naik menjadi 3,15 M/Ha. Tahun 2017, rasio jaringan irigasi Kabupaten Bone mencapai nilai tertinggi yaitu 3,71 M/Ha. Penentuan rasio jaringan irigasi dari tahun 2013 – 2017 secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan Primer (meter)	266.682	227.272	288.812	297.772	336.222
2	Jaringan Sekunder (meter)	55.791	58.728	60.545	71.230	74.979
3	Jaringan Tersier (meter)	-	-	-	-	-
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	89.700	90.819	110.760	110.760	110.761
5	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	3,60	3,15	3,15	3,33	3,71

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, 2018

Hingga tahun 2017 jika ditinjau dari capaian rasio jaringan irigasi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone maka rasio jaringan irigasi terbesar berada di Kecamatan Ulaweng, Lamuru, dan Lappariaja. Rasio jaringan irigasi masing-masing kecamatan tersebut secara berurut adalah 38,71 M/Ha, 22,11 M/Ha dan 10,28 M/Ha. Selengkapnya nilai rasio jaringan irigasi masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, 2017

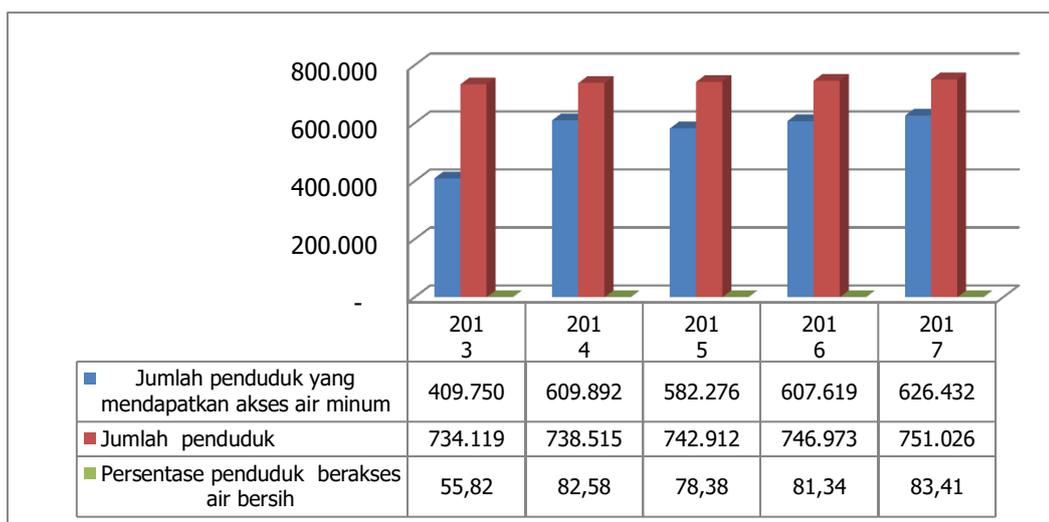
NO.	Nama Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi (m)			Total Panjang Jaringan Irigasi (m) (6=3+4+5)	Luas	
		Primer	Sekunder	Tersier		Lahan Budidaya (Ha)	Rasio (m/ha) (8=6/7)
1	Bonto Cani	22.976	2.010	-	24.986	2.695	9,27
2	Kahu	3.370	-	-	3.370	8.120	0,42
3	Kajuara	881	-	-	881	3.585	0,25
4	Salomekko	341	-	-	341	3.963	0,09
5	Tonra	2.070	3.620	-	5.690	2.426	2,35
6	Patimpeng	2.306	-	-	2.306	4.082	0,56
7	Libureng	19.364	1.877	-	21.241	10.016	2,12
8	Mare	2.231	1.171	-	3.402	4.877	0,70
9	Sibulue	369	752	-	1.121	5.541	0,20
10	Cina	24.573	9.695	-	34.268	3.672	9,33
11	Barebbo	12.619	5.720	-	18.339	5.248	3,49
12	Ponre	11.861	4.036	-	15.897	2.701	5,89
13	Lappariaja	49.451	8.458	-	57.909	5.634	10,28
14	Lamuru	48.031	3.744	-	51.775	2.342	22,11
15	Tellu Limpoe	16.047	-	-	16.047	2.105	7,62
16	Bengo	26.722	11.842	-	38.564	7.148	5,40
17	Ulaweng	31.089	3.598	-	34.687	896	38,71
18	Palakka	14.388	4.981	-	19.369	2.654	7,30
19	Awangpone	2.490	-	-	2.490	5.622	0,44
20	Tellu Siattienge	18.762	2.729	-	21.491	4.856	4,43
21	Amali	3.474	5.038	-	8.512	1.138	7,48
22	Ajangale	-	-	-	-	6.134	-
23	Dua Boccoe	17.978	1.720	-	19.698	6.492	3,03
24	Cenrana	4.162	-	-	4.162	3.814	1,09
25	Tr Barat	-	-	-	-	1.640	-
26	Tanete Riattang	667	3.988	-	4.655	1.210	3,85
27	Tr Timur	-	-	-	-	2.150	-
	Jumlah	336.222	74.979	-	411.201	110.761	3,71

Sumber: Dinas PSDA Kab. Bone, 2018

2.1.3.1.3.1.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang memiliki kemampuan mengakses air minum di Kabupaten Bone cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2013 persentase penduduk yang mampu mengakses air bersih/minum hanya 55,82 persen, tetapi meningkat menjadi 82,58 persen pada tahun 2014. Kondisi ini tidak bertahan lama sehingga pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 78,38 persen. Meskipun demikian pada tahun 2016, jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum terus meningkat samapai tahun 2017.

Grafik 2.56
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

Kemampuan akses air minum di wilayah perkotaan termasuk baik karena persentase jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum diatas (90%). Penduduk di wilayah perkotaan termasuk Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang. Beberapa kecamatan lainnya yang masih rendah kemampuan mengakses air bersih (<70%) adalah Kecamatan Cina, Libureng, Tonra dan Bontocani. Kecamatan ini sering mengalami kesulitan mengases air minum terutama pada musim kemarau.

Tabel. 2.34
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Bontocani	15.719	10.661	67,82
2	Kahu	38.761	29.086	75,04
3	Kajuara	36.435	26.357	72,34
4	Salomekko	15.539	11.418	73,48
5	Tonra	13.651	8.464	62,00
6	Patimpeng	16.577	14.843	89,54
7	Libureng	29.908	20.819	69,61
8	Mare	26.733	22.493	84,14
9	Sibulue	34.206	24.002	70,17
10	Cina	26.449	18.178	68,73
11	Barebbo	27.580	25.332	91,85
12	Ponre	13.873	13.532	97,54
13	Lappariaja	23.824	18.163	76,24
14	Lamuru	24.969	18.832	75,42
15	TelluLimpoe	14.097	12.653	89,76
16	Bengo	25.481	22.872	89,76
17	Ulaweng	24.731	22.344	90,35
18	Palakka	22.639	20.712	91,49
19	Awangpone	29.386	22.183	75,49
20	TelluSiattinge	40.087	39.790	99,26
21	Amali	20.731	19.338	93,28
22	Ajangale	27.441	21.440	78,13
23	DuaBoccoe	30.207	23.000	76,14
24	Cenrana	24.155	22.517	93,22
25	TR Barat	48.438	45.411	93,75
26	TaneteRiattang	52.171	50.209	96,24
27	TR Timur	43.185	41.781	96,75
	Jumlah	751.026	626.432	83,41

Sumber: Data Olahan, 2018

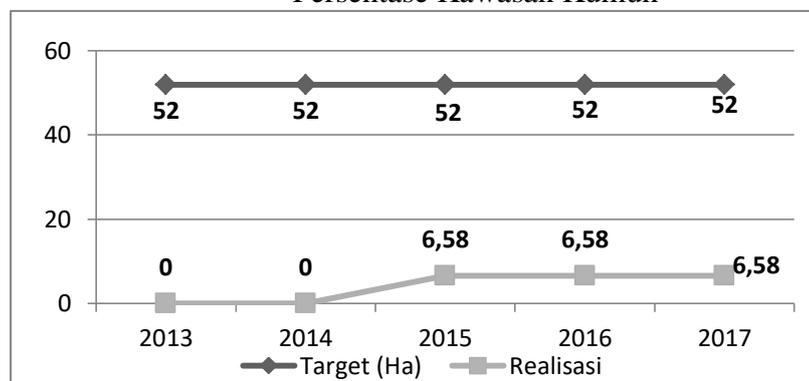
2.1.3.1.3.1.9. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kondisi awal tahun 2013 data tentang luas kawasan kumuh hasil identifikasi dan profil kekumuhan Kabupaten Bone yang di susun dan di sajikan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman mencapai 260,46 Ha yang tertuang dalam “*Slim Improvement Action Plant*” atau “Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh” kota watampone sesuai SK Bupati Bone Nomor : 373 Tahun 2014 Tanggal 07 juli 2014.

Data tentang luas kawasan umum sebanyak 260,46 Ha dapat terurai dalam capaian penanganan, berkurangnya luas tingkat kekumuhan, melalui penanganan rencana aksi tahun 2014 rencana sebesar 52 Ha namun yang dapat direalisasikan sebanyak 0 Ha, tahun 2015 rencana penanganan sebesar 52 Ha, namun realisasi sebanyak 6,58 Ha tahun 2016 rencana capaian sebanyak 52 Ha realisasi 6,58 Ha dan 2017 rencana capaian sebanyak 52 Ha namun yang terealisasi hanya seluas 6,58 Ha.

Realisasi atau capaian rencana pengurangan luas kawasan kumuh di Kabupaten Bone, disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.57
Persentase Kawasan Kumuh



Sumber : Data Diolah, 2018

Meskipun capaian realisasi belum sesuai dengan rencana namun penanganan aksi pengurangan kekumuhan secara perlahan dan bertahap dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasil yang positif mengingat bahwa penanganan aksi pengurangan kekumuhan tidak terlepas dari peran serta masyarakat, keterlibatan seluruh pengangkuh-pengangkuh kepentingan, Budaya, Sosial Ekonomi Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Kesejahteraan, Permasalah Lahan-lahan, Fungsi Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Ruang, serta Luas Satuan Ha penganan sehingga tidak menimbulkan kekumuhan baru.

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

2.1.3.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. RTH dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bone menyebar pada berbagai kecamatan dengan luas yang bervariasi antar kecamatan. Total RTH di Kabupaten Bone seluas 911,26 Ha dimana luasan paling banyak di Kecamatan Bontocani dan Tonra masing-masing 92,67 Ha dan 40,064 Ha. Ruang terbuka hijau paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang dengan luasan masing-masing 9,776 Ha dan 4,758 Ha.

Tabel 2.35
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, 2017

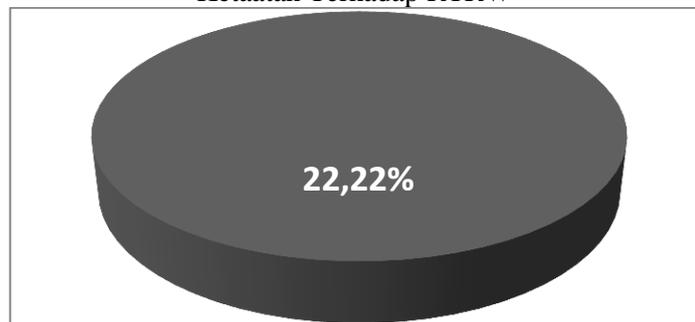
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km ²)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km ²)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Bontocani	463,35	46,21	92,670	2,00
2	Kahu	189,50	23,43	37,900	1,61
3	Kajuara	124,13	20,37	24,826	1,21
4	Salomekko	84,91	11,45	16,982	1,48
5	Tonra	200,32	21,13	40,064	1,89
6	Patimpeng	130,47	18,61	26,094	1,40
7	Libureng	344,25	24,21	68,850	2,84
8	Mare	263,50	17,48	52,700	3,01
9	Sibulue	155,80	20,32	31,160	1,53
10	Cina	147,50	19,74	29,500	1,49
11	Barebbo	114,20	18,62	22,840	1,22
12	Ponre	293,00	20,54	58,060	2,82
13	Lappariaja	138,00	21,36	27,600	1,29
14	Lamuru	208,00	20,63	41,600	2,01
15	TelluLimpo	318,10	22,41	63,620	2,83
16	Bengo	164,00	21,14	32,800	1,55
17	Ulaweng	161,67	28,55	32,334	1,13

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas wilayah ber HPL/HGB (Km ²)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km ²)	Rasio Ruang Terbuka Hijau
18	Palakka	115,32	19,60	23,064	1,17
19	Awangpone	110,70	14,38	22,140	1,53
20	TelluSiattinge	159,30	24,84	31,860	1,28
21	Amali	119,13	16,63	23,826	1,43
22	Ajangale	139,00	13,28	27,800	2,09
23	DuaBoccoe	144,90	15,67	28,980	,84
24	Cenrana	143,60	12,36	28,720	2,32
25	TR Barat	53,68	8,44	10,736	1,27
26	TaneteRiattang	23,79	3,26	4,758	1,45
27	TR Timur	48,88	7,71	9,776	1,26
	Jumlah	4,559	512,37	911,260	1,77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018.

2.1.3.1.3.2.2. Ketaatan Terhadap RTRW

Grafik 2.58
Ketaatan Terhadap RTRW



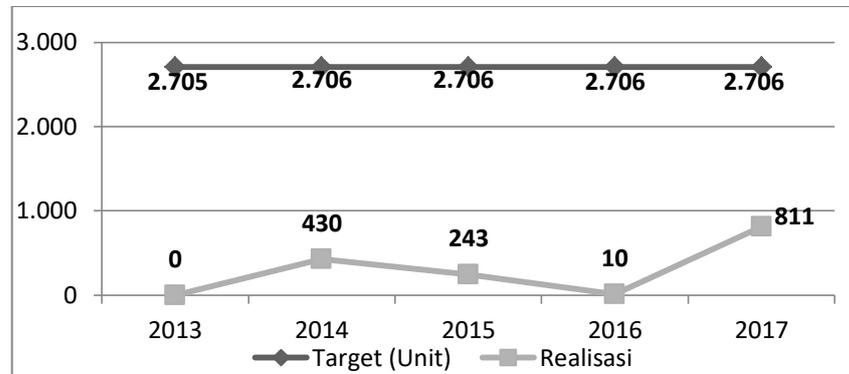
Sumber : Dokumen RTRW dan KDTR, 2018

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kondisi awal tahun 2013 data tentang rumah tidak layak huni sebanyak 13.529 unit dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 2705 unit namun yang dapat di realisasikan sebanyak 430 unit rumah tahun 2015 rencana capaian sebesar 2706 unit realisasi sebanyak 243 unit rumah tahun 2016 rencana capaian sebanyak 2706 unit realisasi 10 unit dan 2017 rencana capaian sebanyak 2706 unit namun realisasi sebanyak 81 unit.

Berikut lampiran capaian rencana realisasi rumah tidal layak huni

Grafik 2.59
Persentase RTLH



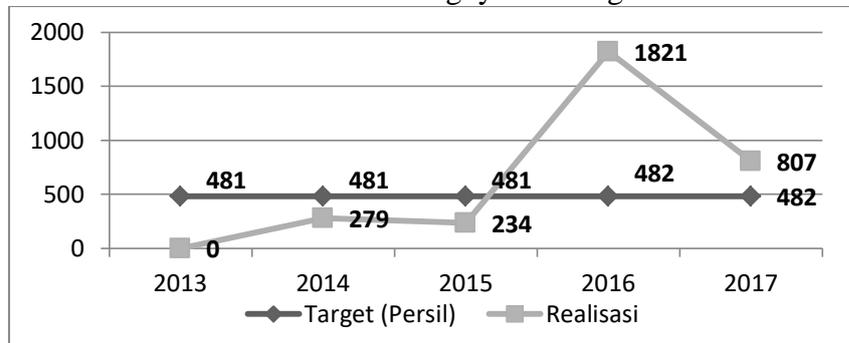
Sumber : Data Diolah, 2018

Capaian perbaikan rumah tidak layak huni secara grafik menunjukkan fluktuasi capaian mengingat kegiatan ini di pengaruhi oleh pembiayaan baik melalui APBN, DAK dan DAU. Tahun 2016 terjadi penurunan akibat pembiayaan hanya melalui APBD sementara tahun 2013,2014 dan 2017 menunjukkan peningkatan capaian meskipun belum optimal mengingat kendala/hambatan yang mempengaruhi realisasi.

Kondisi awal tahun 2013 data tentang data rumah formal (*Backlog*) sebanyak 923 unit dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 481 unit namun yang dapat di realisasikan sebanyak 279 unit rumah, tahun 2015 rencana capaian sebesar 481 unit dan terealisasi sebanyak 234 unit rumah. Tahun 2016 rencana capaian sebanyak 481 unit dan realisasinya mengalami peningkatan sebanyak 1821 unit dan tahun 2017 rencana capaian sebanyak 482 unit dan telah realisasinya sebanyak 807 unit tetap melampaui target.

Capaian rencana dan realisasi berkurangnya backlog rumah formal di sajikan dalam grafik di bawah ini

Grafik 2.60
Persentase Kurangnya Backlog



Sumber : Data Diolah, 2018

Dengan capaian tersebut dan terlihat pada grafik menunjukkan peningkatan capaian target kurung waktu tahun 2014 hingga 2017 yang secara perlahan melampaui rencana pencapaian.

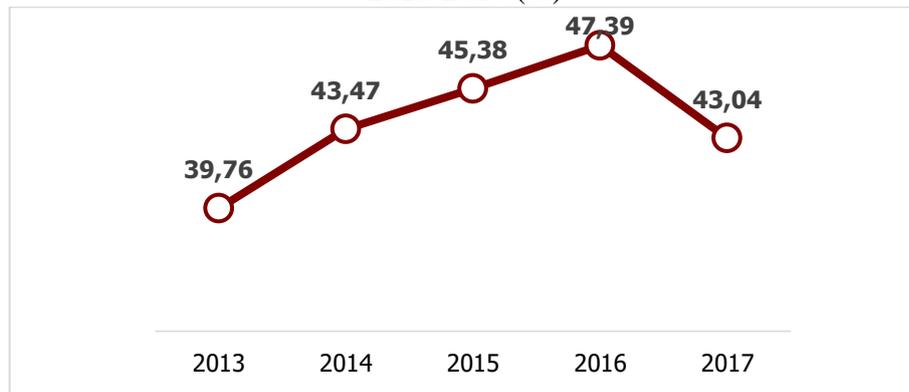
2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Salah satu fungsi negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan menjamin terwujudnya ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan petugas perlindungan masyarakat dan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bone nampaknya mampu menaikkan angka cakupan petugas perlindungan masyarakat, kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2013, cakupan petugas perlindungan masyarakat hanya 39,76 persen, sebelum akhirnya secara perlahan mengalami kenaikan menjadi 43,47 persen tahun 2014 dan 45,38 persen tahun 2015. Angka cakupan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten Bone mencapai angka tertinggi yaitu 47,39 persen tahun 2016 sebelum menurun tahun 2017 sebesar 43,04 persen. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun, pemerintah daerah menambah jumlah petugas

perlindungan masyarakat untuk memastikan kehidupan sosial berjalan aman dan tertib.

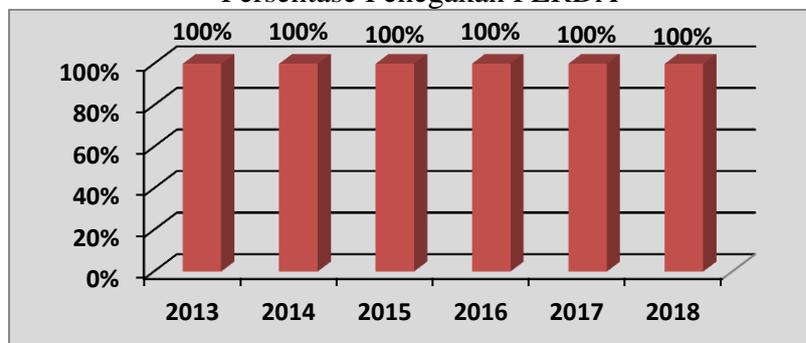
Grafik 2.61
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bone,
2013-2017 (%)



Sumber: Data Olahan, 2018

2.1.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Grafik 2.62
Persentase Penegakan PERDA



Sumber : Data Diolah, 2018

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali kota).

Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Jumlah penduduk yang semakin besar, memicu banyaknya masalah lingkungan. Indikatornya adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Keadaan tertib adalah suatu keadaan dimana semua keadaan berjalan seperti apa yang diharapkan oleh semua masyarakat. Agar tercapai perlu adanya peraturan yang erat hubungannya dengan hukum.

Yang dimaksud dengan K3 adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

- Beberapa kasus yang berkaitan dengan ketertiban :
 - ✓ Meningkatnya gangguan keamanan dan kriminalitas
 - ✓ Maraknya perkelahian pelajar
 - ✓ Maraknya peredaran penyalahgunaan Narkoba
 - ✓ Seringnya melanggar rambu-rambu lalu lintas
 - ✓ Parker kendaraan tidak teratur
 - ✓ Budaya antri yang belum terbiasa
- Masalah ketertiban yang sering terjadi :
 - ✓ Rumah kotor
 - ✓ Toilet umum yang tidak bersih
 - ✓ Saluran air yang tidak lancar
 - ✓ Tidak tersedianya air bersih
 - ✓ Kurangnya udarah bersih
 - ✓ Kurangnya fasilitas WC umum

Keindahan lingkungan adalah lingkungan yang nyaman, estetik dan professional.

Permasalahan keindahan dikota adalah kurangnya ruang terbuka hijau (RPH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan.

Mari kita data permasalahan K3 di Kabupaten Bone

- ✓ Macet semakin sering
- ✓ PKL yang tidak tertib
- ✓ Banyak sampah berserakan
- ✓ Para pengguna jalan yang tidak tertib
- ✓ Lahan hijau yang makin sempit
- ✓ Banjir di beberapa tempat
- ✓ Jalan tanpa trotoar dan jembatan penyebrangan

2.1.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel 2.36

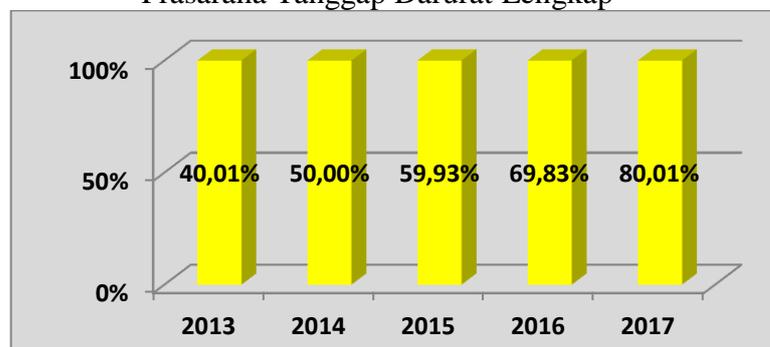
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

No.	Tahun	Jumlah Korban Dievakuasi	Jumlah Korban (KK)	Persentase
1	2013	2.454	6.134	40,01
2	2014	3.067	6.134	50,00
3	2015	184	307	59,93
4	2016	125	179	69,83
5	2017	3.185	3.981	80,01

Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.63

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap



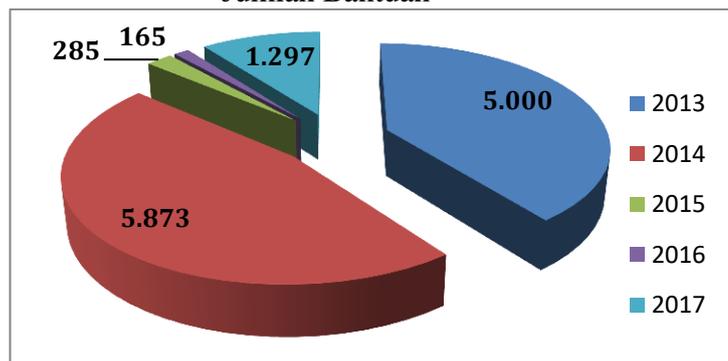
Sumber : Data Diolah, 2018

Tabel 2.37
 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa
 Tanggap Darurat.

No.	Tahun	Jumlah Bantuan	Jumlah Korban (KK)	Persentase
1	2013	5.000	6.134	81,51
2	2014	5.873	6.170	95,19
3	2015	285	307	92,83
4	2016	165	179	92,18
5	2017	1.297	1.456	89,08

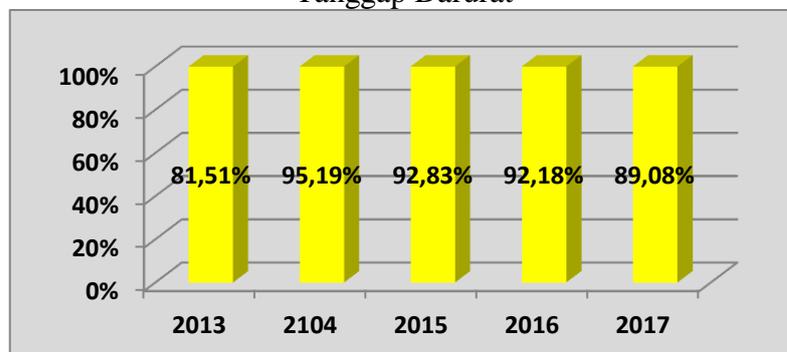
Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.64
 Jumlah Bantuan



Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.65
 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa
 Tanggap Darurat



Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah korban bencana tiap tahun. Dilihat dari tabel persentase dimana pada tahun 2013 jumlah korban sebanyak 6.134 dengan persentase sebesar 81,51%, tahun 2014 jumlah korban sebanyak 6.170 dengan persentase 95,9%, tahun 2015 jumlah korban sebanyak 307 dengan persentase sebesar 92,83%, tahun 2016 jumlah korban sebanyak 179 dengan persentase sebesar 92,18%, tahun 2017 jumlah korban sebanyak 1.456 dengan persentase sebesar 89,08%. Berdasarkan hasil persentase diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah korban penerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

2.1.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

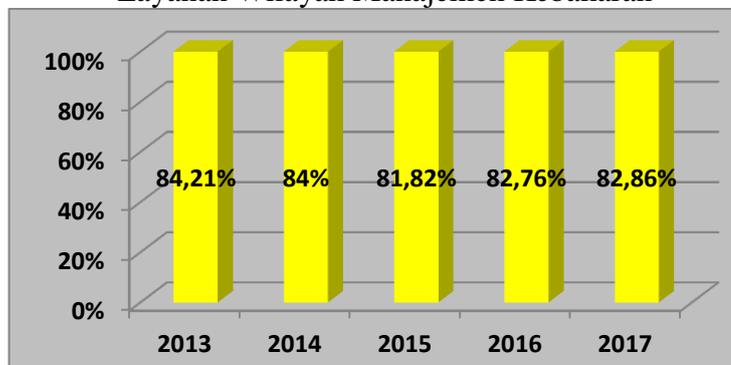
Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry.

Tabel 2.38
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran

NO	TAHUN	JUMLAH WMK	JUMLAH LUAS WMK
1.	2013	16	19
2.	2014	21	25
3.	2015	27	33
4.	2016	24	29
5.	2017	29	35

Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.66
 Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rat) Daerah
 Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran



Sumber : Data Diolah, 2018

Pada tahun 2013 terjadi kebakaran sebanyak 53 kali kebakaran yang terdiri dari 19 kali di dalam WMK dan 34 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 16 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran sebanyak 64 kali kebakaran yang terdiri dari 25 kali di dalam WMK dan 39 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 21 kejadian kebakaran. Persentase capaian tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK pada tahun 2013 dan 2014 di atas 80 % karena hanya ada 1 WMK yaitu WMK pada pemukiman perkotaan.

Pada Tahun 2015 terjadi kebakaran sebanyak 64 kali kebakaran yang terdiri dari 33 kali di dalam WMK dan 31 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 27 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2016 terjadi kebakaran sebanyak 42 kali kebakaran yang terdiri dari 29 kali di dalam WMK dan 13 kali di luar jangkauan WMK. Dan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 24 kejadian kebakaran.

Pada Tahun 2017 terjadi kebakaran sebanyak 63 kali kebakaran yang terdiri dari 35 kali didalam WMK dan 28 kali diluar jangkauan

WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 29 kejadian kebakaran.

2.1.3.1.6. Sosial

2.1.3.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Keterlibatan negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kepedulian pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam Permensos No.8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karenasuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Grafik 2.67
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



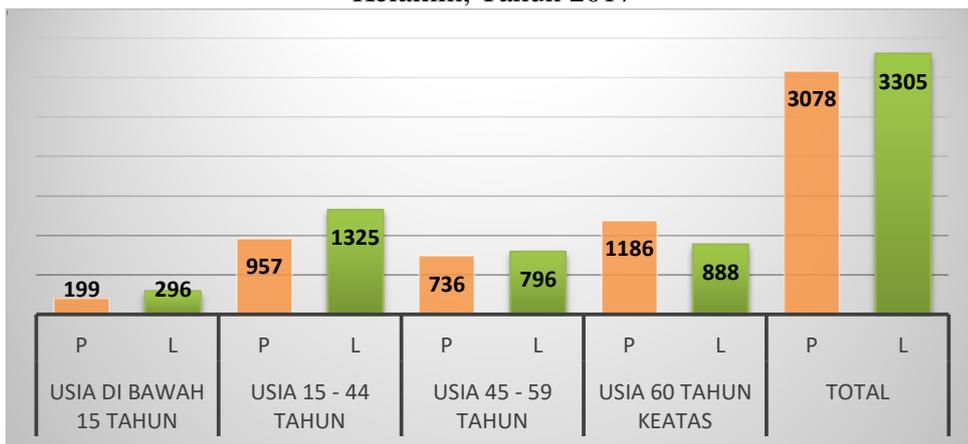
Sumber: Data Olahan, 2018

Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, pemerintah daerah Kabupaten Bone memperluas cakupan pemberian bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori PMKS. Tahun 2013, proporsi PMKS yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah hanya 32,95 persen, sehingga masih ada 67,05 persen masyarakat PMKS belum

mendapatkan bantuan pemerintah. Angkanya semakin memburuk pada tahun 2014, ketika persentase PMKS yang mendapat bantuan pemerintah daerah turun ke 26,44 persen. Pemerintah Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan bantuan mereka terhadap masyarakat PMKS secara signifikan tahun 2015 hingga mencapai 92,66 persen atau hanya tersisa 7,34 persen penduduk PMKS belum mendapat bantuan pemerintah daerah, namun sempat sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 90,69 persen. Akhirnya pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bone mencatat persentase penduduk PMKS yang dibantu sebesar 91,03 persen. Meski angkanya lebih rendah dari capaian tahun 2015, namun pemerintah daerah sudah menunjukkan keseriusannya untuk membantu masyarakat PMKS di Kabupaten Bone.

Salah satu kelompok masyarakat yang termasuk PMKS adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bone, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2017 sebanyak 6.383 orang yang terdiri dari 3.078 (48 persen) perempuan dan 3.305 (52 persen) laki-laki.

Grafik 2.68
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone Menurut Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2017



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.1.6.2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Semakin meluasnya cakupan pemberian bantuan kepada penduduk PMKS di Kabupaten Bone berpengaruh terhadap angka persentase PMKS yang tertangani. Jika angka Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan proporsi antara jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan, angka persentase PMKS tertanganimerupakan proporsi dari jumlah PMKS tertangani dibandingkan dengan total PMKS.

Grafik 2.69
Persentase PMKS Yang Tertangani di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

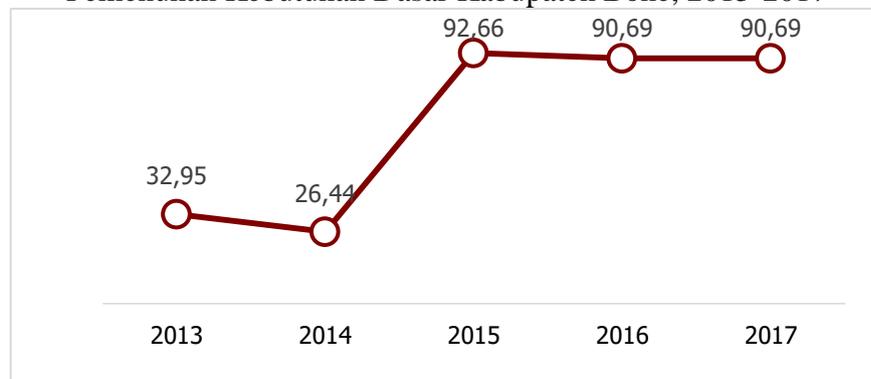
Tren angka persentase persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Bone selama lima tahun terakhir mengikuti perubahan persentase pemberian bantuan kepada PMKS. Awalnya, hanya 17,85 persen PMKS di Kabupaten Bone yang sudah mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sehingga masih ada 82,15 persen PMKS belum ditangani, namun semakin menurun di tahun 2014 sebesar 16,27 persen. Kenaikan signifikan persentase PMKS tertangani di Kabupaten Bone terjadi di tahun di tahun 2015 mencapai 57 persen. Pada tahun ini lebih dari 1/2 penduduk PMKS di Kabupaten Bone berhasil mendapat penanganan dari pemerintah daerah, sebelum sedikit menurun di tahun 2016 sebesar 55,49 persen. Kabupaten Bone berhasil memperluas cakupan PMKS tertangani di tahun 2017 dengan

mencatat angka sebesar 62,69 persen, sekaligus menjadi caaian tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2017. Artinya hanya tersisa lebih dari 1/3 penduduk PMKS yang belum ditangani oleh pemerintah daerah.

2.1.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sebagian besar bantuan pemerintah daerah terhadap penduduk PMKS di Kabupaten Bone adalah bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kementerian Sosial RI mendefinisikan bantuan sosial sebagai semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Grafik 2.70
Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

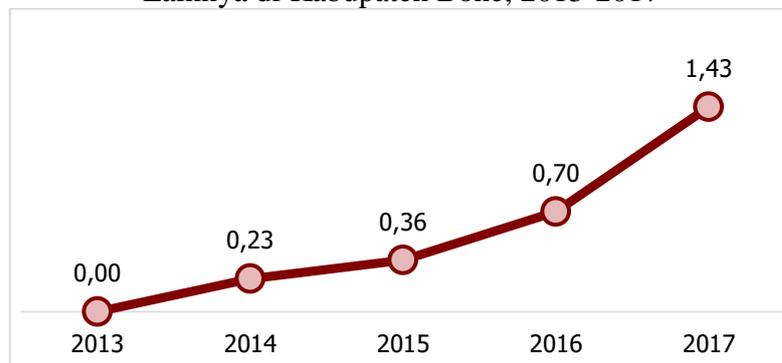
Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada penduduk PMKS. Meski sempat mengalami penurunan angka persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari 32,95 persen tahun 2013 ke 26,44 persen tahun 2014, namun keseriusan pemerintah Kabupaten

Bone membantu masyarakat PMKS skala kabupaten berhasil menaikkan angka tersebut hingga mencapai 92,66 persen, tertinggi dalam rentan waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, angka persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bone turun 90,69 persen dan tetap bertahan hingga tahun 2017.

2.1.3.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.

Tidak hanya menysasar individu PMKS, pemerintah daerah juga menargetkan pemberian bantuan kepada panti sosial atau kelompok sosial ekonomi yang layak mendapat bantuan bantuan pemberdayaan sosial. Dalam lima terakhir, angka persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Bone konsisten meningkat, meski angkanya masih relatif rendah.

Grafik 2.71
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

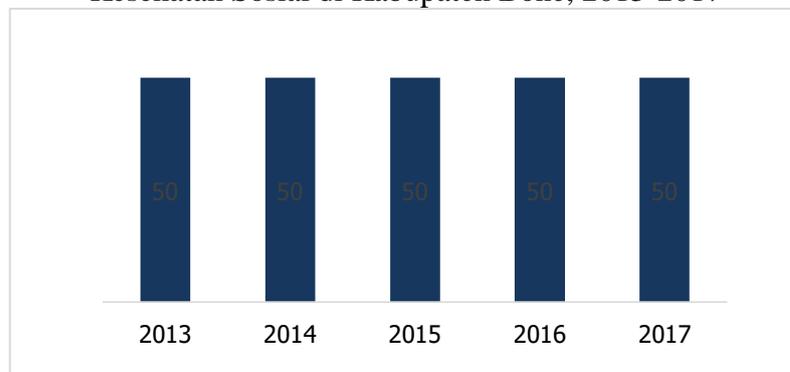
Tiga tahun selanjutnya angkanya terus naik dari 0,36 persen menjadi 0,70 persen, dan akhirnya menyentuh 1,43 persen masing-

masing di tahun 2015, 2016, dan 2017. Meskipun begitu, masih ada sekitar 98,57 persen panti sosial di Kabupaten Bone yang belum menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya.

2.1.3.1.6.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Salah satu instansi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat PMKS adalah panti sosial. Berdasarkan Kepmensos No.50/HUK/2004, panti sosial diartikan sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Karena pentingnya peran panti sosial, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial menjadi salah satu indikator menilai kemampuan pemberian layanan.

Grafik 2.72
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



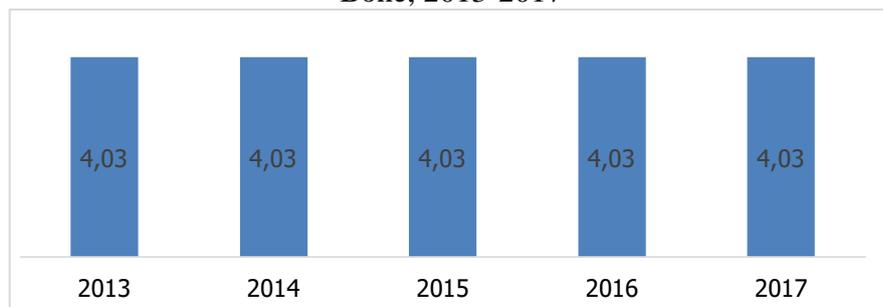
Sumber: Data Olahan, 2018

Di Kabupaten Bone, tidak semua panti sosial memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Sejak tahun 2013 hingga 2015 hanya 50 persen dari total panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial. Jika jumlah masyarakat PMKS bertambah, maka proporsi panti sosial yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial seharusnya juga mengalami kenaikan.

2.1.3.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Selain panti sosial, ketersediaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial juga penting bagi PMKS. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat merupakan sistem kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Menurut Kemensos RI, wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas local, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat local, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi local dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Grafik 2.73
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

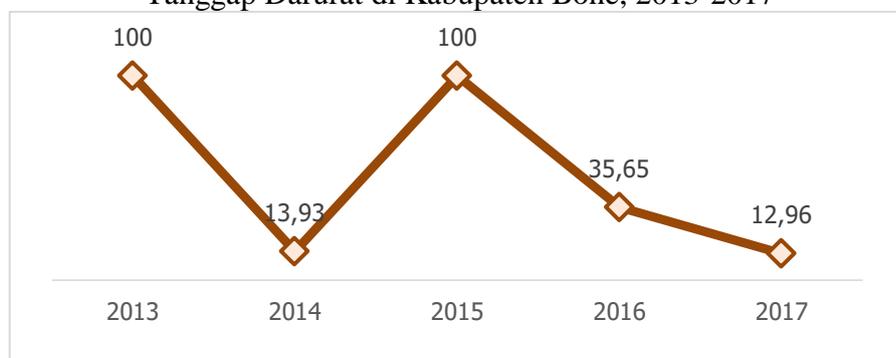
Sama halnya dengan angka persentase panti yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan sosial, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan setidaknya dari 2013 hingga 2017. Angka 4,03 persen menunjukkan bahwa dari sekian

banyak WKBSM di Kabupaten Bone hanya 4,03 persen yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

2.1.3.1.6.7. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kabupaten Bone meruakan salah satu daerah yang mengalami beberapa bencana alam tahun 2017. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone, terdapat empat jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu kebakaran, puing beliung, banjir, dan longsor dengan masing-masing jumlah kejadian sebanyak 52, 10, 8, 1 kejadian. Menurut BPS, jumlah korban paling banyak mencapai 3.825 karena bencana alam banjir. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam membantu penduduk yang menjadi korban bencana dapat dilihat dari angka persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Grafik 2.74
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

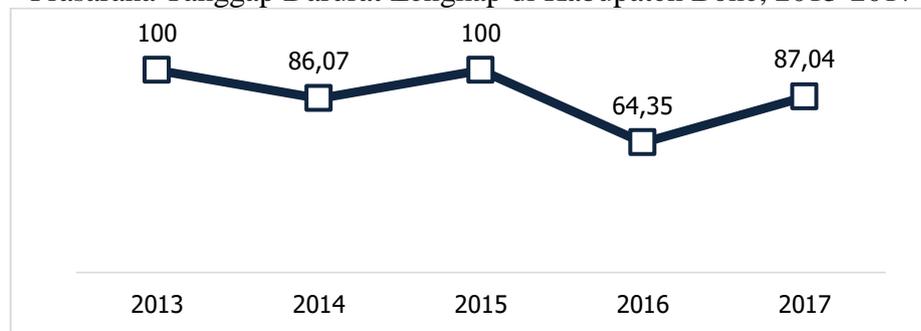
Dalam rentan waktu 2013 sampai 2017, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bone berfluktuasi. Setelah mencapai angka 100 persen tahun 2013, satu tahun kemudian angkanya menurun signifikan menjadi 13,93 persen. Ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut ada sekitar 86,07 persen masyarakat yang menjadi korban bencana dan seharusnya mendapat bantuan sosial tapi tidak memperoleh bantuan.

Tahun 2017, angkanya kembali mencapai 100 persen, sebelum akhirnya di dua tahun terakhir konsisten mengalami penurunan dari 35,65 persen menjadi 12,96 persen.

2.1.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Banjir merupakan salah satu bencana paling besar yang seringkali terjadi di Kabupaten Bone dan membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk mengevakuasi penduduk yang terdampak. Upaya pemerintah daerah dalam mengevakuasi korban bencana nampaknya mengalami perubahan setiap tahun sepanjang tahun 2013 hingga 2017. Hanya di tahun 2013 dan 2015 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di kabupaten bone mencapai 100 persen, artinya semua korban berhasil di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun di tahun 2014 jumlahnya turun ke 86,07 persen, dan kemudian menurun lagi di tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 64,35 persen dan 87,04 persen. Ada dua factor penting penyebab menurunnya angka persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Bone yaitu jangkauan lokasi bencana dan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia.

Grafik 2. 75
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bone, 2013-2017

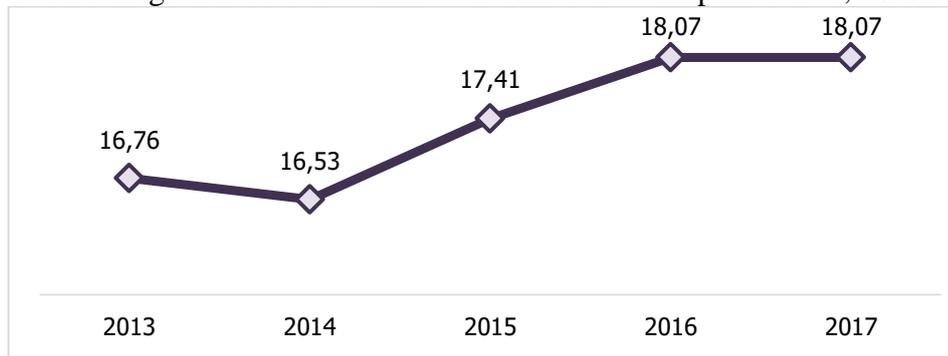


Sumber: Data Olahan, 2018

2.1.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tidak semua penduduk dalam satu daerah memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sebagian penduduk harus mendapatkan bantuan pemerintah agar memudahkan mereka menjalankan kehidupan sosial secara lebih baik. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan kelompok rentan, di antaranya adalah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia. Untuk melaksanakan kehidupan normal ditengah masyarakat, mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah jaminan sosial.

Grafik 2.76
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Olahan, 2018

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pemerintah Kabupaten Bone, dalam lima tahun terakhir, mampu menaikkan angka persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak mereka dan terus memperluas cakupannya. Meskipun persentasenya sempat menurun dari 16,76 persen tahun

2013 ke 16,53 persen tahun 2014 namun di tiga tahun terakhir konsisten menaik. Pada tahun 2015 sebanyak 17,41 persen penduduk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial telah mendapatkan bantuan jaminan sosial, dan jumlahnya terus bertambah menjadi 18,07 persen tahun 2016 dan 2017. Meskipun trennya cenderung naik, namun persentasenya masih relatif rendah, karena masih terdapat 81,93 persen penduduk rentan belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Bone.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun



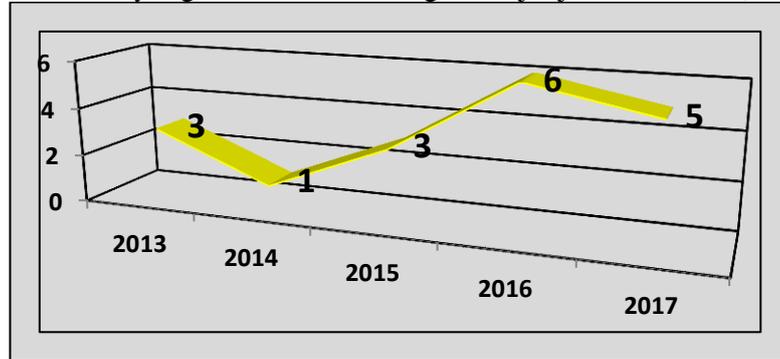
Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2018

Besaran angka sengketa diperusahaan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai, aturan, hak, kewajiban, kesejahteraan dan hak maupun kewajiban pekerja lainnya.

2.1.3.2.1.2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Grafik 2.78

Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)



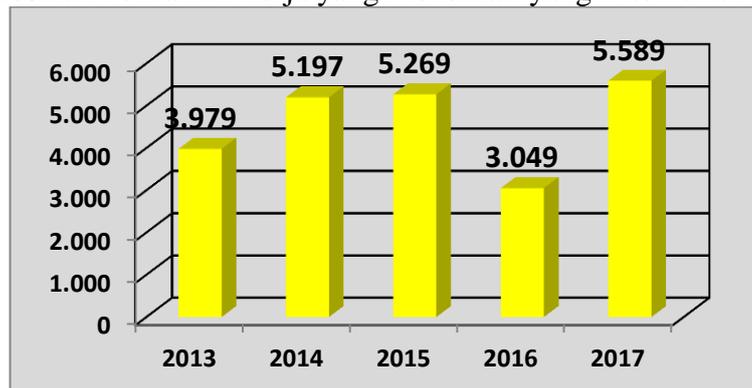
Sumber : Bid. HI Disnaker Bone

Besaran sengketa yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tidak dinamis dikarenakan jumlah sengketa pada perusahaan, dan tergantung dari bagaimana perusahaan maupun pekerja memiliki jalur apa dalam penyelesaian perselisihan.

2.1.3.2.1.3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Grafik 2.79

Besaran Pencarian Kerja yang Mendaftar yang Ditemukan



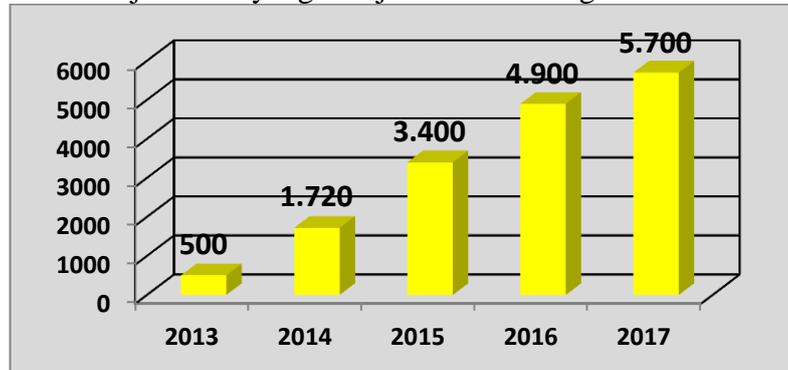
Sumber : Bid. Penempatan Disnaker Bone, 2018

Besaran pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dari 2013-2017 meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini di sebabkan karena kurang perusahaan atau lapangan kerja yang terbuka.

2.1.3.2.1.4. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Grafik 2.80

Besaran Pekerja Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek



Sumber : Bid. HI Disnaker Bone, 2018

Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek dari tahun ketahun selalu meningkat.

2.1.3.2.1.5. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan suatu daerah. Oleh karena itu, rasio perimbangan jumlah lulusan Kesarjanaan untuk strata satu, strata dua, dan strata tiga memberikan indikasi kemajuan suatu daerah. Keterbatasan data dan informasi terkait kebutuhan analisis ini menjadi penting untuk diperhatikan dan diadakan. Jumlah lulusan sarjana terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah yaitu berkisar 2.89% – 3.08% ($\pm 723,745$ jiwa).

Tabel 2.39

.Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bone, 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlahlulusan S1					
2.	Jumlahlulusan S2					
3.	Jumlahlulusan S3					
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	20,940	23,586	20,940	22,768	22,313
5	Jumlah penduduk	724,905	728,737	724,905	738,515	723,745
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2.89	3.24	2.89	3.08	3.08

Sumber : BPS Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Partisipasi tersebut diperlukan karena perempuan diyakini besar peranannya terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan. Pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar agar menghasilkan persamaan derajat yang setara antara perempuan dan kaum laki-laki. Selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, sehingga peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Salah satu indikator peran perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja. Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah dapat dilihat pada seberapa banyak perempuan bekerja sebagai PNS atau menempati jabatan pada berbagai eselon.

Tabel. 2.40
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bone,
2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II	3	8	4	3	9
2	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon III	41	46	45	37	63
3	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon IV	442	455	466	468	515
4	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	6.513	6.597	6.330	6.378	5.728

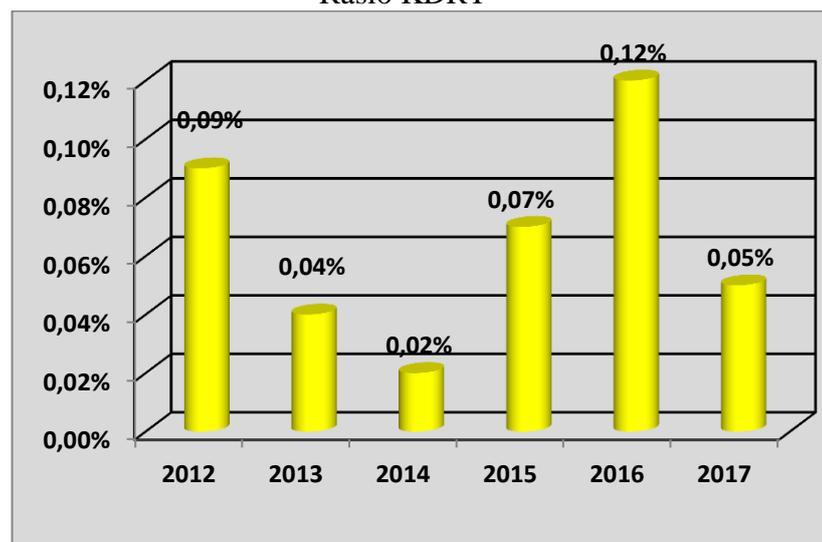
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
5	Jumlah Pekerja Perempuan					
6	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	1,663	1,69	1,621	1,634	1,464

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone, 2018

Jumlah pekerja perempuan di Pemerintah Kabupaten Bone cenderung berkurang sejak lima tahun terakhir. Pekerja perempuan yang bekerja di pemerintahan tahun 2013 sebanyak 6.513 pegawai kemudian turun menjadi 5.728 pegawai pada tahun 2017. Sedangkan pegawai perempuan yang menempati jabatan eselon IV sampai eselon II cenderung mengalami peningkatan.

2.1.3.2.2.2. Rasio KDRT

Grafik 2.81
Rasio KDRT



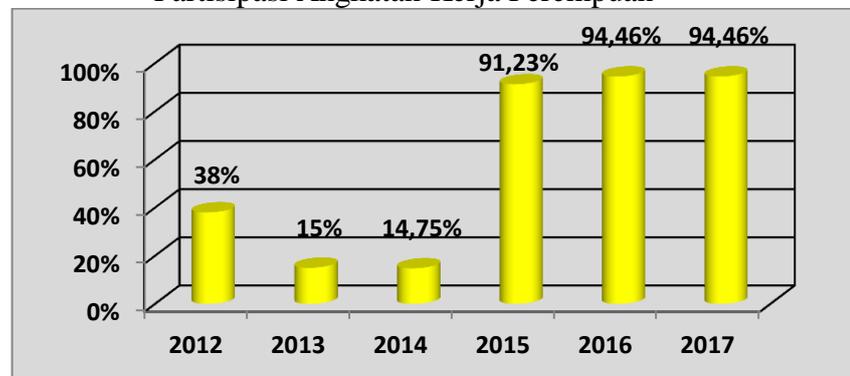
Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan data dalam Tabel diatas perlu dijelaskan bahwa jumlah KDRT pada Tahun 2014 cenderung menurun yaitu hanya 41 kasus yang tercatat dibandingkan pada Tahun 2012 dan 2013 yang mencapai 59 kasus dimana jumlah rumah tangga pada tahun 2013 sebanyak 166.136 dan pada Tahun 2014 sebanyak 230.721 rumah tangga. Pada Tahun 2013 rasio KDRT adalah sebesar 0,04 % sedangkan pada Tahun 2014 rasio KDRT kekerasan sebanyak 125 kasus dan jumlah rumah tangga sebanyak 162.568, dan di Tahun 2016

rasio KDRT mengalami peningkatan yaitu mencapai 0,12 % dimana jumlah kekerasan tercatat 204 kasus dengan jumlah rumah tangga sebanyak 158.202. dan selanjutnya di Tahun 2017 tercatat 87 kasus atau 0,05 % dengan penurunan angka KDRT yang cukup signifikan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.3.2.3. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Grafik 2.82
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan data table di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 dimana pada posisi 94,46 % dimana peningkatan signifikan dilihat dari capaian dan angka perempuan yang ada di kabupaten Bone. Artinya bahwa angkatan kerja perempuan lebih banyak dibandingkan angkatan kerja laki-laki.

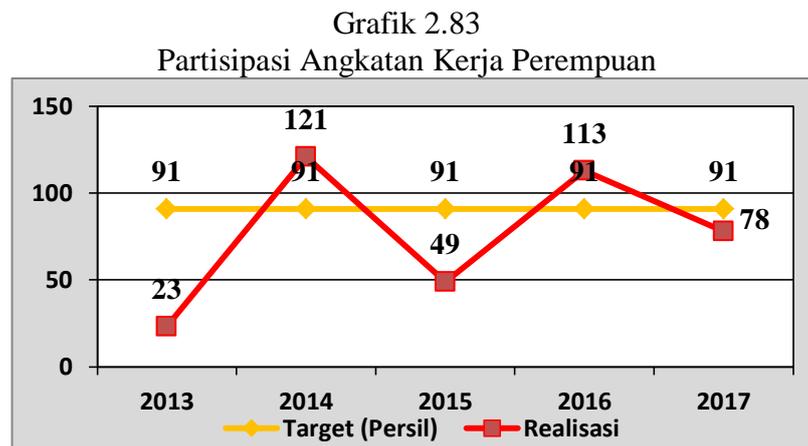
2.1.3.2.3. Pertanian

2.1.3.2.3.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kondisi awal tahun 2013 data tentang tersertifikasinya persil-persil tanah milik pemerintah kabupaten sebanyak 456 persil untuk kurung waktu tahun 2013-2016 dan terurai dalam capaian tahun 2014 rencana sebesar 91 persil dan realisasi sebanyak 121 persil, tahun 2015 rencana capaian sebesar 91 persil realisasi sebanyak 49 persil, tahun 2016 rencana capaian sebanyak 91 persil realisasi sebanyak 113

dan 2017 rencana capaian sebanyak 91 persil namun yang terealisasi sebanyak 78 persil dalam proses sertifikasi.

Berikut capaian rencana dan realisasi sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Bone, yang disajikan dari grafik di bawah ini.



Sumber : Data Diolah, 2018

Capaian sertifikasi tanah menunjukkan peningkatan pencapaian peningkatan meskipun pariatif capaian dari tahun ketahun diatas rencana mengingat masalah lahan banyak dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal seperti lahan dan sejarah tanah.

Sementara untuk fasilitasi sengketa tanah telah diupayakan dan terselesaikan tahun 2013 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 7 persil dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 7 persil. Tahun 2014 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 5 persil dan ralisasi capaian penyelesaian masalahi sengketa selesai sebanyak 5 persil. Tahun 2015 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 2 persil dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 2 persil. Tahun 2016 total sengketa tanah yang terrjadi sebanyak 0 persi dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 0 persil. Tahun 2017 total sengketa tanah yang terjadi sebanyak 1 persi dan realisasi capaian penyelesaian masalah sengketa selesai sebanyak 1 persil.

2.1.3.2.4. Lingkungan Hidup

2.1.3.2.4.1. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Pengukuran air sungai dilakukan dengan mengambil sample air di bagian Hulu, bagian tengah dan bagian hilir kemudian hasil pengujiannya diambil nilai rata-rata sehingga diperoleh data indeks kualitas air.

Tabel 2.41
Peningkatan Indeks Kualitas Air

NO	LOKASI	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Air Sunga Walanae	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
2.	Air Sunag Teko	Cemar Sedang				
3.	Air Sungai Salokae	Cemar Ringan				
4.	Air Sungai Palakka	Baik	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
5.	Air PDAM	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
6.	Air Laut Bajoe	Cemar Ringan				

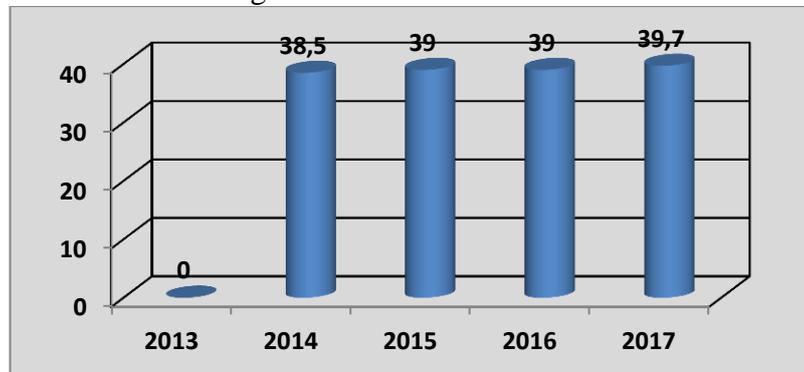
Sumber : Analisis Laboratorium Lingkungan DLH, 2018

2.1.3.2.4.2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Pengukuran kualitas udara dilakukan di beberapa titik yang menggambarkan wilayah pemukiman, wilayah industry, wilayah padat transportasi dan wilayah komersil.

Grafik 2.84
Peningkatan Indeks Kualitas Udara



Sumber : Analisis Laboratorium Lingkungan DLH, 2018

Kategori :

0 – 50 : Baik

51 – 100 : Sedang

101 – 199 : Tidak Sehat

200 – 299 : Sangat Tidak Sehat

300 ≤ : Berbahaya

2.1.3.2.4.3. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh Pemerintah di tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menyusun RPPLH sesuai dengan UU No. 32/2009 disyaratkan ada instrument KLHS dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal).

Dalam kurun waktu 2013 – 2017 Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1.3.2.4.4. Timbulan Sampah yang Ditangani

Tabel 2.42
Timbulan Sampah yang Ditangani

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (ton)	-	-	-	-	80.970
2.	Total timbulan sampah di 27 Kecamatan (ton)	-	-	-	-	134.950

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018

Jumlah Timbulan Sampah di 3 Kecamatan Kota yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 sebesar 98 %.

2.1.3.2.4.5. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Pada tahun 2017 sampah- sampah yang dikurangi melalui 3R yakni sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengkomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

- Komposting : 6 Ton
- Daur Ulang Bahan Baku : 0,5 Ton
- Daur Ulang Produk Kreatif : 0,5 Ton
- Biogas : 5 Ton
- Bank sampah : 1,5 Ton
- Lain-lain (Pengepul/Pencacah) : 4 ton
- Total : 17,5 Ton**

2.1.3.2.4.6. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Sejak tahun 2013 hingga Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melayani pengelolaan persampahan di 3 wilayah kecamatan kota yakni Kec. Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan tanete Riattang Timur dengan luas area 121.650 Km².

2.1.3.2.4.7. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Pola konsumsi, penambahan jumlah penduduk, dan kemajuan ekonomi menyebabkan produksi sampah di daerah terus bertambah. Jika tidak ditangani dengan baik, maka sampah bisa menjadi masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam bab tentang tugas dan kewenangan, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2017 yang tersedia terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone, tercatat jumlah volume sampah tahun tersebut mencapai 134.950 ton, namun yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah hanya 80.970 atau 60 persen dari total volume sampah. Volume sampah yang jumlahnya terus bertambah, paling besar berasal dari lima kecamatan yaitu Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu. Tercatat, tahun 2017 sebanyak 9.847 ton sampah diproduksi oleh kecamatan Tanete Riattang, 8.949 ton berasal dari Tanete Riattang Barat, 7.420 ton bersumber dari TR Timur, sebanyak 6.821 ton dan 8.365 ton datang dari Tellu Siattinge, dan Kahu. Total volume sampah yang dihasilkan di lima kecamatan tersebut mencapai 1/3 dari seluruh sampah Kabupaten Bone.

Banyaknya sampah yang diproduksi Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, dan Kahu membuat pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam menanganinya. Hanya Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur yang angka persentase penanganan sampahnya masing-masing mencapai 98,98 persen, 99,59 persen, dan 98,38 persen atau hanya sekitar kurang lebih 1 persen volume sampah tahun 2017 yang belum tertangani. Sementara di

Kecamatan Tellu Siattinge dan Kahu hanya mampu menangani 1,89 persen dan 2,57 persen dari sampah yang mereka produksi.

Tabel 2.43
 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bone
 Berdasarkan Kecamatan, 2017

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	Persentase Yang Ditangani
1	Bontocani	300	2.715,6	4,74
2	Kahu	400	8.365,8	2,57
3	Kajuara	400	5.515,15	3,11
4	Salomekko	300	2.469,6	5,16
5	Tonra	300	3.438,3	6,00
6	Patimpeng	300	5.420,25	4,68
7	Libureng	300	5.161,1	2,38
8	Mare	300	5.318,05	3,12
9	Sibulue	400	4.438,4	3,23
10	Cina	400	4.376,35	3,87
11	Barebbo	400	2.792,25	3,92
12	Ponre	100	4.234	1,54
13	Lappariaja	200	2.792,25	2,03
14	Lamuru	300	4.234	2,90
15	Tellu Limpoe	100	4.445,7	1,85
16	Bengo	300	2325,05	2,89
17	Ulaweng	200	4.4449,35	2,15
18	Palakka	300	4.989,55	2,66
19	Awangpone	300	6.007,9	2,68
20	Tellu Siattinge	300	6.821,85	1,89
21	Amali	300	3.821,55	3,37
22	Ajangale	400	4.737,7	3,63
23	Dua Boccoe	400	5.347,25	3,30
24	Cenrana	300	3.971	3,30
25	TR Barat	24.420	8.949,8	99,59

No	Kecamatan	Jumlah Sampah Yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	Persentase Yang Ditangani
26	TR Timur	20.000	7.420,45	98,38
27	Tanete Riattang	26.700	9.847,7	98,98
Total		80.970	134.950	60,00

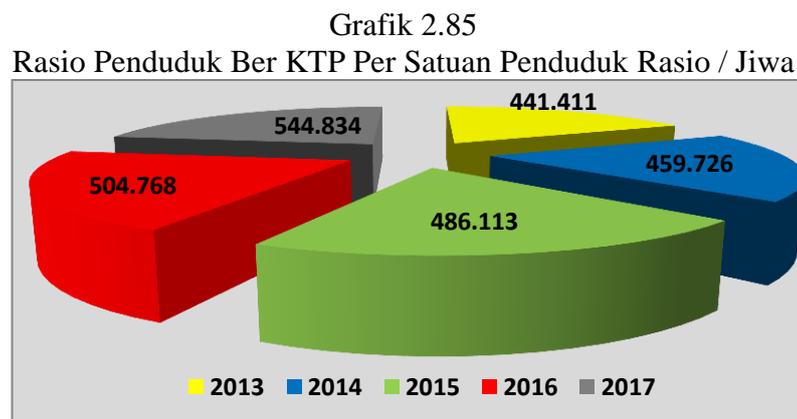
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.4.8. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota

Penilaian Program Adipura Tahun 2017, Nilai TPA Passippo 71,60 Point. Izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta yang diterbitkan tahun 2017.

2.1.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.5.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

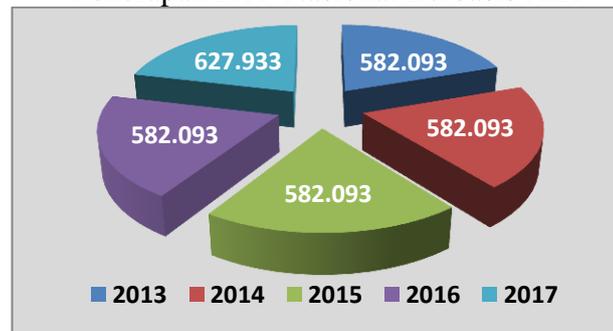


Berdasarkan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Penduduk ber KTP-el pada Tahun 2013 sebanyak 441.411 Jiwa, Tahun 2014, 459,726 Jiwa, Tahun 2015 sebanyak 486.113 Jiwa, Tahun 2016 504.768 Jiwa dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 88 %. Hal ini di sebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pelayanan keliling pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Periode 2013 – 2017. Di samping itu peningkatan ini

dipengaruhi oleh faktor kebutuhan masyarakat terhadap Dokumen Kependudukan untuk identitas diri sebagai warga Negara.

2.1.3.2.5.2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Grafik 2.86
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

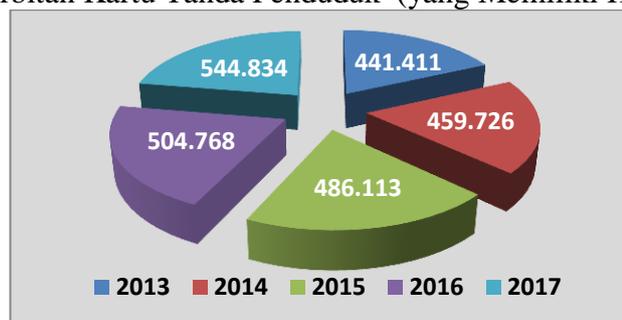


Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Tabel tersebut di atas dalam Kurung Waktu 5 Tahun (2013 – 2017) Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el mengalami peningkatan setiap Tahun sejak adanya Penerapan KTP-el berbasis NIK.

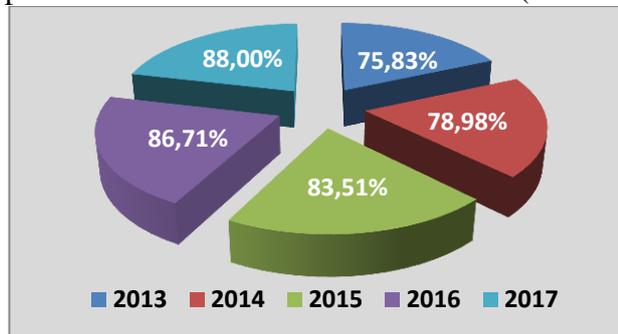
2.1.3.2.5.3. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Grafik 2.87
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (yang Memiliki KTP-EL / Jiwa)



Sumber : Data Diolah, 2018

Grafik 2.88
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Tabel tersebut di atas, Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan setiap Tahunnya .

2.1.3.2.5.4. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.44
Akta Catatan Sipil

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Yang Memiliki Akta (Jiwa)	Persentase	Ket.
1.	2013	893.859	511.759	57,25 %	SIAK
2.	2014	859.377	543.930	63,29 %	SIAK
3.	2015	860.789	563.044	65,41 %	SIAK
4.	2016	863.654	607.512	70,34 %	SIAK
5.	2017	866.245	822.109	94,90 %	SIAK

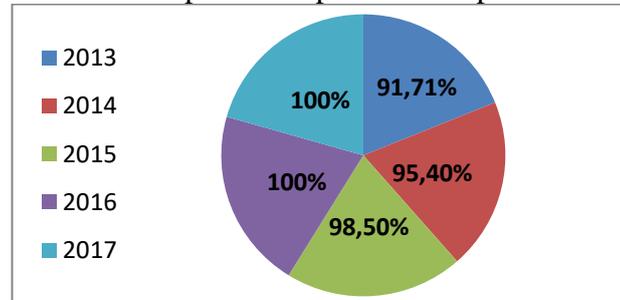
Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan kepemilikan Akta Catatan Sipil dengan asumsi bahwa persentase kepemilikan Akta Catatan Sipil mengalami peningkatan. Hal ini didasari tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan sebagai identitas diri sebagai warga Negara pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

2.1.3.2.5.5. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Grafik 2.89

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik



Sumber : Data Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik cukup meningkat karena dengan adanya bantuan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) perdesa pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2015 dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 pihak Pemerintah Desa banyak yang memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur dengan kegiatan perbaikansarana dan prasarana kantor Desa melalui Dana APBD Desa sampai dengan sekarang.

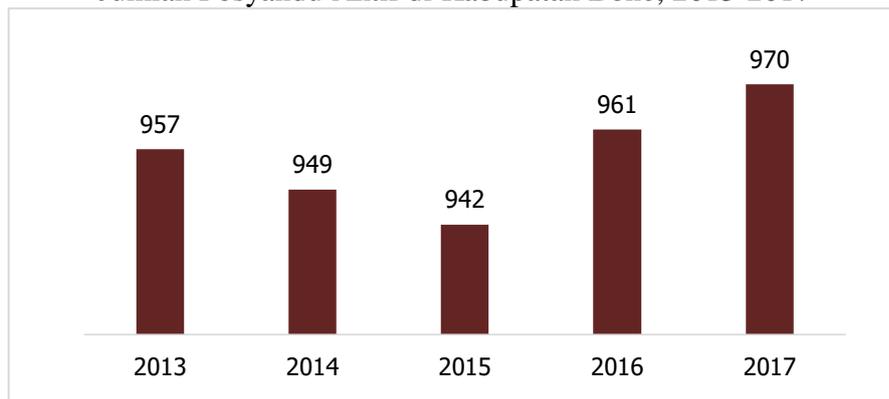
2.1.3.2.5.6. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak.

Selama tahun 2013 sampai 2017, jumlah posyandu aktif di Kabupaten Bone mengalami kenaikan, walaupun di tiga tahun pertama menurun. Pada tahun 2013, Kabupaten Bone memiliki 957 posyandu aktif, dan terus menurun menjadi 949 hingga hanya 942

posyandu aktif. Upaya pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan membuat jumlah posyandu aktif meningkat dan penambahannya jauh lebih banyak daripada penurunan di tiga tahun awal yaitu 961 tahun 2016 dan akhirnya mencapai 970 posyandu aktif tahun 2017.

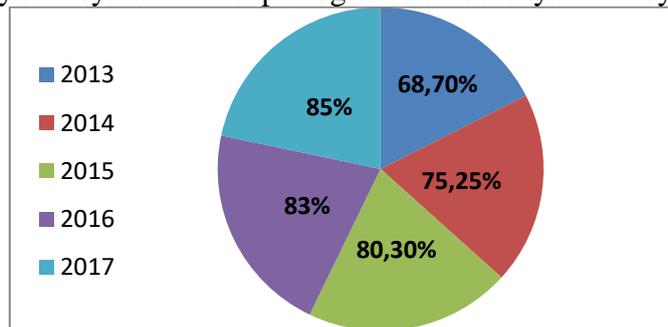
Grafik 2.90
Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber : Data Diolah, 2018

2.1.3.2.5.7. Swadaya Masyarakat Terhadap Program pemberdayaan Masyarakat

Grafik 2.91
Swadaya Masyarakat Hadap Program Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Data Diolah, 2018

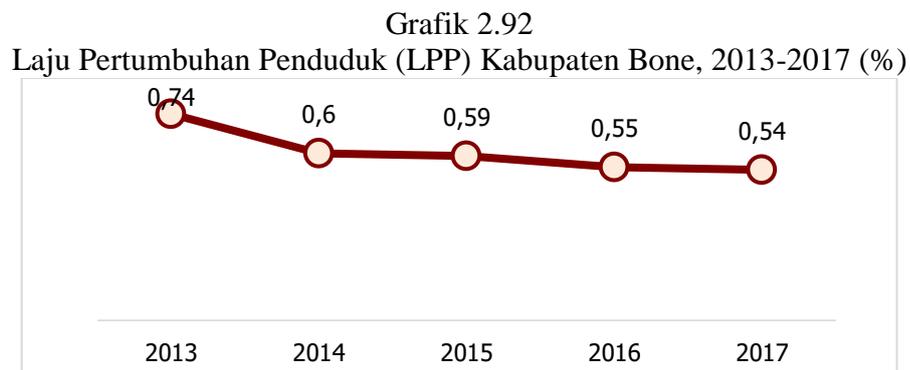
2.1.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.6.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dan berkualitas membuat daerah tersebut

memiliki modal manusia. Namun, tidak selalu banyaknya penduduk sejalan dengan kualitas pembangunan daerah, dan justru berpotensi mendatangkan masalah baru ketika jumlah penduduk yang banyak diikuti dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus bias dikendalikan untuk mengantisipasi masalah social di masa depan.

Sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Bone. Pada tahun 2013, penduduk Kabupaten Bone naik 0,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,6 persen dan 0,59 persen masing-masing di tahu 2014 dan 2015. Karena cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Bone, tahun 2016 dan 2017 laju penduduk kembali melambat dari 0,55 persen ke 0,54 persen.

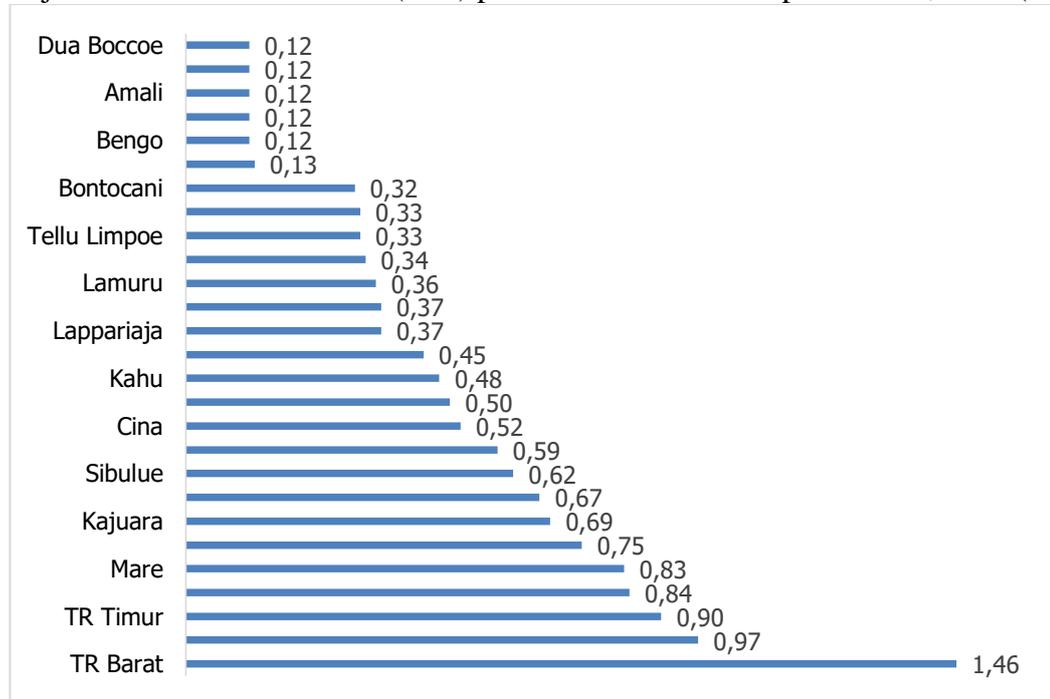


Sumber: Data Diolah, 2018

Lima kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi tahun 2016-2017 adalah Tanete Riattang Barat sebesar 1,46 persen, Tanete Riattang 0,97 persen, Tanete Riattang Timur 0,90 persen, Tonra 0,84 persen, dan Mare 0,83 persen. Sementara lima kecamatan di Kabupaten Bone dengan laju pertumbuhan paling rendah berada di Bengo, Tellu Siattinge, Amali, Ajangale, dan Dua Boccoe masing-masing sebesar 0,12 persen.

Grafik 2.93

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017 (%)



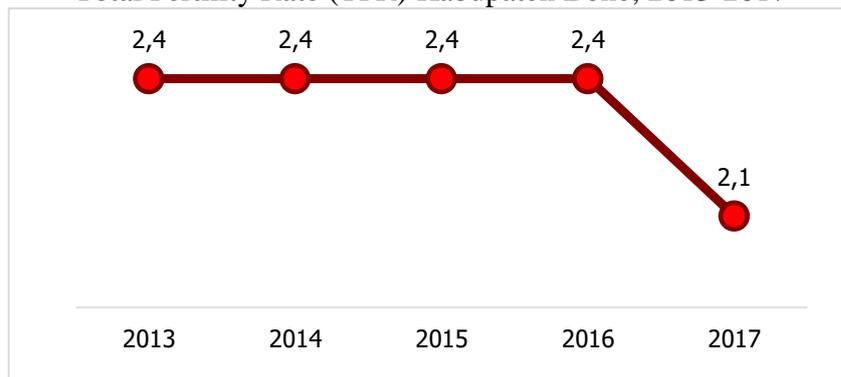
Sumber: BPS, Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

2.1.3.2.6.2. Total Fertility Rate (TFR)

Salah satu sebab melambatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bone adalah angka *Total Fertility Rate* yang cenderung konstan dalam lima tahun terakhir. TFR merupakan ukuran untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Konsep Definisi *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Sejak tahun 2013 hingga 2016 angka TFR Kabupaten Bone konstan di 2,4, menunjukkan bahwa selama empat tahun tersebut wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai dua anak selama masa usia suburnya. Namun tahun 2017, TFR Kabupaten Bone mengalami penurunan sampai 2,1.

Grafik 2.94
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bone, 2013-2017

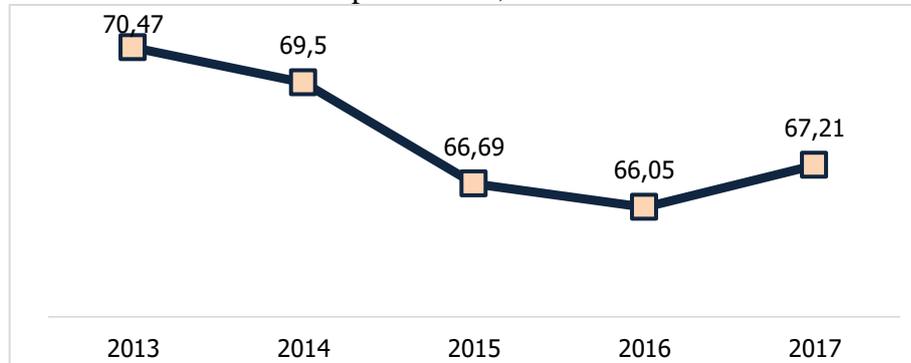


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.3. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi CPR maka semakin banyak perempuan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi, begitupun sebaliknya.

Grafik 2.95
 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15– 49
 Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

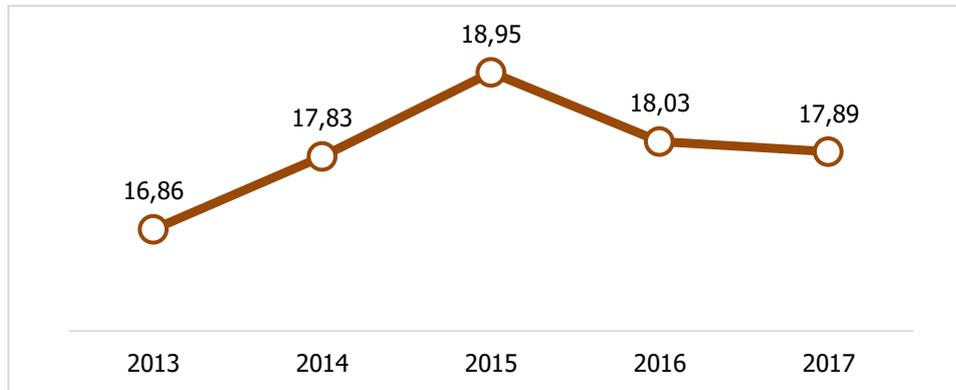
Angka CPR Kabupaten Bone nampaknya cenderung turun. Pada tahun 2013, dari semua pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Bone, sebanyak 70,47 persen menggunakan alat kontrasepsi, sementara 29,53 persen dari mereka belum menggunakan. Angkanya terus turun dari 69,5 persen ke 66,69 persen masing-masing pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016, angka CPR kembali turun menjadi 66,05 persen, sebelum akhir mengalami kenaikan 67,21 persen tahun 2017.

2.1.3.2.6.4. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need KB merupakan kebutuhan pasangan usia subur (PUS) untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Dalam lima tahun terakhir, khususnya di taiga tahun awal, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Bone meningkat, dari 16,86 persen ke 17,83 persen, dan akhirnya mencapai angka tertinggi 18,95 persen. Memasuki tahun 2016 dan 2017 pemerintah daerah berhasil menurunkan proporsi PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (*unmet need*) menjadi 18,03 persen dan kemudian hanya 17,89 persen.

Grafik 2.96

Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

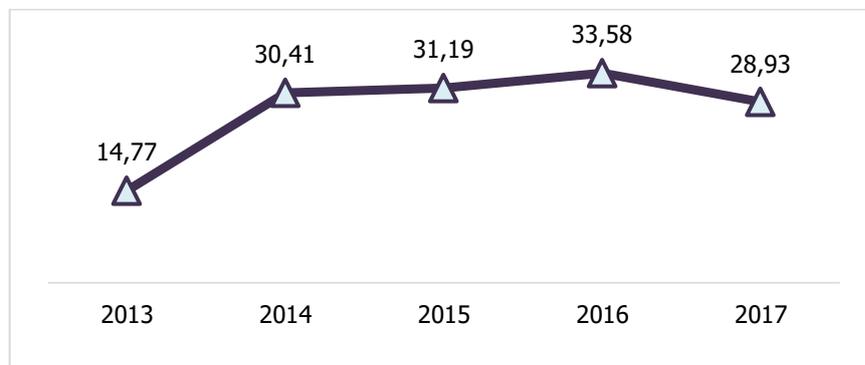
Penduduk merupakan sumberdaya penting dalam pembanguana sebuah negara atau daerah. Namun jika pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, maka justru berpotensi menyebabkan masalah pembangunan, ditambah lagi ketika penduduk yang dimiliki berkualitas rendah. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, mengingat Indonesia sudah menjadi negara berpenduduk paling tinggi keempat di dunia.

Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah melalui BKKBN menghimbau masyarakat agar menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Bone terus bertambah, meskipun di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan. Kenaikan persentase paling tinggi terjadi di tahun 2014 mencapai 30,41 persen sementara tahun sebelumnya

hanya 14,77 persen. Kenaikan angka persentase pengguna MKJP di tahun 2015 dan 2016 melambat, hanya 31,19 persen dan 33,58 persen. Tahun 2017 angkanya justru mengalami penurunan menjadi 28,93 persen, menunjukkan bahwa dari seluruh Jumlah akseptor KB di Kabupaen Bone, masih terdapat 71,07 persen yang belum menggunakan MKJP.

Grafik 2.97

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Bone, 2013-2017



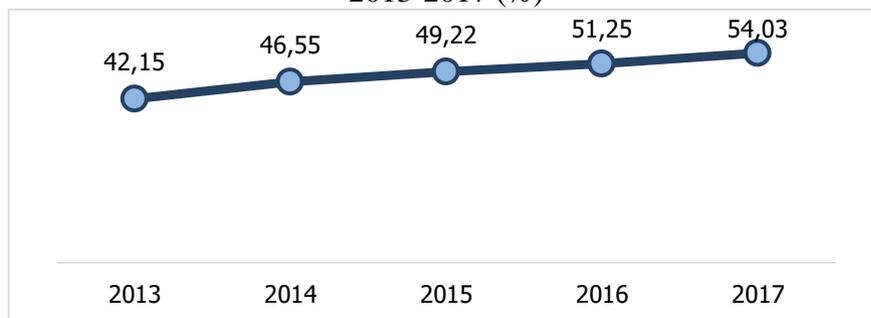
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.6. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur. Salah satu caranya adalah membentuk Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial dan emosional yang berlangsung antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Tidak hanya itu, BKB juga dapat menjadi sarana pemerintah daerah untuk mengkampanyekan pentingnya mengendalikan kelahiran melalui penggunaan KB.

Dalam kurun waktu 2013-2017, angka cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone konsisten mengalami kenaikan. Awalnya, hanya 42,15 persen anggota BKB yang mengikuti program KB, namun perlahan mengalami kenaikan dari 46,55 persen tahun 2014 kemudian 49,22 persen tahun 2015. Pada tahun 2016 sebanyak 51,25 persen anggota BKB sudah mengikuti program KB dan 2017 angkanya bertambah sebesar 54,03 persen. Artinya, lebih dari 1/2 dari anggota BKB di Kabupaten Bone sudah menjalankan program KB.

Grafik 2.98
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.7. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Disetiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 19 Tahun 2017 diartikan sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kegiatan dan atau rangkaian pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Dalam regulasi ini, PPKS penting keberadaanya untuk mewujudkan sebuah keluarga harmonis.

Dalam lima tahun terakhir, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Bone tidak banyak mengalami perubahan. Kenaikan paling signifikan terjadi tahun 2005, dimana tahun sebelumnya angka Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

(PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Bone masih 0 persen namun di tahun 2005 mencapai 7,41 persen. Tahun 2016 dan 2017 angka persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Bone tidak mengalami perubahan, menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan PPKS baru setelah tahun 2015.

Grafik 2.99
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.8. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

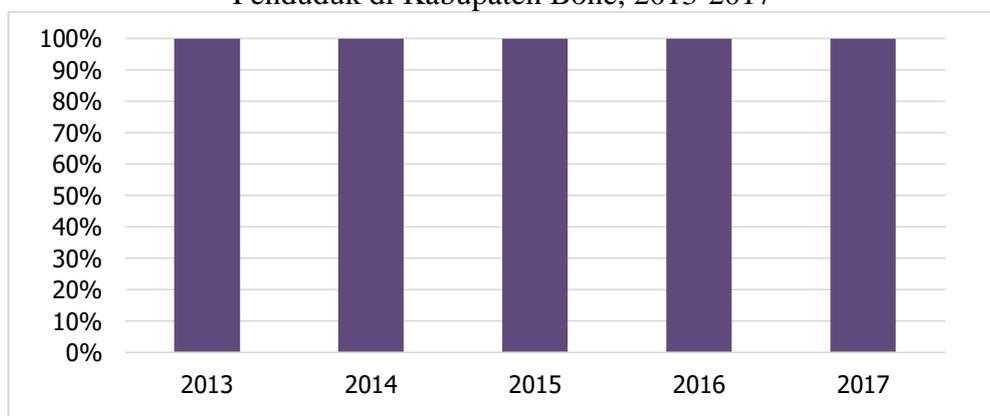
Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena peranya yang penting, maka pelibatan PKB/PLKB dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bone sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Bone.

Grafik 2.100

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

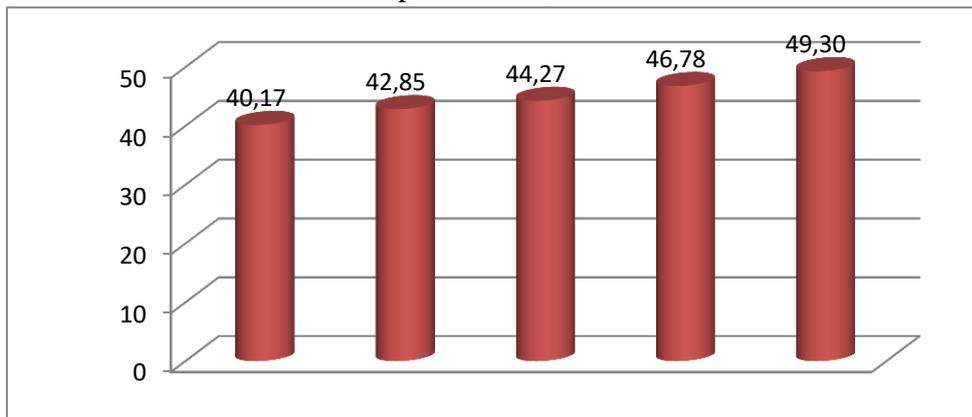
2.1.3.2.6.9. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan yang akan mendorong keluarga dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Tujuan UPPKS mencakup kegiatan yang mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga yang sejahtera diharapkan akan menjadi peserta KB mandiri.

Anggota UPPKS di Kabupaten Bone yang ber-KB mandiri cenderung mengalami peningkatan. Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri pada tahun 2013 hanya 40,17

%. Cakupan PUS yang ber-KB terus meningkat setiap tahun sampai pada tahun 2017 menjadi 49,30%. Meskipun anggota UPPKS yang ber-KB mandiri mengalami peningkatan setiap tahun, namun sampai pada tahun 2017, cakupannya belum mencapai 50 %.

Grafik 2.101
Persentase PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Bone, 2017



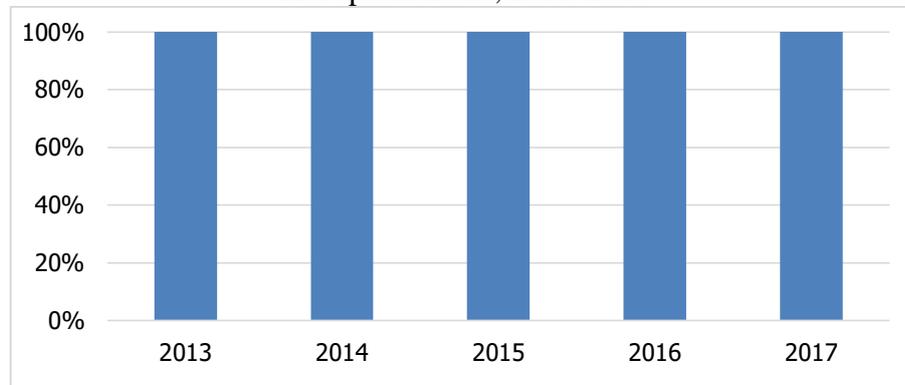
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, 2018.

2.1.3.2.6.10. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan petugas pembantu harus disebar di semua desa.

Di Kabupaten Bone, rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bone sudah mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Bone yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Grafik 2.102
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Bone, 2013-2017

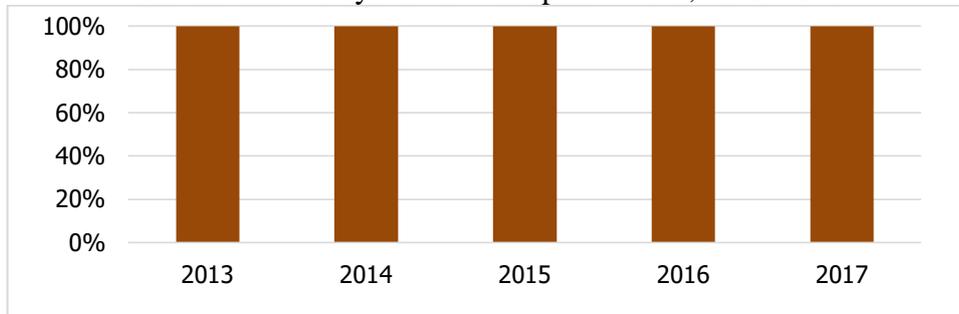


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.6.11. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) melalui kerjasama antara Faskes dan BPJS Kesehatan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Bone telah memastikan bahwa semua Faskes dan jejaringnya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilihat dari angka Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan yang mencapai 100 persen.

Grafik 2.103
 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kabupaten Bone, 2013-2017



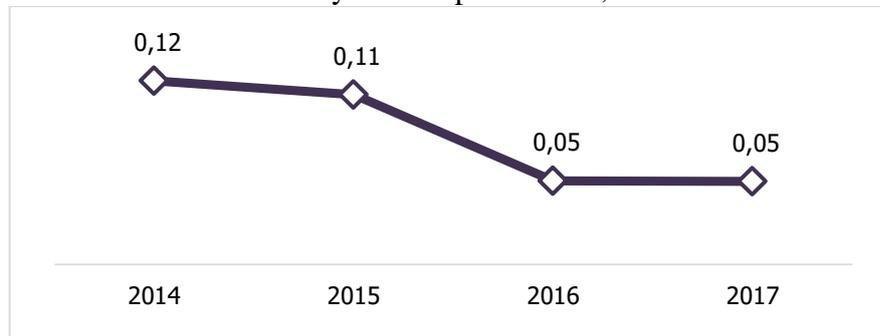
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.2.7. Perhubungan

2.1.3.2.7.1. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Oleh karena itu, kendaraan yang diperbolehkan mengangkut penumpang adalah kendaraan yang telah memiliki izin trayek. Dalam empat tahun terakhir, rasio izin trayek di Kabupaten Bone terus menurun disebabkan karena jumlah angkutan yang memiliki izin lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Angka rasio tertinggi mencapai 0,12 tahun 2013, setelah itu mengalami penurunan ke 0,11 dan berlanjut di dua tahun terakhir masing-masing hanya tersisa 0,05

Grafik 2.104
Rasio Izin Trayek Kabupaten Bone, 2014-2017



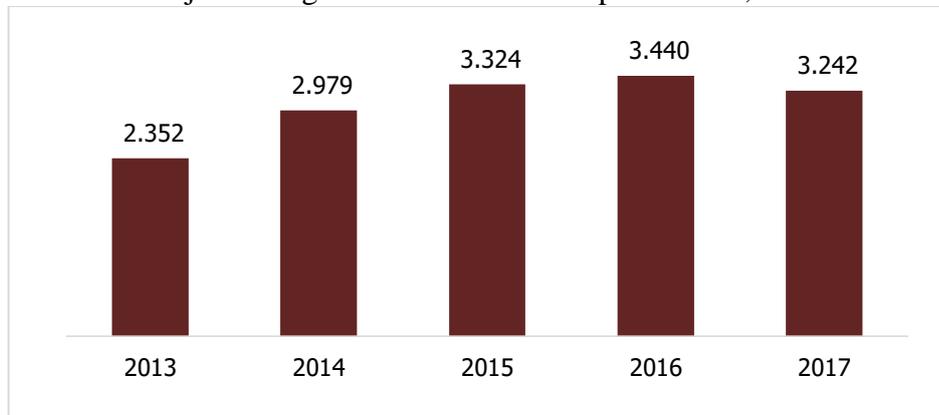
Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.7.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara, terutama pada kendaraan umum (transportasi publik), pemerintah melakukan pengawasan pada setiap armada transportasi publik melalui uji kir atau uji berkala. Dalam Permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang dimaksud dengan uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, keretagandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Namun uji kir yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2018 adalah pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, angkutan umum yang melakukan uji kir cenderung bertambah, kecuali di tahun 2017 sedikit menurun. Pada tahun 2013, hanya 2.352 kendaraan umum di Kabupaten Bone yang melakukan uji kir, sebelum akhirnya konsisten bertambah menjadi 2.979 kendaraan tahun 2014 dan mencapai 3.324 kendaraan tahun 2015. Jumlah kendaraan umum yang melakukan uji kir paling banyak sebesar 3.440 kendaraan tahun 2016, namun setelah mencapai angka tertinggi, terjadi penurunan ke 3.242 kendaraan tahun 2017.

Grafik 2.105
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone, 2013-2017



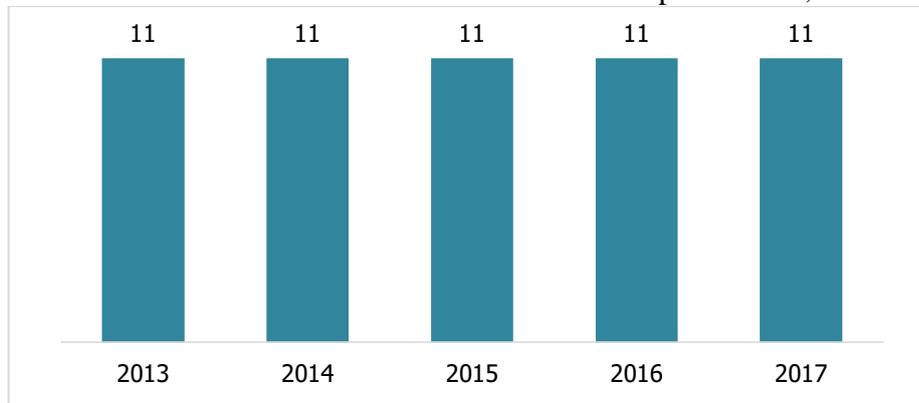
Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.7.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini, sebab infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah yang maju perekonomiannya tentu didukung oleh ketersediaan infrastruktur laut, udara dan darat yang mampu memfalisasi mobilitas barang dan jasa serta penduduk dalam suatu daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan dalam jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Sejak tahun 2013 hingga 2017, Kabupaten Bone total hanya memiliki 11 pelabuhan laut, udara, dan terminal bis. Jika ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi, kedepan pemerintah daerah nampaknya perlu memperhatikan ketersediaan infrastuktur ini mengingat pertumbuhan ekonomi barkaitan erat dengan perpindahan arus barang dan jasa, sehingga perlu mendapat dukungan infrastruktur.

Grafik 2.106
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Bone, 2013-2017

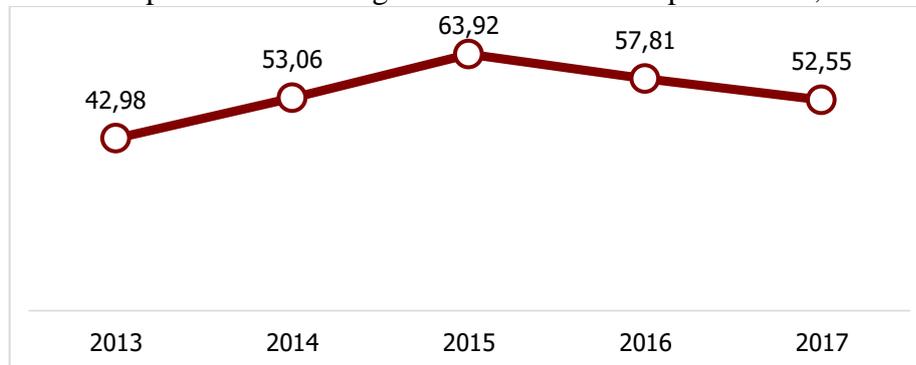


Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.7.4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Pengendara angkutan umum di Kabupaten Bone sebagian besar sudah melakukan uji kir terhadap kendaraan mereka. Awalnya, persentase kepemilikan kir angkutan umum di Kabupaten Bone masih 42,98 persen tahun 2013, namun terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian di tahun 2014 dan 2015 sehingga persentasenya naik 53,06 persen dan mencapai angka tertinggi sebesar 63,92 persen. Jumlah angkutan yang melakukan uji kir menurun sementara total angkutan umum terus bertambah sehingga angka persentase kepemilikan kir angkutan umum di Kabupaten Bone berkurang masing-masing hanya 57,81 persen dan 52,55 persen tahun 2016 dan 2017. Angka tahun 2017 sekaligus juga menunjukkan bahwa dari sekian banyak angkutan umum di Kabupaten Bone, masih ada 47,45 persen kendaraan yang belum memiliki kir.

Grafik 2.107
 Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.7.5. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel. 2.45
 Perkembangan Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan	2.468.17	2.475.15	2.444.96	2.481.60	2.481.60
2	Jumlah Kendaraan	134.666	146.694	157.022	149.675	164.642
3	Rasio	1:83	1:68	1:55	1:65	1:50

Sumber: Data Diolah, 2018

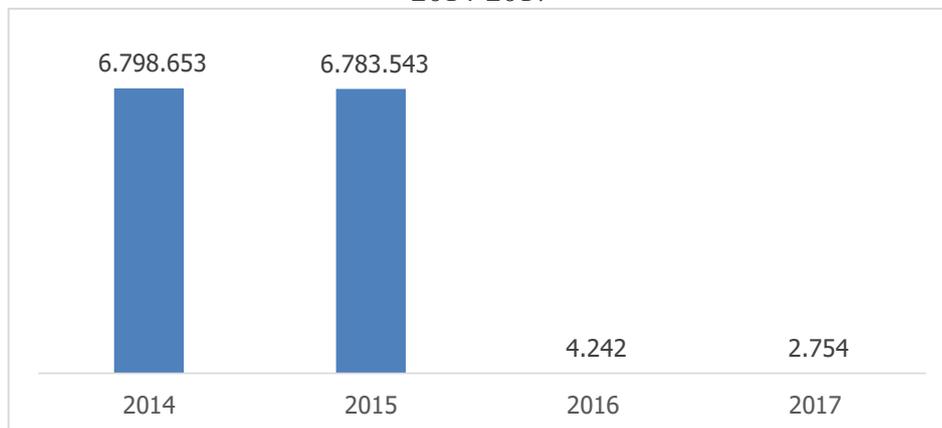
Data perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan semakin berkurang. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana jalan setiap kendaraan mengalami penurunan dari 83 Km per kendaraan pada tahun 2013 menjadi 50 Km per kendaraan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan meningkat lebih besar dibanding dengan peningkatan panjang jalan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kemacetan dan jumlah kendaraan di jalan.

2.1.3.2.7.6. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan

Umum

Besarnya volume angkutan umum dapat dilihat dari jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya. Di Kabupaen Bone, dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Tahun 2014, sebanyak 6.798.653 orang/barang terangkut angkutan umum, menunjukkan bahwa volume perpidahan barang dan penduduk dengan moda transportasi umum di Kabupaten Bone cukup besar, namun di tahun 2015 angkanya turun ke 6.783.543 orang/barang. Penurunan sangat signifikan dalam jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Bone terjadi di tahun 2016 dan 2017, karena di tahun ini hanya 4.242 orang/barang yang terangkut menggunakan angkutan umum, kemudian sedikit bertambah menjadi 2.754 orang/barang.

Grafik 2.108
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Bone,
2014-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.8. Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.8.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.46
Cakupan Layanan Telekomunikasi

Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	100 %

Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.8.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna telepon PSTN terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Peningkatan pengguna HP juga terjadi sampai tahun 2016, namun turun kembali pada tahun 2017.

Tabel 2.47
Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon di
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk yang memiliki HP	704.579	658.055	667.902	671.163	768.335
2	Penduduk yang memiliki telpon PSTN	9.678	9.675	9.680	9.876	9.913
3	Total jumlah penduduk yang memiliki HP/ Telpon (1) + (2)	714.257	667.730	677.580	681.039	778.248
4	Jumlah Penduduk	794.119	738.515	742.912	746.273	856.861
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon (3) / (4)	89%	90%	91%	91%	91%

Sumber: Data Diolah, 2018

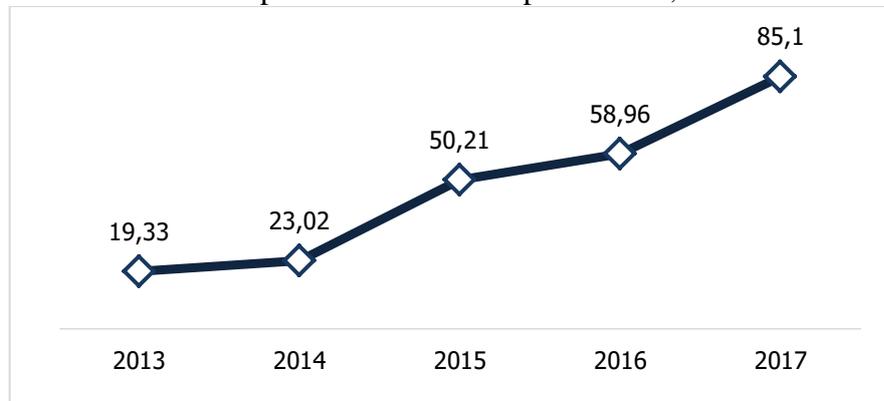
2.1.3.2.9. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

2.1.3.2.9.1. Persentase Koperasi Aktif

Pemerintah sedang berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat miskin atau mereka yang memiliki usaha mikro dan kecil melalui institusi koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012 Tentang Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, semakin banyak koperasi aktif, maka peluang untuk memperbaiki perekonomian daerah, terutama kesejahteraan masyarakat akan semakin besar.

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bone mencatat angka persentase koperasi aktif yang terus meningkat. Pada tahun 2014, persentase koperasi aktif di Kabupaten Bone hanya 23,02 persen, naik dari 19,33 persen di tahun sebelumnya. Artinya di tahun tersebut, sebagian besar koperasi di Kabupaten Bone tidak aktif atau tidak menjalankan aktivitasnya. Karena dianggap berperan penting sebagai soko guru perekonomian, maka pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk menaikkan angka persentase koperasi aktif, sehingga tahun 2015 mencapai 50,21 persen atau 1/2 dari total koperasi di Kabupaten Bone. Di dua tahun terakhir, tercatat terjadi kenaikan angka persentase koperasi aktif, masing-masing sebesar 58,96 persen tahun 2016 dan 85,10 persen tahun 2017. Angka tahun 2017 sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang lima tahun terakhir dan menginformasikan bahwa di tahun tersebut hanya tersisa 14,9 persen koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Bone.

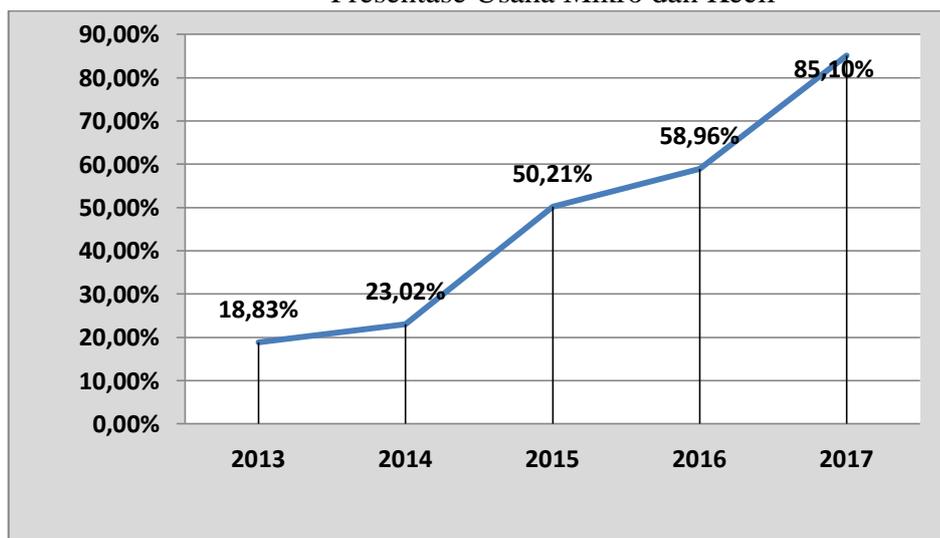
Grafik 2.109
 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.9.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Grafik 2.110
 Presentase Usaha Mikro dan Kecil

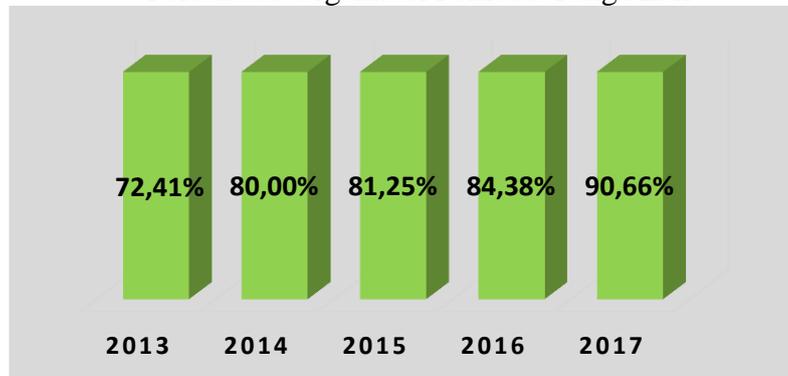


Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

2.1.3.2.10.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

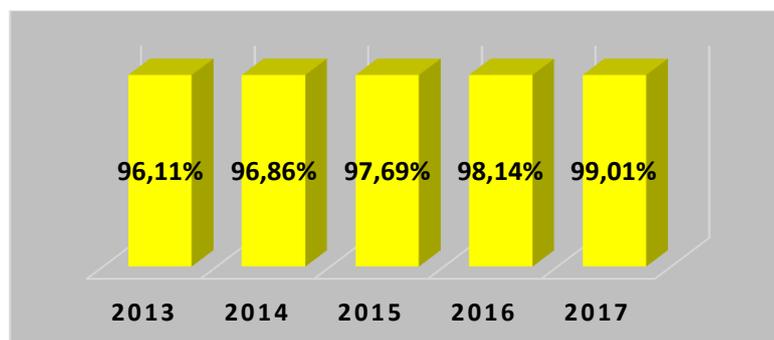
Grafik 2.111
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif



Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnyaperan pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi kepemudaan diseluru kecamatan se Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.2. Persentase Wirausaha Muda

Grafik 2.112
Persentase Wirausaha Muda



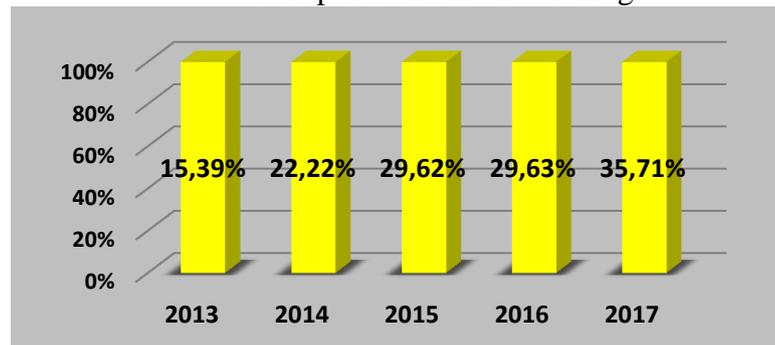
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, tergambar bahwa persentase wirausaha muda dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pemuda dalam mengikuti pendidikan

dan pelatihan kewirausahaan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan dibidang kewirausahaan diseluruh kecamatan se Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Grafik 2.113
Cakupan Pembinaan Olahraga

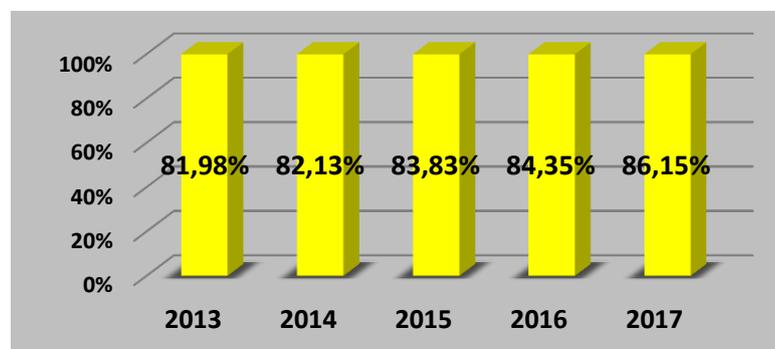


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, maka cakupan pembinaan olahraga dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Dalam hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya partisipasi pengurus cabang olahraga dalam hal pembinaan atlit disetiap cabang olahraga serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Grafik 2.114
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

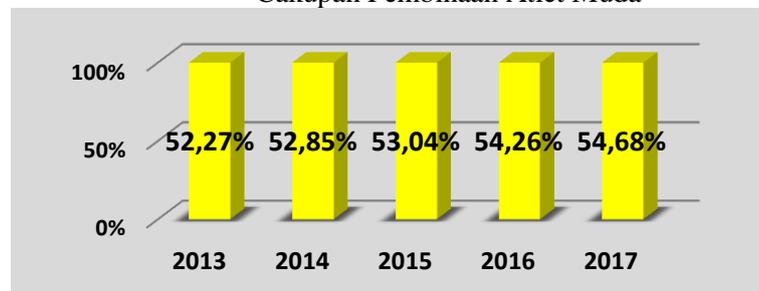


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa cakupan pelatih yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor, diantara makin meningkatnya kerja sama antar pengurus cabang olah raga dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dilaksanakan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Grafik 2.115
Cakupan Pembinaan Atlet Muda



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, cakupan pembinaan atlit muda dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit usia muda (Pelajar) pada setiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan di setiap cabang olahraga di Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.48
Jumlah Atlet Berprestasi

No	Cabang Olahraga	Tahun					Ket.
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	FORKI	4	4	6	6	8	
2.	PASI	4	5	5	8	8	
3.	PJSI	8	8	7	9	10	
4.	PRSI	3	5	5	7	8	
5.	PBSI	2	2	3	4	4	
6.	TAEKWONDOIN	2	3	1	3	4	
7.	PSTI	3	4	4	6	7	

No	Cabang Olahraga	Tahun					Ket.
		2013	2014	2015	2016	2017	
8.	PBVSI	4	4	6	7	9	
9.	PTMSI	3	4	3	5	5	
10.	PERBAKING	4	5	5	7	6	

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah atlit yang berprestasi dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit disetiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan disetiap cabang di Kabupaten Bone.

2.1.3.2.10.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.49
Jumlah Prestasi Olahraga

No.	TAHUN	Cabang olahraga	KET.
1.	2013	4 Cabor	
2.	2014	6 Cabor	
3.	2015	8 Cabor	
4.	2016	8 Cabor	
5.	2017	10 Cabor	

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah berprestasi cabang olahraga yang dimenangkan dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya pembinaan atlit disetiap cabang olahraga serta peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi keolahragaan disetiap cabang olahraga di Kabupaten.

2.1.3.2.11. Statistik

2.1.3.2.11.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.50
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

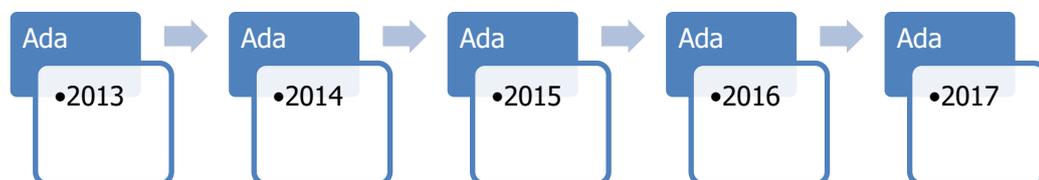
Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Sistem data Statistik yang Terintegrasi	-	-	-	-	-	27 Kec.

2.1.3.2.11.2. Buku "Kabupaten dalam Angka"

Dalam membuat perencanaan, pemerintah daerah bergantung pada ketersediaan data baik pada level makro maupun mikro. Data-data makro misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB Penggunaan dan Lapangan Usaha, Kemiskinan, Pengangguran, Inflasi, dll. Untuk itu, ketersediaan data-data tersebut menjadi salah satu indikasi penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah. Institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan data-data tersebut adalah Badan Pusat Statistik dan secara berkala telah menerbitkan buku Kabupaten Bone Dalam Angka. Semua series publikasi Kabupaten Bone Dalam Angka dapat diakses langsung di website <https://bonekab.bps.go.id>

Grafik 2.116

Ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.11.3. Buku "PDRB"

Selain menerbitkan setiap tahun buku Kabupaten Bone Dalam Angka, Badan Pusat Statistik juga menyediakan publikasi spesifik tentang kondisi produk domestik regional bruto. Buku ini mengulas secara lengkap dan rinci tentang PDRB Kabupaten Bone dari sisi penggunaan dan lapangan usaha. PDRB sektoral dijelaskan hingga level sub sector lapangan usaha sehingga pemerintah daerah relatif lebih mudah mengetahui motor penggerak perekonomian Kabupaten Bone. Dalam lima tahun terakhir, BPS Kabupaten Bone konsisten menerbitkan buku PDRB dari sisi penggunaan dan lapangan usaha.

Grafik 2.117

Ketersediaan Buku "PDRB" Kabupaten Bone, 2013-2017



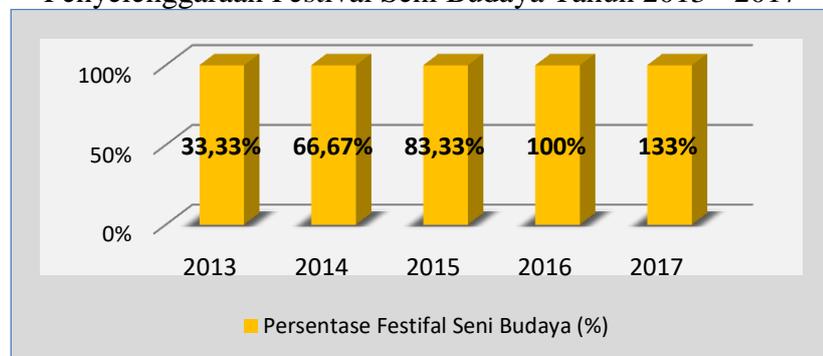
Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.12. Kebudayaan

2.1.3.2.12.1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Grafik 2.118

Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tahun 2013 - 2017

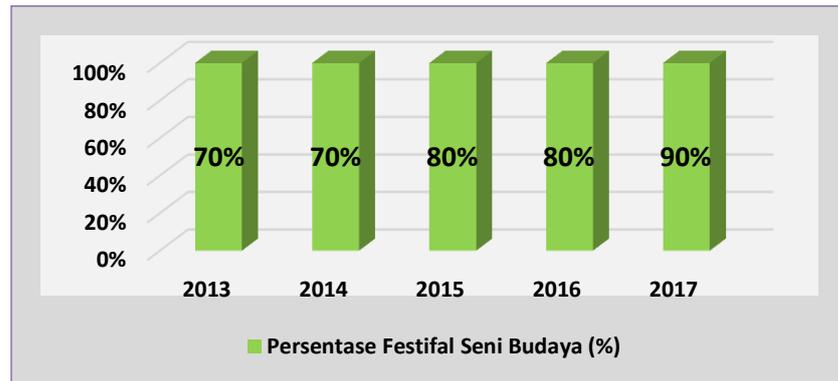


Berdasarkan Grafik di atas maka persentase penyelenggaraan Festival Seni Budaya dari Taun 2013 – 2017 mengalami peningkatan

hal ini dipengaruhi oleh banyaknya Event-event baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional yang merupakan Promosi Budaya Daerah.

2.1.3.2.12.2. Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Grafik 2.119
Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2013 - 2017

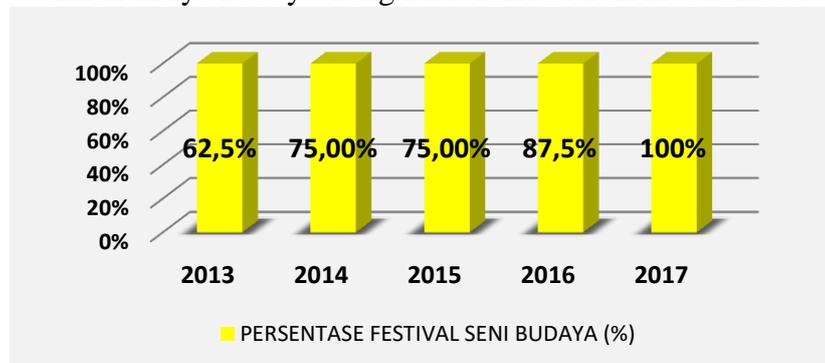


Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, maka persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2013–2017 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi jumlah situs dan kawasan Cagar Budaya telah di inventarisir namun masih perlu kerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian dalam penetapan situs.

2.1.3.2.12.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Grafik 2.120
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

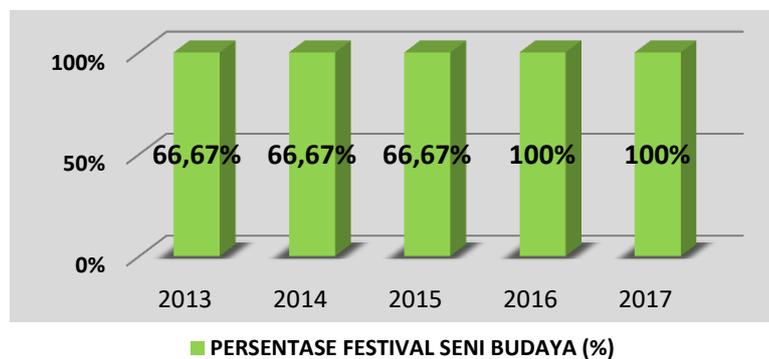


Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, maka persentase jumlah Karya Budaya Tahun 2013 sampai 2017 yang dilestarikan dan di Inventarisasi mengingat hal ini di pengaruhi oleh banyak partisipasi masyarakat yang peduli tentang kearifan local budaya daerah untuk pelestarian nilai-nilai Seni Budaya Daerah.

2.1.3.2.12.4. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Grafik 2.121
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan grafik tersebut diatas maka, persentase jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu tahun 2013 sampai 2017 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Cagar Budaya yang telah dikaji dan dapat dijadikan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya untuk dikelola sebagai Aset Sejarah dan Situs Perpustakaan Daerah.

2.1.3.2.13. Perpustakaan

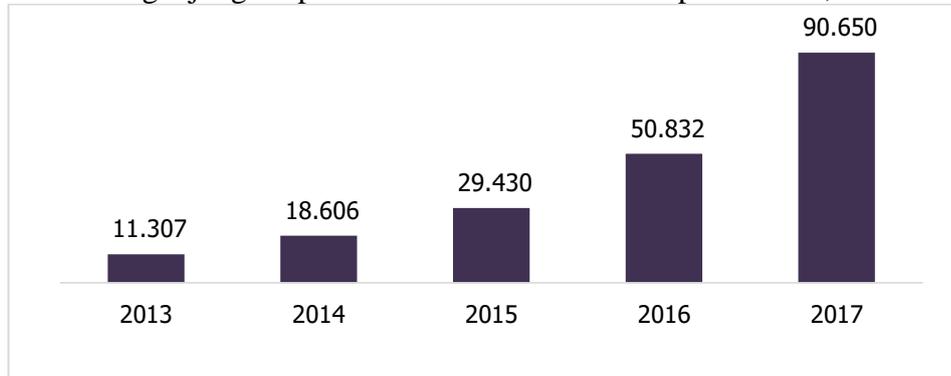
2.1.3.2.13.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam regulasi ini, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu, tidak keliru ketika Perpustakaan dianggap sebagai wahana

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Grafik 2.122

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Bone, 2013-2017

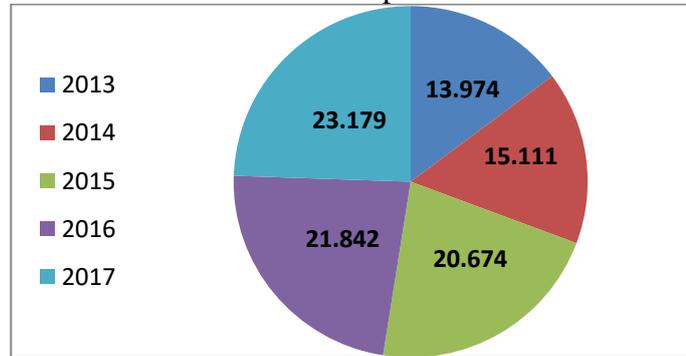


Sumber: Data Diolah, 2018

Setidaknya dalam lima tahun terakhir, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bone terus bertambah. Awalnya hanya sebanyak 11.307 orang pengunjung yang mendatangi perpustakaan setiap tahun di Kabupaten Bone, kemudian angkanya bertambah menjadi 18.606 orang tahun 2014 dan mencapai 29.430 tahun 2015. Kenaikan tertinggi jumlah kunjungan ke perpustakaan terjadi di tahun 2016, dimana jumlah pengujungnya mencapai 50.832 orang atau bertambah sebanyak 21.402 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak berhenti di tahun 2016, pada tahun 2017 jumlah orang yang berkunjung ke perpustakaan naik lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 90.650 orang pengunjung atau bertambah 78,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3.2.13.2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Grafik 2.123
Koleksi Buku Perpustakaan Daerah



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Diagram di atas, maka koleksi buku perpustakaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya makin meningkatnya peran pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi peningkatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah dan peran serta Perpustakaan Nasional dalam memberikan bantuan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone.

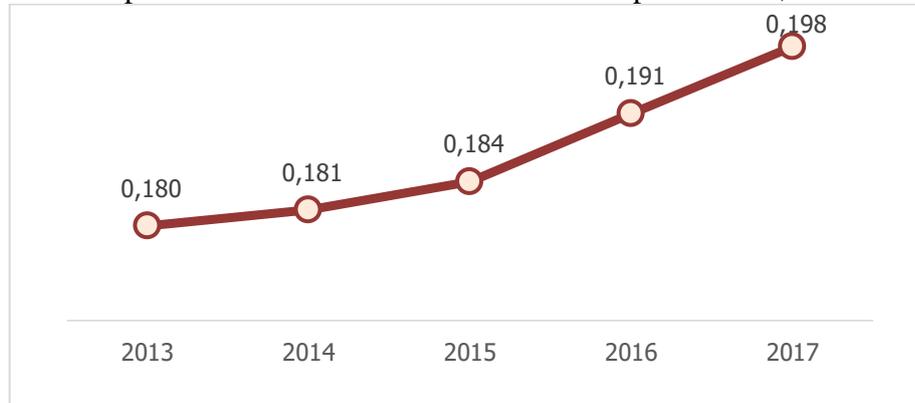
2.1.3.2.13.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Perpustakaan sebagai salah satu media memperoleh pengetahuan, penting untuk diperluas aksesnya dengan cara memperbanyak jumlah perpustakaan sesuai dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Lima tahun terakhir, Kabupaten Bone mampu menaikkan tren rasio perpustakaan persatuan penduduk. Angka ini menggambarkan akses terhadap perpustakaan untuk setiap penduduk di Kabupaten Bone. Di tahun 2013, rasio perpustakaan masih 0,180, paling rendah selama periode lima tahun terakhir. Tapi karena pemerintah daerah terus menambah jumlah perpustakaan, maka rasionya perlahan naik dari 0,181 ke 0,184 per 1.000 penduduk. Kenaikan rasio perpustakaan tertinggi terjadi di tahun 2016 dan 2017, dengan angka 0,191 dan

0,198 disebabkan karena terjadi penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 143 tahun 2016 dan 149 tahun 2017.

Grafik 2.124

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Bone, 2013-2017

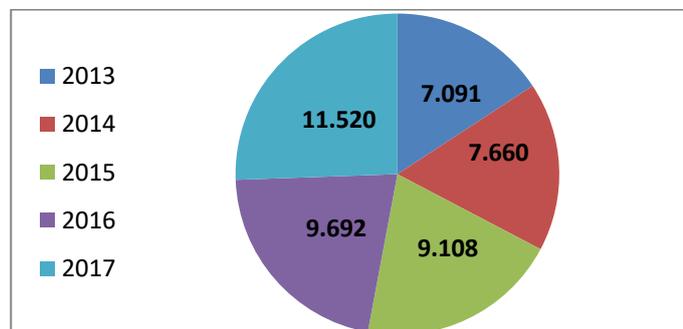


Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.13.4. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Grafik 2.125

Koleksi Judul Buku Perpustakaan



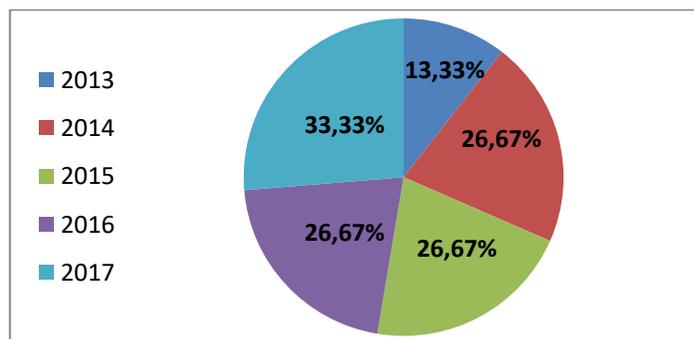
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka jumlah koleksi judul buku perpustakaan pada perpustakaan umum daerah Kabupaten Bone berdasarkan Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya, peran pemerintah Kabupaten Bone dalam memberikan sarana berupa bahan pustaka baik perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan desa/kelurahan atau komunitas baca, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan sebagaimana tujuan Perpustakaan Daerah Kabupaten

Bone yaitu dapat meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat.

2.1.3.2.13.5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Grafik 2.126
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilaian yang Bersertifikat (%)



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan diagram tersebut di atas, maka jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya meningkatnya kerjasama antar pengelola perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan dapat dilaksanakan, serta peran Pemerintah Daerah Khususnya Perpustakaan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan Pembinaan Pengelola Perpustakaan ditingkat Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Komunitas Baca yang ada di Kabupten Bone.

2.1.3.2.14. Kearsipan

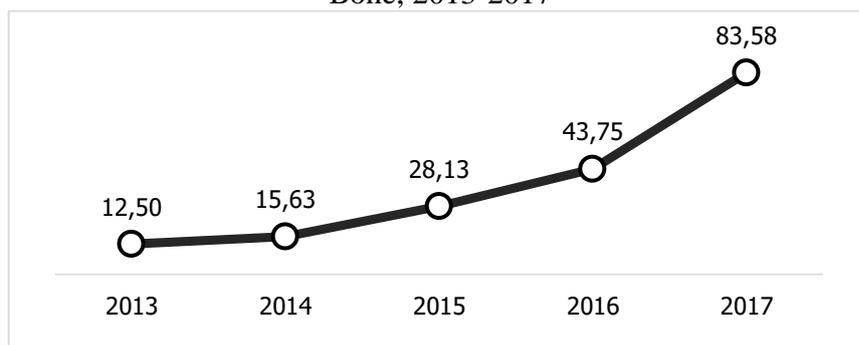
2.1.3.2.14.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian ini, arsip merupakan dokumen penting karena berisi rekaman aktivitas lembaga negara. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baku atau terstandarisasi.

Dalam lima tahun terakhir, belum semua perangkat daerah di Kabupaten Bone melakukan pengelolaan arsip secara baku, meski angkanya terus bertambah. Tahun 2017, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Bone sudah mencapai 83,58 persen, padahal empat tahun sebelumnya masih 12,50 persen. Data ini menunjukkan bahwa masih tersisa 16,42 persen perangkat daerah di Kabupaten Bone yang belum melakukan pengelolaan arsip secara baku.

Grafik 2.127
 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Bone, 2013-2017



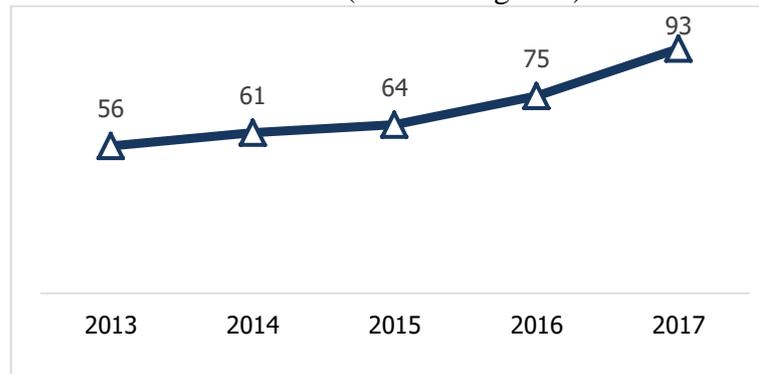
Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.2.14.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah daerah Kabupaten Bone terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan pemerintah realiable dan akurat untuk digunakan.

Untuk itu, pemerintah daerah, dalam lima tahun terakhir terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bone.

Grafik 2.128
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Bone,
2013-2017 (Jumlah Kegiatan)



Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tahun 2015, pemerintah daerah memuat 64 kegiatan pengelolaan kearsipan, bertambah dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya 56 kegiatan tahun 2013 dan 61 kegiatan tahun 2014. Pemerintah daerah kembali menambah jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip menjadi 75 kegiatan dan 93 kegiatan masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Jumlah kegiatan yang terus bertambah dalam lima tahun terakhir diharapkan sebanding dengan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah Kabupaten Bone.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Pariwisata

2.1.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bone terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata jumlah kunjungan wisata meningkat sekitar 9,85% per tahun. Peningkatan ini dikontribusi oleh jumlah kunjungan wisatawan lokal yang meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Sedangkan jumlah kunjungan

wisatawan domestik dan mancanegara menunjukkan tren menurun. Proporsi wisatawan mancanegara juga masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0,36% pada tahun 2017.

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bone, 2013-2017

Tahun	Lokal	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2013	54.181	36.069	871	91.121
2014	85.246	35.672	475	121.393
2015	80.382	30.116	584	111.082
2016	91.800	31.200	500	123.500
2017	96.140	31.200	460	127.800

Sumber: BPS. Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

2.1.3.3.1.2. Lama kunjungan Wisata

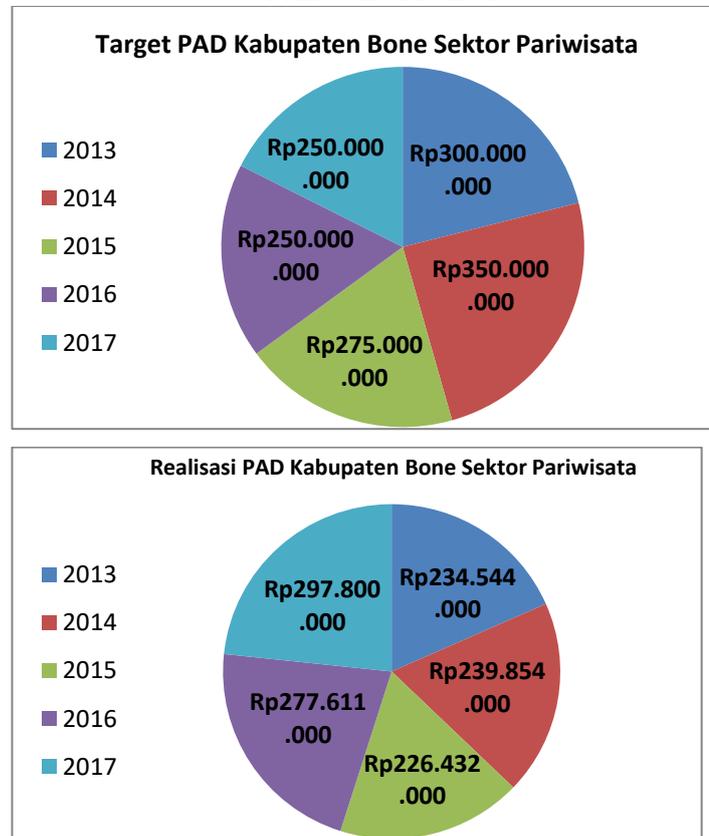
Tabel 2.52
Lama Kunjungan Wisata

Indikator	Capaian Kinerja				
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
♦ Lama Kunjunagn Wisatawan					
- Wisatawan Nusantara (Wisnus)	3 Hari	3 Hari	4 Hari	5 Hari	5 Hari
- Wisatawan macanegara (Wisma)	2 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Adapun lama kunjungan wisatawan nusantara rata-rata berlangsung selama 3 hari dan wisatawan mancanegara paling lama 2 hari. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten Bone belum banyak diminati oleh para wisatawan sehingga lama kunjungan wisatawan dipersingkat.

2.1.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Grafik 2.129
PAD Sektor Pariwisata



Sumber: Data Diolah, 2018

Kabupaten Bone Sektor Pariwisata : kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Sektor Pariwisata yang dicapai dari target berbanding realisasi hanya mencapai 78,18%. Hal ini berti target yang ditetapkan tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan, disebabkan oleh kunjungan wisatawan terbatas dan berlangsung singkat termasuk didalamnya pengelolaan obyek-obyek wisata yang ditangani oleh Pemerintah kabupaten Bone belum Optimal.

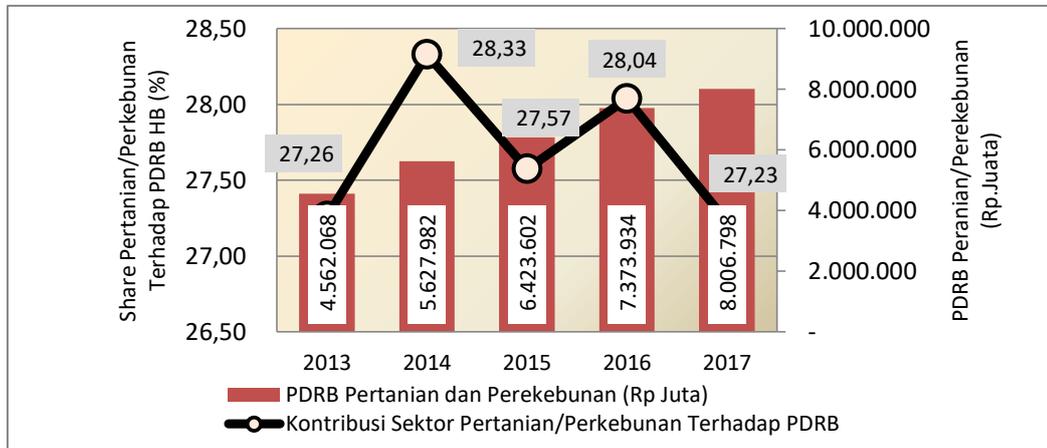
2.1.3.3.2. Pertanian

2.1.3.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian.

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/perkebunan sebesar Rp. 4,56 Trillion meningkat menjadi Rp. 8,01 trillion pada tahun 2017. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan dalam PDRB harga berlaku Kabupaten Bone menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013-2014 kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB meningkat yakni dari 27,26 persen tahun 2013 meningkat menjadi 28,33 persen tahun 2014. Akan tetapi pada periode berikutnya cenderung menurun bahkan pada tahun 2017 kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara tajam yakni hanya sekitar 27,23 persen. Penurunan tajam kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada tahun 2017, terkait berbagai kondisi sepanjang tahun 2017, seperti terjadinya anomali cuaca El Nino di awal tahun dan berlanjut El Nina di pertengahan hingga akhir tahun, yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman pertanian yang terserang hama penyakit dan bencana alam berupa banjir di daerah Bone bagian utara.

Grafik 2.130
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



Sumber : PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.1.3.3.2. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

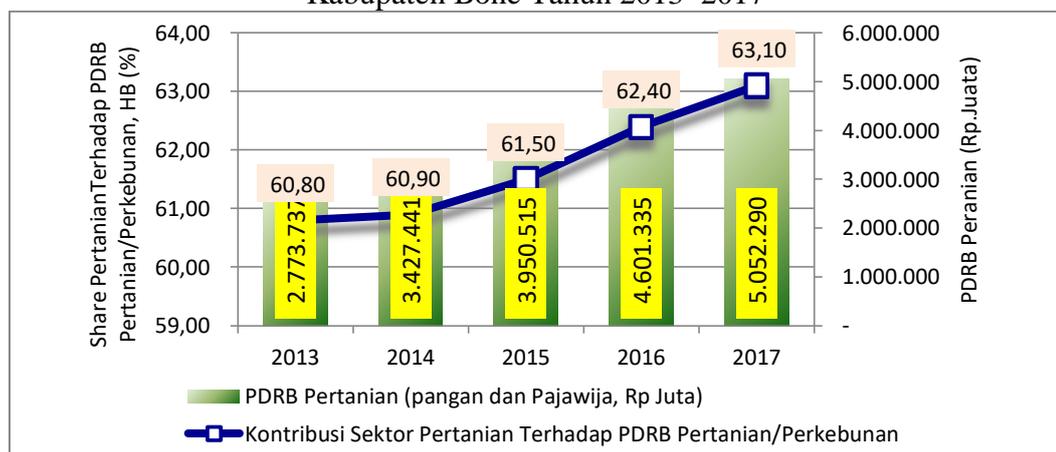
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian (pangan dan pawija) sebesar Rp. 2,77 Trillium meningkat menjadi Rp. 5,05 trillium pada tahun 2017. Sektor

pertanian pangan dan palawija di Kabupaten Bone tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, tetapi kecenderungan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian (pangan dan palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 60,80 persen meningkat yakni dari 63,10 persen tahun 2017. Uraian tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) yang merupakan basis utama pertanian Kabupaten Bone memiliki kinerja perkembangan yang cukup baik.

Grafik 2.131

Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



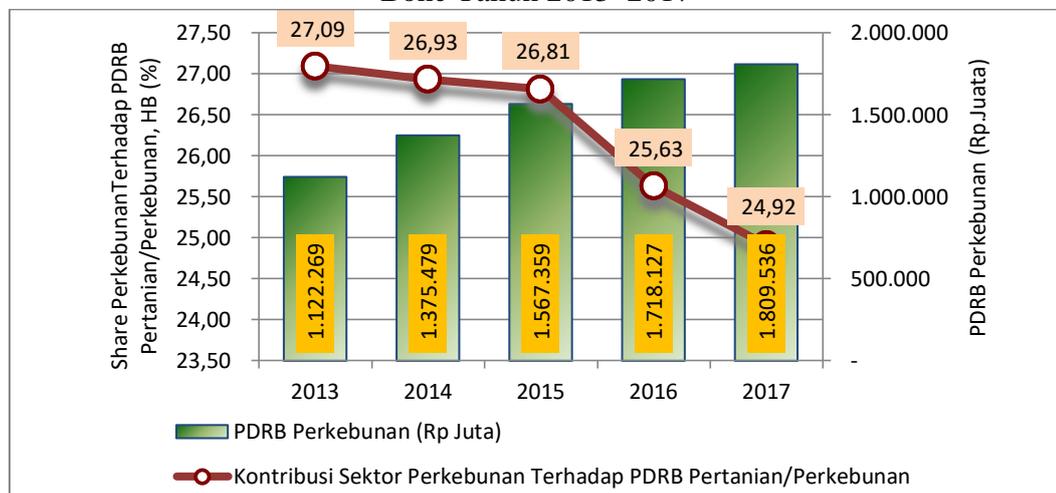
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

2.1.3.3.2.3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi

yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Grafik 2.132
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Kabupaten Bone Tahun 2013–2017



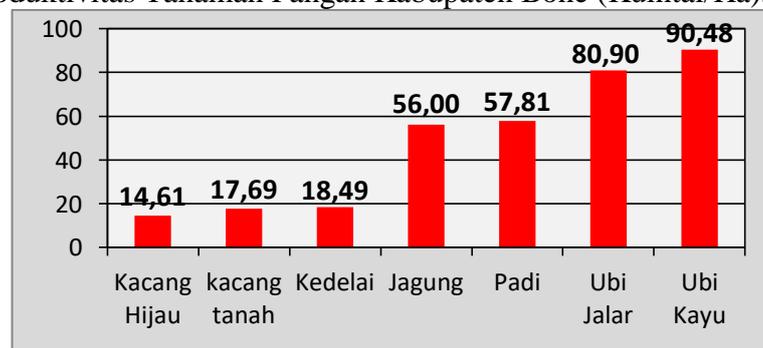
Sumber: PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan meningkat, meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian pangan dan palawija. Pada tahun 2013 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp. 1,12 Trillion meningkat menjadi Rp. 1,81 triliun pada tahun 2017. Meskipun demikian sektor perkebunan merupakan sektor pertanian yang masih cukup penting di daerah ini karena merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor tanaman pangan dan palawija. Kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Bone mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi

sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang terus mengalami kemerosotan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,09 persen sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 24,92 persen. Turunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan mengisyaratkan bahwa kinerja pertumbuhan sektor perkebunan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

2.1.3.3.2.4. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Grafik 2.133
Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bone (Kuintal/Ha), 2016



Sumber : Kabupaten Bone dalam Angka, 2018

Analisis mengenai data pangan akan lebih bermakna apabila ditinjau nilai produktivitas tanaman pangan. Besarnya produktivitas tanaman padi berada pada posisi ketiga yaitu 57,81 kuintal/ha. Produktivitas tertinggi dihasilkan oleh tanaman ubi kayu (90,48 kuintal/ha). Produktivitas tertinggi berikutnya dihasilkan oleh ubi jalar dengan rata-rata produksi 80,90 kuintal/ha.

Produksi tanaman pangan terbesar kedua adalah jagung dengan volume produksi 379.789 ton. Produksi tersebut dihasilkan dari lahan seluas 67.824 ha.

2.1.3.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.1.3.3.3.1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Total jumlah rumah tangga mengalami perkembangan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017. Perkembangan ini juga diikuti oleh perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bervariasi berdasarkan daya listrik yang disediakan PLN. Pengguna listrik terbanyak menggunakan daya 900 Watt dan turun secara konsisten sejalan dengan meningkatnya daya listrik. Persentase jumlah pengguna listrik meningkat dari 71,52 % pada tahun 2013 menjadi 93,62 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik dari tahun ke tahun.

Tabel 2.53
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di
Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	RT dengan daya 450 watt	39.064	37.332	38.214	37.169	35.796
2.	RT dengan daya 900 watt	96.421	109.324	117.140	122.338	135.800
3.	RT dengan daya 1.300 watt	16.006	17.320	18.911	25.042	26.733
4.	RT dengan daya 2.200 watt	2.390	2.331	3.093	3.413	3.936
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	504	620	674	771	941
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	151.995	166.927	178.032	188.733	203.206
7.	Jumlah Rumah Tangga	212.510	213.644,5	214.779	215.913,5	217.048
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	71.52%	78.13%	82.89%	87.41%	93.62%

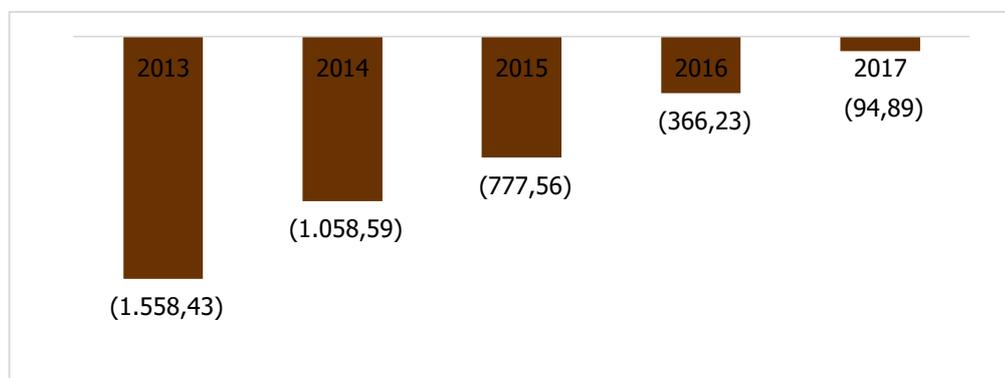
Sumber: Dinas Perindustrian, 2018

2.1.3.3.4. Perdagangan

2.1.3.3.4.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong perekonomian daerah, sebab produksi barang dan jasa seringkali juga tergantung dari output antara yang didatangkan dari luar daerah atau sektor perdagangan memperjual-belikan barang dan jasa dari luar daerah. Jika arus barang keluar (net ekspor) terus meningkat akan mendorong PDRB, begitupun sebaliknya.

Grafik 2.174
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bone, 2013-2017 (Miliar Rp)



Sumber: Data Diolah, 2018

Sepanjang lima tahun terakhir, ekspor bersih Kabupaten Bone terus defisit, menggambarkan bahwa arus barang keluar (ekspor) nilainya lebih kecil daripada arus masuk output. Tahun 2013 merupakan defisit perdagangan paling tinggi yang dialami Kabupaten Bone karena angkanya mencapai Rp. -1.058,59 miliar, namun empat tahun selanjutnya konsisten defisitnya terus berkurang. Pada Tahun 2014, ekspor bersih Kabupaten Bone masih mencapai Rp. -1.058,59 miliar, kemudian menurun menjadi Rp. -777,56 miliar dan Rp. -366,23 miliar masing-masing tahun 2015 dan 2016. Karena terus memperbesar volume ekspornya, defisit perdagangan Kabupaten Bone hanya terisisa Rp. -94,89 miliar, paling rendah dalam lima tahun terakhir.

2.1.3.3.4.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

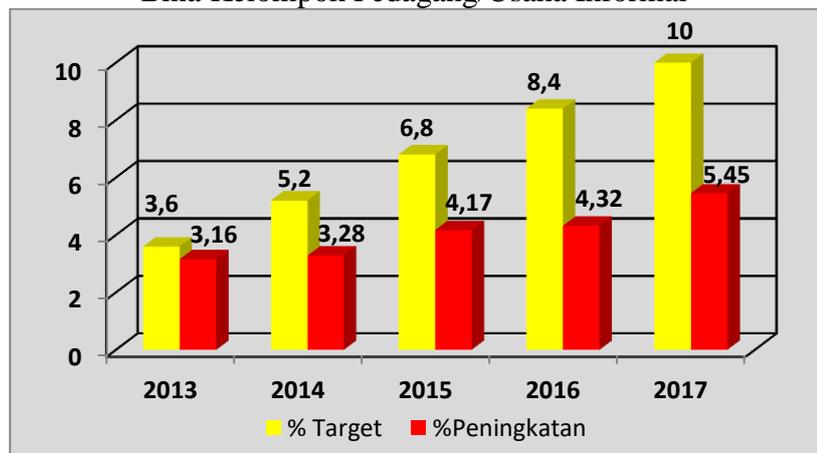
Tabel 2.54
Cakupan Bin Kelompok Pedagang/Usaha Informasi (%)

No	Kelompok Pedagang	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)
1	Jumlah Perusahaan	316	366	1800	1807	1835
2	Jumlah Binaan	10	12	75	78	100
3.	% Bina Kelompok Pedagang	3,16	3,28	4,17	4,32	5,45

Sumber : Data Diolah, 2018

Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi adalah sebagai berikut:

Grafik 2.175
Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa :

- Tahun 2013 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 3,16% sedangkan Target sebesar 3,6% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2013 masih kurang sekitar 4,4%
- Tahun 2014 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 3,28% sedangkan Target sebesar 5,2% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2014 masih kurang sekitar 1,92%

- Tahun 2015 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 4,17% sedangkan Target sebesar 6,8% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2015 masih kurang sekitar 2,63%
- Tahun 2016 persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 4,32% sedangkan Target sebesar 8,4% maka dapat disimpulkan capaian tahun 2016 masih kurang sekitar 4,08%
- Tahun 2017 Triwulan III Persentase Binaan Kelompok Pedagang sebesar 5,45% sedangkan Target sebesar 10%
Beberapa Bantuan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informasi yang dilakukan oleh Dinas Pedagang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :
 1. Pembinaan mengenai Pengurusan Izin Usaha Pedagang (SIUP/TDP,HO)
 2. Pembinaan mengenai Permohonan pinjaman modal di Bank
 3. Pembinaan mengenai manajemen dasar pengelolaan usaha
 4. Pembinaan mengenai Penyederhanaan Dokumen Ekspor Impor

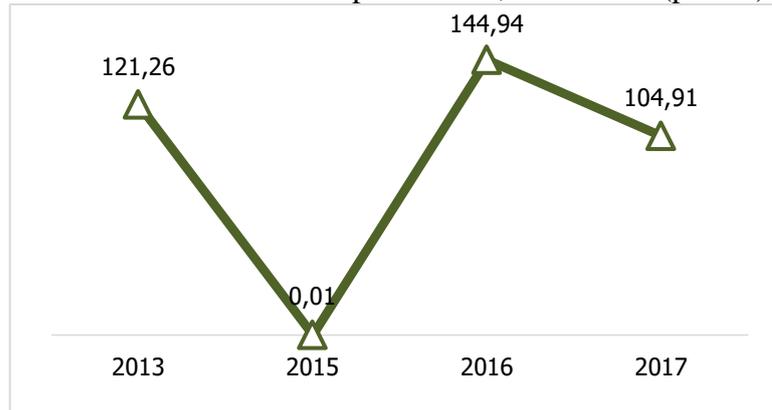
2.1.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.5.1. Produksi Perikanan

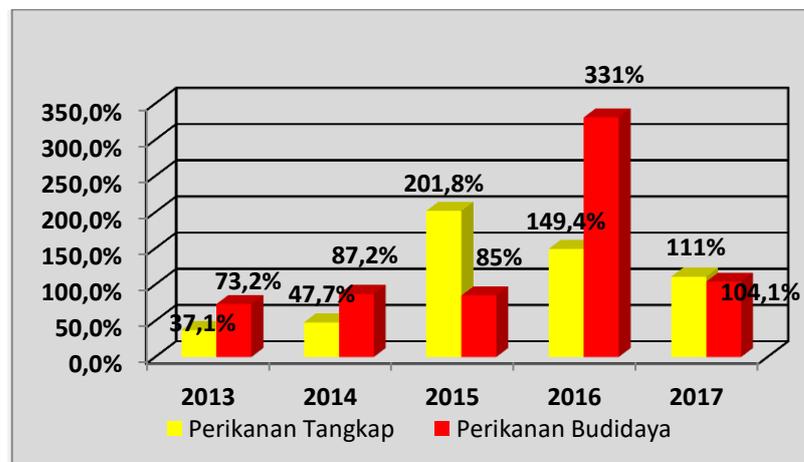
Perekonomian Kabupaten Bone sebagian besar dikontribusi oleh sektor pertanian dan penggerak sektor pertanian salah satunya adalah lapangan usaha perikanan. Produksi perikanan yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2018 diperoleh dari jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan target daerah (ton) dikali 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan Kabupaten Bone terus meningkat, kecuali tahun 2015 angkanya mengalami penurunan tajam. Capaian produksi perikanan tahun 2013 angkanya sudah mencapai 121,26 persen atau melampaui target, kemudian semakin besar di tahun 2014 hingga mencapai 133,50 persen. Persentase capaian kinerja produksi perikanan Kabupaten Bone tiba-tiba menurun signifikan hingga hanya

tersisa 0,01 persen disebabkan karena target produksi yang ditentukan jauh lebih tinggi daripada realisasi produksi. Kinerja lapangan usaha perikanan kemudian mencapai angka tertingginya di tahun 2016 sebesar 144,94 persen, sebelum menurun ke 104,91 persen tahun 2017

Grafik 2.176
Produksi Perikanan Kabupaten Bone, 2013-2017 (persen)



Sumber: Data Diolah, 2018



- a. Produksi perikanan untuk perikanan tangkap seperti pada tabel tersebut menggambarkan bahwa presentase nilai capaian Indikator pada tahun 2013 sebesar 26.178,3 (ton) atau (37,1%, tahun 2014 sebesar 34.628,7 ton) atau (47,4%), tahun 2015 sebesar 150.933,2 (ton) (201,8%), tahun 2016 sebesar 115.000 (ton) (149,37%) dan 2017 sebesar 44.359,6 (ton) atau (111%).

Pembangunan kelautan dan perikanan bidang penangkapan ikan menunjukkan adanya fluktuasi produksi. Kondisi ini sangat di

pengaruhi oleh iklim atau cuaca yang tidak stabil dimana nelayan enggan melaut pada kondisi tersebut.

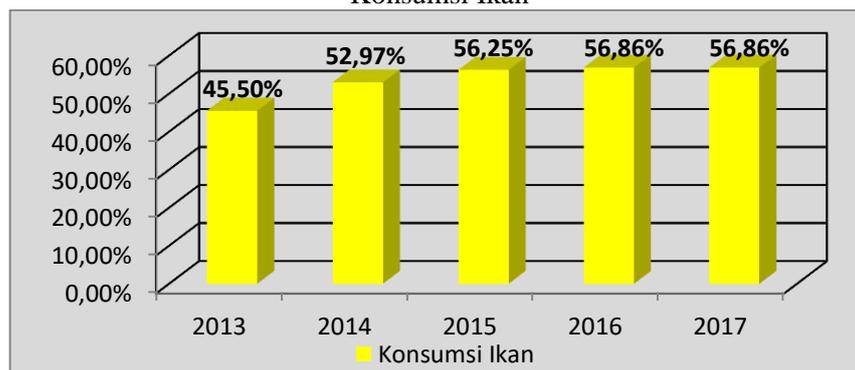
- b. Produksi perikanan budidaya ikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk tahun 2013 produksi budidaya sebesar diproduksi 94.648,7 atau (73%), tahun 2014 sebesar 116.283,7 (87,2%), tahun 2015 produksinya mencapai 116.85,4 (85%) tahun 2016 sebesar 469.164 (331) dan tahun 2017 sebesar 322.999 ton (104,1%).

Berdasarkan grafik tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator dinas kelautan dan perikanan dari tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan. Keberhasilan ini di dukung karena adanya beberapa bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya.

Pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan di maksudkan untuk mendukung indikator sasaran strategis yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya untuk mendapat sarana prasarana produksi budidaya (pokdakan).

2.1.3.3.5.2. Konsumsi Ikan

Grafik 2.177
Konsumsi Ikan



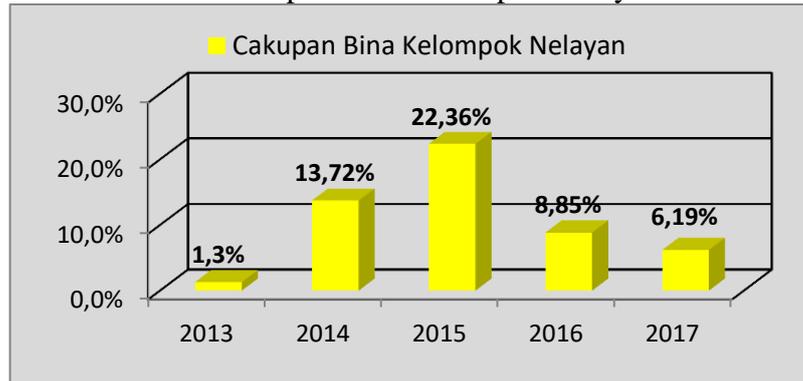
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan hasil konsumsi ikan dari tahun 2013-2017 presentase konsumsi ikan masih berada pada kisaran 45-56 persen. Ikan sebagai sumber protein sangat relevan untuk mendukung

program pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, oleh Karena itu konsumsi ikan merupakan salah satu memasyarakatnkan gemar makan ikan.

2.1.3.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Grafik 2.178
Cakupan Bina Kelompok Nelayan



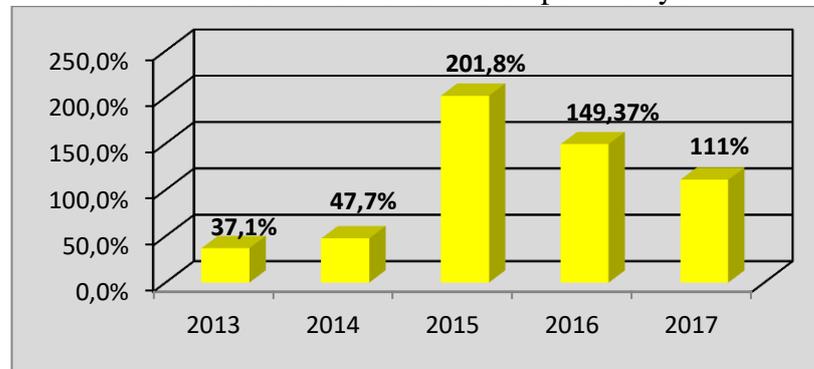
Sumber: Data Diolah, 2018

Kegiatan pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap dengan capaian meningkatnya fasilitas pendukung perikanan tangkap melalui pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan yaitu alat bantu penangkapan ikan (kapal perikanan) dan beberapa alat tangkap yang diharapkan dapat meningkatkan produksi penangkapan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan untuk tahun 2013 sebanyak 3 kelompok, tahun 2014 sebanyak 31 kelompok, tahun 2015 sebanyak 53 kelompok, dan tahun 2016 sebanyak 20 kelompok dan tahun 2017 sebanyak 14 kelompok. Pemberian bantuan ini juga bervariasi dimana tahun 2015 cukup tinggi dan di tahun 2017 malah lebih kecil, hal ini tentu tidak terlepas dari salah satu pengalokasian anggaran atau didasarkan atas usulan kelompok.

2.1.3.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Grafik 2.179
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.4. Penunjang Urusan

2.1.3.4.1. Keuangan

2.1.3.4.1.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Rumus : Opini BPK Terhadap Hasil Audite Laporan Keuangan Daerah

Tabel 2.55
Indikator Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1	2013	WDP	Hasil Audit LKPD Tahin 2012
2	2014	WDP	Hasil Audit LKPD Tahin 2013
3	1015	WDP	Hasil Audit LKPD Tahin 2014
4	2016	WTP	Hasil Audit LKPD Tahin 2015
5	2017	WTP	Hasil Audit LKPD Tahin 2016

Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat hasil audite atas laporan keuangan daerah tahun 2017, dimana opini BPK –RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2017 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kab. Bone T.A 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bila dibandingkan dengan hasil audit BPK-RI Terhadap LKPD Pemerintah Kab. Bone selama tiga tahun sebelumnya sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas menunjukkan bahwa Opini WTP yang telah diperoleh di tahun 2016, telah dapat dipertahankan pada tahun 2017. Perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis ini selama tahun 2014-2017, dimana capaian ini merupakan capaian tertinggi yang di raih pertama kalinya dan dapat di pertahankan dua tahun berturut-turut dalam sepuluh tahun terakhir terkait pencapaian kinerja pengelolaan keuangan pemerinta kab.Bone.

Begitupun Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Bone juga terus mengalami perbaikan yang signifikan berdasarkan perbandingan jumlah temuan dan rekomendasi beserta nilai rupiah dari hasil audit BPK-RI atas LKPD T.A.2016. Selain itu,pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah Kab.Bone khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, beberapa catatan temuan dan rekomendasi BPK-RI yang perlu di perhatikan kedepanya agar tidk berulang sebagai temuan, yang secara garis besar meliputi 2 aspek pemeriksaan, yaitu :

a. Sistem pengendalian internal :

- Penata usahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran belum tertib sepenuhnya;
- Penata usahaan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) tidak tertib;
- Penata usahaan persiapan pada beberapa SKPD belum tertib sepenuhnya;
- Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios, dan lods Pasar Sentral Palakka watampone belum didukung dengan

bukti perikatan dan pembelian yang telah lunas belum di proses bukti kepemilikannya;

- Potensi penerimaan daerah dari retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dan sewa atas bangunan tanah untuk bangunan mesin ATM pada pemerintah kabupaten bone belum dipungut;
 - Penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan hibah;
 - Penerimaan dan penggunaan dana BOS SD, SMP Dan SMA/SMK T.A 2016 dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan kepada pemerintah kabupaten bone tidak dianggarkan dalam APBD.
- b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun. Secara umum hal ini tersebut terjadi karena masih cukup lemahnya pengendalian internal dan tindak lanjut terkait hal-hal tersebut diatas dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

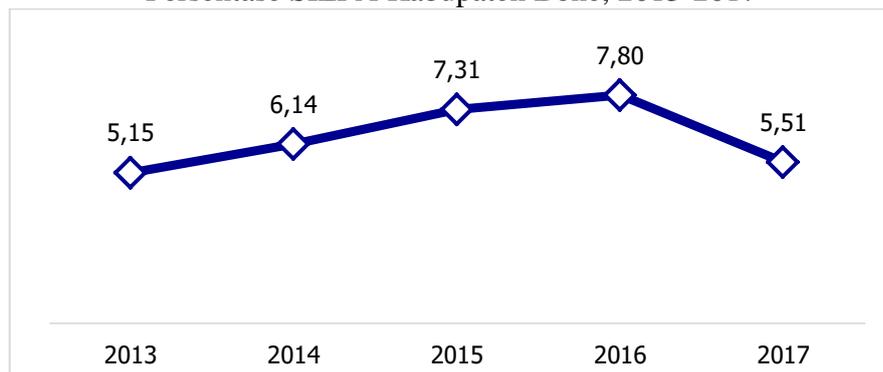
2.1.3.4.1.2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan

Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Proporsi SILPA dalam APBD Kabupaten Bone cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2017. Tahun 2014, Kabupaten Bone mencatat proporsi SILPA terhadap APBD sebesar 6,14 persen, naik dari 5,15 persen tahun 2013. Karena terjadi kenaikan SILPA yang cukup besar pada tahun 2015, proporsinya terhadap APBD juga meningkat menjadi 7,31 persen dan mencapai angka tertinggi tahun 2016 sebesar 7,80 persen. Namun pada tahun 2017, SILPA Kabupaten Bone berkurang sehingga menyebabkan proporsinya menurun ke 5,51 persen.

Grafik 2.180
Persentase SILPA Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

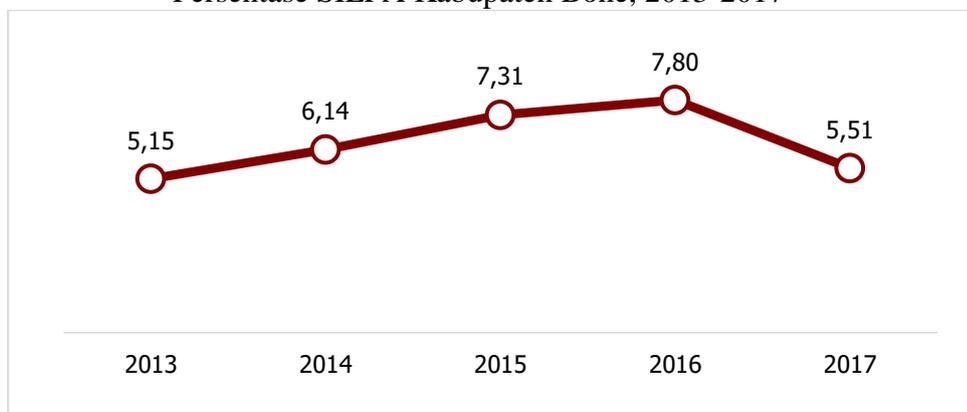
2.1.3.4.1.3. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan

pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Proporsi SILPA dalam APBD Kabupaten Bone cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2017. Tahun 2014, Kabupaten Bone mencatat proporsi SILPA terhadap APBD sebesar 6,14 persen, naik dari 5,15 persen tahun 2013. Karena terjadi kenaikan SILPA yang cukup besar pada tahun 2015, proporsinya terhadap APBD juga meningkat menjadi 7,31 persen dan mencapai angka tertinggi tahun 2016 sebesar 7,80 persen. Namun pada tahun 2017, SILPA Kabupaten Bone berkurang sehingga menyebabkan proporsinya menurun ke 5,51 persen.

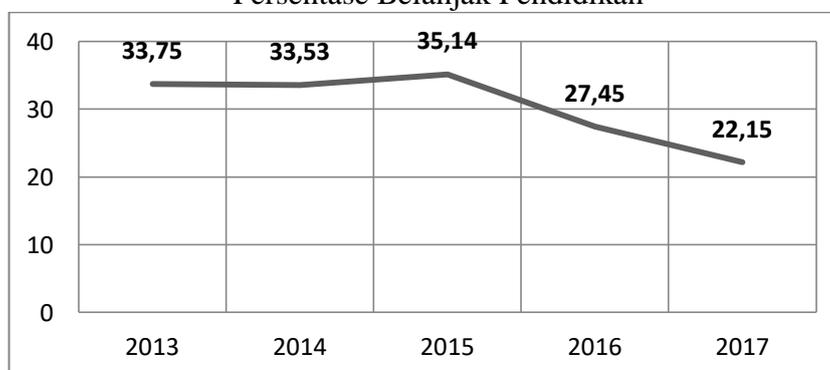
Grafik 2.181
Persentase SILPA Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.4.1.4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Grafik 2.182
Persentase Belanja Pendidikan



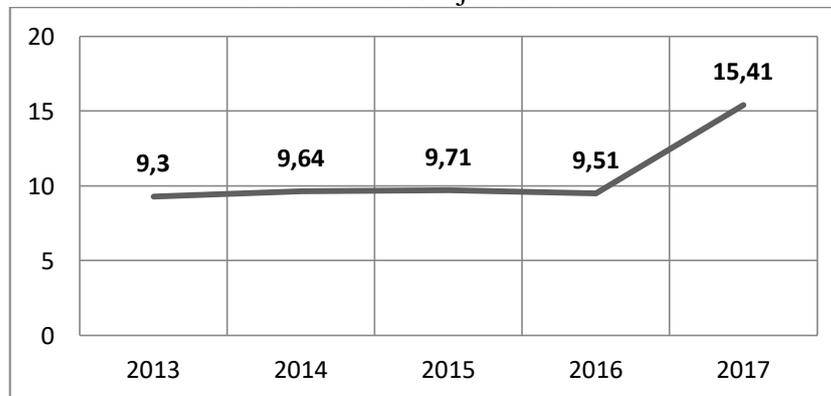
Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan grafik diatas persentase belanja pendidikan terhadap total APBD prkuatatif sejak tahun 2013 sampai 2017 dikarenakan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 alokasi anggaran dari pemerintah pusat cukup besar yang disebar di Dana Alokasi Khusus Pendidikan, BOS dan belanja Sertifikasi sehingga meningkatkan persentase belanja pendidikan sebesar rata-rata 35% dari total APBD. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan hingga 22.15% dikarenakan anggaran DAK pendidikan yang mengalami penurunan, namun secara Nasional anggaran tersebut masih di atas persentase yang dialmanahkan dalam belanja pendidikan dan prioritas Kabupaten Bone akan terus berupaya untuk meningkatkan anggaran Pendidikan sesuai Visi Kabupaten Bone yang Cerdas.

2.1.3.4.1.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Grafik 2.183
Persentase Belanjak Kesehatan



Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan grafik di atas, persentase Belanja Kesehatan dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 persentase Belanja Kesehatan terhadap APBD masih 9.30% dikarenakan anggaran belanja yang terdapat di APBD tahun 2013 masih dinamis oleh belanja Pegawai sehingga Pengalokasian anggaran sektor kesehatan belum memenuhi standar minimum yang diisyaratkan sebesar 10%. Pada tahun 2014 masih berada di posisi 9.64% , sama yang terjadi pada tahun sebelumnya belum memenuhi standar minimum dikarenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2015 posisi anggaran sektor kesehatan sebesar 9.71% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp.40.254.277.405, walaupun mpersentase dari total APBD mengalami penurunan 0.20% dikarenakan meningkatnya alokasi Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2017 pengalokasian pada sektor kesehatan sebesar 15.41% menebihi standar minimum 10%, hal ini disebabkan karena konsistensi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ters ditingkatkan serta terintegrasi Program

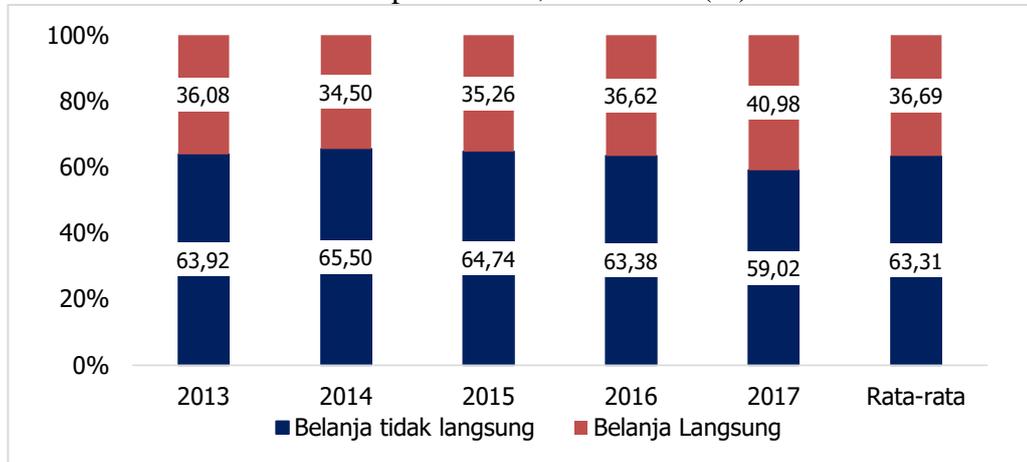
Nasioanal prioritas Daerah sehingga anggaran kesehatan melebihi target Nasional.

2.1.3.4.1.6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi APBD yang besar untuk belanja langsung akan berdampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya ketika komponen belanja langsung paling dominan adalah belanja modal.

Namun, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, Kabupaten Bone mengalokasikan sebagian besar APBD untuk membiayai belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Secara rata-rata hampir 2/3 APBD Kabupaten Bone digunakan untuk belanja tidak langsung, sementara untuk belanja langsung hanya 1/3. Tahun 2013 misalnya, proporsi belanja tidak langsung dalam struktur APBD Kabupaten Bone mencapai 62,71 persen, sementara belanja langsung hanya 35,40 persen. Proporsi belanja tidak langsung semakin membesar pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing 63,47 persen dan 63,76 persen dan proporsi belanja langsung menurun ke 33,43 persen, sebelum sedikit penambahan menjadi 34,72 persen. Penurunan alokasi APBD untuk belanja tidak langsung berlangsung di tahun 2016 sebesar 63,46 persen dan berlanjut ke 2017 menjadi 60,08 persen, dan pemerintah daerah menambah alokasi untuk belanja langsung sebesar 36,67 persen dan 41,71 persen per tahun 2016 dan 2017. Meskipun proporsi belanja tidak langsung menurun di dua tahun terakhir, namun angkanya masih relatif tinggi.

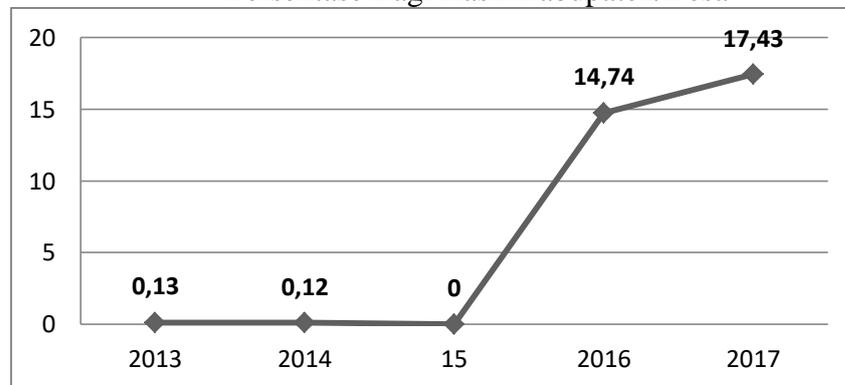
Grafik 2.184
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Bone, 2013-2017 (%)



Sumber: Perda APBD Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, 2013-2018

2.1.3.4.1.7. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Grafik 2.185
Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Desa



Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan grafik diatas, persentase Bagi Hasil Kabupaten Bone Kepemerintah Desa masih sangat minim, dimana angka tersebut masih dibawah 1% hal ini disebabkan karena masih terbatasnya anggaran khusus yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sehingga berdampak terhadap besaran yang diberikan kepada pemerintah Desa. Pada tahun 2016 dan 2017 setelah terbitnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pemerintah Kabupaten wajib memberikan anggaran sebesar 10% dari Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi di daerah.

2.1.3.4.1.8. Penetapan APBD

Tabel 2.56
Penetapan APBD

No	Tahun	Waktu Penetapan APBD	Ket.
1	2013	20/02/2013 Tidak Tepat Waktu	
2	2014	24/12/2013 Tepat Waktu	
3	2015	24/12/2014 Tepat Waktu	
4	2016	22/12/2015 Tepat Waktu	
5	2017	30/11/2016 Tepat Waktu	

Sumber: Data Diolah, 2018

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan penetapan APBD Kabupaten Bone tahun 2013 mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena penyusunan anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Pagu Indikatif dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan dan dinamika pembahasan anggaran Pendapatan Belanja Daerah cukup panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tidak dapat dilaksanakan penetapan APBD sesuai ketentuan yang ada. Pada tahun 2014 sampai 2017 pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Bone dilaksanakan dengan sinergitas baik eksklusif maupun legislative sehingga penetapan anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tepat waktu sebelum 31 Desember.

2.1.3.4.2. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

2.1.3.4.2.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel 2.57

Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

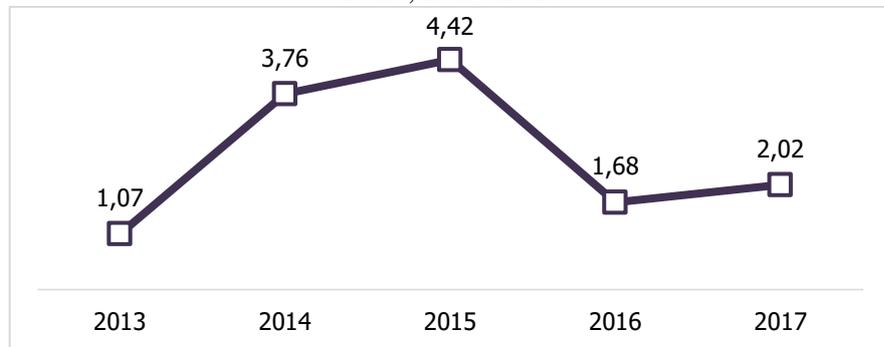
Bidang Urusan/Indikator	Realisasi Capaian					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 JP	6 JP	5 JP	5 JP	7 JP	7 JP

Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.3.4.2.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan dua instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, sebab melalui pendidikan dan pelatihan ASN dapat meningkatkan kapasitas pelayanan mereka kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Bone fluktuatif. Pada tahun 2013, tercatat hanya 1,07 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Bone, yang berarti masih ada 98,93 persen ASN belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di tahun tahun tersebut. Angka persentasenya perlahan naik dari 3,76 persen tahun 2014 menjadi 4,42 persen tahun 2015, sebelum akhirnya menurun ke 1,68 persen dan 2,02 persen. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Bone belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Grafik 2.186
 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Bone, 2013-2017

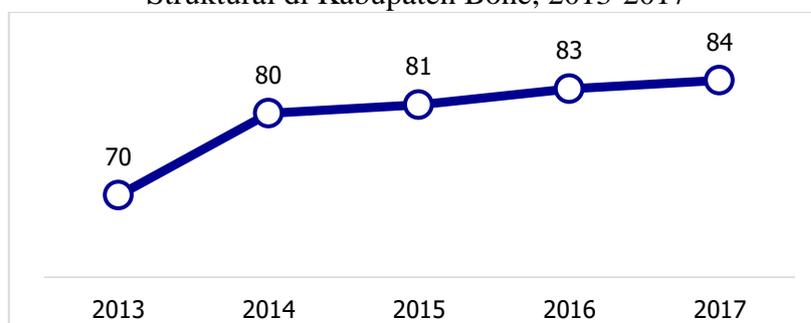


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.4.2.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Berbeda dengan persentase ASN, angka persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Bone sepanjang tahun 2013 sampai 2017 terus meningkat. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2014, dimana persentase naik dari 70 tahun 2013 persen menjadi 80 persen. Setelah tahun 2014, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Bone konsisten menaik meski cenderung lebih lambat, masing-masing hanya mencapai 81 persen tahun 2015, 83 persen tahun 2016, dan 84 persen tahun 2017.

Grafik 2.187
 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Bone, 2013-2017

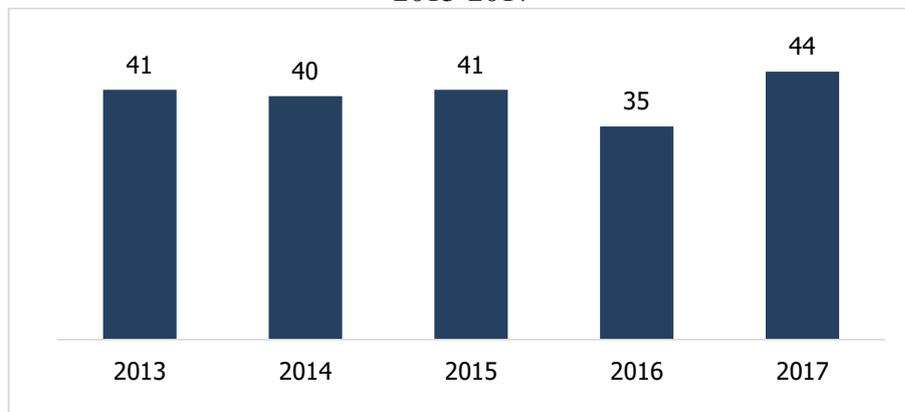


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.4.2.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Hanya di tahun 2016 sempat mengalami penurunan signifikan dalam jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari 41 jabatan menjadi 35 jabatan, sebelum akhirnya pada tahun 2017 kembali bertambah menjadi 44 jabatan.

Grafik 2.188
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone, 2013-2017

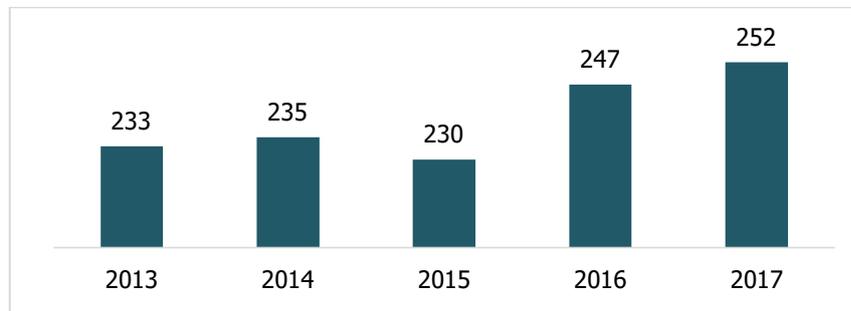


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.4.2.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Berbeda dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang tidak banyak mengalami perubahan, jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone justru cenderung bertambah. Pada tahun 2014, jumlah orang yang menjabat jabatan administrasi bertambah, dari 233 orang menjadi 235 orang, sebelum menurun di tahun 2015 sebanyak 230 orang. Pada tahun 2016, terjadi penambahan cukup banyak ASN yang menjabat jabatan administrasi di Kabupaten Bone hingga mencapai 247 orang, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 sebanyak 252 orang sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga 2017.

Grafik 2.189
 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone,
 2013-2017

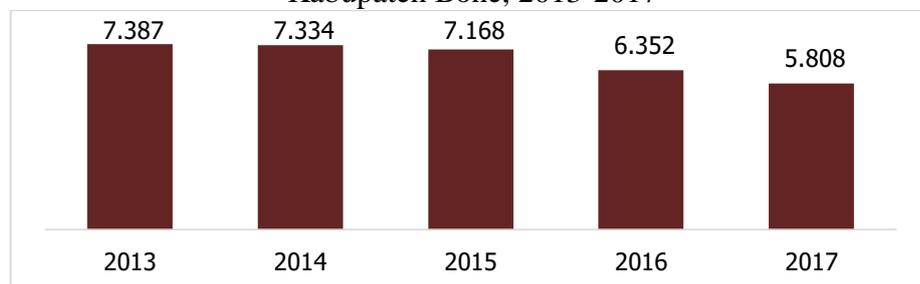


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.4.2.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berkurang. Jumlah pemagku jabatan fngsional paling banyak mencapai 7.387 orang tahun 2013, kemudian perlahan turun ke 7.334 orang tahun 2014 dan 7.168 orang tahun 2015. Penurunan paling banyak terjadi di tahun 2016, ketika jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone hanya 6.352 orang dan terus berlanjut di tahun 2017 sebanyak 5.808 orang.

Grafik 2.190
 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di
 Kabupaten Bone, 2013-2017



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bone, 2018

2.1.3.4.3. Penelitian dan Pengembangan

2.1.3.4.3.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.58
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan Dalam Rkpd	Jumlah Kelitbangan Dalam Rpjmd	%
1	2013	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2014	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
4	2016	8 Kegiatan Kelitbangan	8 Kegiatan Kelitbangan	100 %
5	2017	9 Kegiatan Kelitbangan	9 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kelitbangan Dalam RRPD pada Tahun 2013, 2014 dan 2015 jumlah kegiatan Kelitbangan masing-masing sebanyak 2 kegiatan sedangkan di Tahun 2016 kegiatan Kelitbangan meningkat menjadi 8 kegiatan Kelitbangan dan di Tahun 2017 sebanyak 9 kegiatan Kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone. Dan Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD pada Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sama dengan jumlah Kelitbangan dalam RRPD sehingga Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan dapat terlaksana 100 %.

2.1.3.4.3.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.59
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

No	Tahun	Jumlah Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah	%
1	2013	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
2	2014	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
3	2015	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
4	2016	2 Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan Kelitbangan	100 %
5	2017	4 Kegiatan Kelitbangan	4 Kegiatan Kelitbangan	100 %

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone menjadi 100 % dimana Jumlah Kelitbangan yang ditindak lanjuti mulai Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebanyak 2 Kegiatan Kelitbangan, dan di tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 4 kegiatan Kelitbangan. Demikian pula dengan Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah dari tahun 2013,214,2015,2016 masing-masing sebanyak 2 kegiatan Kelitbangan dan di Tahun 2017 sebanyak 4 Kegiatan Kelitbangan.

2.1.3.4.3.3. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Tabel 2.60
Persentase Unit Kerja yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	Jumlah Total Perangkat Daerah	%
1	2013	-	-	-
2	2014	-	-	-
3	2015	-	-	-
4	2016	-	-	-
5	2017	75 OPD	82 OPD	2,97

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Presentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dapat terlaksana pada tahun 2017 dengan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi sebanyak 75 terdiri dari OPD, sedangkan Jumlah Total Perangkat Daerah di Kabupaten Bone sebanyak 82 OPD. Sehingga masih ada sekitar 7 OPD yang belum difasilitasi.

2.1.3.4.3.4. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah

Tabel 2.61
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

No	Tahun	Jumlah Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan	Jumlah Inovasi Yang Diusulkan	%
1	2013	2	-	-
2	2014	1	-	-
3	2015	-	-	-
4	2016	-	-	-
5	2017	-	122	-

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel diatas Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah pada Tahun 2013 Kantor Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bone telah melakukan proses penjabaran SK 2 (dua) yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menristek Dikti dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan pada Tahun 2014 Bupati Bone menindak lanjuti SK Menteri Dalam Negeri dan Menristek Dikti untuk melaksanakan sosialisasi tentang Sistem Inoasi Daerah (SIDa), di tahun 2015 Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengacu pada gambaran umum pelaksanaan Kegiatan Sistem Inovasi daerah (SIDa), sedangkan di Tahun 2016 dilaksanakan Pengumpulan data-data terkait Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan di Tahun 2017 melakukan implementasi kegiatan Sistem Inovasi daerah (SIDa). Inovasi yang diusulkan di Tahun 2013 sampai dengan 2016 belum ada karena Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone nanti di tahun 2017 menjadi Laboratorium Inovasi Administrasi Negara setelah menandatangani MOU Program Kegiatan

Akselerasi. Pengembangan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara dengan LAN RI. Dengan adanya penandatanganan MOU dengan LAN RI, berbagai OPD memasukkan usulan inovasinya ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten dengan jumlah usulan sebanyak 122.

2.1.3.4.4. Pengawasan

2.1.3.4.4.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.62

Jumlah Temuan Bpk-Ri Dan Tindak Lanjutnya

Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI beserta Tindak Lanjut Temuannya Tahun 2006-2017

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Telah Selesai Ditindak Lanjuti		% Tindak Lanjut	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai
2017	10	-	23	31.174.700,00	18	31.174.700,00	78,26%	100%
2016	9	223.447.905.068,14	30	216.041.919.432,11	18	213.160.610.266,83	60,00%	98,67%
2015	21	489.670.425,99	52	489.670.425,99	33	489.670.425,99	63,46%	100%
2014	36	1.735.280.595,00	91	1.735.280.595,00	62	1.109.095.265,00	68,13%	63,91%
2013	34	530.328.176,29	87	530.328.176,29	48	509.254.352,29	55,17%	96,03%
2012	24	64.452.865.379,77	61	2.065.688.966,00	50	1.773.509.789,65	81,97%	85,86%
2011	16	561.250.997,30	33	511.420.958,30	29	476.987.313,00	87,88%	93,27%
2010	30	952.088.450,65	100	313.914.450,65	47	313.914.450,65	47,00%	100%
2009	17	553.708.522,50	37	553.708.522,50	34	553.708.522,50	91,89%	100%
2008	39	9.612.606.800,00	66	2.475.358.600,00	59	2.310.449.398,00	89,39%	93,34%
2007	21	11.092.520,00	44	11.092.520,00	42	11.092.520,00	95,45%	100%
2006	17	2.220.503.777,48	33	1.914.616.377,48	32	1.703.776.377,48	96,97%	88,99%
TOTAL	274	304.567.300.713,12	657	226.674.173.724,32	472	222.443.243.373,39	71,84%	98,13%

Sumber: data rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil periksaan BPK-RI Per Desember 2017

Data yang terjadi pada table di atas, mengacu pada Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pengelolaan Keuangan dan Asset Lingkup Pemerintah Kab. Bone selama kurung waktu Tahun 2006-2017 yang masing tersisa proses penyelesaian tindak lanjutnya.

Berdasarkan Tabel di atas , jumlah temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK – RI dari Tahun 2006-2017 sebanyak 274 Temuan dengan 657 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nilai temuan keuangan sebesar Rp. 304.567.300.713,12 dengan Nilai yang direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sebesar Rp. 226.674.173.724,32.

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan nilai keuangannya secara umum merupakan temuan yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Dana Desa, Pengelolaan Asset, Sertifikasi Guru, dan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan serta Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Nilai Keuangan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, Pertanggungjawaban dana Desa merupakan aspek temuan yang harus mendapat perhatian lebih bahkan menjadi isu strategis hingga tingkat Nasional. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa kedepannya menjadi salah satu prioritas utama dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone tanpa mengabaikan aspek temuan lainnya, sehingga jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dapat berkurang secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya

Dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI hingga Tahun 2017, sesuai Tabel di atas diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut berdasarkan jumlah rekomendasi temuan sebesar 71,84 % dan persentase penyelesaian tindak lanjut

berdasarkan nilai rekomendasi temuan sebesar 98,13 %. Tersisa 185 Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, yang terdiri dari 173 Temuan Administratif dan 12 Temuan Keuangan dengan nilai keuangan sebesar Rp. 4.230.934.221,35.

Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK-RI sebesar 71,84 % masih kurang dari target capaian kinerja sebesar 90 % hingga Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah termasuk Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga kedepannya kinerja penyelesaian tindak lanjut ini akan ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun Tim Tindak Lanjut Kabupaten.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri atas: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita, Produktivitas Total Daerah, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa, Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum, Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR, Angka Kriminalitas Yang Tertangani, dan Rasio Ketergantungan.

2.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumahtangga perkapita di Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan secara progresif. Pengeluaran konsumsi rumahtangga tahun 2013 sebanyak Rp. 196.538 perkapita dan pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi telah mencapai Rp. 331.890 perkapita. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat meningkatnya pemenuhan

berbagai jenis kebutuhan rumahtangga. Selain itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi rumahtangga.

Tabel. 2.63
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi RumahTangga Perkapita Di Kabupaten Bone, 2013-2017 (Rp)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga Per Kapita	196.538	234.675	259.057	310.213	331.890

Sumber : Data Diolah, 2018

2.1.4.2. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Sejak lima tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi non pangan rumahtangga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2016, namun demikian kembali mengalami penurunan pada tahun 2017. Data dalam waktu lima tahun terakhir proporsi pengeluaran non pangan meningkat dari 47.58 % menjadi 48.90 %. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Asumsi tersebut berdasarkan teori Engel yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka proporsi pengeluaran untuk non pangan semakin besar.

Tabel 2.64
Perkembangan Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita di Kabupaten Bone 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	47.58 %	48.47 %	49.02 %	49.65 %	48.90 %

Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.4.3. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Jumlah kecamatan yang berstatus swasembada belum mencapai 100%. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, kecamatan yang berstatus swasembada hanya 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2016. Kecamatan yang berstatus swasembada pada tahun 2017 telah mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Bone.

Tabel. 2.65
Perkembangan Persentase Kecamatan Bersatatus Swasembada Terhadap Total Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Kecamatan Berstatus Swasembada terhadap total Kecamatan	70 %	70 %	70 %	75 %	81 %

Sumber: Data Diolah, 2018

2.1.4.4. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 2.66
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Bone, 2017

Kasus Kriminal	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Kasus yang Dilaporkan	Persentase Kasus yang Diselesaikan
Kebakaran	35	35	2,93	3,75
Perzinaan	5	9	0,42	0,96
Perjudian	6	3	0,50	0,32
Pembunuhan	8	11	0,67	1,18

Kasus Kriminal	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase Kasus yang Dilaporkan	Persentase Kasus yang Diselesaikan
Penganiayaan Berat	6	5	0,50	0,54
Penganiayaan Ringan	107	107	8,97	11,46
Pencurian Berat	3	3	0,25	0,32
Pencurian Ringan	86	49	7,21	5,25
Pencurian dengan Kekerasan	3	2	0,25	0,21
Pencurian Kendaraan Bermotor	18	12	1,51	1,28
Pencurian Hewan	8	7	0,67	0,75
Narkoba	62	58	5,20	6,21
Penggelapan	20	14	1,68	1,50
Penipuan	18	19	1,51	2,03
Pengrusakan	19	10	1,59	1,07
Panadahan	-	-	0,00	0,00
Kejahatan Lain-lain	153	121	12,82	12,96
Pelanggaran KUHP/Non KUHP	-	-	0,00	0,00
Laka Lantas	636	469	53,31	50,21
Jumlah	1.193	934	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Bone Dalam Angka 2018

Sepanjang tahun 2017, tercatat angka kriminalitas di Kabupaten Bone yang dilaporkan sebesar 1.193 kasus, namun yang bisa diselesaikan hanya 934 kasus atau 78,29 persen. Masyarakat Kabupaten Bone sebagian besar melaporkan beberapa kasus kriminal, namun yang paling banyak dilaporkan adalah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas). Pada tahun 2017, lebih dari 1/2 tindakan kriminal Laka Lantas dilaporkan ke pihak berwenang dengan jumlah kasus mencapai 636, namun yang mampu ditangani hanya 469 kasus atau 50,21 persen. Tidak hanya Laka Lantas yang tidak semua laporan mampu diselesaikan, beberapa kasus seperti pencurian ringan, pencurian kendaraan bermotor, narkoba, dan kejahatan lainnya belum sepenuhnya tuntas diselesaikan.

Pada tahun 2017, pelaporan pencurian ringan mencapai 86 kasus atau 7,21 persen dari total tindakan kriminal yang dilaporkan, tapi hanya 49 kasus yang dapat diselesaikan atau proporsinya hanya 5,25 persen dari seluruh

kasus yang diselesaikan. Begitupun dengan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dimana persentase kasus yang dilaporkan mencapai 1,51 persen sedangkan kasus terselesaikan hanya 1,28 persen.

Kasus kriminal ekstrordinari (luar biasa) seperti peredaran narkoba nampaknya juga masih sulit untuk diselesaikan di Kabupaten Bone meski pihak berwenang berupaya untuk menekan laju perdagangan obat-obat terlarang. Tahun 2017, sebanyak 62 kasus kejahatan narkoba dilaporkan, jumlah tersebut setara dengan 5,20 persen dari seluruh laporan kasus kriminal yang masuk sepanjang tahun 2017. Tetapi, pihak berwenang hanya mampu menyelesaikan sebanyak 58 kasus atau 6,21 persen dari semua kasus yang berhasil diselesaikan.

2.1.4.5. Rasio Ketergantungan

Distribusi umur penduduk dapat dikelompokkan secara baik untuk memberikan gambaran terhadap struktur umur dengan kategori usia produktif, usia tidak produktif, dan menentukan rasio ketergantungan. Data yang tersedia di tahun 2015, 2016, dan 2017 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio ketergantungan berkisar 45.9 % yang memberikan gambaran bahwa setiap usia produktif setidaknya akan menanggung beban setengah dari usia yang tidak produktif.

Tabel. 2.67
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Bone

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun			204,424	204,812	199,335
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun			62,305	67,912	73,551
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)			266,729	272,724	272,886
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun			580,069	590,930	595,306
5	Rasio ketergantungan (3)/ (4)			45.98	46.15	45.84

Sumber: BPS Kabupaten Bone

2.1.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.68
Lama Proses Pelayanan Perizinan

NO	JENIS IZIN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12 (dua belas) Hari Kerja.*
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) Hari Kerja.*
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3 (tiga) Hari Kerja.*
4	Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (IUI dan TDI)	5 (lima) Hari Kerja.*
5	Tanda Daftar Gudang	5 (lima) Hari Kerja.*
6	Izin Reklame	5 (lima) Hari Kerja.*
7	Izin Sarana Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
8	Izin Tenaga Kesehatan	5 (lima) Hari Kerja.*
9	Izin Penelitian	3 (tiga) Hari Kerja.*
10	Izin Lingkungan	3 (tiga) Hari Kerja.*
11	Izin Lokasi	5 (lima) Hari Kerja.*
12	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	5 (lima) Hari Kerja.*
13	Izin Trayek	5 (lima) Hari Kerja.*
14	Tanda Daftar Perusahaan	3 (tiga) Hari Kerja.*
15	Izin Prinsip Penanaman Modal:	
	Izin Prinsip PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perluasan PMDN	3 (tiga) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Perubahan PMDN	5 (lima) Hari Kerja.*
	Izin Prinsip Penggabungan PMDN	7 (tujuh) Hari Kerja.*
16	Izin Usaha Penanaman Modal :	
	Izin Usaha PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perluasan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Perubahan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
	Izin Usaha Penggabungan PMDN	6 (enam) hari kerja.*
17	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	3 (tiga) Hari Kerja.*

Lama proses penerbitan layanan perizinan pada tabel diatas adalah merupakan standard pelayanan maksimal, yang mana rata rata proses layanan selama 3 (tiga) hari kerja, kecuali beberapa izin yang memerlukan kajian dan kunjungan lapangan (bila diperlukan), memerlukan waktu proses layanan

perizinan lebih dari 3 hari kerja tergantung dari jumlah tim teknis yang terlibat dalam kajian teknis terkait izin tersebut. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang prosesnya mencapai 12 (dua belas) hari kerja, izin Tenaga Izin Usaha Penanaman Modal 6 (enam) hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal 7(tujuh) hari kerja dan beberapa izin yang penerbitannya maksimal 5 (lima) hari kerja.

Lama Proses layanan perizinan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat 6 pasal 4 Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017, proses pengelolaan pelayanan perizinan mengacu pada standar pelayanan.

Evaluasi kinerja terkait pelaksanaan Standar Pelayanan terkait kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP akan dimonitoring melalui kartu kontrol dan sistem monitoring oleh Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan 3 Bulan sekali yang hasilnya dipublikasikan dan dilaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Bupati. Adapun Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi yaitu : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten Bone terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dihimpun dalam satu kajian analisis. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Bone dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.

Evaluasi RKPD Kabupaten Bone Tahun 2018 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam

RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bone dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bone Tahun 2018 adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing misi, sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

A. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1: Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan yang Merata dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.69
Analisis Misi 1 Sasaran 1
Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan yang Merata

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
1.	Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata	Cakupan puskesmas dan pustu per 20.000 penduduk	Per 20.000 penduduk			3	0,35

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran yaitu cakupan puskesmas dan pustu per 20.000 penduduk telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 3 Per 20.000 penduduk dari target 1 Per 20.000 penduduk, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,35 Per 20.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 112 unit yang terdiri dari Puskesmas sebanyak 38 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 74 unit yang melayani penduduk sebanyak 866.245 jiwa. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan jumlah dana sebesar Rp.9.453.000.329 yang terealisasi sebesar Rp.8.028.302.480.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tetap dilakukan dan menjadi prioritas utama tiap tahunnya, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan maksimal.
2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2: Tersebarinya Tenaga Medis Terlatih dan Responsif Gender dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.70
Analisis Misi 1 Sasaran 2
Tersebarinya Tenaga Medis Terlatih dan Responsif Gender

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
2.	Tersebarinya tenaga medis terlatih dan responsif gender	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio 1/10.000			1,88	0,21
		Rasio tenaga medis	Rasio 1/10.000			4,38	0,30

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 2) rasio dokter per satuan penduduk telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 1,88/10.000 penduduk dari target 1/10.000 penduduk, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,21/10.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 163 orang yang melayani penduduk sebanyak 866.245. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan Peningkatan sumber daya kesehatan dengan jumlah dana sebesar Rp.3.395.000 yang terealisasi sebesar Rp.3.120.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Adanya penambahan tenaga dokter PTT dari Kemenkes yang disebar ke Puskesmas.
- 2) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kesehatan melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, seminar, lokakarya maupun studi banding.
- 3) Transfer pengetahuan dari aparatur yang telah mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya kepada aparatur lainnya.

Realisasi target pada indikator sasaran 3) rasio tenaga medis telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 4,38/10.000 penduduk dari target 1/10.000 penduduk, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,30/10.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah paramedis sebanyak 699 orang yang melayani penduduk sebanyak 866.245. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Adanya penambahan tenaga medis yang disebar ke Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.
 - 2) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kesehatan melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, seminar, lokakarya maupun studi banding.
3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terjalinnnya Hubungan sinergis Antar Penyedia Layanan Kesehatan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Analisis Misi 1 Sasaran 3
Terjalinnnya Hubungan Sinergis Antar Penyedia Layanan Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
3.	Terjalinnnya hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda	Persen	100		100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 4) Persentase Rumah Sakit Swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100%, kondisi ini sama dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebanyak 1 yakni RS Hapsah. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program upaya kesehatan masyarakat melalui kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada pusat-pusat rujukan dan instalasi medis dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.24.990.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Adanya koordinasi dan komunikasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan RS Hapsah.
 - 2) Adanya kesepahaman bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara Pemerintah Daerah dengan RS Hapsah.
4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4: Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.72
Analisis Misi 1 Sasaran 4
Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
4.	Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100		64,06	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 5) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 64,06% dari target 100% dengan jumlah kunjungan pasien yang ditanggung BPJS Kesehatan di sarana kesehatan strata 1 pada tahun 2017 sebanyak 379.710 dari jumlah penduduk yang ditanggung BPJS Kesehatan sebanyak 592.725. Capaian ini dikategorikan Cukup.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan melalui kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan dana sebesar Rp.105.858.064.500 yang terealisasi sebesar Rp.67.754.634.400.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Masih adanya masyarakat miskin peserta BPJS Kesehatan yang tidak menggunakan haknya.
- 2) Masih kurangnya sosialisasi BPJS Kesehatan dan Pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas dari BPJS Kesehatan.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Melaksanakan sosialisasi BPJS Kesehatan dan Pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas dari BPJS Kesehatan
- 2) Peningkatan kualitas layanan di seluruh tingkatan sarana kesehatan.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.73
 Analisis Misi 1 Sasaran 5
 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membudayakan
 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
5.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen			43,86	44,8

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 6) persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 43,8% dari target 45%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 44,8%. Pada tahun 2017, jumlah RT berPHBS sebanyak 38.168 dan jumlah RT yang disurvei pada tahun 2017 sebanyak 87.022. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan dana sebesar Rp.29.890.000 yang terealisasi sebesar Rp.29.870.000.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga.
- 2) Masih ditemukannya pembuangan sampah yang tidak sesuai syarat-syarat kesehatan.

Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, antara lain:

- 1) Sosialisasi peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.
- 2) Peran aktif petugas kesehatan yang memberikan penyuluhan baik itu di kecamatan, desa, sekolah-sekolah yang dilakukan secara rutin.

- 3) Program desa bebas ODF (*Open Defecation Free*) dan bebas dari rokok yang saat ini telah digalakkan di seluruh desa.
6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6: Berkurangnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.74
 Analisis Misi 1 Sasaran 6
 Berkurangnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
6.	Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita	Angka kematian ibu	/100.000 KH			67,3	87,05
		Angka kematian balita	/100.000 KH			0,37	0,51
		Angka kematian bayi	/100.000 KH			5,83	1,01

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada 3 indikator sasaran tidak mencapai target, namun demikian sesungguhnya kondisi ini yang diharapkan adalah semakin berkurangnya kematian ibu, kematian balita dan kematian bayi maka kinerja indikator sasaran semakin baik.

Indikator sasaran 7) angka kematian ibu tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 67,3% atau 9/100.000 KH kematian ibu dari target 12/100.000 KH jumlah kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 87,05%. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Indikator sasaran 8) angka kematian balita tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 0,37/1.000 KH dari target 8,4/1.000 KH jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 tahun), mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,51/1.000 KH. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Indikator sasaran 9) angka kematian bayi tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 5,83/1.000 KH dari target 7,6/1.000 KH jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 tahun), mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1,01/1.000 KH namun belum melampaui target jumlah kematian bayi. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan pelayanan berkala bagi ibu hamil dan melahirkan dengan dana sebesar Rp.4.879.353.750 yang terealisasi sebesar Rp.2.163.777.850.

Adapun keberhasilan pencapaian penurunan angka kematian ibu, kematian balita dan kematian bayi disebabkan oleh :

- 1) Terjalannya kerjasama lintas sektoral melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Peduli “Indo ta’ Anak ta’ di 15 kecamatan yang tinggi/banyak kematian ibu dan bayinya.
- 2) Upaya peningkatan akses ibu bersalin yang berkomplikasi dengan penambahan sarana prasarana Rumah Sakit dan tenaga dokter ahli obgine dan anak.
- 3) Peningkatan kapasitas tenaga bidan (sebanyak 960 orang, 32 angkatan), kapasitas Ibu bersalin melalui *Midwifery Update* yang dilaksanakan IBI Cab. Bone kerjasama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
- 4) Peningkatan upaya sistem rujukan Ibu bersalin berkomplikasi dengan menyiapkan *Call-Centre* di semua RS, PONEK maupun Non PONEK.
- 5) Peningkatan pelayanan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dengan cakupan 63,29% dan peningkatan kapasitas nakes dan pelayanan SDIDTK sebanyak 20 orang.
- 6) Pelaksanaan Jampersal berupa :
 - a. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Wilayah Puskesmas yang akses sulit sebanyak 7 (tujuh) RTK masing-masing Puskesmas.
 - b. Penyediaan dana transport bagi pendamping untuk mengantar ibu hamil bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Jaminan pembiayaan persalinan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan.

7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7: Berkurangnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.75
 Analisis Misi 1 Sasaran 7
 Berkurangnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
7.	Berkurangnya angka kematian ibu, bayi dan balita	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP rate/10.000 penduduk usia < 15 tahun	/100.000			3	2
		Persentase penemuan penderita pneumonia balita	Persen			1,82	17,08
		Persentase penemuan pasien baru TB BTA +	Persen			73,7	58,15
		Persentase penderita DBD yang ditangani	Persen			100	100
		IR HIV/AIDS / 100.000 pendudu	Persen			100	100
		Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyedilikan epidemiologi < 24 jam	Persen			100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat 6 indikator sasaran yang realisasinya terdiri dari 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target dan 3 indikator sasaran yang mencapai target serta 1 indikator sasaran yang melebihi target. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: realisasi target dari indikator sasaran 10) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP rate/10.000 penduduk usia < 15 tahun tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 3/10.000 penduduk usia < 15

tahun dari target 4/10.000 penduduk usia < 15 tahun. Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 2/10.000 penduduk usia < 15 tahun maka realisasi tersebut telah mengalami peningkatan jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP rate. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah dengan dana sebesar Rp.4.960.000 yang terealisasi sebesar Rp.3.060.000. Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena peran serta masyarakat yang kurang tentang pentingnya pemeriksaan AFP.

Solusi atas masalah tersebut dapat diatasi melalui :

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pemeriksaan AFP.
- 2) Pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah dengan melibatkan orang tua.

Realisasi target pada indikator sasaran 11) persentase penemuan penderita pneumonia balita tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 1,82% dari target 27,89% dengan jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 17,08%. Pada tahun 2017, jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani sebanyak 543 dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 29.763. Capaian ini dikategorikan Kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (ISPA) dengan dana sebesar Rp.5.060.000 yang terealisasi sebesar Rp.5.060.000 (100%).

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Terlambatnya penegakan diagnosa karena ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter.
- 2) Banyaknya kasus yang menjadi gawat darurat yang langsung berkunjung ke Dokter Praktek atau ke Rumah Sakit sehingga tidak tercatat di Puskesmas dan data yang di ambil hanya dari data hasil pencacatan di Puskesmas.

Solusi atas masalah tersebut adalah :

- 1) Peningkatan koordinasi dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Dokter Praktek agar data-data penanganan penderita pneumonia balita dapat terintegrasi dan valid.
- 2) Petugas Puskesmas lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan dan identifikasi penderita pneumonia balita melalui kunjungan maupun sosialisasi.

Realisasi target pada indikator sasaran 12) persentase penemuan pasien baru TB BTA + telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 73,7% dari target 58%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 58,15%. Pada tahun 2017, jumlah penderita baru yang ditemukan sebanyak 390 orang dan jumlah perkiraan penderita baru pada tahun 2017 sebanyak 529 orang. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB-Paru) dengan dana sebesar Rp.8.660.000 yang terealisasi sebesar Rp.7.560.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Pelibatan RS dalam pelayanan penyakit TB dengan DOTS (Directly Observed Treatment, Short-Cours).
- 2) Pembentukan pos TB desa dan aktifnya gerakan “Ketuk Pintu” oleh kader.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri bila ada gejala TB.

Realisasi target pada indikator sasaran 13) persentase penderita DBD yang ditangani telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100%, kondisi ini sama dengan pencapaian tahun 2016 yakni 100%. Pada tahun 2017 jumlah penderita DBD yang ditangani sebanyak 44 orang dari jumlah perkiraan penderita baru sebanyak 44 orang. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk dengan dana sebesar Rp.200.008.900 yang terealisasi sebesar Rp.199.818.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Aktifnya gerakan 1 rumah 1 jumatik, pemberian Abate, dan *fooging focus*.
- 2) Semua penderita DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan di sarana kesehatan baik itu RS dan Puskesmas.

Realisasi target pada indikator sasaran 14) IR HIV/AIDS / 100.000 penduduk telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah penderita IR HIV/AIDS yang tertangani pada tahun 2017 sebanyak 29 orang dari jumlah Penderita IR HIV/AIDS sebanyak 29 orang. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2016 yang penanganan penderita 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV-AIDS) dengan dana sebesar Rp.5.120.000 yang terealisasi sebesar Rp.4.880.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Cepatnya penanganan pihak Rumah Sakit terhadap pasien.
- 2) Keberhasilan sosialisasi pengobatan kepada para penderita IR HIV/AIDS

Realisasi target pada indikator sasaran 15) cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 telah mencapai 100% dari target 100% jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2016 yang penanganan KLB mencapai 100%. Pada tahun 2017 sebanyak 8 KLB di desa/kelurahan yang semuanya dapat ditangani. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan peningkatan survailance Epidemiologi dan Penanggualngan Wabah dengan dana sebesar Rp.14.480.000 yang terealisasi sebesar Rp.14.320.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan:

- 1) Sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB berjalan dengan baik
- 2) Jejaring survailance berjalan dengan baik pula.

8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Status gizi masyarakat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.76
 Analisis Misi 1 Sasaran 8
 Meningkatnya Status gizi masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
8.	Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen			100	49

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 16) persentase balita gizi buruk telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target <0,05% jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2106 yang penanganannya hanya mencapai 49%. Pada tahun 2017, seluruh balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 15 orang telah ditangani. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program perbaikan gizi masyarakat penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya yang anggarannya Rp.18.625.000 terealisasi 100%.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Pembinaan TPG (Tenaga Petugas Gizi) untuk mengadakan kegiatan survailance gizi di wilayah kerjanya berjalan dengan baik, keaktifan TPG melakukan pelacakan apabila ada indikasi gizi buruk dari hasil penimbangan yang dilakukan di posyandu; dan
- 2) Adanya laporan masyarakat dan aktifnya penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola asuh bagi balita.

9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9: Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi dapat dijelaskan sebagai berikut berikut:

Tabel 2.77

Analisis Misi 1 Sasaran 5

Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
9.	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen			84,4	77,64

Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 17) cakupan penduduk yang mengakses sanitasi layak dan berkelanjutan telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 84,4% dari target 72,59%, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sebesar 77,64%. Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga yang mengakses sanitasi sebanyak 161.596 dari 191.363 jumlah rumah tangga. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan lingkungan sehat melalui kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat dengan anggaran sebesar Rp.11.450.000 yang terealisasi sebesar Rp.11.430.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Keberhasilan program STBM yang didukung oleh pemerintah setempat.
- 2) Partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan sanitasi yang tersedia di wilayah masing-masing

10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.78
 Analisis Misi 1 Sasaran 13
 Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
10.	Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif	Rasio Akseptor KB Aktif	Persen			66,69	66,05

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 18) rasio akseptor KB aktif tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 66,69% dari target 72,59% dengan jumlah peserta KB aktif (PA) pada tahun 2017 sebanyak 86.631 dari 128.901 jumlah pasangan usia subur (PUS). Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai 66,05%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Masih kurangnya sosialisasi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh PLKB dan PKB di lapangan.
- 2) Masih kurangnya Pelatihan MKJP Bidan
- 3) Tingginya angka *drop out* (DO) karena kualitas layanan yang belum optimal.

11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.79
Analisis Misi 1 Sasaran 11
Meningkatnya Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
10.	Meningkatnya Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi	Cakupan Tenaga Terlatih Aktif PIK KRR	Persen			540	540

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 19) Cakupan Tenaga Terlatih Aktif PIK KRR telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 540 orang dari target 540 orang. Kondisi ini sama dengan tahun 2016. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Adanya dukungan dari pihak sekolah kegiatan PIK KRR
- 2) Anak-Anak di Sekolah telah merasakan manfaat dari PIK R yaitu mereka terhindar dari triak KRR.
- 3) Adanya dukungan tokoh masyarakat dalam kegiatan PIK RR.

B. Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12: Meningkatnya Akses Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat yang Makin Setara dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.80
Analisis Misi 2 Sasaran 12
Meningkatnya Akses Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat yang Makin Setara
dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
12.	Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	APK					
		• PAUD (0-6 tahun)	Persen			67,35	60,45
		• SD / MI	Persen			105,45	91,26
		• SMP/ MTS	Persen			97,95	84,75
		APM					
		• PAUD (0-6 tahun)	Persen			99,98	89,12
		• SD / MI	Persen			94,87	81,15
		• SMA/MA/SMK	Persen			-	-
		APS					
		• PAUD (0-6 tahun)	Persen			0,07	0,07
		• SD / MI	Persen			0,03	0,03
		• SMA/MA/SMK	Persen			-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 20) APK PAUD (0-6 tahun) tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 67,35% dari target 84,90%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 mengalami peningkatan yang hanya mencapai 60,45%. Capaian ini dikategorikan Cukup.

Adapun ketidak berhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD.

Solusi yang dapat dilakukan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 20) APK SD/MI telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 105,87% dari target 105,45%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 91,25%. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Adanya dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang membiayai peserta didik yang kurang mampu dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang melibatkan peserta didik.
- 2) Telah tersedianya sarana prasarana pada Sekolah SD/MI Tahun 2017 sebanyak 12 (dua belas) Sekolah SD yang telah direhabilitasi dengan Jumlah Anggaran Rp.2.496.000.000.- dan 1 (Satu) Sekolah SD pembangunan Ruang Kelas Baru dengan jumlah Dana Rp.148.201.500.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 20) APK SMP/MTs telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 97,95% dari target 97,95%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 84,75%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan adanya distribusi Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Dana DAK Fisik terdiri dari : 5 (lima Paket Pembangunan Gedung Laboratorium IPA dengan Anggaran: Rp.1.446.664.050.00 telah direhabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Penunjang lainnya sebanyak 15 (lima belas) Ruang dengan Anggaran Rp.1.450.241.150.00.
- 2) Penduduk yang berusia 13-15 tahun yang tidak bersekolah makin mengerucut sehingga persentase anak usia tersebut yang bersekolah di SMP/MTs adalah makin besar. Capaian tersebut turut ditunjang oleh adanya sekolah satu atap (satap) dan juga dana BOS yang dikururkan ke sekolah-sekolah penerima. Walau demikian, masih terdapat kesenjangan 2,05% anak usia tersebut yang perlu didorong untuk kembali bersekolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 21) APM SD/MI telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 99,98% dari target 99,85%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 89,12%. Pada tahun 2017, jumlah siswa usia 7–12 tahun dijenjang SD/MI/paket A sebanyak 86.359 dari jumlah penduduk kelompok usia 7–12 tahun sebanyak 86.520. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Bertambahnya anak usia sekolah SD/MI yang bersekolah tepat waktu.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana kelas yang makin baik seperti meja bangku, ruang kelas yang layak
- 3) Adanya alat peraga dan media pembelajaran yang makin lengkap yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi siswa untuk bersekolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 21) APM SMP/MTs telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 94,87% dari target 91,06%, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 81,55%. Jumlah siswa usia 13–15 tahun dijenjang SMP/MTS/paket B sebanyak 36.658 orang dari jumlah penduduk kelompok usia 13–15 tahun sebanyak 40.745 orang. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Bertambahnya anak usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu yaitu 94,87%. Hanya 5,13% siswa SMP/MTs yang berusia di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun.
- 2) Penyebaran SMP/MTs sampai pada wilayah-wilayah terpencil.
- 3) Sarana pembelajaran siswa makin tersedia dalam berbagai varian sehingga memiliki serangkaian pilihan sesuai dengan minat dan kesenagannya. Termasuk sarana perpustakaan dan laboratorium.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 22) APS SMA/MA tidak mencapai target. Hal ini diakibatkan APS SMA/MA bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bone. APM SMA/MA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 22) APS SD/MI telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 0,07% dari target 0,1% dengan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI. Kondisi ini sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 0,07%. Pada tahun 2017, angka putus sekolah sebanyak 61 orang dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 88.236 orang. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Motivasi anak usia SD untuk bersekolah masih tinggi. Siswa terdorong oleh adanya rasa ketertinggalan oleh anak-anak lain yang bersekolah sehingga merasa terpanggil untuk ikut sekolah
- 2) Adanya kucuran dana BOS yang membantu siswa berkekurangan dalam hal uniform dan alat-alat belajar.
- 3) Jarak sekolah dengan tempat tinggal siswa makin terjangkau sehingga anak yang masih tertarik untuk bersekolah dapat terpenuhi.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 22) APS SMP/MTs telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 0,03% dari target 0,11%. Kondisi ini sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 0,03%. Pada tahun 2017, jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTS sebanyak 12 dari 40.005 orang jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Motivasi anak usia SMP/MTs untuk bersekolah masih tinggi. Siswa terdorong oleh adanya rasa ketertinggalan oleh anak-anak lain yang bersekolah sehingga mereka merasa terpanggil untuk ikut sekolah.
- 2) Adanya motivasi orang tua untuk menamatkan putra-putrinya di SMP/Mts
- 3) Adanya kucuran dana BOS yang membantu siswa berkekurangan dalam hal uniform dan alat-alat belajar.

- 4) Sarana gedung sekolah, gedung perpustakaan dan laboratorium terus dibenahi sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi siswa SMP/MTs.
- 5) Akses mencapai sekolah makin terjangkau sehingga anak yang masih memiliki hasrat untuk bersekolah dapat terpenuhi.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 21) APM SMA/MA tidak mencapai target. Hal ini diakibatkan APM SMA/MA bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. APM SMA/MA merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.81
Analisis Misi 2 Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	Unit	458	155	146	141
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	9.000	33.286	31.089	22.617
		Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	15.293	25.936	24.458	21.842

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 sasaran indikator, yang melebihi target sebanyak 1 sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 2. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Realisasi target pada

indikator sasaran 23) jumlah perpustakaan yang memenuhi standar tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2018 hanya mencapai 155 unit dari target 458 unit.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.1.301.350.000 yang terealisasi sebesar Rp.1.301.326.800 (99.9%).

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Minimnya anggaran yang dimiliki.
- 2) Minimnya sumber daya manusia dibidang perpustakaan.

Solusi terhadap masalah yang dihadapi adalah :

- 1) Peningkatan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan
- 2) Penggunaan anggaran dana desa untuk membantu dalam pelaksanaan peningkatan jumlah perpustakaan untuk mendorong terwujudnya minat baca bagi masyarakat desa.

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14: Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kemajuan Organisasi Pemuda Serta Jiwa Kewirausahaan Pemuda dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82
Analisis Misi 2 Sasaran 14
Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kemajuan Organisasi Pemuda Serta Jiwa
Kewirausahaan Pemuda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Capaian		
					2018	2017	2016
14.	Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda serta jiwa kewirausahaan pemuda	Persentase cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	Persen	100 (8 Cabang olah raga)		50	40

Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator persentase cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 50% dari target 100%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian 40% pada tahun 2016, maka mengalami peningkatan. Jumlah medali yang diperoleh sebanyak 4 medali dari 8 jumlah cabang olahraga yang diikuti yaitu Atletik, Judo, Tinju, Taekwondo, Karate, Sepak Takraw, Bola Basket dan Bulu Tangkis. Dari 8 kompetisi yang diikuti tingkat nasional hanya cabang olahraga Judo yang mendapatkan medali yaitu 2 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Capaian ini dikategorikan Cukup.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga melalui kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan anggaran sebesar Rp.270.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 235.980.000 (87,41%).

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Persaingan atlit-atlit pada kompetisi yang diikuti sangat ketat.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung peningkatan prestasi masih terbatas.

Solusinya adalah :

- 1) Peningkatan daya saing atlit melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Perlunya peningkatan pengalaman tanding melalui keikutsertaan atlit di kompetisi tingkat provinsi dan regional.

C. Misi 3 : Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.83
Analisis Misi 3 Sasaran 15
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
14.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Persen			9,29	9,06
		Laju inflasi	Persen			0,63	0,24
		PDRB konstan Th. 2017	Juta			18.547.305	17.504,82
		PDRB berlaku	Juta			29.142.6 92	26.414. 529
		PDRB per kapita	ADHB			38.931.2 39	35.362. 093
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persen			10,00	10,07
		IPM	Persen			65,04	63,86
		Angka usia harapan hidup	Persen			66,28	66,12
		Angka rata-rata lama sekolah	Persen			6,90	6,72
		IPG	Persen			93,52	92,81
IDG	Persen			67,19	64,21		

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 27) pertumbuhan ekonomi, realisasi pada tahun 2017 telah melebihi target yaitu 9,29% dari target 8,74%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 9,06%. Percepatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi tanaman pangan. Pada tahun 2017, perekonomian Kabupaten Bone masih ditopang oleh sektor primer dengan share terhadap PDRB sekitar 53,42%. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 28) Laju inflasi tidak mencapai target, namun demikian kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat inflasi maka kinerja perekonomian daerah semakin baik. Pada tahun 2017, tingkat inflasi daerah

mencapai 0,63% dari target 8,82%, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yakni sebesar 0,24%. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 29) PDRB Konstan mencapai target mencapai 18.547.305 dari target 17.690.143, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yakni sebesar 17.504,82. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 30) PDRB berlaku tahun 2017 telah melebihi target yakni 26.888.163 juta dari target sebesar Rp.29.142.692 juta, mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai Rp. 26.414.529 juta. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Bone. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 31) PDRB perkapita tahun 2017 telah melebihi target yakni Rp. 38,93 juta dari target sebesar Rp. 36,10 juta, mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai Rp. 35,36 juta. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Bone. Sektor tersebut merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Bone. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 32) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan tidak mencapai target. Pada tahun 2017, hanya mencapai penurunan 10% sementara targetnya sebesar 8,94%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih berada pada kondisi 10,07% maka ada peningkatan capaian penurunan penduduk miskin. Capaian ini dikategorikan Baik.

Adapun ketidakberhasilan penurunan angka kemiskinan daerah karena:

- 1) Akselarasi pelaksanaan program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum optimal ke sasaran penduduk miskin.
- 2) Monitoring dan evaluasi implementasi program penanggulangan kemiskinan belum berjalan optimal.

Solusi yang dapat dilakukan :

- 1) Percepatan akselerasi pelaksanaan program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui keikutsertaan SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 2) Intervensi program/kegiatan melalui pembiayaan APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak swasta.
- 3) Penguatan data sasaran program perlindungan sosial melalui verifikasi dan validasi data terpadu yang berbasis masyarakat dengan menggunakan indikator kemiskinan lokal daerah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 33) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melebihi target. Pada tahun 2017, mencapai 65,04 sementara targetnya sebesar 64,07. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih berada pada kondisi 63,86 maka ada peningkatan capaian IPM. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 34) Angka Harapan Hidup tidak mencapai target. Pada tahun 2017, hanya mencapai 66,28 sementara targetnya sebesar 72,5. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih berada pada kondisi 66,12 maka ada peningkatan capaian Angka Harapan Hidup. Terdapat beberapa variable yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH, salah satunya penolong persalinan. Pada Tahun 2016 persentase persalinan yang dibantu oleh tenaga medis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 85,83% menjadi 93,63%, sejalan dengan kenaikan AHH. Penanganan kelahiran yang benar merupakan salah satu harapan untuk dapat menekan atau meminimalisir tingkat mortalitas. Capaian ini dikategorikan Baik.

Solusi untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup adalah meminimalkan resiko kematian dengan cara memperbaiki berbagai faktor pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meminimalkan angka kematian bayi (AKB), menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan menerapkan pola hidup sehat.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 35) Angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai target. Pada tahun 2017, hanya mencapai 6,90 sementara targetnya sebesar 7,88. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Bone baru menyelesaikan jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih berada pada kondisi 6,72 maka ada peningkatan capaian. Capaian ini dikategorikan Baik.

Pencapaian RLS di Kabupaten Bone kenaikannya dari tahun ke tahun belum signifikan sesuai target daerah disebabkan karena:

- 1) Masih tingginya anak usia sekolah 7-18 Tahun yang tidak bersekolah.
- 2) Masih adanya wilayah-wilayah yang letaknya jauh/terpencil dari pusat pendidikan sehingga kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Solusi yang dapat dilakukan atas masalah tersebut adalah :

- 1) Pemerintah daerah melakukan strategis percepatan RLS melalui implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) baik melalui jalur formal, informal maupun non formal.
- 2) Implementasi Program GKB melibatkan peran pemerintah desa melalui sharing pembiayaan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 36) Indeks Pembangunan Gender (IPG) melebihi target. Pada tahun 2017, mampu mencapai 93,5 sementara targetnya sebesar 66,36. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih berada pada kondisi 92,81 maka terjadi peningkatan capaian. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000 teralisasi Rp.100.000.000, kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender jumlah anggaran sebesar Rp.201.540.000, terealisasi Rp.201.540.000. Program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan melalui kegiatan peningkatan peranan wanita menuju

keluarga sehat dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp.307.453.500 terealisasi Rp.307.453.500.

Penyebab keberhasilan Indeks Pembangunan Gender (IPG):

- 1) Telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang rentan (prasejahtera) yang ada di kecamatan/ desa dan kelurahan;
- 2) Telah dilaksanakan pelatihan keterampilan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan Ibu rumah tangga yang ada di kecamatan, desa dan kelurahan;
- 3) Melakukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 37) Indeks Pembangunan Gender (IDG) tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 67,19 dari target 80,47. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 64,21 maka mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Cukup.

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16: Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Berskala Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.84
Analisis Misi 3 Sasaran 16
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Berskala Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
16.	Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional	Persentase peningkatan jumlah investor berskala nasional	Persen			52	46

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 38) persentase peningkatan jumlah investor berskala nasional telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 52% dari target 50%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya

mencapai 46%. Pada tahun 2017, jumlah realisasi izin sebanyak 167 dari 320 target izin. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan fasilitasi tenaga Front Office dengan anggaran sebesar Rp.108.749.800 yang terealisasi sebesar Rp.99.624.800 (91,6%) dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal dengan anggaran sebesar Rp.276.800.000 yang terealisasi sebesar Rp.276.800.000 (100%).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Keberadaan regulasi penanaman modal dalam bentuk peraturan daerah (Perda Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal) yang menjadi payung hukum bagi investor untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bone.
 - 2) Penyederhanaan pelayanan perizinan dan pengurusan izin dilaksanakan disatu tempat/satu pintu sehingga proses pengurusan izin tidak berbelit-belit, singkat dan cepat.
 - 3) Pelayanan perizinan secara online melalui website www.dpmpstsp.bone.go.id.
3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17: Tersedianya Lapangan Kerja dan Berkurangnya Pengangguran, serta Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.85
Analisis Misi 3 Sasaran 17
Tersedianya Lapangan Kerja dan Berkurangnya Pengangguran,
serta Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
17.	Tersedianya lapangan kerja dan pengangguran , serta	Angkatan kerja yang terserap	Orang			52	46
						5.275	3.378
						5	1
						483	350

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
	meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek	Orang			8.324	5.706

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 39) angkatan kerja yang terserap pada poin AKAL telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 5.275 orang dari target 1.500 orang Akal. Kondisi mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 3.378 orang. Pada poin TKI tidak mencapai target, realisasi pada Tahun 2017 hanya mencapai 5 orang dari target 300 orang TKI. Kondisi mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya 1 orang TKI. Adapun pada poin penempatan di perusahaan tidak mencapai target, realisasi pada Tahun 2017 hanya mencapai 483 orang dari target 750 orang, tetapi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 350 orang. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dengan anggaran Rp.1.774.459.700 yang telah terealisasi sebesar Rp.1.773.941.381 (99,97%) dan program peningkatan kesempatan kerja melalui kegiatan penyusunan informasi bursa tenaga kerja dengan anggaran sebesar Rp.36.034.500 terealisasi Rp.33.324.500 (92,48%), kegiatan pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja perempuan Rp.30.995.000 terealisasi Rp.30.825.000 (99,45%), dan kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja Rp.36.585.000 terealisasi Rp.35.990.000 (98,37%).

Adapun penyebab penurunan kinerja indikator angkatan kerja yang terserap yaitu kemampuan dan kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja belum memadai sesuai syarat dan kriteria yang dibutuhkan pasar kerja/perusahaan.

Solusi yang telah dilaksanakan:

- 1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar.
- 2) Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga instruktur/pelatih dan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- 3) Melaksanakan bursa kerja (*job fair*) kerjasama dengan perusahaan.

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKAL) pada tahun 2017 sebanyak 5275 orang jauh melebihi dengan yang ditargetkan sebanyak 1500 orang. Dibandingkan dengan tahun 2016 penempatan tenaga kerja antar lokal (AKAL) ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 sebanyak 3378 orang dan di tahun 2017 sebanyak 5275 orang. Hal ini tentu sangat meningkatkan pengurangan pengangguran yang ada di Kabupaten Bone melalui penyerapan/penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKAL).

Penempatan tenaga kerja yang ditempatkan diluar negeri yaitu tenaga kerja indonesia (TKI) sebanyak 5 orang. Dengan target sebanyak 300 orang. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya 1 orang TKI. Jumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri sebenarnya sangat banyak, tetapi sebagian besar dari TKI tersebut berangkat untuk bekerja di luar negeri tidak melalui proses ataupun prosedur yang ada, maka dari itu jumlah TKI yang terdata sangat sedikit.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 40) Jumlah tenaga kerja kepesertaan jamsostek telah melebihi target. Pada tahun 2017 sebanyak 8.324 orang peserta pada 1.592 perusahaan yang menjadi peserta jamsostek. Kondisi mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 3.378 orang. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, melalui kegiatan fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp.62.492.000 terealisasi Rp.60.120.000 (96,20%), kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan Rp.38.300.000, teralisasi Rp.38.300.000(100%), kegiatan sosialisai perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Rp.19.150.000, terealisasi Rp.19.150.000 (100%).

Penyebab keberhasilan indikator Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek adalah pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi dan sosialisasi mengenai norma-norma, peraturan akan hak dan kewajiban serta jaminan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja/perusahaan yang ada di Kabupaten Bone.

4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan di Berbagai Obyek Wisata Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.86
Analisis Misi 3 Sasaran 18
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan di Berbagai Obyek Wisata Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
18.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen			0,0013	0,0016
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang			460	400
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang			300.500	250.214

Sumber Data : Dinas Pariwisata, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 41) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 0,0013% dari target 0,075%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 0,0013% maka capaian ini mengalami penurunan. Capaian ini dikategorikan Kurang. Penyebab kegagalan yaitu :

- 1) Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang menyebabkan rendahnya kontribusi di sektor pariwisata terhadap PDRB; dan
- 2) Sektor pariwisata merupakan *renewable resources*, jika tidak dikelola dengan optimal maka pendapatan sektor pariwisata akan rendah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 42) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak mencapai target, realisasi pada Tahun 2017 hanya mencapai 460 orang dari target 600 orang. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 400 orang maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Ketidakberhasilan mencapai target disebabkan oleh:

- 1) Masih kurangnya daya tarik wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone.
- 2) Masih kurangnya kegiatan promosi wisata.

Solusinya adalah :

- 1) Perlunya pembenahan sarana dan prasarana obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone.
- 2) Peningkatan intensitas kegiatan promosi wisata ke mancanegara.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 43) jumlah kunjungan wisatawan nusantara melebihi target, realisasi pada Tahun 2017 mencapai 300.500 orang dari target 250.000 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 250.214 orang maka capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata, melalui Kegiatan pengembangan obyek wisata unggulan dengan alokasi dana dan anggaran sebesar Rp.4.865.000.000. Selain itu dilaksanakan juga program Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui Kegiatan pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara di dalam negeri dan di luar negeri, alokasi dana dan anggaran sebesar Rp.407.677.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.406.909.000 (99,81%).

Keberhasilan ini disebabkan oleh pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri dan Kegiatan pengembangan kemitraan untuk menggali peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19: Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berkembang dan Bertambahnya Jumlah Wirausahawan Baru dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.87
Analisis Misi 3 Sasaran 19
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berkembang dan Bertambahnya Jumlah Wirausahawan Baru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
19.	Meningkatnya Jumlah UMK dan Menengah yang Berkembang dan Bertambahnya Jumlah Wirausahawan Baru	Pertumbuhan omzet UMKM (milyar)	Milyar			416,30	325,06

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 44) meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan belum mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 416,30 Milyar dari target 990 Milyar. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 325,06 Milyar, maka capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil dan menengah, melalui kegiatan pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah dengan anggaran sebesar Rp.53.600.000, terealisasi Rp.53.200.000 (99,48%), kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha kecil

menengah sebesar Rp.186.360.000, teralisasi Rp.178.360.000 (95,52%) serta kegiatan pendataan UMKM sebesar Rp.74.900.000 terealisasi Rp.74.895.000 (99,99%).

Ketidakberhasilan kinerja indikator sasaran ini disebabkan oleh masih minimnya bantuan teknis dan fasilitasi permodalan kepada pelaku UMKM.

Solusinya diharapkan agar kegiatan yang menunjang peningkatan omzet usaha mikro lebih diprioritaskan pelaksanaannya agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.

6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20: Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.88
Analisis Misi 3 Sasaran 20
Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
20.	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	Persentase koperasi aktif	Persen			85,1	58,96

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 45) persentase koperasi aktif dan sehat melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 85,1% dari target 51,13%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 58,96%, maka capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.670.000, terealisasi Rp.109.674.000 (90,14%), kegiatan pembinaan dan penilaian sebesar Rp.47.025.000 terealisasi Rp.44.923.000 (90,14%), serta koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi sebesar Rp.300.300.000 terealisasi Rp.270.220.000 (89.98%).

Penyebab keberhasilan indikator persentase koperasi aktif dan sehat:

- 1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan peningkatan pelaksanaan kegiatankegiatan baik dalam bentuk pengawasan, pembinaan dan penilaian koperasi yang memacu dan meningkatkan jumlah koperasi aktif.
- 2) Pelaksanaan pelatihan-pelatihan khususnya dalam hal administrasi dan manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP.

7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21: Meningkatnya Jumlah IKM yang Berkembang dan Menyerap Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.89
Analisis Misi 3 Sasaran 21
Meningkatnya Jumlah IKM yang Berkembangdan Menyerap Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
21.	Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang dan menyerap tenaga kerja	Jumlah Unit Usaha IKM yang aktif	Unit			2.239	6.971

Sumber Data : Dinas Perindustrian, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 46) jumlah unit usaha IKM yang aktif tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 sebanyak 2.239 unit dari target 4.979 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6.960 Unit, maka capaian ini mengalami penurunan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah melalui kegiatan pemutahiran data industri dengan alokasi anggaran Rp.60.320.000 terealisasi sebesar Rp.60.320.000 (100%).

Penyebab penurunan kinerja indikator jumlah unit usaha IKM yang aktif yaitu:

- 1) Keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM Atau aparatur teknis dibidang industri.
- 2) Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) hanya dilakukan pada 5 (Lima) kecamatan sehingga belum mewakili jumlah keseluruhan di tingkat Kabupaten.

Solusi atas masalah tersebut :

- 1) Melakukan Kegiatan pengembangan SDM Industri Kecil Menengah melalui penyuluhan industri kecil.
 - 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana usaha industri yang mendukung pengembangan disektor usaha kecil.
 - 3) Penyusunan data base IKM se Kabupaten Bone.
 - 4) Fasilitasi bantuan modal usaha dan pemanfaatan teknologi tepat guna kepada pelaku IKM.
8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya Aktivitas Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.90
Analisis Misi 3 Sasaran 22
Meningkatnya Aktivitas Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
22.	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDR	Persen			11,53	11,04

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 47) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi target. Pada Tahun 2017 mencapai 11,53% dari target sebesar 10,79%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 11,04%, maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik Sekali.

Penyebab keberhasilan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB disebabkan oleh

1) Meningkatnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pasar Rakyat.

Pada Tahun 2017 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 2 Unit Yaitu Pasar Tanete Kecamatan Cina dan Pasar Tujue Kecamatan Tellu Limpoe dengan menggunakan dana DAK-DAU sebesar Rp.4.134.100.000 dengan realisasi keuangan Tahun 2017 sebesar Rp.3.992.042.900 atau sebesar 92,96 % dan 2 Unit yaitu Pasar Pompanua Kecamatan Ajangale dan Pasar Lipujange Kecamatan Bengo dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.12.000.000.000. Pembangunan Pasar ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya serta didukung oleh dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI.

2) Adanya Kegiatan Pasar Murah

Tahun 2017 Pelaksanaan Fasilitasi Pasar Murah dilaksanakan dengan penyerahan Paket Sembako sebanyak 1.400 Paket kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pasar Murah dengan melibatkan Distributor sebanyak 3 Kali yaitu Sebelum Bulan Ramadhan, Sebelum Idhul Fitri dan Sebelum Idul Adha yang di laksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, dengan dana DAU sebesar Rp.98.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp.98.740.000,- atau sebesar 99.99%. Pemda Kabupaten Bone juga menggarakan kegiatan fasilitasi pasar murah sebesar Rp.98.750.000.

3) Terlaksananya Kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok

Tersedianya Data Harga Sembilan Bahan Pokok sebagai wujud dari Standarisasi Harga pada kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dengan harga yang stabil dan terjangkau sebagai upaya pengamanan perdagangan dan pada kegiatan ini untuk mempermudah konsumen dan masyarakat pada umumnya. Pada Tahun 2017 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp.27.625.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp.27.625.000,- atau sebesar 100%.

Selain itu untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor melalui kegiatan promosi produk daerah dengan anggaran sebesar Rp.137.545.500 terealisasi Rp.137.486.500, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan sebesar Rp.4.134.100.000 terealisasi Rp.3.922.042.000, kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Usaha Rp.19.060.000 terealisasi Rp.19.060.000, serta program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, melalui kegiatan monitoring bahan kebutuhan pokok sebesar Rp.27.625.000 terealisasi Rp.27.625.000.

9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23: Meningkatnya Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.91
Analisis Misi 1 Sasaran 23
Meningkatnya Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
23.	Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	Produksi Hasil-Hasil Pertanian :					
		Kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman panga, hortikultura dan perkebunana terhadap PDRB	Persen			13,03%	12,01%
		Produktifitas padi	Persen			58,80	57,89
		Produktifitas jagung	Persen			55,53	26,00
		Produktifitas kedela	Persen			19,22	18,49
		Produktifitas kacang tanah	Persen			18,10	17,69
		Produktifitas kacang hijau	Persen			12,42	15,00
		Produktifitas ubi kayu	Persen			93,90	90,52
		Produktifitas ubi jalar	Persen			80,76	80,90
		Produksi kakao	Ton			12.234	18.079
		Produksi kelapa	Ton			15.621	15.040
		Produksi tebu	Ton			40.133	36.244

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
		Produksi kapas	Ton			77	120
		Produksi kemiri	Ton			2.998	2.974
		Produksi cengke	Ton			4.744	4.748

Sumber Data : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 48) Kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan telah memenuhi target. Pada Tahun 2017 mencapai 13,03% dari target sebesar 13,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 12,01%, maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 49) produktifitas padi telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 58,80% dari target 58,73%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 57,89%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun untuk komoditi padi, karena petani makin yakin menggunakan benih varietas unggul, disamping perbaikan jaringan irigasi dan penerapan alsintan pra dan pasca panen yang semakin intensif.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 50) produktifitas jagung telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 55,53% dari target 51,99%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 26%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target produktifitas jagung disebabkan oleh :

- 1) Pembinaan dan pengawasan kepada petani di luar wilayah program pemerintah.
- 2) Penggunaan benih bermutu dan bersertifikat.
- 3) Stabilitasnya harga di tingkat petani

- 4) Kemudahan akses permodalan.
- 5) Sarana produksi yang memadai.
- 6) Perbaiki infrastruktur.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 51) produktifitas kedelai telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 19,22% dari target 18,45%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 18,49%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan produktivitas dari kedelai karena penggunaan benih varietas unggul oleh petani dan ditunjang dengan perbaikan jaringan irigasi untuk pengairan lahan serta peningkatan produktivitas per satuan luas akibat penerapan teknologi spesifik lokalitas.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 52) produktifitas kacang tanah telah mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 18,10% dari target 17,08%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 17,69%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh penggunaan benih varietas unggul oleh petani untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dan ditunjang dengan penggunaan alsintan yang baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 53) Produktifitas kacang hijau tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 12,42% dari target 13,71%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 15%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh masyarakat tidak melakukan pergiliran tanam setelah pertanaman kacang hijau, kontribusi masyarakat terhadap pertanaman kacang hijau belum begitu besar hanya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Bone dalam beberapa waktu.

Solusinya adalah perlunya peningkatan pemahaman kepada petani mengenai nilai ekonomis kacang hijau sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan produktifitas melalui perluasan areal tanam maupun penggunaan teknologi pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 54) produktifitas ubi kayu tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 93,90% dari target 100,07%. Namun demikian, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 90,52%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakeberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan skala luas lahan juga bersaing dengan komoditi ubi kayu yang mengalami peningkatan harga jual.

Solusinya adalah perlunya peningkatan pemahaman kepada petani mengenai nilai ekonomis dari ubi kayu sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan produktifitas melalui perluasan areal tanam maupun penggunaan teknologi pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 55) produktifitas ubi jalar tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 80,76% dari target 83,59%. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 80,90%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakterhasilan pencapaian target ini disebabkan karena masyarakat menanam ubi jalar sebagai bahan pangan sampingan, rata-rata masyarakat menanam di lahan tegalan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bone, rata-rata masyarakat tidak menjual keluar daerah sehingga kurangnya motivasi untuk menambah luas penanam ubi jalar.

Solusinya adalah perlunya peningkatan pemahaman kepada petani mengenai nilai ekonomis dari ubi jalar sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan produktifitas melalui perluasan areal tanam maupun penggunaan teknologi pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 56) produksi kakao telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 12.234 ton dari target 9.761 ton. Namun jika dibandingkan dengan produksi kakao tahun 2016 yang mencapai 18.079 ton maka capaian ini mengalami penurunan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target peningkatan produktivitas per satuan luas akibat penerapan teknologi spesifik lokalitas dan penggunaan pupuk serta harga yang stabil membuat minat petani terhadap komoditi ini sangat baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 57) produksi kelapa telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 15.621 ton dari target 13.423 ton. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 15.040 ton. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian disebabkan oleh penyediaan sarana pasca panen yang memadai sehingga petani dapat meningkatkan kualitas hasil panennya serta jaminan harga di pasar yang semakin baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 58) produksi tebu telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 40.133 ton dari target 29.122 ton. Kondisi ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 36.244 ton. Produksi tebu yang besar ini menjadi bahan baku dari Pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula Arasoe Kabupaten Bone. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan ini disebabkan oleh pembinaan tanaman tebu untuk pertanaman rawat ratoon, pembinaan petani tebu serta iklim yang mendukung.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 59) produksi kapas tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 77 ton dari target 413.864 ton. Kondisi ini mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 120 ton. Capaian indikator ini dikategorikan Kurang.

Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh akibat kurangnya animo masyarakat untuk pengembangan areal tanaman kapas juga disebabkan karena

harga untuk tanaman semusim ini tidak stabil/harga rendah (harga di bawah 5.000/kg) sehingga kurang minat petani untuk pengembangannya.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 60) produksi kemiri tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 2.998 ton dari target 12.259 ton. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya mencapai 2.974 ton maka mengalami peningkatan produksi. Capaian indikator ini dikategorikan Kurang.

Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh intensitas musim kemarau panjang sehingga tanaman kemiri sebagian tidak tumbuh dan berproduksi.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 61) produksi cengkeh telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 4.744 ton dari target 1.624 ton. Kondisi ini mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 4.748 ton. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh peningkatan produksi cukup signifikan karena sangat berpengaruh kepada harga yang menjanjikan kepada petani cengkeh sehingga pemeliharaan dan pemupukan tanaman cengkeh dikelola dengan baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan melalui kegiatan Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian dengan anggaran sebesar Rp.5.645.985.000 terealisasi, program pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis Rp.77.760.000 terealisasi Rp.77.760.000 (100%), program pengembangan bibit unggul berkelanjutan Rp.444.050.000 terealisasi Rp.444.050.000 (100%) serta program peningkatan ketahanan pangan yang bersumber dari APBN, melalui kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealiala sebesar Rp.2.608.770.000 terealisasi Rp.2.608.170.000, program pengelolaan produksi kedelai sebesar Rp.7.807.400.000 terealisasi Rp. 7.807.400.000.

Beberapa hal yang cukup berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran sektor Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura pada tahun 2017 belum tercapai secara optimal sebagai berikut :

- 1) Penerapan pengelolaan tanaman terpadu masih dilaksanakan secara parsial.
- 2) Keterlambatan benih dan sarana produksi.
- 3) Jadwal tanam serempak.
- 4) Masih adanya pertanaman hambur yang dilakukan oleh petani.
- 5) Penggunaan varietas unggul diluar lokasi program yang tidak bermutu dan bersertifikat.
- 6) Masih terbatasnya sarana pasca panen yang ada sehingga hasil panen kurang berkualitas.
- 7) Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi kedelai, sehingga pada saat panen raya harga kedelai di tingkat petani sangat rendah.
- 8) Masih kurangnya modal sebagian petani dalam menerapkan PTT.
- 9) Infrastruktur yang masih belum cukup dan sesuai dengan kebutuhan petani.
- 10) Terjadinya perubahan iklim global yang sulit diprediksi.

Oleh karena itu, alternatif solusi dan upaya langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- 2) Perlu pembinaan dan pengawasan kepada petani di luar wilayah program pemerintah.
- 3) Perlu pembinaan dan penyuluhan kepada petani tentang pentingnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat.
- 4) Peningkatan SDM petani.
- 5) Penyediaan sarana pasca panen yang memadai sehingga petani dapat meningkatkan kualitas hasil panennya.
- 6) Perlu ada jaminan harga di tingkat petani.
- 7) Membantu petani dalam mengakses permodalan ke Bank.
- 8) Memperbaiki infrastruktur yang diperlukan.
- 9) Penyediaan sarana produksi yang memadai.

10) Perlu pembinaan operasional penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak Perubahan Iklim (DPI).

10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24: Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Ikutannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.92
Analisis Misi 3 Sasaran 24
Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Ikutannya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Capaian		
					2018	2017	2016
24.	Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya	Kontribusi sektor pertanian khususnya bidang peternakan terhadap PDRB	Persen			11,53	11,04
		Produksi ternak :					
		Jumlah populasi sapi	Ekor			419.819	395.308
		Jumlah populasi kambing	Ekor			30.279	26.501
		Jumlah populasi itik	Ekor			257.420	233.192
		Jumlah populasi ayam buras	Ekor			4.474.130	3.797.188
		Jumlah populasi ayam petelur	Ekor			250.910	193.250
		Jumlah populasi ayam pedaging	Ekor			1.392.931	1.217.868

Sumber Data : Dinas Peternakan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 62) Kontribusi sektor pertanian khususnya bidang peternakan terhadap PDRB terhadap PDRB telah memenuhi target. Pada Tahun 2017 mencapai 21% dari target sebesar 21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 20%, maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 63) jumlah populasi sapi melebihi target. Realisasi target jumlah populasi sapi pada tahun 2017 sebanyak 419.819 ekor dari target 407.006 ekor. Kondisi ini

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 395.308 ekor. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Pelaksanaan program Nasional yaitu UPSUS SIWAB sebagai usaha dalam meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Bone.
- 2) Pelaksanaan Program Vaksinasi ternak secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh petugas.
- 3) Pelaksanaan usaha penanganan penyakit ternak seperti gangguan reproduksi bagi peternak.
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi petugas peternakan dan pemuda desa yang dilatih menjadi petugas inseminasi buatan.
- 5) Pelaksanaan pelarangan pemotongan ternak betina produktif baik dimasyarakat maupun di RPH (Rumah Potong Hewan).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 64) jumlah populasi kambing tidak mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 30.279 ekor dari target 35.240 ekor. Namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah populasi kambing pada tahun 2016 yang hanya mencapai 26.501 ekor maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan ternak kambing.
- 2) Tidak semua wilayah kabupaten bone dapat dikembangkan ternak kambing.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 65) jumlah populasi itik tidak mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 257.420 ekor dari target 297.803 ekor. Namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah populasi itik pada tahun 2016 yang hanya mencapai 233.192 ekor maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh masih kurangnya minat masyarakat beternak itik dan rentannya penyakit.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 66) jumlah populasi ayam buras tidak mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 4.474.130 ekor dari target 4.947.108 ekor. Namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah populasi ayam buras pada tahun 2016 yang hanya mencapai 3.797.188 ekor maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian indikator ini dikategorikan baik. Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh penyakit menular ternak yang disebabkan oleh virus yang sangat meresahkan masyarakat peternak penyakit yang disebabkan yaitu Virus H5N1 (penyakit AI). Langkah yang harus ditempuh untuk mencegah adanya penyakit ini yaitu dengan vaksinasi secara teratur dan tepat, serta mengubur bangkai yang terjangkit penyakit tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 67) jumlah populasi ayam petelur telah melebihi target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 250.910 ekor dari target 221.623 ekor. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi ayam petelur pada tahun 2016 yang hanya mencapai 193.250 ekor maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan ini ditunjang dengan tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan ayam petelur karena harga yang stabil dipasaran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap telur.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 68) jumlah populasi ayam pedaging mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 1.392.931 ekor dari target 219.550 ekor. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi ayam pedaging pada tahun 2016 yang hanya mencapai 1.217.868 ekor maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan ini disebabkan oleh:

- 1) Semakin bertambahnya peternak ayam pedaging di Kabupaten Bone.
- 2) Adanya kestabilan harga dan tingginya kebutuhan akan ayam pedaging di pasaran.

3) Adanya usaha penanganan penyakit ternak dan vaksinasi ternak ayam pedaging.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Peningkatan produksi hasil peternakan melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana inseminasi buatan dengan alokasi anggaran Rp.307.330.000 terealisasi Rp.307.302.691.

11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25: Meningkatnya produksi, Mutu dan Nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.93
Analisis Misi 3 Sasaran 25
Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
25.	Meningkatnya produksi, mutu dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Rupiah			17.504.817	17.504.817
		Produksi perikanan tangkap	Ton			36.728,2	36.400
		Produksi perikanan budidaya	Ton			281.628	280.478

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 69) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terhadap PDRB telah memenuhi target. Pada Tahun 2017 mencapai Rp.17.504.817 dari target sebesar Rp.17.504.817. maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 70) produksi perikanan tangkap tidak mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 36.728,2 ton dari target sebanyak 81.638,1 ton. Namun jika

dibandingkan dengan produksi pada tahun 2016 yang mencapai 36.400 ton maka mengalami peningkatan. Capaian indikator ini dikategorikan kurang.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh perubahan iklim (cuaca yang tidak menentu), kerusakan habitat dan terumbu karang.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 71) produksi perikanan budidaya melebihi target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 281.628,0 ton dari target kinerja 2017 sebanyak 146.061 ton. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2016 yang mencapai 280.478 ton maka mengalami peningkatan. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini dipengaruhi karena adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada pokdakan, pembinaan kelompok dan sosialisasi cara budidaya yang baik dan pemanfaatan lahan budidaya.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan Pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap dan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dengan alokasi anggaran Rp.1.606.410.000 terealisasi Rp.1.604.610.000. Serta program perikanan budidaya melalui kegiatan Pembinaan pengembangan perikanan, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dan pengembangan UPTD, pembinaan dan mekanisme budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.716.919.850, terealisasi Rp.3.567.425.962.

12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26: Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.94

Analisis Misi 3 Sasaran 26

Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
26.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman	Persentase ketersediaan pangan utama (energi dan protein perkapita)	Persen			104,32	102

Sumber Data :Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 72) persentase ketersediaan pangan utama (energi dan protein) telah melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 104,32% dari target 100% dengan jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebanyak 2.460 kkal perkapita pada tahun 2017 dan jumlah kebutuhan konsumsi pangan sebanyak 2.358 kkal perkapita. Jika dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang mencapai 102% maka mengalami peningkatan. Capaian indikator ini dikategorikan Sangat Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti halnya ketersediaan energi. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Peningkatan ketahanan pangan, melalui kegiatan penanganan, kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, kegiatan Pengembangan lumbung pangan masyarakat, kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman, kegiatan

pengembangan model distribusi pangan yang efisien dan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan alokasi anggaran Rp.1.297.155.000 teralisasi Rp.1.294.641.060

13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 : Terwujudnya Perlindungan Lahan-Lahan Produktif Sebagai Cadangan Pangan dan Pendukung Ekonomi Lokal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.95
Analisis Misi 3 Sasaran 27
Terwujudnya Perlindungan Lahan-Lahan Produktif Sebagai Cadangan Pangan dan Pendukung Ekonomi Lokal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
27.	Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal	Jumlah regulasi ketahanan pangan	Produk	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 73) jumlah regulasi ketahanan pangan telah mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 1 produk dari target 1 produk. Kondisi ini sama dengan tahun 2016. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan capaian yaitu kelompok Wanita Tani yang mendapat sosialisasi menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sebanyak 10 KWT, sosialisasi jajanan anak usia sekolah sebanyak 10 sekolah serta laporan hasil uji lab bahan pangan segar.

14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dan terselesaikannya Konflik-Konflik /Pertanahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.96
Analisis Misi 3 Sasaran 28
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dan Terselesaikannya Konflik-Konflik/Pertanahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2017	Capaian		
					2018	2017	2016
28.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	Luas lahan bersertifikat	Bidang/sertifikat			0	113
		Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Persen			100	100

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 74) luas lahan bersertifikat tidak mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 tidak tercapai dari target 90 bidang/78 bidang. Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan dari proses pembayaran belum terwujud pada posisi bulan Oktober 2017 dan berpotensi produk sertifikat tidak terbit sehingga pembayaran tertunda dan dialihkan ke tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang mencapai 113% maka mengalami penurunan kinerja. Capaian indikator ini dikategorikan kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, melalui kegiatan Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (pembebasan tanah/lahan) dengan alokasi anggaran Rp.95.000.000 teralisasi Rp.90.000.000 (94,73%).

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 75) Persentase penyelesaian kasus tanah negara telah mencapai target. Realisasi penyelesaian kasus tanah negara yang terjadi pada 2017 sebanyak 3 kasus yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat dan berhasil terselesaikan

dengan upaya persuasif dan komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah terhadap para penggugat. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang mencapai 100% penyelesaian kasus tanah. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kegiatan penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi aset pemda) dengan alokasi anggaran Rp.92.350.000 teralisasi Rp.87.209.000 (94,43%).

15. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29: Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.97
Analisis Misi 3 Sasaran 29
Berkurangnya Kasus-Kasus Pencemaran Air, Tanah Dan Udara
Dan Terjaganya Kelestarian Sumber-Sumber Mata Air

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
29.	Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air	Persentase pencemaran status mutu air	Persen			100	100
		Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Persen			40	40
		Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber	Persen			100	100
		Cakupan pengawasan terhadap UKL dan UPL	Persen			85	80
		Persentase luas lahan terbuka hijau wilayah perkotaan (Ha)	Persen			35	30
		Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi bio massa	Persen			100	100
		Persentase volume sampah perkotaan yang dikelola melalui	Persen			9	8

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
		3R					
		Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB	Persen			0,33	0,30
		Cakupan pengawasan terhadap amdal	Persen			100	85
		Persentase penegakan hukum lingkungan	Persen			100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 76) Persentase pencemaran status mutu air telah mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah pelayanan pencemaran status mutu air di 17 titik terlayani. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang mencapai 100%. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan dari meningkatkan kinerja laboratorium lingkungan dalam melakukan pemantauan kualitas air dan juga melakukan sampling air sesuai dengan permintaan pemrakarsa untuk dilakukan uji rona awal.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 77) Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak **tidak** mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 40% dari target 46%. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang mencapai 40%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena belum memadainya peralatan yang dimiliki oleh laboratorium lingkungan dinas lingkungan hidup Kab.Bone sehingga untuk melakukan pengukuran kualitas udara harus mendatangkan tenaga sampling dari laboratorium lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan dan juga tidak ada alat untuk menganalisa sehingga sampel udara yang diambil pun harus dianalisa di tempat lain.

Solusinya adalah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan peningkatan kualitas analisis lingkungan.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 78) Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air (BPBD) mencapai target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 88%. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang mencapai 100%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan adanya sosialisasi terhadap penyebaran informasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi resiko bencana, khususnya bencana longsor.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 79) Cakupan pengawasan terhadap UKL dan UPL mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 85% dari target 85% dengan jumlah wajib UKL-UPL yang di cakup dalam pengawasan sebanyak 48 berbanding dengan jumlah pelaku usaha wajib UKL-UPL yang direkomendasikan sebanyak 57. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 80%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan adanya pegawai teknis yang menangani pengawasan memfokuskan diri untuk melayani pengawasan pelaku usaha yang disinyalir bisa menimbulkan kasus-kasus pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 80) persentase luas lahan terbuka hijau wilayah perkotaan (Ha) tidak mencapai target, capaian luas lahan terbuka hijau perkotaan 35 % dari target, 40 % capaian kinerja pada tahun 2017. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 81) pelayanan informasi status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017

mencapai 100% dari target 60%. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang mencapai 100%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena adanya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang kemudian disajikan dalam bentuk buku sebagai informasi status lingkungan yang diharapkan dapat diteruskan untuk menjadi bahan perumusan kebijakan bagi pemangku kepentingan dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Ketersediaan Buku data untuk penyajian Informasi lingkungan, penyusunan buku informasi data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data pada bidang terkait buku kualitas air, kualitas udara, buku kualitas tanah dan buku profil menuju indonesia hijau.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 82) persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (dinas lingkungan hidup) melebihi target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 9% dari target 8% dengan jumlah sampah yang tertangani sebanyak 25.01 T berbanding dengan total jumlah timbunan sampah sebanyak 287.820 T. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 8%. Capaian indikator ini dikategorikan baik sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan dengan cara menggiatkan kegiatan pada TPS3R. Presentase Jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R :

- Komposting 6 Ton
- Daur Ulang bahan baku 0,5 Ton
- Daur Ulang Produk Kreatif 0,5 Ton
- Biogas 5 Ton
- Bank Sampah 1,5 Ton
- Lain-lain (pengepul + Pencacah) 4 Ton

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 83) rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB telah mencapai target, capaian kinerja rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah per HPL/HGB sebesar 0,33 % dari target 0,33%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 84) cakupan pengawasan terhadap amdal mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 85 %. Capaian indikator ini dikategori baik sekali

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan dari adanya pertemuan intens dikalangan komisi penilai AMDAL dengan melibatkan masyarakat, LSM dan beberapa instansi terkait selaku kontrol terhadap pelaksanaannya di lapangan. Tahun 2017 ada dua rekomendasi izin lingkungan yang wajib AMDAL yakni pembangunan ruang perawatan rumah sakit umum daerah Tenriawaru dan juga pembangunan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 85) persentase penegakan hukum lingkungan mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100% dengan 7 jumlah kasus yang diselesaikan dari 7 kasus yang terjadi. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan dengan melakukan pemantauan terhadap usaha yang mengajukan rekomendasi izin lingkungan, kemudian akan ditelaah lebih lanjut apakah jenis usaha yang dimaksud wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) atau wajib menganalisa dampak lingkungan (AMDAL) atau hanya memerlukan pernyataan resmi untuk pengelolaan lingkungan (SPPL) hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

16. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Terwujudnya Watampone Sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.98
 Analisis Misi 3 Sasaran 30
 Terwujudnya Watampone Sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
30.	Terwujudnya Watampone Sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone)	Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup	Nilai	Piagam Adipura	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 86) terwujudnya Watampone sebagai Kota Adipura (Ibu Kota Watampone) tidak mencapai target dengan tidak memperoleh piagam adipura, nilai yang diperoleh Kabupaten Bone yaitu nilai P1 65,54 dan nilai TPA 71,40. Kondisi ini sama dengan tahun 2016 yang belum mendapatkan Piagam Adipura. Capaian Indikator ini dikategorikan kurang.

Kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh minimnya hutan kota yang ada di Kabupaten Bone dan pengelolaan sampah 3R yang masih rendah yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta pengelolaan TPA yang belum maksimal.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura dengan alokasi dana sebesar Rp.183.700.000.

17. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.99
 Analisis Misi 3 Sasaran 31
 Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
31.	Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan (Ha)	Persen			75	75

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 87) meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan tidak mencapai target. Realisasi target tahun 2017 mencapai 75% dari target 80%. Kondisi ini sama dengan tahun 2016. Luas lahan terbuka hijau yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM seluas 35 Ha dengan luas lahan terbuka hijau yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan seluas 40 Ha. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakberhasilan indikator ini disebabkan penyulaman bibit tanaman RTH sejumlah 1350 bibit tanaman dan pengadaan 1000 bibit tanaman pelindung masih kurang dari seharusnya dan masih kurangnya hutan kota. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengelolaan ruang terbuka hijau melalui kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan alokasi anggaran Rp.115.500.000 teralisasi Rp.105.540.000

18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32: Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan Berkondisi Baik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.100
 Analisis Misi 3 Sasaran 32
 Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan Berkondisi Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
32.	Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan berkondisi baik	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan (Ha)	Persen			71,25	61,68

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 88) Prosentase Kemantapan Jalan Kabupaten tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 71,25% dari target 73,33%. Capaian target ini terjadi deviasi min (-) 2,08% dari target rencana di tahun 2017 dan (-) 8,75% dari target RPJMD tahun 2018. Namun demikian, kondisi mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 61,68%. Kondisi jalan mantap merupakan penjabaran dari kondisi jalan baik sebesar 45.24% dan kondisi sedang 26.01%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Ketidakberhasilan pencapaian target disebabkan menurunnya kondisi jalan status kabupaten yang disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Umur Rencana Jalan yang rentan dengan kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan sehingga beberapa ruas jalan kabupaten mengalami penurunan kualitas.
- b. Masih ada jalan-jalan kabupaten yang dilalui oleh kendaraan dengan standar tonase yang melebihi tonase kendaraan dipersyaratkan pada ruas jalan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan jalan utamanya pada struktur geometrik jalan.

Alternatif solusinya adalah:

- 1) Melakukan update kondisi jalan setiap tahun dan menjadikan dasar perencanaan prioritas untuk pelaksanaan penanganan jalan
- 2) Pelaksanaan intensif pemeliharaan rutin untuk jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada. Dengan demikian kondisi jalan dapat dipertahankan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) serta mengurangi tingkat kerusakan jalan dan jembatan dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan, melalui kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran Rp.67.799.486.500 terealisasi Rp.67.799.486.500, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dana sebesar Rp.78.159.442.926 teralisasi Rp.78.159.000.000 program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dengan alokasi anggaran Rp.103,000,000 terealisasi Rp.102.920.000, dan kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan alokasi anggaran Rp.50,470,000 terealisasi Rp.50,470,000. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan ini baik berkala maupun rutin rencana anggarannya adalah sebesar Rp.79.422.960.426 dengan realisasi anggaran sebesar 99,34% atau sebesar Rp.78.898.768.887,19.

19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33: Meningkatnya Luas dan Tingkat Pelayanan Jaringan Irigasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.101
Analisis Misi 3 Sasaran 33
Meningkatnya Luas dan Tingkat Pelayanan Jaringan Irigasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
33.	Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi	Tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi	Ha			30.652,50	25.652,50

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 89) tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 30.652,50 Ha dari target 23.790 Ha. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya mencapai 15.039,50 Ha. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali. Keberhasilan ini akibat tingginya kepercayaan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam pengelolaan Dana APBN bidang sumber daya air yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah kabupaten dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (Tahun 2013 – Tahun 2016) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK+DAU) dengan Anggaran Rp.9.454.379.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.413.811.900 atau 99,57 % dengan realisasi fisik 100% yang terdiri dari 30 Daerah Irigasi serta kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK+DAU) dengan Anggaran Rp.6.685.836.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.625.761.500 atau 99,10 % dengan realisasi fisik 100 % yang terdiri dari 18 Daerah Irigasi.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian target dengan melakukan up date data kondisi Jaringan irigasi setiap tahunnya dan menjadikan dasar perencanaan prioritas untuk pelaksanaan penanganan jaringan irigasi. Disamping itu pelaksanaan pemeliharaan rutin untuk jaringan irigasi yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada. Dengan demikian kondisi jaringan irigasi dapat dipertahankan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) serta mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi baik.

20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34: dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.102

Analisis Misi 3 Sasaran 34

Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
34.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sistem.	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan	Persen	100		100	100

Sumber Data : Dinas Perhubungan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 90) tingkat kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sebanyak 53 dengan jumlah seharusnya sebanyak 53 buah. Kondisi ini sama dengan capaian tahun 2016. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh meningkatnya penambahan sarana dan prasarana lalu lintas yang ada untuk mengimbangi jumlah kendaraan yang semakin meningkat.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Rp.110.028.000,00 terealisasi Rp.109.480.000 (99,50%).

21. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.103
 Analisis Misi 3 Sasaran 35
 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
35.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni	Persen		91,16% atau 170.04 7 unit	90,67 % atau 169.13 3 unit	

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 90) persentase rumah layak huni melebihi target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 91,16% dari target 38% dengan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 170.047 unit dari 186.486 unit jumlah rumah keseluruhan. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 90,67% atau 169.133 unit. Capaian indikator ini dikategorikan Baik Sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh capaian perbaikan jumlah rumah layak huni meningkat sehingga mempengaruhi total jumlah rumah layak huni menjadi lebih baik dan meningkat.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan dana sebesar Rp. 555.928.350 teralisasi Rp. 555.928.350.

22. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36: Berkurangnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Cakupan Keluarga Memiliki Sarana Air Bersih dan Sanitasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.104
Analisis Misi 3 Sasaran 36
Berkurangnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Cakupan Keluarga Memiliki Sarana Air Bersih dan Sanitasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
36.	Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persen			37,58 % atau 19,58 Ha	69,33% atau 34,8 Ha
		Jumlah rumah tidak layak huni	Persen			21,58 % atau 584 Unit	9,35% atau 253 Unit
		Persentase rumah tangga berakses air bersih	Persen			100,23 % atau 37.994 jiwa	79,24 % atau 30.106 jiwa

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 92) persentase penurunan kawasan kumuh melebihi target. Realisasi kinerja pada tahun 2017 mencapai 37,5% dari target 35% dengan luas kawasan kumuh tahun 19,58 Ha, dengan luas wilayah 52,21 Ha. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 69,33% atau 34,8 Ha. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh dukungan program-program pemerintah (NUSP2 dan Kotaku) melalui pembiayaan APBN /TP dan APBN serta sasaran Pembiayaan APBD lebih diarahkan pada lokasi kawasan Kumuh Kota Watampone. Selain itu juga terjadi kolaborasi berbagai program mendasar atau urusan wajib yang mendukung upaya penuntasan dan tercegahnya kumuh baru, diharapkan dalam penuntasan atau pengurangan persentase kumuh perkotaan diupayakan seluruh SKPD dapat bersinergi secara program sehingga sasaran pengurangan dan penuntasan dapat terjadi secara skala kawasan mengingat luasan penyelesaian kumuh dalam satuan hektar.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 93) jumlah rumah tidak layak huni tidak mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 21,58% dari target 32% dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.365 unit berbanding dengan jumlah rumah keseluruhan sebanyak 186.520 unit. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 79,24% atau 243 unit. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh dukungan pembiayaan yang masih perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap hasil jumlah perbaikan rumah tidak layak huni, mengingat pembiayaan perbaikan untuk 1 unit rumah tidak layak huni dibutuhkan anggaran sebesar Rp.15.000.000 dengan rencana capaian target per tahun sebesar 2.706 unit atau membutuhkan anggaran sebesar Rp.40.590.000.000 per tahunnya sementara alokasi anggaran yang dapat dialokasikan di kisaran Rp.5.000.000.000 s/d Rp.8.500.000.000 / tahun.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 94) persentase rumah tangga berakses air bersih mencapai target, capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 100,23% (37.994 jiwa) dari target 90% dengan jumlah rumah tangga berakses air bersih berbanding dengan jumlah rumah keseluruhan. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 9,35% atau (30.106 jiwa). Capaian indikator ini dikategorikan sangat baik.

Keberhasilan pencapaian bahkan melampaui target ini disebabkan oleh adanya dukungan program peningkatan infrastruktur permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan berbasis komunitas masyarakat, peran dan partisipasi kegiatan yang berbasis masyarakat diharapkan mampu menambah jumlah layanan jaringan sehingga jumlah layanan air bersih dari tahun ke tahun membaik, dengan bertumpu dan berbasis komunitas seluruh sumber sumber air bersih yang telah dibangun dapat di rawat atau di kembangkan menjadi suatu layanan air bersih berbasis masyarakat sehingga seluruh fasilitas air bersih di perkotaan maupun di perdesaan dapat terlayani.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman melalui kegiatan NUSP-2 dengan anggaran sebesar Rp.9.177.216.000 teralisasi Rp.9.177.216.000, kegiatan KOTAKU dengan alokasi anggaran Rp.2.900.000.000 terealisasi Rp.2.900.000.000. Program Pengembangan perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.169.000.000 terealisasi Rp.12.101.562.134 yang berasal dari DAK dan DAU. Program penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan anggaran Rp.4.637.124.637 terelaisasi Rp.4.222.752.468, kegiatan pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Rp.3.754.341.225 teralisasi Rp.3.754.341.225, kegiatan fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Rp.409.400.000 terealisasi Rp.406.688.488. Program pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Rp.900.000.000 terealisasi Rp.885.800.000, Kegiatan PAMSIMAS alokasi anggaran Rp.1.920.000.000 terealisasi Rp.1.920.000.000.

D. Misi 4 : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37: Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.105
 Analisis Misi 4 Sasaran 40
 Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
37.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	100		86,77	86,71
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	100		90	75,59

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 95) presentase kepemilikan KTP elektronik tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 86,77% dari target 100% dengan jumlah kepemilikan KTP Penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2017 sebanyak 544.835 dan jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2017 sebanyak 627.933. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 86,71%. Capaian indikator ini dikategorikan baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Pengajuan/permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan berupa perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el karena jaringan yang masih konektifitas lambat sedangkan aparatur yang tersedia terbatas sehingga perlu penambahan pegawai baru.
- 2) Tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 3) Luas wilayah operasi pembinaan/pelayanan kependudukan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
- 4) Belum tersinerginya pendukung/persyaratan kelengkapan penerbitan dokumen kependudukan lintas sektor terbukti banyaknya penduduk yang mengurus akte kelahiran tanpa melampirkan akta nikah.
- 5) Seringnya terjadi gangguan jaringan komunikasi data, sehingga untuk mengakses data kependudukan ke server induk Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 96) presentase kepemilikan Kartu Keluarga tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 90% dari target 100% dengan jumlah kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebanyak 180.421 dan jumlah rumah tangga pada Tahun 2017 sebanyak 238.662. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 75,59%. Capaian indikator ini dikategorikan Baik.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Pengajuan/permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan Kartu Keluarga yang datanya kurang lengkap karena jaringan yang masih konektifitas lambat sedangkan aparatur yang tersedia terbatas sehingga perlu penambahan pegawai baru.
- 2) Luas wilayah operasi pembinaan/pelayanan kependudukan tidak sebanding dengan Jumlah SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone.
- 3) Belum tersinerginya pendukung /persyaratan kelengkapan penerbitan dokumen kependudukan lintas sektor terbukti banyaknya penduduk yang mengurus akte kelahiran tanpa melampirkan akta nikah.
- 4) Seringnya terjadi gangguan jaringan komunikasi data, sehingga untuk mengakses data kependudukan ke server induk Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.808.124.000 terealisasi Rp.808.124.000, dan kegiatan penerbitan dokumen kependudukan Rp.654.673.000 terealisasi Rp.521.895.000 (80%). Untuk mengatasi masalah yang dihadapi ditempuh solusi setiap stakeholder wajib mempersyaratkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap pengurusan dan dilakukan proses penginputan secara manual melalui layanan off line/data tersimpan pada hardisk.

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38 : Meningkatkan Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.106
Analisis Misi 4 Sasaran 38
Meningkatkan Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
38.	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PKMS yang tertangani	Persen			62,69	55,49

Sumber Data : Dinas Sosial, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 97) presentase PKMS yang tertangani telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 62,29% dari target 18,52% dengan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2017 sebanyak 95.171 dan jumlah PMKS yang ada pada tahun 2017 sebanyak 151.823. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 55,49%. Capaian indikator ini dikategorikan baik sekali.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh Memanfaatkan data yang ada dan melakukan verifikasi dan validasi secara terbatas dan koordinasi antara para satuan penanganan bencana yang ada daerah yang dianggap rawan bencana dan pengadaan mobil Pick Up untuk operasional dan menyalurkan bantuan.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui kegiatan Koordinasi dan pelayanan bagi keluarga harapan dengan alokasi anggaran Rp.350.000.000 terealisasi Rp.350.000.000, kegiatan Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi alokasi anggaran Rp.51.500.000 terealisasi Rp.51.500.000. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma melalui kegiatan

pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi Rp.60.000.000. Program pembinaan anak terlantar melalui kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi Rp.60.000.000.

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 39: Semakin Berkembangnya Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayanan Administrasi Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.107
Analisis Misi 4 Sasaran 39
Semakin Berkembangnya Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelayanan Administrasi Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
39.	Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa	Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina	Persen			100	85

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 98) persentase jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 95% dengan jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina pada Tahun 2017 sebanyak 15 kelompok usaha dan jumlah kelompok usaha ekonomi sebanyak 15 kelompok usaha. Kondisi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 85%. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan melalui peningkatan sumber daya manusia kelompok usaha ekonomi perempuan Rp.120.000.000 terealisasi Rp.120.000.000, dan kegiatan bantuan usaha ekonomi perempuan Rp.80.000.000 terealisasi Rp.80.000.000.

Analisis penyebab keberhasilan jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang dibina yaitu:

- 1) Terlaksananya program pembinaan kepada kelompok usaha ekonomi yang ada di desa.
- 2) Peningkatan respon masyarakat secara positif yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah kelompok dan anggotanya.

4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 40 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.108
Analisis Misi 4 Sasaran 40

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
40.	Meningkatnya Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	IPG	Indeks			93,52	92,81
		IDG	Indeks			67,19	64,21

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 99) Indeks Pembangunan Gender (IPG) melebihi target. Realisasi pada tahun 2017 mencapai 93,52 dari target 66,36. Kondisi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 92,81. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000 teralisasi Rp.100.000.000, kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender jumlah naggaran sebesar Rp.201.540.000, terealisasi Rp.201.540.000. Program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan melalui kegiatan peningkatan peranan wanita menuju

keluarga sehat dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp.307.453.500 terealisasi Rp.307.453.500.

Analisis penyebab keberhasilan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu:

- 1) Tersosialisasinya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender kepada masyarakat khususnya masyarakat yang rentan (prasejahtera) yang ada di kecamatan/ desa dan kelurahan.
- 2) Telah dilaksanakannya pelatihan keterampilan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan Ibu rumah tangga yang ada di kecamatan, desa dan kelurahan.
- 3) Terjadinya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 100) Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak mencapai target. Realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 67,19 dari target 80,47. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 64,21 maka mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Cukup.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 41: Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.109
Analisis Misi 4 Sasaran 41
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Meningkatnya Keberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
41.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan	Rasio KDRT	Persen	100		0,05	0,12
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100		98,3	79,96

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 101) rasio KDRT tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 0,05% dari target 100% dengan jumlah kekerasan pada Tahun 2017 sebanyak 87, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,12%. Semakin rendah rasio KDRT maka kinerja semakin baik yang menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi semakin sedikit. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Adapun Ketidakberhasilan mencapai target ini disebabkan oleh :

- 1) Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, cenderung menurun ditahun 2017 dimana dapat dilihat dari angka pelaporan kasus sebanyak 33 kasus sedangkan di tahun 2016 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 43 kasus KDRT.
- 2) Penurunan kekerasan dalam rumah tangga ini, diakibatkan oleh kesadaran masyarakat tentang pencegahan KDRT sudah mulai diterapkan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan PA dengan

melibatkan Polres Bone sebagai bagian integral dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Bone. Selanjutnya bahwa bagaimana mengurangi angka kekerasan melalui informasi di media cetak dan elektronik sehingga pemahaman masyarakat tentang pencegahan kekerasan lebih efektif lagi.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 102) persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 98,30% dari target 100% dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2017 sebanyak 5.728 dan jumlah pekerja perempuan pada Tahun 2016 sebanyak 5.827. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 79,96% maka mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa peran aktif perempuan semakin baik yang dapat dilihat dengan terserapnya perempuan dalam lembaga pemerintah di berbagai eselon dan golongan kepangkatan yang ada. Akses bagi perempuan untuk bekerja terbuka luas dan bersaing dengan laki-laki di segala sektor pembangunan, artinya peluang di dunia kerja sudah responsif Gender.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan jumlah anggaran Rp. 132.170.000 terealisasi Rp. 132.170.000, kegiatan fasilitasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.161.500 terealisasi Rp.101.161.500. Serta program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui kegiatan peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.485.000 terealisasi Rp. 57.485.000.

6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 42: Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Transmigrasi di Lokasi Permukiman Transmigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.110
 Analisis Misi 4 Sasaran 42
 Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman Transmigrasi di Lokasi Permukiman
 Transmigrasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
42.	Meningkatnya rasa aman dan nyaman transmigran di lokasi pemukiman transmigrasi	Transmigran swakarsa	Persen	100	-	-	-

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 100) transmigran swakarsa tidak mencapai target. Hal ini diakibatkan karena transmigran swakarsa bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Daerah transmigrasi merupakan kewenangan konkuren yang diurus bersama oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

E. Misi 5 : Memperkuat budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 43 : Meningkatkan Penyelenggaraan Event-Event Seni Budaya Daerah dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.111
 Analisis Misi 5 Sasaran 43
 Meningkatkan Penyelenggaraan Event-Event Seni Budaya Daerah
 dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
43.	Meningkatnya penyelenggaraan event-event seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan			8	4

Sumber Data : Dinas Kebudayaan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 104) jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 8 kegiatan dari target 6 kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya melaksanakan 4 kegiatan maka capaiannya mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengelolaan keragaman budaya melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan alokasi anggaran Rp.641.000.000 terealisasi Rp.568.799.944. dan kegiatan pegelaran seni dan budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000 terealisasi Rp.150.000.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan seni dan budaya yang diselenggarakan dengan kegiatan perayaan Hari Jadi Bone maupun perayaan nasional.
- 2) Adanya dukungan dan kerjasama pihak pemerhati seni maupun stakeholder serta asosiasi yang membidangi dan membantu mewujudkan perkembangan kompetensi seni budaya masyarakat melalui penyelenggaraan event-event yang bertaraf nasional maupun internasional

F. Misi 6 : Memperkuat budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 44: Meningkatnya Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum dan Kesadaran Bela Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.112
Analisis Misi 6 Sasaran 44
Meningkatnya Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum dan Kesadaran Bela Negara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
44.	Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	Persen	90	-	-	-

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 105) tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 0% dari target 90%. Capaian ini dikategorikan Kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program Pendidikan politik melalui kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat dengan dana sebesar Rp.695.820.000 yang terealisasi sebesar Rp.687.378.864.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali maka untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 tidak ada pemilu. Namun tetap ada program pendidikan politik dalam hal kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu penyuluhan ini dilaksanakan disetiap kecamatan tertentu bagi generasi muda sejak dini karena

kegiatan ini sangat vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Kabupaten Bone.

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 45: Meningkatnya keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di lingkungan Masyarakat (Menurunnya Gangguan Kantibmas) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.113
Analisis Misi 6 Sasaran 45
Meningkatnya keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di lingkungan Masyarakat
(Menurunnya Gangguan Kantibmas)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
45.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat (menurunnya gangguan kantibmas)	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (jumlah gangguan kantibmas)	Persen			97	90

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 106) persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat (jumlah gangguan kantibmas) telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 97% dari target 90% dengan jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 34 dan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2016 sebanyak 34. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 90% maka capaiannya mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan dana sebesar Rp.3.541.500.000 yang terealisasi sebesar Rp.3.541.354.000, serta program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal melalui kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP, dan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan dana sebesar Rp.2.264.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.2.253.860.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Meningkatnya profesionalisme aparat di lapangan dan kerjasama dengan instansi terkait dan pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atau dari pemerintah setempat (kelurahan/desa) dan jumlah kasus yang ditangani.
 - 3) Peningkatan profesionalisme aparat dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 46: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.114
Analisis Misi 6 Sasaran 46
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan
Meningkatnya Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
44.	Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	Persen	90	-	-	-

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 107) jumlah capaian pajak daerah telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai Rp.44.726.076.045 dari target Rp.36.983.033.600. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai

Rp.37.605.711.246 maka capaiannya mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbe-rsumber pendapatan daerah dengan dana sebesar Rp.685.459.000 yang terealisasi sebesar Rp.674.194.500, kegiatan optimalisasi penagihan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya dengan dana sebesar Rp.61.578.000 yang terealisasi sebesar Rp.60.950.500, kegiatan pemutakhiran data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan dana sebesar Rp.415.290.000 yang terealisasi sebesar Rp. 415.010.000, kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dengan dana sebesar Rp. 56.350.000 yang terealisasi sebesar Rp.56.219.000, kegiatan penerbitan dan distribusi dokumen ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dengan dana sebesar Rp. 78.600.000 yang terealisasi sebesar Rp.78.390.000, kegiatan operasional penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan dana sebesar Rp.1.743.532.000 yang terealisasi sebesar Rp1.560.497.500, kegiatan peningkatan pengelolaan administrasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan dana sebesar Rp.63.755.000 yang terealisasi sebesar Rp.63.727.000, kegiatan penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dengan dana sebesar Rp.32.699.000 yang terealisasi sebesar Rp.32.437.500, kegiatan penyusunan laporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga dengan dana sebesar Rp.375.613.000 yang terealisasi sebesar Rp.375.168.339, kegiatan penyusunan perencanaan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan dana sebesar Rp.22.462.000 yang terealisasi sebesar Rp.21.047.750, kegiatan penerbitan dan distribusi dokumen ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan dana sebesar Rp.330.880.000 yang terealisasi sebesar Rp.308.150.000, dan kegiatan optimalisasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan dana sebesar Rp.514.086.000 yang terealisasi sebesar Rp.495.020.807.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Usaha peningkatan cakupan obyek pajak melalui pendataan dan verifikasi data obyek/subyek.
- 2) Mengintensifkan pengawasan pemungutan.
- 3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan-penyuluhan.
- 4) Pertumbuhan pendapatan riil perkapita yang mendorong kemampuan masyarakat membayar pajak.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 108) jumlah capaian retribusi daerah telah melebihi target, realisasi pada tahun 2017 mencapai Rp.12.795.043.203 dari target Rp.12.671.944.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp.11.336.148.488 maka capaiannya mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dengan dana sebesar Rp. 114.874.000 yang terealisasi sebesar Rp. 109.365.643.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh :

- 1) Peningkatan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong wajib retribusi patuh memenuhi kewajibannya.
- 2) Peningkatan pengawasan pelaksanaan pemungutan.
- 3) Pemberian penyuluhan-penyuluhan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 109) perbaikan sarana dan prasarana penghasil retribusi telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 16 unit dari target 16 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 14 unit maka capaiannya mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan dana sebesar Rp.993.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.992.060.000 dan kegiatan penataan

tempat berusaha bagi pedagang dengan dana sebesar Rp.60.214.000 yang terealisasi sebesar Rp.59.554.000.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian target ini yaitu secara berkesinambungan pemerintah melakukan perbaikan sarana prasarana penghasil retribusi seperti pasar-pasar tradisional.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 110) Indikator Opini BPK terhadap Audit Keuangan Daerah telah mencapai target. Pada tahun 2017 Indikator Opini BPK terhadap Audit Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang tersaji pada tabel diatas, terjadi peningkatan Opini sejak tahun 2016 yang mana sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 hasil audit BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan pada tahun 2016 dan 2017 opini BPK meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian setelah memenuhi kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual.
- b. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp.537.140.000 terealisasi Rp.512.671.000, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Rp.295.520.000 teralisasi Rp.281.557.386, serta peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan alokasi anggaran Rp.6.438.374.750 teralisasi Rp.5.844.215.118.

4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 47 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.115
Analisis Misi 6 Sasaran 47
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
47.	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persen	100	98.72	97.83	96.00

Sumber Data : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 111) persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2018 mencapai 98.72% dari target 100% dengan jumlah PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2018 sebanyak 9.192 dan jumlah PNS pada tahun 2016 sebanyak 9.311. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 96% maka capaiannya mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan aparatur melalui kegiatan penempatan PNS dengan dana sebesar Rp.117.735.000 yang terealisasi sebesar Rp.108.585.500.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh Penempatan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yang berdasarkan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat yang belum sesuai walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 48: Terjalannya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Terjalannya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Analisis Misi 6 Sasaran 48
Terjalannya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Terjalannya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
48.	Terjalannya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalannya kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan jumlah perda yang ditetapkan setiap tahun	Persen	100		122	100

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kab. Bone, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 112) persentase peningkatan jumlah perda yang ditetapkan setiap tahun tidak/telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 122 % dari target 100% dengan jumlah perda yang ditetapkan tahun tertentu pada tahun 2017 sebanyak 11 dan jumlah perda yang ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 9.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan legislasi peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.141.125.000 yang terealisasi sebesar Rp.141.125.000 dan kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan Rp.752.200.000 yang terealisasi sebesar Rp.412.500.000.

6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 49 Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.117
 Analisis Misi 6 Sasaran 49
 Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
49.	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh SKP	Persen	100		82	79

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 113) persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh SKPD tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 82% dari target 100% dengan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 sebanyak 57 dan jumlah SKPD pada tahun 2017 sebanyak 66. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 79%, maka capaian ini mengalami peningkatan. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dengan dana sebesar Rp.39.770.000 yang terealisasi sebesar Rp.39.770.000 dan program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah dengan dana sebesar Rp.23.635.000 yang terealisasi sebesar Rp.23.635.000.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya tenaga pengelola kearsipan di tiap unit kearsipan Perangkat Daerah.
- 2) Kurangnya pengetahuan pengelola kearsipan di tiap unit kearsipan Perangkat Daerah.

Solusinya adalah :

- 1) Pengalihan status tenaga pelaksana menjadi tenaga fungsional kearsipan.
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis kearsipan yang baku.

7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 50: Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informatika sesuai kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.118
Analisis Misi 6 Sasaran 50
Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informatika sesuai kebutuhan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
50.	Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan website milik Pemda	Persen	100		21,21	-

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 114) persentase ketersediaan website milik pemda tidak mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 21,21% dari target 100% dengan jumlah website dan sub domain pada tahun 2017 sebanyak 14 dan jumlah SKPD pada tahun 2017 sebanyak 66. Capaian ini dikategorikan Kurang.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program pengembangan komunikasi informasi dan media massa melalui kegiatan pengkajian pengembangan sistem informasi dengan dana sebesar Rp.158.561.500 yang terealisasi sebesar Rp.143.581.500 dan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi dengan dana sebesar Rp.68.250.000 yang terealisasi sebesar Rp.38.335.000.

Adapun ketidakberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

- 1) Penetapan target kinerja rendah disebabkan penetapan program dan kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis.
- 2) Anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara kepedulian dari masing-masing Perangkat Daerah untuk membuat/menyediakan sub domain masih rendah.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Penyusunan Grand Design tentang teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Bone.
 - 2) Peningkatan anggaran untuk mendukung implementasi program dan kegiatan.
8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 51: Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.119
Analisis Misi 6 Sasaran 51
Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
51.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Bone, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 115) Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik telah mencapai target, capaian kinerja tahun 2017 baik dari target kinerja berkategori baik. Pencapaian Kategori IKM ini sama dengan tahun 2016. Untuk tahun 2017 SKPD yang melaksanakan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat melalui kegiatan penyusunan Indeks kepuasan masyarakat dengan dana sebesar Rp.51.712.500 yang terealisasi sebesar Rp.51.712.500.

9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 52: Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Sektor dan Perencanaan-Perencanaan Normatif Lainnya Sesuai Kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.120
Analisis Misi 6 Sasaran 52

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Sektor dan Perencanaan-Perencanaan Normatif Lainnya Sesuai Kebutuhan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
52.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaan-perencanaan normatif lainnya sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	Persen	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator sasaran 116) persentase ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan pada tahun 2017 sebanyak 2 dokumen. Pencapaian ini sama dengan tahun 2016. Capaian ini dikategorikan Baik.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dengan dana sebesar Rp.125.610.000 yang terealisasi sebesar Rp.125.610.000 dan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan dana sebesar Rp.229.510.000 yang terealisasi sebesar Rp.229.350.000.

Adapun keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu.

10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 53: Tersusunnya Data dan Informasi Statistik Daerah yang Valid dan Up to date sesuai kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.121
Analisis Misi 6 Sasaran 53
Tersusunnya Data dan Informasi Statistik Daerah yang Valid
dan *up to date* Sesuai Kebutuhan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian		
					2018	2017	2016
53.	Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang valid dan up to date sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis informasi manajemen	Persen	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator 117) persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis informasi manajemen telah mencapai target, realisasi pada tahun 2017 mencapai 100 dari target 100% dalam bentuk sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan buku SIPD Kabupaten Bone tahun 2017 yang merupakan data dan informasi pembangunan daerah berbasis sistem informasi manajemen.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran, maka telah dilaksanakan program penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. melalui kegiatan penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan dana sebesar Rp.66.320.000 yang terealisasi sebesar Rp.66.320.000 (100%).

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (pada level makro daerah), diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).** Angka IPM Kabupaten Bone adalah salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Bone menempati peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Jeneponto. Semua capaian indikator komposit IPM Kabupaten Bone berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Namun indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli menunjukkan capaian yang relatif paling rendah. Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi penyebab rendahnya Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan kurang berkembangnya sentra-sentra aktifitas ekonomi, banyaknya angkatan kerja yang menganggur, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk, menjadi penyebab rendahnya Paritas Daya Beli.
- 2. Masih tingginya angka kemiskinan.** Kabupaten Bone masih mencatat persentase penduduk miskin yang relatif tinggi (tahun 2017 sebesar 10,28%) dan masih berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone juga mencatat angka terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 77.130 jiwa. Target untuk menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit tampaknya juga belum berhasil. Masih tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk sehingga balas jasa ekonomi yang diterima mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi penyebab utama

terjadinya kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan berkorelasi terhadap meningkatnya angka stunting dan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone. Olehnya itu, penguatan intervensi 1000 HPK menjadi prioritas dimasing-masing perangkat daerah terkait.

3. **Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.** Pendapatan per kapita Kabupaten Bone masih relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita Kabupaten Bone sebesar Rp 39,15 juta, sekitar 18,79 persen lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 48,21 juta). Rendahnya pendapatan per kapita Kabupaten Bone disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar, menjadi penyebab rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Bone.
4. **Kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah (PDRB).** Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, bukan hanya relatif kecil, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperjual-belikan tanpa melalui proses pengolahan. Dengan kata lain, komoditas hasil sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dipasarkan dalam bentuk komoditas primer. Kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan menjadi penyebab kurang berkembangnya industri pengolahan di Kabupaten Bone.
5. **Rendahnya tingkat produktivitas pekerja.** Ini setidaknya ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2017 sebesar 4,55%), tetapi tingginya angka kemiskinan di sisi lain (10,28%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan

pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

6. **Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah.** Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung bias ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lainnya terjadinya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis juga turut menyumbang terjadinya ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bone.
7. **Rendahnya Angka Harapan Hidup.** Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone pada tahun 2017 sebesar 66,22 tahun, yang menempatkan Kabupaten Bone pada urutan ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Jeneponto dan Pangkajene Kepulauan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone juga lebih rendah 3,62 tahun dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan (69,84 tahun). Rendahnya Angka harapan Hidup Kabupaten Bone dikontribusi oleh masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian anak usia di bawah lima tahun (balita), dan kematian akibat berbagai jenis penyakit. Ini mengindikasikan bahwa akses penduduk terhadap layanan kesehatan masih terbatas akibat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
8. **Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah.** Kabupaten Bone masih mencatat angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk di atas 15 tahun yang

relatif rendah. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone hanya sebesar 6,77 tahun. Angka ini persis sama dengan capaian Kabupaten Takalar, dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rendahnya akses penduduk terhadap layanan pendidikan, tingginya angka putus sekolah (berhenti sekolah), dan rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua masalah ini terjadi karena tidak tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.

- 9. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah.** Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun. APS 7-12 tahun hanya sebesar 98,51 persen, yang menempatkannya pada posisi ketiga terendah di Provinsi Sulawesi Selatan, setelah Kabupaten Wajo dan Bantaeng. Sedangkan APS 16-18 tahun hanya sebesar 56,52 tahun, yang menempatkannya pada posisi terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bone menunjukkan rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan, terutama untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA di seluruh wilayah kecamatan menjadi penyebab rendahnya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan.
- 10. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian.** Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Bone.
- 11. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan.** Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Bone mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp 649.605 sebulan (Maret 2017). Angka ini bukan

hanya lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 927.908), tetapi juga menempatkan Kabupaten Bone pada posisi kedua terendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Bone hanya berada di atas Kabupaten Soppeng. Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

- 12. Masih tingginya angka kriminalitas.** Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2017 mencapai 1.193 kasus, meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya (2016: 739 kasus). Dari seluruh kasus yang terjadi di tahun 2017, hanya 934 kasus yang diselesaikan atau 78,29 persen. Kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan narkoba merupakan kasus-kasus yang dengan frekuensi yang cukup tinggi. Munculnya pelanggaran hukum tersebut karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
- 13. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.** Ini setidaknya diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78 persen, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar C, dan masih adanya sejumlah temuan BPK yang berpotensi merugikan kerugian negara. Belum maksimalnya desain perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pengendalian dan pengawasan menjadi sejumlah penyebab mengapa tata kelola pemerintahan belum optimal.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pendidikan, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; Sarana dan Prasarana PAUD masih kurang dan tidak merata;

- ♦ Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi;
- ♦ Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi;
- ♦ Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- ♦ Jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat domisili siswa;
- ♦ Rasio Guru dan Siswa SD/SMP yang belum memenuhi SPM Pendidikan;
- ♦ Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;
- ♦ Masih kurangnya PKBM sebagai wadah penyebarluasan informasi pendidikan keaksaraan;
- ♦ Kurangnya dukungan untuk mendorong gerakan pemberantasan buta aksara;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan yang mendukung peningkatan kecakapan hidup masyarakat.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kesehatan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya;
- ♦ Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek jenis pelayanan (Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas, Rujukan, Tradisional dll), aspek peralatan kesehatan maupun dari aspek lain;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan kalibrasi alat kesehatan;
- ♦ Masih sering terjadi bencana alam seperti banjir dll;
- ♦ Masih perlu pengawasan intensif terhadap pengedaran obat dan makanan terhadap masyarakat;
- ♦ Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Bone;

- ♦ Masih tingginya angka kekurangan gizi pada Balita terutama Balita Stunting;
- ♦ Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi standar / belum mencapai target;
- ♦ Belum Semua Kecamatan, desa dan kelurahan melakukan Proses Kawasan Sehat secara Standar;
- ♦ Belum ada Desa/Kelurahan STBM, Belum mencapai Universal Akses Desa/Kelurahan ODF;
- ♦ Angka kejadian penyakit menular masih tinggi, penemuan kasus masih rendah dan pengobatan yang belum sesuai standar;
- ♦ Belum semua desa/kelurahan berstatus UCI;
- ♦ masih adanya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap;
- ♦ Masih ada puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi;
- ♦ Masih tingginya angka penduduk miskin sehingga perlu intervensi terhadap faktor penyebab kemiskinan di bidang kesehatan;
- ♦ Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas;
- ♦ Masih perlu pembangunan RS d beberapa wilayah;
- ♦ Perlunya Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana RS yang sudah ada;
- ♦ Masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu JKN;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Anak masih belum signifikan;
- ♦ Program Peningkatan Keselamatan Lansia;
- ♦ Perlunya pengawasan intensif terhadap pengolahan makanan dan minuman pada industri - industri rumah tangga;
- ♦ Penurunan Angka Kematian Ibu masih belum signifikan;
- ♦ Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM);
- ♦ Keterlambatan penemuan kasus kanker serviks dan payudara;

- ♦ Masih tingginya kebiasaan merokok yang merupakan faktor resiko penyakit tidak menular;
- ♦ Masih tingginya penderita katarak;
- ♦ Masih ada pasien ODGJ yang dipasung;
- ♦ Kasus Hipertensi semakin meningkat;
- ♦ Kasus DM semakin meningkat;
- ♦ Tuntutan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS harus Reakreditasi setiap 3 tahun)
- ♦ Pembangunan dan penataan gedung disesuaikan dengan Master Plan dan Kebutuhan Alat kesehatan sesuai standar RS type B;
- ♦ Jumlah SDM belum memenuhi Standar RS type B;
- ♦ Indikator pelayanan rawat inap yang belum berada pada angka ideal;
- ♦ SIM RS belum terintegrasi optimal;
- ♦ Persiapan pelaksanaan Survey Verifikasi dan Visitasi Akreditasi RS Versi SNARS.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

- ♦ Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun beton;
- ♦ Masih ada Jembatan yang mengalami rusak berat;
- ♦ Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- ♦ Aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan wisata dan industri belum memadai;
- ♦ Pembagian kewenangan jalan mengakibatkan penanganan jalan tidak efektif;
- ♦ Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin kelayakan dan Rendahnya kepatuhan terhadap fungsi ruang;

- ♦ Masih terjadinya alih fungsi lahan;
- ♦ Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- ♦ Masih adanya daerah irigasi baru (irigasi permukaan dan irigasi tambak) yang sudah didata namun belum terbangun jaringan irigasinya;
- ♦ Adanya kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang terjadi pada daerah-daerah irigasi permukaan yang sudah terbangun (eksisting) yang berpotensi mengganggu fungsi dan kinerja jaringan irigasi di daerah irigasi tersebut;
- ♦ Masih adanya daerah-daerah irigasi yang sudah terdaftar tapi belum memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan belum pernah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan;
- ♦ Masih adanya jaringan sungai (termasuk di dalamnya saluran pembuang) yang butuh untuk direhabilitasi / dinormalisasi (pengerukan, pasangan talud dan bronjong) yang jika dilaksanakan akan berpotensi mengganggu kinerja dan fungsi aset-aset pengairan yang ada di sekitarnya;
- ♦ Adanya sumber-sumber air yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumber-sumber air (konservasi) untuk keperluan pertanian;
- ♦ Adanya kawasan-kawasan pemukiman di sekitar pantai di beberapa daerah pantai yang membutuhkan fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) untuk melindungi kawasan tersebut dari banjir yang diakibatkan kenaikan air laut (pasang).
- ♦ Kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) dalam menanggulangi liapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah permukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah pantai tersebut akibat adanya fluktuasi pasang surut air laut di daerah-daerah pantai (kawasan pesisir) yang ada di

Kabupaten Bone yang cenderung tidak menentu baik disebabkan pengaruh inkonsistensi iklim maupun pengaruh pemanasan global.

- ♦ Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada disekitarnya.
- ♦ Banyak sungai utama yang mengalami laju aggradasi (pendangkalan dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.
- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
- ♦ Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- ♦ Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkaran/konservasi air tanah yang terbangun.
- ♦ Banyak bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
- ♦ Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
- ♦ Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
- ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.

- ♦ Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
 - ♦ Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk pembenahan jaringan irigasi tambak yang sudah terbangun di Kabupaten Bone.
 - ♦ Masih banyak potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bone yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.
 - ♦ Belum memadainya tingkat pelayanan operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru terbentuk.
 - ♦ Belum memadainya database irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi da pantai.
 - ♦ Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
 - ♦ Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, adalah:
- ♦ Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
 - ♦ Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
 - ♦ Tidak memadainya sarana dan prasarana jalan di kawasan perumahan dan permukiman;
 - ♦ Masih adanya kawasan permukiman kumuh
 - ♦ Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA;
- ♦ Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal;
- ♦ Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merata;
- ♦ Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara;
- ♦ Masih adanya pelanggaran K3 oleh masyarakat;
- ♦ Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- ♦ Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
- ♦ Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
- ♦ Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- ♦ Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
- ♦ Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- ♦ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan;
- ♦ Belum memadainya sarana, prasarana dan SDA pendukung penanganan korban bencana;
- ♦ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian

bencana;

- ♦ Belum optimalnya penanganan pasca bencana;
- ♦ Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan;
- ♦ Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
- ♦ Jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran.

6. Urusan Sosial:

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

- ♦ Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan usaha KUBE.
- ♦ Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- ♦ Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah.
- ♦ Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas;
- ♦ Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya;
- ♦ Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial.
- ♦ Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam

Pahlawan (TMP).

7. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

- ♦ Rendahnya tingkat kesadaran pihak pengusaha untuk memberi hak pada karyawan seperti pesangon, insentif, upah yang layak, uang saku dll;
- ♦ Kurangnya komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan dan perselisihan;
- ♦ Rendahnya tingkat pengetahuan dari pengusaha tentang kepesertaan jamsostek;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- ♦ Tingginya Pertumbuhan Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan kerja;
- ♦ Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih dibidang kewirausahaan;

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

- ♦ Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
- ♦ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ♦ Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
- ♦ Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;
- ♦ Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;

- ♦ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- ♦ Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;
- ♦ Belum tersedia lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- ♦ Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.

9. Urusan Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

- ♦ Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang;
- ♦ Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
- ♦ Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras;
- ♦ Masih rendahnya ketersediaan protein hewani;
- ♦ Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan;
- ♦ Belum optimalnya pelaporan SKPG;
- ♦ Belum seimbangnya pola konsumsi masyarakat dimana masih didominasi oleh karbohidrat, ketimbang protein hewani maupun nabati;
- ♦ Informasi distribusi bahan pangan antar wilayah belum optimal;
- ♦ Harga pangan masih fluktuatif;
- ♦ Belum memadainya sarana dan pasarana distribusi pangan;
- ♦ Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan belum berjalan secara optimal;
- ♦ Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait tentang keamanan pangan;
- ♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- ♦ Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan

pekarangan;

- ♦ Masih rendahnya promosi pangan lokal;
- ♦ Belum optimalnya lembaga petani dalam menyediakan cadangan pangan;
- ♦ Masih rendahnya operasional dalam mengelola cadangan pangan.

10. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pertanahan, adalah:

- ♦ Masih banyaknya lahan/ aset pemerintah yang belum tersertifikasi;
- ♦ Masih banyaknya bangunan Negara yang membutuhkan penanganan;
- ♦ Masih banyaknya sarana dan prasarana daerah yang membutuhkan penanganan.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- ♦ Adanya kesulitan dalam menyusun RPPLH karena RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan belum ada untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman penyusunan;
- ♦ Adanya kesulitan memperoleh data realisasi capaian SDGs dalam lima tahun terakhir
- ♦ Rendahnya Pengawasan terkait ketaatan hukum lingkungan dikarenakan belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup (pejabat Fungsional);
- ♦ Terbatasnya kemampuan menangani sampah di seluruh wilayah kecamatan karena kurangnya tenaga operasional, armada, dan anggaran operasional.
- ♦ Masih terjadinya pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan sangat potensial mencemari lingkungan, terutama pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap kedalam tanah);
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan Laboratorium Lingkungan untuk

memantau seluruh sungai di Kabupaten Bone;

- ♦ Belum tersedianya peralatan sampling udara portable pada Laboratorium Lingkungan DLH sehingga pengukuran kualitas udara masih bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Makassar dan/atau bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DPLH Provinsi Sulawesi Selatan;
- ♦ Dampak Perubahan Iklim (Pemanasan Global).

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

- ♦ Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena jaringan koneksi internet yang lambat dan jumlah aparatur yang terbatas;
- ♦ Tidak adanya peraturan mengenai sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- ♦ Tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- ♦ Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mutasi penduduk;
- ♦ Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sektor untuk meningkatkan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

- ♦ Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
- ♦ Unit usaha tidak berfungsi optimal;
- ♦ Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

- ♦ Pengelolaan sistem pemerintahan desa tidak dikelola secara profesional;
- ♦ Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
- ♦ Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
- ♦ Pengelolaan keuangan desa masih banyak yang tidak memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratisasi.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

- ♦ Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- ♦ Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok bina ketahanan keluarga;
- ♦ Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

15. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

- ♦ Belum terpenuhinya aksesibilitas jalan untuk semua wilayah, terutama pada wilayah pedesaan yang terisolir;
- ♦ Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana dan prasarana transportasi, seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- ♦ Lemahnya sistem registrasi kepemilikan kendaraan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

- ♦ Belum tersedianya sarana yang memadai Khususnya Pelayanan

Berbasis Online sehingga belum terkoneksi *Command Center*;

- ♦ Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*. Belum terjangkau Jaringan Seluler;
- ♦ Infrastruktur Jaringan belum memadai.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

- ♦ Masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- ♦ Rendahnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan melalui BPR/LKM oleh koperasi dan UKM;
- ♦ Minimnya kualitas SDM dan kurangnya aparat pembina dan penyuluh koperasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten bone;
- ♦ Masih terbatasnya kemampuan gerakan koperasi dan pelaku Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usaha;
- ♦ Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan promosi produk usaha mikro.

18. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

- ♦ Belum tersedianya database investasi dan regulasi insentif penanaman modal;
- ♦ Ketepatan jangka waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP;
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun realisasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkaji/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal;

- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

- ♦ Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan;
- ♦ Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
- ♦ Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda;
- ♦ Masih Kurangnya festival kepemudaan;
- ♦ Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif;
- ♦ Kurang pengetahuan pemuda tentang penyalagunaan narkoba;
- ♦ Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK;
- ♦ Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran;
- ♦ Rendahnya Frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas;
- ♦ Kurang Optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar;
- ♦ Masih kurangnya kegiatan kompetisi Olahraga;

- ♦ Masih terbatasnya pembibitan atlet potensial;
- ♦ Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga.

20. Urusan Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

- ♦ Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta *up-to date* yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.

21. Urusan Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan persandian, adalah:

- ♦ Belum memadainya peralatan dan anggaran persandian;
- ♦ Belum tersedianya tenaga pengelola persandian.

22. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

- ♦ Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan;
- ♦ Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian andalan penetapan situs;
- ♦ Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya;

23. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

- ♦ Rendahnya minat baca masyarakat;
- ♦ Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada;
- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang perpustakaan;
- ♦ Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka;
- ♦ Kurangnya pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan perkembangan teknologi informasi;
- ♦ Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

- ♦ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kearsipan;
- ♦ Rendahnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan arsip;
- ♦ Belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan.

A. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kelautan dan perikanan, adalah:

- ♦ Lemahnya Kemampuan Pelaku Usaha di Bidang Kenelayanan, dalam Kemandirian Berusaha secara berkelanjutan;
- ♦ Masih Rendahnya Kemampuan berwirausaha Bagi Pembudidaya Ikan secara berkelanjutan;
- ♦ Rendahnya Legalitas Berusaha bagi Pelaku Usaha Perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

- ♦ Terbatasnya Pelaksanaan Festival, Event/ PameranPariwisata;
- ♦ Belum Optimal Peran Kelompok Sadar Wisata;
- ♦ Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- ♦ Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bone.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian, adalah:

- ♦ Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
- ♦ Rendahnya akses petani terhadap permodalan;
- ♦ Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang berbasis agribisnis;
- ♦ Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal peningkatan teknologi pertanian;
- ♦ Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian;
- ♦ Terus berlangsungnya alih fungsi lahan;
- ♦ Masih adanya pertanaman hambur yang dilakukan oleh petani;
- ♦ Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi kedelai

sehingga pada saat panen raya harga kedelai di tingkat petani sangat rendah;

- ♦ Belum optimalnya pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah lingkungan;
- ♦ Penanganan pasca panen yang masih rendah;
- ♦ Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis;
- ♦ Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan;
- ♦ Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak;
- ♦ Jumlah Akseptor IB masih rendah;
- ♦ Ternak bibit sapi belum bersertifikat;
- ♦ Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (Kontainer);
- ♦ Kurangnya tempat pemasaran hewan;
- ♦ Perlunya penanggulangan penyakit ternak Antrax dan Rabies.

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan energi dan sumberdaya mineral, adalah:

- ♦ Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- ♦ Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Bone;
- ♦ Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibannya;
- ♦ Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- ♦ Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- ♦ Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;

- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- ♦ Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- ♦ Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ♦ Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral,air tanah dan mata air

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

- ♦ Kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan;
- ♦ Masih banyaknya barang yang tidak aman yang beredar di masyarakat;
- ♦ Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ♦ Masih banyaknya timbangan/alat timbang yang belum memiliki sertifikat tera;
- ♦ Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha;
- ♦ Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya;
- ♦ Masih Kurangnya Pengetahuan UKM untuk melakukan kegiatan ekspor;
- ♦ Kurangnya Promosi Produk Unggulan Daerah.

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

- ♦ Rendahnya Inovasi dan adopsi Teknologi, Pengembangan Desain/ Kemasan Produk Industri;
- ♦ Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Industri;
- ♦ Kurangnya Wawasan Pengusaha IKM dalam hal Manajemen, Kewirausahaan, Mempromosikan Produk IKM;
- ♦ Terbatasnya Modal Usaha dan Rendahnya Akses terhadap Sumber-

Sumber Permodalan;

- ♦ Masih Rendahnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi;
- ♦ Masih Kurangnya Sentra-Sentra Pengembangan Industri.

B. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan pembangunan, adalah:

- ♦ Masih Rendahnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sehingga perumusan kebijakan kurang berkualitas;
- ♦ Kurangnya Data yang Akurat, Valid, dan Relevan serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk Perencanaan yang Baik;
- ♦ Lemahnya Kapasitas Aparat Perencana dilihat dari kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan Tektis Perencana;
- ♦ Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perencanaan.

2. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

- ♦ Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah;
- ♦ Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- ♦ Kontribusi/ Rasio PAD terhadap APBD masih rendah;
- ♦ Tingkat pemahaman kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perpajakan daerah belum memadai;
- ♦ Belum tercapainya pengalokasian belanja modal minimal 30% terhadap APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan APBD
- ♦ Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel khususnya dalam implementasi Transaksi Non Tunai yang menjadi kebijakan baru dari Pemerintah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Masih rendahnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan (Diklat PIM);
- ♦ Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti tugas belajar dan mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan;
- ♦ Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
- ♦ Belum terlaksananya secara optimal pengembangan pegawai berdasarkan pola karier;
- ♦ Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- ♦ Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
- ♦ Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja pegawai.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- ♦ Belum tersedia informasi tentang peningkatan kualitas hidup manusia berdasarkan hasil pengkajian;
- ♦ Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi wilayah serta inovasi teknologi;
- ♦ Masih rendahnya penelitian terhadap sektor-sektor unggulan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- ♦ Belum adanya penelitian dan pengembangan teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan;
- ♦ Belum berjalannya fungsi litbang sebagai motivator dan inisiator dalam pembangunan;
- ♦ Belum memadai sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung

penelitian dan pengembangan;

- ♦ Belum terlaksananya pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah;
- ♦ Sinergitas (ABG-C) Academition, Business, Goverment and Comunity belum terlaksana secara optimal;
- ♦ Kesiapan teknologi yang menjadi bagian aspek penguat pada ekosistem inovasi pada (IDSD) Indeks Daya Saing Daerah belum tersedia.

5. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengawasn, adalah:

- ♦ Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan internal Inspektorat Daerah dalam penjaminan mutu (quality assurance) dan pemberian jasa konsultasi (consulting) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditinjau dari tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, tingkat maturitas SPIP, capaian implementasi reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta aspek-aspek lainnya di lingkup Pemerintahan Kab. Bone;
- ♦ Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI berdasarkan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus kepegawaian terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ♦ Tingkat Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal yang kompeten dan profesional pada Inspektorat Daerah yang belum memadai dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- ♦ Tingkat Kapabilitas APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih kurang dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditinjau dari Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dan Keuangan, Pengelolaan SDM, Ketersediaan Anggaran beserta Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran.

6. Sekretariat Dewan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat dewan, adalah:

- ♦ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- ♦ Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan sekretariat DPRD;
- ♦ Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
- ♦ Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat segera ditindaklanjuti karena banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia yang ada;
- ♦ Masih sangat minim Ranperda inisiatif DPRD karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif.

7. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sekretariat daerah, adalah:

- ♦ Manajemen Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi belum memadai;
- ♦ Kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan masih terbatas;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan Reviuw terhadap dokumen

perencanaan baik subtransi sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai;

- ♦ Belum Optimalnya pembiayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- ♦ Kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Sekretariat masih rendah;
- ♦ Penatausahaan Barang/Aset Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah belum tertib;
- ♦ Pembinaan generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan perlu ditingkatkan;
- ♦ Manajemen Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi belum memadai;
- ♦ Luas Wilayah Kabupaten Bone tidak sebanding dengan kemampuan daerah yang sangat terbatas sehingga perlu dilakukan kerjasama;
- ♦ Belum optimalnya Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan Penataan Wilayah administrasi pemerintahan;
- ♦ Evaluasi Pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kependudukan belum optimal;
- ♦ Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Beragama;
- ♦ Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah belum memadai;
- ♦ Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam masih kurang;
- ♦ Belum Optimalnya pelaksanaan pembinaan kelembagaan pada masing-masing SKPD;
- ♦ Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah masih rendah;
- ♦ Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa belum memadai;
- ♦ Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Sekretariat daerah masih rendah;
- ♦ Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi beberapa

bagian dengan dinas/ instansi/kantor;

- ♦ Penyusunan Kebijakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Kedinasan KDH/WKDH sangat penting;
- ♦ Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat penting

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menetapkan prioritas pembangunan yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu melalui:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.

5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan diatas, maka kegiatan prioritas disusun berdasarkan kriteria :

- a. Kebutuhan Mendesak
- b. Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak termasuk Kelompok Marjinal
- c. Pemenuhan hak dasar warga dan pencapaian rasa keadilan
- d. Memiliki potensi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- e. Kepastian penerima manfaat dan keterlibatan swadaya riil masyarakat.

Untuk mengetahui pergerakan perekonomian Kabupaten Bone kedepan perlu analisis atas capaian kinerja perekonomian tahun 2018 dan perkiraan capaian perekonomian tahun 2019.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Kabupaten Bone sepanjang tahun 2013-2018 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.1 menunjukkan trend

yang positif. Apabila PDRB pada tahun 2013 sebesar Rp. 13,53 Trilyun meningkat menjadi Rp.20,24 trilyun di tahun 2018, atau dengan kata lain selama kurun waktu tersebut, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bone meningkat rata-rata sebesar 8,39 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar 9,53 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp.21,65 trilyun, dan tahun 2020 diproyeksikan kembali meningkat sekitar Rp. 23,07 trilyun.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Bone Tahun 2013-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)							
		2013	2014	2015	2016	2017	*2018	*2019	*2020
1	Pertanian.	6.200	7.025.7	7.654	8.454.41	9.161.	9.904.5	106195	113731
	Kehutanan. dan Perikanan	.476	87	.002	8	587	10	70	86
2	Pertambangan dan Penggalian	352.9	403.6	458.8	507.048	563.0	614.156	666907	718951
		62	02	72		03		.74	
3	Industri Pengolahan	968.5	1.047.	1.123.	1.225.6	1.315.	1.398.1	149036	158253
		57	185	606	43	917	35	0.5	3
4	Pengadaan Listrik.	16.80	20.56	19.79	22.591	23.89	25.591	26732.	28782
	Gas	5	3	8		3		66	
5	Pengadaan Air	7.045	7.051	7.084	7.411	7.787	7.829	8109.9	8385
								4	
6	Konstruksi	1.408.	1.435.	1.550.	1.661.7	1.809.	1.881.5	201281	212649
		360	943	585	01	377	31	7.64	1
7	Real Estate	482.65	519.06	557.38	571.16	598.2	630.662	654504	678507
		3	6	4	7	12		.28	
8	Perdagangan Besar dan Eceran.	1.732.8	1.883.10	2.000.4	2.213.67	2.449.4	2.585.0	278222	298663
	d Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	87	7	88	6	77	52	3.46	7
9	Transportasi dan Pergudangan	343.47	374.85	401.17	413.906	442.96	455.219	474744	492798
		0	6	1		0		.333	
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.753	85.155	88.617	94.562	105.61	109.077	116056	123603
						2		.54	
11	Informasi dan Komunikasi	294.90	303.91	335.63	372.027	410.72	444.784	480467	517454
		0	3	6		7		.3	
12	Jasa Keuangan	406.32	429.13	462.26	522.869	550.04	591.449	633785	668075

		3	3	0		8		.011	
13	Jasa Perusahaan	9.396	9.999	10.656	11.416	12.328	12.943	13736.64	14523
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	684.238	697.328	762.835	754.192	793.690	821.027	849254.806	868730
15	Jasa Pendidikan	357.224	375.489	399.960	429.187	470.396	492.087	524070.137	555520
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.161	153.465	165.214	177.883	194.117	205.867	219421.3	233420
17	Jasa lainnya	46.641	49.735	53.704	58.484	64.923	68.291	73526.94	78622
	PDRB	13.531.849	14.821.376	16.051.871	17.498.179	18.974.053	20.248.211	21647987.9	23064549

Sumber : BPS Kabupaten Bone . 2018
*) 2018- 2020 Data Proyeksi

Dilihat dari perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, secara nominal meningkat tajam dan konsisten setiap tahunnya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone rata-rata sekitar 47,5 persen pertahun selama periode 2013-2017, dan pada tahun 2018 kontribusi sektor ini sebesar 48,92 persen dengan nominal mencapai Rp. Rp. 9,9 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari PDRB Kabupaten Bone disumbang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Selanjutnya terdapat sektor perdagangan besar dan eceran yang menempati urutan kedua sebagai sektor dengan proporsi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone dengan share sektor tahun 2018 sekitar 12,77 persen atau dengan nilai sebesar Rp. 2,59 trilyun, sektor ini meningkat dua kali lipat lebih hanya dalam waktu enam tahun. Kemudian disusul oleh sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan yang juga merupakan sektor dominan dengan

rata-rata share sektor masing-masing sebesar 9,29 persen dan 6,91 persen.

Sejalan dengan itu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, sektor real estate, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor lainnya merupakan kumpulan sektor yang memiliki trend positif namun melambat selama periode pengamatan. Sementara untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan sektor administrasi pemerintahan cenderung berfluktuasi bahkan sempat menurun tajam sebelum kemudian meningkat kembali.

Dengan demikian dapat disimpulkan, kontribusi dari keempat sektor terhadap pembentukan PDRB rata-rata mencapai 77 persen, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya rata-rata hanya sekitar 23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Bone sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor; sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan, dimana sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai sektor pendukung sehingga perkembangan dan kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan tersebut.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diproyeksikan perekonomian daerah sepanjang tahun 2019 dan 2020 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi Rp. 21.648 trilyun dan pada tahun 2020 konsisten meningkat sebesar Rp 23.065 trilyun.

Trend peningkatan PDRB sepanjang tahun 2019 dan 2020, diperkirakan masih dipengaruhi oleh trend peningkatan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan

eceran, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Bone berdasarkan harga berlaku sepanjang tahun 2013-2018 juga menunjukkan pergerakan yang seirama, dimana terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Tabel 3.2 menerangkan bahwa terjadi akselerasi yang cukup mengesankan pada PDRB kabupaten Bone, bisa dilihat dari data yang ada menunjukkan pergerakan yang begitu cepat dari sekitar Rp. 16,73 trilyun pada tahun 2013, telah meningkat sebesar Rp. 32,65 trilyun lima tahun berikutnya.

Tabel 3.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bone
Tahun 2013-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)							
		2013	2014	2015	2016	2017	*2018	*2019	*2020
1	Pertanian.	7.947.8	9.815.1	11.470.	12.970.8	14.518.	16.233.	17,766,	19,348,
	Kehutanan. dan	53	07	718	61	220	498	966	593
	Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian	489.674	664.942	866.106	985.688	1.066.132	1.256.607	1,382,902	1,502,840
3	Industri Pengolahan	1.169.670	1.379.734	1.615.162	1.791.531	2.017.319	2.226.812	2,435,005	2,639,656
4	Pengadaan Listrik. Gas	15.956	18.229	17.416	20.108	23.815	24.384	26,403	29,100
5	Pengadaan Air	7.611	7.869	8.095	8.730	9.321	9.626	10,150	10,693
6	Konstruksi	1.710.143	1.899.379	2.235.912	2.558.767	2.878.691	3.155.524	3,492,175	3,796,998
7	Real Estate	652.781	752.424	885.068	979.273	1.055.711	1.174.864	1,274,125	1,365,920
8	Perdagangan Besar dan Eceran. d Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.990.764	2.212.186	2.555.956	3.045.777	3.489.725	3.808.336	4,260,216	4,683,326
9	Transportasi dan Pergudangan	390.051	473.861	589.663	608.304	648.179	737.221	787,017	831,164
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.699	108.691	118.090	129.814	148.551	159.087	171,989	186,626

11	Informasi dan Komunikasi	281.33 3	297.93 2	324.98 5	382.903	432.31 9	459.977	509,05 1	555,40 9
12	Jasa Keuangan	539.07 9	612.70 7	698.81 7	811.429	895.77 0	981.614	1,078,9 08	1,171,8 02
13	Jasa Perusahaan	11.714	12.901	14.583	15.945	17.935	19.261	20,947	22,548
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	818.42 5	909.18 9	1.100.9 97	1.127.27 3	1.218.4 53	1.340.3 09	1,433,1 53	1,507,2 42
15	Jasa Pendidikan	415.79 5	466.51 1	520.23 4	558.995	639.95 2	682.537	739,17 7	796,60 7
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.35 4	170.72 8	199.31 1	220.701	249.08 8	275.069	300,51 7	325,97 1
17	Jasa lainnya	55.306	64.555	75.005	84.939	96.214	105.864	116,46 3	126,84 9
	PDRB	16.734. 207	19.866. 945	23.296. 118	26.301.0 35	29.405. 396	32.650. 590	17,766, 966	19,348, 593

Sumber: BPS Kabupaten Bone. 2018

*) 2018- 2020 Data Proyeksi

Komponen pembentuk PDRB Kabupaten Bone menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana pada tahun 2013 nilainya sebesar Rp 7,95 trilyun meningkat sebesar Rp 16,23 trilyun pada tahun 2018 atau dapat dikatakan sektor ini meningkat hampir dua trilyun setiap tahunnya. Hal ini tentunya turut mengkonfirmasi terjadinya peningkatan PDRB atas dasar harga konstan yang juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang berarti bahwa peningkatan sektor ini didukung oleh produksi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin membaik.

Sama halnya dengan PDRB harga konstan, urutan kedua ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, meskipun mengalami fluktuasi namun sektor ini konsisten dalam memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone disetiap tahunnya, dengan share sektor sebesar masing-masing 11,9 persen 11,14 persen, 10,97 persen, 11,58 persen, 11,87 persen

untuk tahun 2013-2017, dan pada tahun 2018 kontribusi untuk sektor ini sebesar 11,61 persen dari total PDRB Kabupaten Bone atau senilai dengan Rp. 3,82 triliun, dan diproyeksikan akan memiliki pola yang sama untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Disisi lain sektor dengan sumbangsih terendah terhadap PDRB Kabupaten Bone adalah sektor pengadaan air yang bernilai hanya Rp. 9,63 milyar pada tahun 2018 dan peningkatannya hanya berkisar dua ratus juta pertahun.

PDRB Kabupaten Bone Tahun untuk tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp. 35,81 triliun, dan selanjutnya untuk tahun 2020 diproyeksikan kembali meningkat hingga Rp. 38,91 triliun. Atau dengan kata lain, perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten Bone meningkat rata-rata sekitar tiga triliun lebih setiap tahunnya.

Struktur perekonomian Kabupaten Bone masih bertumpu pada sektor primer dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018, begitupun diproyeksikan untuk tahun 2019 dan tahun 2020, dimana dominasi sektor primer begitu besar terhadap total PDRB Kabupaten Bone. Hal ini dapat dilihat dari share sektor primer yang memberikan andil lebih dari setengah total PDRB Kabupaten Bone baik dilihat dari harga konstan maupun harga berlaku, tahun 2013 share sektor primer sebesar 47,49 persen, sektor sekunder sebesar 20,29 persen dan sektor tersier sebesar 32,23 persen. Lima tahun kemudian sektor primer memberikan andil setengah dari PDRB Kabupaten Bone (50,07%), sekitar 29,47 persen dari sektor tersier dan 20,47 persen sisanya disumbang oleh sektor sekunder

Berdasarkan formulasi trend pertumbuhan beberapa tahun ke belakang, maka dapat diproyeksikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sektor primer masih menjadi tumpuan PDRB Kabupaten Bone masing-masing sebesar 49,92 persen dan 50,22 persen. Selanjutnya sektor sekunder diproyeksiakan memberikan kontribusi sebesar 20,62 persen tahun 2019 dan 20,63 persen di tahun 2020. Sementara itu

sektor sekunder diprediksi akan tetap berada pada angka 29 persen baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020. Lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Bone adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (primer). Tingginya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Bone ditopang oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pertanian tanaman pangan. Disamping itu Industri Pengolahan juga sudah mulai tumbuh membuka lapangan usaha bagi masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone sepanjang periode tahun 2013-2018 sebagaimana diperlihatkan pada grafik 3.3 menampilkan kinerja yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone rata-rata sekitar 8,5 persen pertahun, dan pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai Sembilan persen. Angka tersebut tidak hanya terbilang tinggi, tetapi juga turut menempatkan Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tersebut konsisten setiap tahunnya berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.3
Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone
Tahun 2013-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)							
		2013	2014	2015	2016	2017	*2018	*2019	*2020
1	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	4.16	13.31	8.94	10.46	8.36	10.711	8.62	9.30

2	Pertambangan dan Penggalian	10.74	14.35	13.69	10.50	11.04	11.089	9.38	8.73
3	Industri Pengolahan	7.13	8.12	7.30	9.08	7.37	8.232	8.11	8.25
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.30	22.37	(3.72)	14.11	5.77	8.17	3.67	8.25
5	Pengadaan Air	4.79	0.08	0.47	4.61	5.08	4.539	7.01	8.25
6	Konstruksi	9.88	1.96	7.98	7.17	8.89	8.145	10.81	10.59
7	Real Estate	5.52	7.54	7.38	2.47	4.73	3.533	1.93	1.06
8	Perdagangan Besar dan Eceran, d Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.06	8.67	6.23	10.66	10.65	11.005	12.17	13.81
9	Transportasi dan Pergudangan	7.53	9.14	7.02	3.17	7.02	4.679	3.53	3.44
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.38	6.77	4.07	6.71	11.69	8.692	11.03	13.21
11	Informasi dan Komunikasi	11.28	3.06	10.44	10.84	10.40	11.01	13.91	13.45
12	Jasa Keuangan	10.70	5.61	7.72	13.11	5.20	7.418	8.14	6.86
13	Jasa Perusahaan	7.60	6.42	6.57	7.13	7.99	7.589	8.27	8.67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.50	1.91	9.39	(1.13)	5.24	4.314	4.14	2.88
15	Jasa Pendidikan	9.65	5.11	6.52	7.31	9.60	8.268	10.18	10.86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.10	9.49	7.66	7.67	9.13	4.482	5.12	4.33
17	Jasa lainnya	6.46	6.63	7.98	8.90	11.01	11.607	13.12	14.42
	PDRB	6.30	9.53	8.30	9.01	8.43	9.436	8.92	9.32

Sumber: BPS Kabupaten Bone . 2018

*) 2018- 2020 Data Proyeksi

Pada tahun 2019 dan 2020, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.3, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,92 persen dan 9,32 persen. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor Perdagangan besar dan eceran yang diperkirakan tumbuh sebesar 12,17 persen dan 13,81

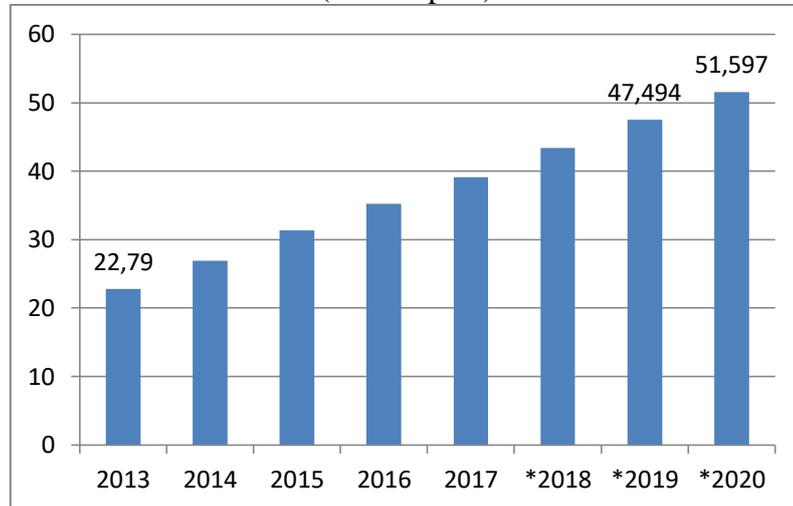
persen, diikuti oleh pertumbuhan di sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,03 persen dan 13,21 persen. Selanjutnya diisi oleh sektor konstruksi dengan nilai proyeksi sebesar 10.81 persen dan 10.59 persen. Sementara untuk sektor pertanian sendiri yang memberikan andil begitu besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone diproyeksikan tumbuh lebih lambat dari ketiga sektor tersebut diatas, dimana pertumbuhan sektor ini cukup tinggi, namun bertumbuh tidak lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

b. PDRB Perkapita

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bone serta meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak terhadap PDRB per kapita. Meskipun pada dasarnya angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Mencermati data pendapatan perkapita Kabupaten Bone sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1 dalam kurun waktu 2013-2020 PDRB per kapita Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan yang impresif. Apabila tahun 2013, PDRB perkapita Kabupaten Bone sebesar Rp 22,79 juta, meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 43,39 juta. Dan diproyeksikan akan terus terakselerasi pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 47,49 juta dan Rp. 51,59 juta. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, maka PDRB perkapita pada tahun 2019-2020 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2013-**2020*
(Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bone . 2018
*) 2018- 2020 Data Proyeksi

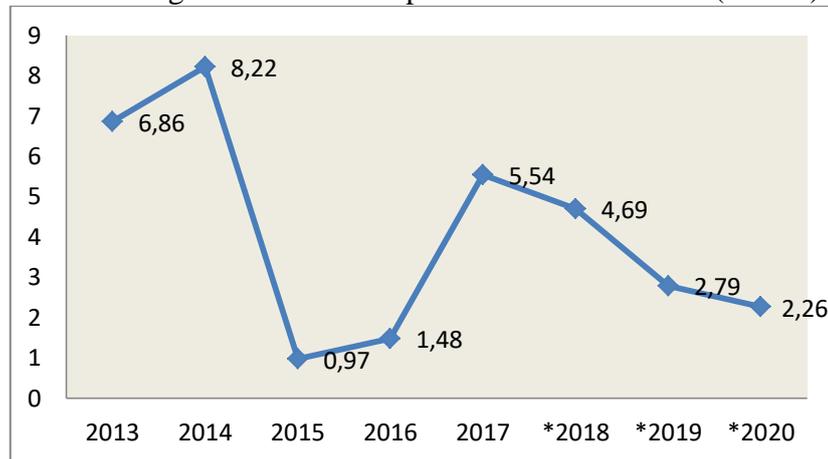
c. Inflasi

Salah satu variabel ekonomi yang menarik untuk dicermati adalah tingkat inflasi. Karena meskipun terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita, namun kenaikan harga cukup besar mempengaruhi daya beli riil masyarakat. Daya beli masyarakat berfluktuasi tergantung pada perubahan harga barang-barang. Gambaran mengenai perubahan atau kestabilan harga pada satu wilayah dari berbagai komoditas (baik berupa barang dan jasa) ditunjukkan oleh laju inflasi. Angka inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat memberi informasi tentang dinamika perkembangan harga dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting karena perkembangan harga dan jasa berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset serta nilai transaksi bisnis.

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menunjukkan rendahnya daya

beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang berakibat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.2
Perkembangan Inflasi Watampone Tahun 2013-2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bone . 2018
*) 2018- 2020 Data Proyeksi

Mencermati data inflasi di Kabupaten Bone secara umum sejak tahun 2013 sampai tahun 2018, pergerakan inflasi di kota Watampone cukup berfluktuasi. Puncak peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,22 persen. Namun setahun berikutnya (2015) terjadi penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 0,97 persen turun sekitar delapan kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 8,22 persen. Tahun 2018 angka inflasi Kabupaten Bone menunjukkan pergerakan menurun dari 5,54 persen (2017) menjadi 4,69 persen tahun 2018.

Peningkatan laju inflasi pada tahun 2013 dan 2014 ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi yaitu dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 pada 21 Juni 2013 dan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 pada 17 November 2014. Di tahun 2016 dan 2017 harga BBM juga mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

Dalam rangka mengurangi dampak peningkatan harga BBM pada tahun 2013 dan 2014 terhadap upaya penanggulangan

kemiskinan, pemerintah mempersiapkan berbagai program perlindungan sosial bagi kelompok rumah tangga miskin, diantaranya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang kemudian berganti nama menjadi Kartu Perlindungan Sosial (KPS), bantuan siswa miskin (BSM), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang kemudian diubah menjadi subsidi iuran BPJS untuk rumah tangga miskin dan lain-lain. Berbagai program tersebut sedikit banyak mampu meringankan beban rumah tangga miskin yang terlihat dari tren penurunan penduduk miskin yang konsisten sepanjang tahun 2013 hingga 2015 meski sempat terjadi gejolak peningkatan harga secara umum.

Jika diamati bobot inflasi di lima kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone (Kota Watampone) memiliki bobot inflasi kedua terendah setelah Kabupaten Bulukumba (Kota Bulukumba). Sedangkan kota yang tertinggi bobot inflasinya adalah Kota Makassar, yaitu rata-rata 3,93 persen per tahun. Dengan kata lain, Kota Makassar menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam enam tahun terakhir, secara rata-rata, laju inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan per tahun sebesar 4,77 persen. Dari angka tersebut, hanya 0,23 persen yang bersumber dari Kota Watampone. Dengan semakin stabilnya harga barang dan jasa Kabupaten Bone pasca kenaikan harga yang dipicu oleh kenaikan harga BBM, maka dapat diproyeksikan inflasi Kabupaten Bone (Watampone) pada tahun 2019 akan terus mengalami penurunan hingga dua persen dibawah tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,79 persen dan diproyeksikan akan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 2,26 persen.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Bone tahun 2014-2018, proyeksi perekonomian tahun 2019, perekonomian

Kabupaten Bone pada Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Bone serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Melihar proyeksi pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diperkirakan perekonomian Kabupaten Bone masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi yang masih dihadapi Kabupaten Bone. Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami cenderung menurun dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program/kegiatan yang selama ini dilakukan telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone tetap konsisten untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan

angka kemiskinan sampai tahun 2020 sebesar 9-10%. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan terutama penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, antara lain program PPLS yang berbasis rumah tangga, program pemberdayaan masyarakat dan program pengembangan ekonomi kecil dan mikro.

- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.

- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019-2020

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2019 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah; *Pertama*, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. *Kedua*, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. *Ketiga*, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. *Keempat*, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. *Kelima*, memperbaiki modal sosial khususnya

etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. *Keenam*, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Dengan melakukan hal-hal tersebut di atas diharapkan kedepan target yang sudah ditentukan dapat dicapai. Adapun prospek perekonomian Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 10,35%. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Bone pada tahun 2020 diperkirakan akan berada pada nilai 2-3%.
- Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih dapat tumbuh meskipun mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, diharapkan akan ikut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan berdasarkan kriteria dari Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan akan menurun menjadi 9-10%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bone di tahun 2018 diprediksikan akan berada di kisaran 4-5 % melalui upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019, dalam hal Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah, strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dan transfer dan pelayanan publik.
- d. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada

kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat meningkatkan IPM, member kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai bidang.

Kabupaten Bone sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi kedepan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 dapat diketahui. Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3.2.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2019

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bone Tahun 2014-2018 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari propinsi. Peningkatan jumlah pendapatan daerah dari tahun 2013 ketahun 2014 adalah sebesar Rp.1.533.031.760.003,- sedangkan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp.1.870.233.204.846,- Pada tahun2016 meningkat menjadi sebesar Rp.2.042.529.174.855,- dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.2.201.181.670.675,- pada tahun 2018 diproyeksi menjadi sebesar Rp.2.251.597.559.579,- pada tahun

2019 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.2.369.014.884.600,-. Hasil evaluasi/catatan atas perhitungan keuangan daerah RKPD tahun 2019 Kabupaten Bone dapat diketahui pada table 3.1:

Tabel 3.1 Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas RKPD Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3
4	Pendapatan	2.522.300.288.707
4.1	Pendapatan Asli Daerah	228.338.719.607
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57.111.227.642
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.491.899.437
4.1.3	Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.079.210.938
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	140.656.381.590
4.2	Dana Perimbangan	1.728.373.016.900
4.2.1	Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	25.599.288.320
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.179.340.805.940
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	523.432.922.640
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	565.588.552.200
4.3.1	Hibah	105.849.960.300
4.3.2	Dana Darurat	-
4.3.3	Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	68.337.150.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	364.160.241.900
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	27.241.200.000
4.3.6	Pendapatan Lainnya	-
5	Belanja	2.536.647.085.527
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.577.731.152.314
5.1.1	Belanja Pegawai	1.067.929.691.997
5.1.2	Belanja Bunga	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-
5.1.4	Belanja Hibah	26.604.270.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.491.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hsl. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	6.585.926.237
5.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	473.545.264.080
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000
5.2	Belanja Langsung	958.915.933.213
5.2.1	Belanja Pegawai	13.870.569.120
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	628.206.444.537
5.2.3	Belanja Modal	316.838.919.556
	Surplus / Defisit	(14.346.796.820)
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	24.346.796.820

6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	24.346.796.820
6.1.2	Pencairan Dana cadangan	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman daerah	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-
6.2.4	Pembayaran Pokok Utang	-
6.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.6	Pembayaran Utang Pemda	-
6.2.7	Pengembalian Dana Bos	-
	Pembiayaan Netto	14.346.796.820
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan (SILPA)	-

3.2.2 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Perhitungan kapasitas keuangan daerah dapat di analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Tahap I: Analisis dan Perhitungan Penerimaan Daerah

1) Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah

2) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

Dilihat dari tren pendapatan dari tahun 2014 ke 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gambaran perkembangan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2014–2017 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)					
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pendapatan Asli Daerah	155,427,196,666	159,866,219,584	180,156,598,903	279,960,093,500	214,246,216,580	11.87
1	Pendapatan Pajak Daerah	36,277,176,531	35,125,637,714	37,605,711,247	44,726,076,045	51,236,484,457	9.34
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15,378,571,068	15,221,326,386	11,336,148,488	12,795,043,203	19,652,213,419	9.98
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	2,331,537,248	2,953,683,330	4,179,816,872	6,727,965,905	7,055,937,640	33.51
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101,439,911,819	106,565,572,154	127,034,922,297	215,711,008,347	136,268,519,517	14.31
B	Dana Perimbangan	1,083,624,984,390	1,242,614,366,711	1,540,620,696,554	1,512,633,984,416	1,548,309,677,324	9.80
1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	46,907,340,390	34,897,311,711	52,114,930,328	31,407,240,349	23,302,043,707	(10.45)
2	Dana Alokasi Umum	950,401,934,000	977,807,065,000	1,088,618,062,000	1,069,494,543,000	1,070,426,493,000	3.14
3	Dana Alokasi Khusus	86,315,710,000	229,909,990,000	399,887,704,226	411,732,201,067	454,581,140,617	63.42
C	Lain Lain Pendaptan yang Sah	295,595,581,529	467,752,618,551	321,751,879,398	408,587,592,759	489,041,665,675	18.43
1	Pendapatan Hibah	-	-	11,038,188,960	-	84,489,169,245	(25.00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	50,761,528,815	53,871,562,151	75,918,025,272	76,881,029,359	72,110,586,785	10.53
3	Dana Penyesuaian	217,767,982,000	385,474,033,000	202,773,125,000	306,700,190,600	306,620,285,200	20.21

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)					
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	27,066,070,714	28,407,023,400	32,022,540,166	25,006,372,800	25,821,624,445	(0.24)
Total Pendapatan Daerah		1,534,647,762,585	1,870,233,204,846	2,042,529,174,855	2,201,181,670,675	2,251,597,559,579	10.28

3) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dapat dilihat padatabel berikut:

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014-2018

NO	Jenis Belanja Daerah	TAHUN (Rp)					
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Tidak Langsung	542,306,609,820	1,192,434,833,096	1,296,194,903,754	1,322,409,001,832	1,424,920,507,441	27.96
1.1	Belanja Pegawai	431,717,602,972	894,670,854,461	922,893,000,080	862,728,295,367	849,443,775,486	19.07
1.2	Belanja Bunga	1,601,042,182	1,265,189,968	929,417,250	590,230,716	253,351,574	(54.59)
1.3	Belanja Subsidi	31,909,347,649	28,630,890,582	7,297,509,288	-	-	(36.96)
1.4	Belanja Hibah	6,482,500,000	2,157,500,000	11,262,890,000	33,521,141,213	97,608,807,050	137.00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,349,500,000	50,960,276,170	35,108,958,014	49,761,862,000	71,750,385,800	32.83
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	1,754,472,000	-	-	-	4,593,053,681	(20.00)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan	65,492,145,018	214,508,371,916	317,968,973,096	375,794,960,536	401,261,210,850	63.14

NO	Jenis Belanja Daerah	TAHUN (Rp)					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Desa						
1.8	Belanja Tidak Terduga	-	241,750,000	734,156,026	12,512,000	10,224,000	(1.116.92)
2	Belanja Langsung	944,693,543,804	649,340,477,249	748,916,909,315	918,022,072,543	815,052,788,537	2.49
2.1	Belanja Pegawai	431,717,602,972	-	-	-	-	(20.00)
2.2	Belanja Barang dan Jasa	303,396,569,836	345,142,601,459	418,172,616,191	525,318,599,098	547,576,079,281	17.00
2.3	Belanja Modal	209,579,370,996	304,197,875,790	330,744,293,124	392,703,473,445	267,476,709,256	8.31
	Jumlah Belanja	1,487,000,153,623	1,841,775,310,345	2,045,111,813,069	240,431,074,375	2,239,973,295,978	10.63

4) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	127,442,472,281.77	123,874,991,704.26	46,868,582,357.52	8,941,069,491.57	47.638.821.117.83	(0.21)
Kas di Bendahara Pengeluaran	724,549,610.00	156,980,215.00	271,089,553.00	96,372,453.00	3.622.375.60	(55.87)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	1,047,000.00	24,066,084.00	65,349,656.00	1.431.000.00	(10.52)
Kas dibadan Layanan Umum Daerah	5,276,903,112.00	5,707,687,520.00	5,752,165,015.00	4,304,209,202.00	2.132.005.036.00	(396.97)
Kas Dana JKN	3,808,418,103.00	4,926,001,428.00	8,025,768,684.00	4,932,265,206.00	3.098.664.367.00	(0.39)

Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Kas Bendahara BOS		830,940,903.00	1,277,410,887.00	2,749,419,313.00	102.610.593.00	(1.66)
Kas Lainnya	-	25,000,000,000.00	30,000,000,000.00	28,254,852,819.00	31.754.852.819.00	0.33
Setara Kas						-
Investasi Jangka Pendek	-	-	30,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10.000.000.000.00	(0.25)
Piutang	-	-	-			-
Piutang Pajak	5,650,396,720.10	3,884,365,196.60	8,145,783,037.20	9,284,139,288.20	9.988.213.144.,20	0.08
Penyisihan Piutang Pajak		-414786496.9	(2,395,659,011.81)	(3,112,761,595.01)	(4.234.375.637,78)	0.75
Piutang Retribusi	6,035,264,236.00	10,894,962,110.00	5,085,861,781.00	7,852,124,460.00	14.559.095.168,00	0.03
Penyisihan Piutang Retribusi		(29,400,750.00)	(52,139,000.00)		(4.234.375.637,78)	0.36
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-			-
Piutang Lainnya	-	-	-		-	-
Penyisihan Piutang	(282,377,493.70)		-		(4.234.375.637,78)	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	89,394,725.00	32,889,752,827.45	34,430,972,796.12	34,682,324,529.66	34.179.445.442,66	0.25
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		329,696,588.00	127,053,454.00	127,053,454.00	117.053.454,00	(0.17)
Persediaan	12,170,278,912.00	13,332,176,876.00	12,827,649,165.95	14,346,686,987.00	35.984.559.13,90	0.19
Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-		-	-
JUMLAH ASET LANCAR	160,915,300,206.17	221,384,415,121.44	180,388,604,802.98	122,523,105,244.42	185.625.998.015,41	(0.02)
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-		-	-
Investasi Non permanen	-	-	-		-	-
Investasi Nonpermanen Dana Bergulir	-	-			-	-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-	-		-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-	-		-	-
Investasi Permanen	-	-	-		-	-
Penyerahan Modal Pemerintahan Daerah	20,436,488,943.79	20,307,963,699.78	30,109,448,025.11	32,078,157,5840.25	33.373.903.737,61	0.10
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-		-	-
Jumlah Investasi Permanen	20,436,488,943.79	20,307,963,699.78	30,109,448,025.11	32,078,157,840.25	33.373.903.737,61	0.10

Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	20,436,488,943.79	20,307,963,699.78	30,109,448,025.11	32,078,157,840.25	33.373.903.737,61	0.10
ASET TETAP	-	-	-	-	-	-
Tanah	174,883,288,590.00	243,840,952,724.00	618,565,434,507.26	609,730,347,957.26	595.918.410.019,26	0.21
Peralatan dan Mesin	250,989,472,667.00	308,948,748,663.78	360,526,364,993.16	399,014,899,951.00	438.552.536.373,00	0.31
Gedung dan Bangunan	829,844,754,451.00	981,680,620,855.07	1,055,033,061,318.73	942,982,749,110.40	935.732.717.810,40	0.02
Jalan Irigasi dan Jaringan	1,288,571,817,781.00	1,416,432,499,354.00	1,703,774,115,541.00	1,924,484,541,286.00	1.841.782.004.792,29	0.08
Aset Tetap Lainnya	47,229,261,574.00	55,733,626,597.18	43,439,898,823.03	50,904,598,345.67	53.349.746.701,68	0.02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,939,731,578.00	44,410,916,097.00	954,048,400.00	21,324,573,250.00	41.189100.000,00	(10.85)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(1,654,443,407,600.86)	(1,706,518,035,904.86)	(1,762,789,991,232.06)	(1.610.645.396.372,49)	0.24
JUMLAH ASET TETAP	2,604,458,326,641.00	1,396,603,956,690.17	2,075,774,887,678.32	2,185,651,718,668.27	2.295.879.119.324,14	0.11
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	15,003,287,671.23	30,003,287,671.23	-	0.37
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	15,003,287,671.23	30,003,287,671.23	-	0.37
ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	41,369,700,000.00	8,850,700,000.00	6,838,900,000.00	6,354,700,000.00	6.149.300.000,00	(1.02)
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	1,915,635,380.96	2,090,378,514.96	2,084,287,514.96	2.084.287.514,96	0.27
Aset Kondisi Rusak Berat	-	-	-	16,003,946,930.00	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	1,447,140,000.00	1,447,140,000.00	1.447.140.000,00	0.50
Aset Tak Berwujud	-	467,100,000.00	973,450,000.00	1,095,950,000.00	1.338.925.000,00	0.29
Aset Lain Lain	3,072,981,050.00	16,382,399,647.00	14,630,034,768.00	203,805,645,027.73	179.384.296.890,00	0.35
Akumulasi Amortasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	44,442,681,050.00	27,615,835,027.96	25,979,903,282.96	230,791,669,472.69	190.403.949.405,86	(0.05)
JUMLAH ASET	2,830,252,796,840.96	1,665,912,170,539.35	2,327,256,131,460.60	2,601,047,938,896.86	2.705.282.970.483,02	(0.07)
KEWAJIBAN	-	-	-	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata Rata Pertumbuhan
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	577,073,775.00	128,438,425.00	195,805,647.00	5,438,976.00	254.0000,00	(14.64)
Utang Bunga	628,413,027.75	481,783,321.28	321,188,880.85	160,594,440.43	-	(0.45)
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	2,889,255,300.00	2,889,255,300.00	2,889,255,300.00	2,889,255,300.00	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	2,902,777.79	116,639,825.51	149,421,191.67	57.124.775,00	0.56
Utang Belanja	24,104,150,684.00	26,496,842,937.00	43,196,925,751.00	23,539,425,135.00	20.185.345.437,00	(0.15)
Utang Jangka Pendek Lainnya	17,800,401,046.52	2,296,648,992.00	2,139,588,616.00	2,368,731,147.00	3.177.88.332,00	(1.64)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45,999,293,833.27	32,295,871,753.07	48,859,404,020.36	29,112,866,190.10	23.520.612.544,00	(0.26)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					-	-
Utang Negeri Sektor Perbankan	8,667,765,900.00				-	-
Utang Dalam Negeri Pemerintahan Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	5,778,510,600.00	2,889,255,300.00	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	8,667,765,900.00	5,778,510,600.00	2,889,255,300.00	-	-	(0.38)
JUMLAH KEWAJIBAN	54,667,059,733.27	38,074,382,353.07	51,748,659,320.36	29,112,866,190.10	23.520.612.544,00	(0.30)
EKUITAS						
EKUITAS	2,775,585,737,107.69	1,627,837,752,186.27	2,275,507,472,140.24	2,571,935,072,706.77	2.681.762.357.939,02	(007)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,830,252,796,840.96	1,665,912,170,539.35	2,327,256,131,460.60	2,568,465,185,184.89	2.705.282.970.483,02	(0.07)

1. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

a) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber pendapatan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya.

Tabel 3.5 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.13%	8.55%	8.82%	12.72%	9.52%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.36%	1.88%	1.84%	2.03%	2.28%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.00%	0.81%	0.56%	0.58%	0.87%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0.15%	0.16%	0.20%	0.31%	0.31%
4.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.61%	5.70%	6.22%	9.80%	6.05%
4.2	Dana Perimbangan	70.61%	66.44%	75.43%	68.72%	68.76%
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	3.06%	1.87%	2.55%	1.43%	1.03%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	61.93%	52.28%	53.30%	48.59%	47.54%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	5.62%	12.29%	19.58%	18.71%	20.19%
4.3	Lain Lain Pendapatan yang Sah	19.26%	25.01%	15.75%	18.56%	21.72%
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00%	0.00%	0.54%	0.00%	3.75%
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	3.31%	2.88%	3.72%	3.49%	3.20%
4.3.4	Dana Penyesuaian	14.19%	20.61%	9.93%	13.93%	13.61%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	1.76%	1.52%	1.57%	1.14%	1.15%

b) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.6. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

NO	Uraian	KINERJA (%)				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	104.17	104.17	101.59	104.79	107.41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	103.01	103.01	105.83	120.94	123.06
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	96.72	104.93	79.18	100.97	87.52
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	99.79	100.59	99.14	105.71	99.49
4.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.94	102.11	103.06	102.16	106.25
4.2	Dana Perimbangan	100.88	98.61	3.33	97.24	98.71
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	125.36	66.65	97.49	82.37	73.39
4.2.2	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	100.00	100.00	94.51	91.91	97.18
4.3	Lain Lain Pendapatan yang Sah	95.45	97.10	101.19	98.70	92.07
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	100.00	-	92.07
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	87.23	80.24	108.31	94.79	96.71
4.3.4	Dana Penyesuaian	100.00	99.30	100.00	99.92	99.75
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	80.24	107.57	94.01	96.39	95.15

c) Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	228,338,719,607
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57,111,227,642
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,491,899,437
4.1.3	Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,079,210,938
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	140,656,381,590
4.2	Dana Perimbangan	1,728,373,016,900
4.2.1	Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	25,599,288,320
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,179,340,805,940
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	523,432,922,640
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	565,588,552,200
4.3.1	Hibah	105,849,960,300
4.3.2	Dana Darurat	
4.3.3	Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	68,337,150,000

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	364,160,241,900
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	27,241,200,000
JUMLAH		2,522,300,288,707

2. Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya menggunakan data TAPD. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

Tabel 3.8 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	24,346,796,820
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	24,346,796,820
6.1,2	Pencairan Dana cadangan	-
6.1,3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	-
6.1,4	Penerimaan Pinjaman daerah	-
6.1,5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1,6	Penerimaan Piutang Daerah	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		24,346,796,820

Data tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Bone

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020	Proyeksi RKPD Tahun 2020
1	2	3	4
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	228,338,719,607	228,338,719,607
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57,111,227,642	57,111,227,642
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22,491,899,437	22,491,899,437
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	8.079,210,938	8.079,210,938
4.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140,656,381,590	140,656,381,590
4.2	Dana Perimbangan	1,728,373,016,900	1,728,373,016,900
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	25,599,288,320	25,599,288,320
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,179,340,805,940	1,179,340,805,940
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	523,432,922,640	523,432,922,640
4.3	Lain Lain Pendapatan yang Sah	565,588,552,200	565,588,552,200
4.3.1	Pendapatan Hibah	105,849,960,300	105,849,960,300
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	68,337,150,000	68,337,150,000
4.3.4	Dana Penyesuaian	364,160,241,900	364,160,241,900
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	27,241,200,000	27,241,200,000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,522,300,288,707	2,522,300,288,707

B. Tahap II: Perhitungan Pengeluaran Daerah

Hasilan alisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020	Proyeksi RKPD Tahun 2020
1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	1,577,731,152,314	1,577,731,152,314
1.1	Belanja Pegawai	1,067,929,691,997	1,067,929,691,997
1.2	Belanja Bunga	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-
1.4	Belanja Hibah	26,604,270,000	26,604,270,000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,491,000,000	1,491,000,000
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	6,585,926,237	6,585,926,237
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	473,545,264,080	473,545,264,080
1.8	Belanja Tidak Terduga	1,575,000,000	1,575,000,000
2	Belanja Langsung	958,915,933,213	958,915,933,213
2.1	Belanja Pegawai	13,870,569,120	13,870,569,120
2.2	Belanja Barang dan Jasa	628,206,444,537	628,206,444,537
2.3	Belanja Modal	316,838,919,556	316,838,919,556
	Jumlah Belanja	2,536,647,085,527	2,536,647,085,527
	Surplus / (Defisit)	(14,346,796,820)	(14,346,796,820)
6.	Pembiayaan Daerah		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	24,346,796,820	24,346,796,820
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	24,346,796,820	24,346,796,820
6.1.2	Pencairan Dana cadangan		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10,000,000,000	10,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-
6.2.4	Pembayaran Pokok Utang	-	-
6.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.6	Pembayaran Utang Pemda	-	-
6.2.7	Pengembalian Dana Bos	-	-
	Pembiayaan Netto	14,346,796,820	14,346,796,820

Dalam mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah

dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan: (a) Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; (b) Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Berikut ini tabel penghitungan kebutuhan belanja langsung : wajib/mengikat dan prioritas.

Tabel 3.11 Penghitungan Kebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas Kabupaten Bone Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2020	Selisih
1	Belanja Pegawai	13,870,569,120.00	13,870,569,120.00	-
2	Belanja barang dan Jasa	628,206,444,537.00	628,206,444,537.00	-
3	Belanja Modal	316,838,919,556.00	316,838,919,556.00	-
TOTAL BELANJA LANGSUNG WAJIB DAN MENGIKAT		958,915,933,213.00	958,915,933,213.00	-

Berdasarkan data TAPD, APBD Kabupaten Bone pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, realisasi anggaran APBD rata-rata meningkat sebesar 11.22% atau sebesar Rp.239.191.855.869,- Sehingga proyeksi tahun 2017 berdasarkan perhitungan data TAPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel3.12. Perhitungan Proyeksi APBD Tahun 2020

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	RATA-RATA %	RATA-RATA KENAIKAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	PENDAPATAN	1,533,031,760,003	1,870,233,204,846	2,042,529,174,855	2,201,181,670,675	2,251,597,559,579	10.28	179.641.449.894,0	2.369.014.884.600	2,522,300,288,707
4.1	Pendapatan Asli Daerah	155,427,196,666	159,866,219,584	180,156,598,903	279,960,093,500	214,246,216,580	11.87	14.704754978,5	195.573.255.600	228,338,719,607
4.1.1	Pajak Daerah	36,277,176,531	35,125,637,714	37,605,711,247	44,726,076,045	51,236,484,457	9.34	3.739.826.981,5	43.108.723.600	57,111,227,642
4.1.2	Retribusi Daerah	15,378,571,068	15,221,326,386	11,336,148,488	12,795,043,203	19,652,213,419	9.98	1.068.410587	21.943706100	22,491,899,437
4.1.3	Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,331,537,248	2,953,683,330	4,179,816,872	6,727,965,905	7,055,937,640	33.51	1.181.100.098	6.986.469.000	8,079,210,938
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	101,439,911,819	106,565,572,154	127,034,922,297	215,711,008,347	136,301,581,064	14.31	8.715.417311,3	123.534356900	140,656,381,590
4.2	Dana Perimbangan	1,083,624,984,390	1,242,614,366,711	52,114,930,328	1,512,633,984,416	1,548,309,677,324	9.80	116.171.173.233,5	1.634.785.865.000	1,728,373,016,900
4.2.1	Dana Bagi Hsl Pajak/Bagi Hsl Bukan Pajak	46,907,340,390	34,897,311,711	52,114,930,328	31,407,240,349	23,302,043,707	(10.45)	(5.901.324.170,8)	24.150.272.000	25,599,288,320
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	950,401,934,000	977,807,065,000	1,088,618,062,000	1,069,494,543,000	1,070,426,493,000	3.14	30.006.139.750	1.116.830.949.000	1,179,340,805,940
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	86,315,710,000	229,909,990,000	399,887,704,226	411,732,201,067	454,581,140,617	63.42	92.066.357.654,3	493.804.644.000	523,432,922,640
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	295,595,581,529	467,752,618,551	321,751,879,398	408,587,592,759	489,041,665,675	18.43	48.361.521.036,4	538.655.764.000	565,588,552,200
4.3.1	Hibah	-	-	11,038,188,960	-	84,489,169,245	(25.00)	21.122.311,3	100.809.486.000	105,849,960,300
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hsl. Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	50,761,528,815	53,871,562,151	75,918,025,272	76,881,029,359	72,110,586,785	10.53	5.337.264.492,4	65.083.000.000	68,337,150,000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217,767,982,000	385,474,033,000	202,773,125,000	306,700,190,600	306,620,285,200	20.21	22.213.075.800	346.819.278.000	364,160,241,900
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	27,066,070,714	28,407,023,400	32,022,540,166	25,006,372,800	25,821,624,445	(0.24)	(311.111.567,3)	25.944.000.000	27,241,200,000
4.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Belanja	1,487,000,153,623	1,841,775,310,345	2,045,111,813,069	2,240,431,074,375	2,239,973,295,978	10.63	188.243285.588,6	2.369.014.884.600	2,536,647,085,527

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	RATA-RATA %	RATA-RATA KENAIKAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
5.1	Belanja Tidak Langsung	542,306,609,820	1,192,434,833,096	1,296,194,903,754	1,322,409,001,832	1,424,920,507,441	27.96	220.653.474.405,3	1.502.315.992.410	1,577,731,152,314
5.1.1	Belanja Pegawai	431,717,602,972	894,670,854,461	922,893,000,080	862,728,295,367	849,443,775,486	19.07	104.431.543.128,6	1017.075.897.140	1,067,929,691,997
5.1.2	Belanja Bunga	1,601,042,182	1,265,189,968	929,417,250	590,230,716	253,351,574	(54.98)	(336.922.651,9)	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	31,909,347,649	28,630,890,582	7,297,509,288	-	-	(36.96)	(7.977.336.912,3)	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	6,482,500,000	2,157,500,000	11,262,890,000	33,521,141,213	97,608,807,050	137.00	22.781.501.512,5	25.337.400.000	26,604,270,000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,349,500,000	50,960,276,170	35,108,958,014	49,761,862,000	71,750,385,800	32.83	17.100.221.450	1.420.000.000	1,491,000,000
5.1.6	Belanja Bagi Hsl. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	1,754,472,000	-	-	-	4,593,053,681	(20.00)	709.645.420,3	5.987.205.670	6,585,926,237
5.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	65,492,145,018	214,508,371,916	317,968,973,096	375,794,960,536	401,261,210,850	63.14	83.942.266.458	450.995.489.600	473,545,264,080
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	241,750,000	734,156,026	12,512,000	10,224,000	(1.116,92)	2.556.000	1.500.000.000	1,575,000,000
5.2	Belanja Langsung	944,693,543,804	649,340,477,249	748,916,909,315	918,022,072,543	815,052,788,537	2.49	(32.410.188.816,6)	881.555.623.080	958,915,933,213
5.2.1	Belanja Pegawai	431,717,602,972	-	-	-	-	(20.00)	(107.929.400.724,9)	17.338.211.400	13,870,569,120
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303,396,569,836	345,142,601,459	418,172,616,191	525,318,599,098	547,576,079,281	17.00	61.044..877.361,3	572.603.127.689	628,206,444,537
5.2.3	Belanja Modal	209,579,370,996	304,197,875,790	330,744,293,124	392,703,473,445	267,476,709,256	8.31	14.474.334.565	291.614.283.991	316,838,919,556
								-		
	Surplus / Defisit	47,647,608,962	28,457,894,500	(2,582,638,214)	(39,249,403,700)	11,624,263,601	285.19	(9.005.836.340,2)	(14.856.730.890)	(14,346,796,820)
6	Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	94,495,190,064	136,675,269,332	159,956,768,596	121,784,005,969	89,295,314,009	2.78	(1.299.969.013,7)	24.856.730.890	24,346,796,820
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	94,159,190,064	136,675,269,332	159,387,176,123	121,202,865,127	59,295,314,009	(3.32)	(8.715.969.013,7)	24.856.730.890	24,346,796,820

NO	URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	RATA-RATA %	RATA-RATA KENAIKAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	30,000,000,000	25.00	7.500.000.000	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	336,000,000	-	569,592,473	581,140,842	-	(49.49)	(84.000.000)	-	-
6.1.7	Penerimaan Pembayaran ASKES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.8	Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.9	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,467,529,694	5,595,941,390	36,652,330,420	23,245,864,760	5,889,255,300	111.52	105.431.401,5	10.000.000.000	10,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	15,000,000,000	15,000,000,000	-	(25.00)	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,000,000,000	2,500,000,000	16,038,188,960	5,000,000,000	3,000,000,000	145.68	500.000.000	10.000.000.000	10,000,000,000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3,395,755,300	2,889,255,300	2,889,255,300	-	2,889,255,300	(28.73)	(126.625.000)	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	2,889,255,300	-	(25.00)	-	-	-
6.2.5	Pembayaran Utang Belanja PEMDA	1,071,774,394	206,686,090	2,724,886,160	-	-	259.41	(267.943.598,5)	-	-
6.2.6	Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.7	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8	Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	89,027,660,370	131,079,327,942	123,304,438,176	98,538,141,209	83,406,058,709	1.47	(1.405.400.415,2)	14.856.730.890	14,346,796,820
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan (SILPA)	136,675,269,332	159,537,222,442	120,721,799,963	59,288,737,509	95,030,322,309,45	0.45	(10.411.236.755,7)	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah meningkat rata-rata sebesar 10.28 sehingga proyeksi anggaran tahun 2020 sebesar Rp.228.119.784.007,- Dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar 9.80% dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat 18.43%. Jumlah pendapatan Kabupaten Bone pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 2.522.300.288.707,- Padatahun 2019, belanja daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp.2.536.647.085.527,- Sedangkan pembiayaan Kabupaten Bone di tahun 2020 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp.14.346.796.820,-

3.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan tren data APBD Kabupaten Bone dari tahun 2014-2018, persentase terbesar pendapatan daerah tahun 2020 dari dana perimbangan yaitu sebesar 68.52% dari total pendapatan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22.42% dan pendapatan asli daerah sebesar 9.05%. Anatomi pendapatan daerah Kabupaten Bone tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pendapatan terbesar adalah dari dana perimbangan sedangkan pendapatan asli daerah relatife kecil. Jumlah pendapatan asli daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.228.338.719.607,- meningkat sebesar 16.75% dari tahun 2019 yang sebesar Rp.195.573.255.600,- Dana perimbangan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.728.373.016.900,- meningkat sebanyak 5.72% dari tahun 2019 yang sebesar Rp.1.643.785.865.000,- Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat dari tahun 2019 sebesar 5% yaitu Rp.538.655.764.000,- dan ditahun 2020 sebesar Rp.565.588.552.200,-. Anatomi belanja daerah Kabupaten Bone hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan belanja tidak langsung daerah Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.577.731.152.314,- meningkat sebesar 5.02% dari tahun 2019 yang sebesar Rp.1.502.315.992.410,- Sedangkan belanja langsung tahun 2020 diproyeksi meningkat sebesar 8.78% yaitu Rp.958.915.933.213,- dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp.881.555.623.080,-.

Pembiayaan daerah berdasarkan tren data APBD Kabupaten Bone, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran (SILPA) yang diproyeksikan meningkat sebesar -3.43% dari

tahun 2019. Proyeksi penerimaan dari SILPA tahun 2020 sebesar Rp.24.346.796.820,- dari tahun 2019 yang sebesar Rp.24.856.730.890,- Berdasarkan uraian dan proyeksi anggaran daerah, kerangka pendanaan Kabupaten Bone ditahun 2020 untuk pendapatan daerah banyak berasal dari dana perimbangan. Sedangkan belanja daerah banyak diserap untuk belanja tidak langsung.

3.2.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu : jenis pajak Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis meliputi:

- a) Pajak hotel;
- b) Pajak restoran;
- c) Pajak hiburan;
- d) Pajak reklame;
- e) Pajak penerangan jalan;
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g) Pajak parkir;
- h) Pajak air tanah;
- i) Pajak sarang burung walet;
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k) Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Sedangkan obyek retribusi daerah tersebut meliputi:

- a) Retribusi jasa umum;
- b) Retribusi jasa usaha; dan
- c) Retribusi perizinan tertentu.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui : (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensidan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat

untuk memenuhi kewajibannya. Pendapatan daerah Kabupaten Bone terdiri dari tiga komponen sumber pendapatan yaitu : (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018, pendapatan daerah terserap sebesar 99.18% dari seluruh realisasi anggaran, sedangkan belanja daerah terserap sebesar 0.82% dan sisanya sebesar 1.59% adalah pembiayaan daerah. Sumber-sumber PAD 2018 Kabupaten Bone terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 63.62% atau sebesar Rp.136.301.581.064,41,- dari seluruh pendapatan asli daerah. Sumber terbesar kedua berasal dari hasil pajak daerah sebesar 23.91% atau Rp.51.236.484.457,- dari total seluruh pendapatan daerah. Sumber lainnya berasal dari hasil retribusi daerah sebesar 9.17% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3.29% dari seluruh pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari dana perimbangan tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.1.548.309.677.324,- yang banyak berasal dari dana alokasi umum sebesar 69.14% atau Rp.1.070.426.493.000,-sedangkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus sebesar 29.36% atau Rp.454.581.140.617,- dan dari dana bagihasil pajak/bagihasil bukan pajak sebesar 1.50% atau Rp.23.302.043.707,- Sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang Sah dengan pendapatan terbanyak berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 62.70% atau Rp.306.620.285.200,- pendapatan dari dana bagihasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 14.75% atau Rp.72.110.586.785,- dan berasal dari bantuan keuangan dari propinsi atau pemdalainnya sebesar 5.28% atau Rp.25.821.624.445,-.

Dalam upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan seringkali menimbulkan permasalahan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas SDM pengelola penerimaan daerah.
4. Penataan anggaran berbasis kinerja (Performance Budget) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dan biaya rendah.
5. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
6. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah.
7. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan retribusi daerah.
8. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.
9. Peningkatan investasi dapat di dorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif.
10. Menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mempertegas peraturan kebijakan agar tidak tumpang tindih, baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
11. Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha.
12. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.
13. Meningkatnya penggunaan asset daerah, optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi asset, kalau perlu dilaksanakan kerjasama dengan swasta.
14. Perlu membentuk badan usaha baru.

3.2.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan harus berdasar pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah; prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan diantaranya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal serta belanja yang wajib dikeluarkan pada tahun bersangkutan. Secara umum struktur belanja daerah Kabupaten Bone tahun 2018 terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 63.61% atau Rp.1.424.920.507.441,- sedangkan Belanja Langsung sebesar 36.39% atau Rp.815.052.788.537,- Dari analisis realisasi anggaran serta pertimbangan lainnya, arah kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanjadaerah yang mencukupi belanja pegawai/gaji PNS;
2. Mencukupi belanja barang dan jasa rutin kantor;
3. Belanja pelayanan fungsi pendidikan dan kesehatan dan pemerataan infrastruktur Kabupaten Bone;
4. Alokasi belanja bantuan social untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan;

5. Peningkatan belanja modal;
6. Dukungan program dari pemerintahan pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Alokasi belanja antisipasi kegiatan mendesak melalui belanja tidak terduga.

3.2.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2019, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2020 di Kabupaten Bone antara lain diarahkan untuk :

- a. Melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya;
- b. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;
- c. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam; dan
- d. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui transaksi dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Catatan :

- Rata-rata persentase SILPA terhadap realisasi APBD Kabupaten Bone Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mencapai 7,92 persen, hal ini disebabkan karena adanya pelampauan anggaran dan efisiensi belanja dengan rata-rata serapan 93,1 persen pertahun dengan komponen pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Sulselbar Cabang Bone
 - b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat atas perjanjian RDA-327/DP3/2006 dan RDA.P5-113/DP3/1993
 - c. Kas di Kas Daerah
 - d. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - e. Kas di BLUD
 - f. Kas di Bendahara JKN

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.59,288,737,509 mengalami penurunan sebesar Rp.61.433.062.454 dari SILPA Tahun anggaran 2016, hal ini disebabkan karena serapan anggaran Tahun 2017 mencapai 95.91 persen;
- Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2018 diasumsikan sama dengan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2019;
- SILPA tahun 2018 tidak dicantumkan karena penghitungannya harus didasarkan pada perkiraan realisasi anggaran tahun 2018.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk percepatan pertumbuhan makro ekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan dan sangat erat keterkaitannya dengan strategi pengembangan wilayah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi hasil pembangunan beserta permasalahannya dan isu-isu terkait pembangunan dan berdasarkan pada target yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023.

Perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan target yang akan dicapai pada Sustainability Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 sehingga sasaran dan prioritas pembangunan yang dilakukan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam rangka menjaga secara berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan Pembangunan adalah sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil program Perangkat Daerah. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu lima tahun dengan perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu tujuan dan sasaran yang telah diurmuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).					
1	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
	Sasaran 1	Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP
			Nilai SAKIP	Predikat	B
Sasaran 2	Berkurangnya kasus KKN	Proporsi OPD yang bebas KKN	Persen	90	
Misi 2 Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat					
2	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang berkelanjutan		Indeks Gini	Indeks	0,377
	Sasaran 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Persen	9,18
	Sasaran 4	Membaiknya daya beli masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	51,60
			Tingkat inflasi	Persen	4,38
	Sasaran 5	Tersedianya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,10
	Sasaran 6	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	10,00
Sasaran 7	Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69	
Misi 3 Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.					
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,57
	Sasaran 8	Membaiknya layanan pendidikan kepada	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,81

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
		seluruh lapisan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,75
	Sasaran 9	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,78
			Persentase Balita Stunting	Persen	7,42
	Sasaran 10	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,98
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,57
Misi 4 Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.					
4	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan		Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat	Persen	100
	Sasaran 11	Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,21132
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak	Persen	82,25
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi air limbah	Persen	79,06
			Rasio Jaringan Irigasi	Mtr/ Ha	5,06
			Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	61,14
Misi 5 Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.					
5	Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,31-100 (A)
	Sasaran 12	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai PMDN/PMA	Rp Miliar	175
	Sasaran 13	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik	Jumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah	Inovasi	1
Misi 6 Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.					
6	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan penegakan		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
	hukum				
	<i>Sasaran 14</i>	Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum masyarakat	Persentase angka kriminalitas tertangani	Persen	84,27
	<i>Sasaran 15</i>	Berkurangnya kasus kriminalitas	Angka Kriminalitas	Kasus	870
7	Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,202
	<i>Sasaran 16</i>	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Jumlah wisatawan	Orang	168.767

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Bone menyusun rencana kerja daerah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2020 untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan sebagai bentuk menata Kabupaten Bone disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, peningkatan kualitas masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2019 untuk perencanaan Tahun 2020 mengambil tema “*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian, Berdaya Saing dan Berkelanjutan*”, dan didalam dokumen RPJMD 2018-2023 telah dirumuskan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan

perdesaan.

5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan ditentukannya prioritas pembangunan maka arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2020 dapat dirumuskan dengan memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan pokok kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang tentunya sudah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bone digunakan sebagai bahan sinkronisasi program prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan ketersediaan pendanaan riil daerah. Secara garis besar hasil pemetaan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bone menitikberatkan permasalahan pembangunan pada peningkatan taraf hidup, pembangunan infrastruktur seperti jalan lintas dan irigasi dan pembangunan pada sektor kesehatan serta jalan-jalan lingkungan yang merupakan kebutuhan umum yang mendesak. Penjabaran Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

- Perubahan sistem dan tata kelola Pemerintahan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kinerja OPD yang berbasis pelayanan prima. Diantaranya memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep satu pintu sehingga para investor tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku
- Perlunya revitalialisasi manajemen lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan peningkatan infrastruktur transportasi.

Melalui program manajemen rekayasa sistem lalu lintas yang dapat mengurangi kemacetan.

- Peningkatan pelatihan dan pelayanan sumber daya manusia di segala bidang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian/kehutanan dan perikanan dengan pelatihan ketenaga kerjaan dan kewirausahaan guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas menuju masyarakat yang sejahtera.
- Perlunya peningkatan profesionalisme bagi Satuan Polisi Pamong Praja melalui latihan yang lebih berkualitas.
- Perlunya pelatihan tenaga/aparat desa yang lebih terarah dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat desa.
- Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat/pemangku kepentingan.
- Perlunya menegakkan disiplin hukum terhadap oknum pejabat yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu
- Mengevaluasi secara menyeluruh perda yang ada untuk mencari yang saling tumpang tindih guna tercapai produk hukum yang efektif
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan HAM yang mendukung tegaknya PERDA dan Undang-Undang.

2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone masih tinggi yang disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari segi pendapatan yang tidak merata sehingga menurunkan daya beli. Salah satu ketidakmampuan masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan karena ketidakberdayaan mereka yang disebabkan banyak faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, akses ke titik-titik ekonomi, lapangan pekerjaan yang kurang dan tidak termanfaatkannya secara optimal sumber daya alam.

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut langkah yang ditempuh adalah :

1. Memperkuat Perekonomian Daerah melalui upaya penciptaan lapangan kerja, pemeliharaan dan pemanfaatan asset-asset Daerah yang kurang maksimal, mengingat tingkat pertumbuhan penduduk usia produksi di Kabupaten Bone semakin meningkat.
2. Peningkatan dan pengembangan produksi dan pemasaran serta pembinaan pengembangan dan penumbuhan aktifitas ekonomi keluarga, kelompok dan masyarakat.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang lebih optimal.
4. Memperbanyak kursus – kursus baik jenis kursus maupun frekuensi dan daya jangkau sampai ke pelosok pedesaan untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan investasi, sumber daya UMKM dan PTKD, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru.
5. Memperkuat Perekonomian Daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Melakukan pembinaan pada peningkatan sistem padat karya, disamping untuk menggiatkan budaya gotong royong yang sudah menjadi tradisi sosial masyarakat Bone khususnya di desa, yang sejauh ini terancam terkikis dengan adanya dana desa yang cukup besar.
7. Merevitalisasi sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang mengalami trend yang baik namun di beberapa sektor perlu peningkatan dan optimalisasi. Diantaranya meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi asset daerah, optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya serta meningkatkan tata kelola BUMD menjadi *Good Corporate Government*.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, mengurangi pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

3. *Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya.*

Kebijakan pendidikan di Kabupaten Bone diarahkan pada upaya pencapaian tiga aspek antara lain : 1). Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 2). Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan 3). Akuntabilitas dan manajemen pendidikan. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan berbagai program/kegiatan meliputi ; Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan pendidikan menengah, Program Pendidikan Non-Formal diarahkan mendukung pencapaian angka melek aksara usia 15-45 tahun. Antara lain menyempurnakan metode serta kurikulum pada seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang memuat topik inti, muatan lokal, dan minat pribadi peserta didik, serta pemberian bobot pendidikan sikap hidup yang mampu mengubah nilai dan sikap budaya kearah kesadaran menjaga harkat dan martabat diri. Serta perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu, nasib, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidik lainnya, terutama di daerah terpencil dan terisolir. Penanganan masalah dalam sektor pendidikan antara lain :

- Perlunya meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan Life Skill) khususnya bagi anak putus sekolah dan pengangguran.
- Perlunya dikembangkan Sekolah Percontohan di setiap wilayah.
- Perlunya peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan melalui program dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

Pada pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dan terbangunnya suatu lingkungan yang sehat dan perilaku sehat masyarakat. Keberhasilan yang dapat dicapai dari peningkatan derajat kesehatan salah satunya memperpanjang usia harapan hidup. Menurunkan kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan status gizi masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis, perbaikan sanitasi, khususnya ketersediaan air minum dan

jambang keluarga, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Penanganan sektor kesehatan dan sosial dasar lainnya antara lain :

- Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai setiap desa secara merata, disamping itu hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan sistem pengelolaan sampah.
- Perlu adanya standarisasi pelayanan kesehatan baik Primer maupun Sekunder.
- Perlunya mengiatkan program perbaikan Gizi Masyarakat.
- Mengkampanyekan sayang anak, memberi ruang bagi anak untuk berkembang dengan bagus nilai-nilai luhur bangsa tanpa kehilangan jati dirinya.
- Pengarustamaan Gender dalam semua aspek kehidupan.

4. *Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan.*

Perlu adanya kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan BUMDES di setiap desa yang di tekankan memiliki nilai pemberdayaan bagi masyarakat dalam pengelolaan unit usahanya. Olehnya itu, perlu intervensi kebijakan dari Pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan optimalisasi. Diantaranya dengan menjadikan BUMDES sebagai Lokus utama penyedia kebutuhan petani, sekaligus sebagai langkah awal dalam melepaskan petani dari tengkulak yang dinilai cukup merugikan petani selama ini.

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang lebih optimal dengan mengajak masyarakat untuk berinovasi dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya yang ada diwilayahnya menjadi industri-industri kreatif. Pembinaan pada peningkatan sistem padat karya disamping untuk menggiatkan budaya gotong royong yang sudah menjadi tradisi sosial masyarakat Bone khususnya di desa, yang sejauh ini terancam terkikis dengan adanya dana desa yang cukup besar.

5. *Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.*

Inovasi diperlukan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi komparatif menjadi kompetitif sehingga kabupaten bone mempunyai daya saing ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Usaha untuk pengembangan inovasi daerah telah dilakukan sejak tahun 2015 namun beberapa permasalahan secara umum diidentifikasi pada persoalan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran serta keterlibatan pemangku kepentingan.

6. *Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.*

Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang dampaknya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan suatu tantangan pemerintah daerah yang cukup berat dikarenakan ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan dan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Pembangunan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk peningkatan investasinya.

Pembangunan Industri dalam rangka peningkatan perekonomian daerah yang akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dominan, yang bertumbuh pada peran lokomotif ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor rill, diharapkan akan mampu mendorong pembangunan industri serta peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah daerah melakukan strategi kebijakan dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja, daya saing dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah melalui kemitraan dengan pihak swasta, masyarakat dan swasta (*public-private partneship*). Tantangan ini menjadi cukup penting bagi pemerintah daerah karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

7. *Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.*

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah menunjukkan kemajuan, diantaranya tindakan kriminal dan kekerasan dirasakan intensitasnya semakin berkurang. Meskipun demikian disadari juga seringnya terjadi tindakan pencurian, hal ini akan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangannya.

Kemajuan demokrasi terlihat dengan telah berkembangnya pengetahuan masyarakat dalam politik dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif dalam berpartisipasi mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan politik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat. Di samping itu, kebebasan pers dan media telah berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi menjadi prioritas pada tahun 2020. Pembangunan bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat diarahkan pada terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, melalui ;

1. Menciptakan Keamanan, ketertiban dan ketentraman umum dilingkungan kehidupan sosial masyarakat sehingga akan dapat tercipta rasa aman dan tentram baik secara batiniah maupun lahiriah.

2. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi manusia.
3. Mengembangkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah , Polri dan TNI (atas permintaan) serta peran masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada Perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB V

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada matrix di bawah ini. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone. Selain itu, pada matrix tersebut disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Setiap Pemerintah Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis dimasing-masing tingkatan secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) harus selaras antar tingkatan unit organisasi yang meliputi Indikator Kinerja Sasaran (*Impact*) dan Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) termasuk Indikator Kinerja Keluaran (*Output*).

Indikator Kinerja Utama pada tingkat pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Kinerja Sasaran (*Impact*) sesuai dengan target yang akan dicapai terhadap visi dan misi pemerintah. Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah adalah Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) sedangkan Indikator Kinerja Utama pada pelaksana satuan kerja adalah Indikator Kinerja Keluaran (*Output*). Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu pemerintahan, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam kerangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan, penerapan Indikator Kinerja Utama akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Sesuai dengan variabel indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, maka berikut ini akan disajikan Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka indikator kinerja sasaran dan program serta target yang akan dicapai pada tahun 2020, termasuk Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam menuntaskan seluruh indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2023
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	A
3	Proporsi OPD yang bebas dari KKN	Persen	85	90	99
4	Pertumbuhan ekonomi	Persen	8,81	9,18	10,11
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	47,49	51,60	63,91
6	Tingkat inflasi	Persen	4,66	4,38	3,50
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30	4,10	3,75
8	Persentase penduduk miskin	Persen	10,08	10,00	9,75
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68	69	75
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,81	13,05
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,75	8,41
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,64	66,78	67,18
	Persentase Balita Stunting	Persen	7,47	7,42	7,27
13	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,96	91,98	92,07
14	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,53	62,57	62,69
15	Cakupan Desa/ Kelurahan Sehat	Persen	100	100	100
16	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,21066	0,21132	0,21330
17	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak	Persen	80,5	82,25	85,75
18	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi air limbah	Persen	77,62	79,06	83,43
19	Rasio Jaringan Irigasi	Mtr/ Ha	4,68	5,06	6,21
20	Nilai PMDN/PMA	Rp Miliar	150	175	250
21	Jumlah inovasi yang	Inovasi	1	1	1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja	Kondisi Akhir
				2020	2023
	mendapatkan penghargaan dari pemerintah				
22	Persentase angka kriminalitas tertangani	Persen	82,34	84,27	90,08
23	Angka Kriminalitas	Kasus	966	870	634
24	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,189	0,202	0,241
25	Jumlah wisatawan	Orang	153.493	168.767	220.353

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
	Pendidikan				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	72,44	461.246	DINAS PENDIDIKAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,95	126.637.464	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	98,00		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	87,80		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	82,30		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,09		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,15		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	1068,23	122.773	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	1621,89		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (%)	100	6.980.000	
	Program Pendidikan Menengah	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	62,16	3.439.700	
	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	65,00	7.164.043	
	Kesehatan				
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan realisasi ketersediaan obat (%)	100	5.963.354	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan penyehatan lingkungan (%)	100	16.204.320	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan obat dan makanan (%)	100	18.700	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	35.038.000	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelaksanaan perbaikan Gizi masyarakat (%)	100	1.033.097	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lingkungan sehat (%)	100	823.807	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin(%)	100	26.840	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS (%)	100	123.437.189	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pustu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di PKM dan jaringannya (%)	100	18.438.459	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan realisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	100	759.753	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak balita (%)	90	110.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan PKM yang melaksanakan program kesehatan lansia (%)	100	30.500	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (%)	100	15.125	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan (%)	80	5.793.931	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (%)	100	458.244	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan PKM yang telah terakreditasi (%)	100	24.723.561	DINAS KESEHATAN
		Status Akreditasi Rumah Sakit (%)	-	-	RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RS Kelas B (%)	77	65.000.000	RSUD
		Cakupan ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang RS (%)	100	8.143.899	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kualifikasi SDM sesuai standar RS tipe B (%)	100	8.860.000	RSUD
	Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan realisasi pelayanan kesehatan rujukan (%)	100	74.969.362	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan kabupaten (%)	28,09	52.500.000	Dinas PU-PTR
		Persentase pembangunan jembatan (%)	32,45	4.000.000	
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yang dipelihara (%)	71,16	41.900.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi (%)	100	150.000	
	Progran Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan status kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat (%)	100	250.000	
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase data base jalan dan jembatan yang berbasis SIG (%)	100	440.000	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur jalan desa (%)	50,95	4.000.000	
	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	100	3.175.000	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang 100 persen (%)	100	1.230.000	
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan ruang 100 persen (%)	100	260.000	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian dan pengawasan ruang 100 persen (%)	100	50.000	
	Program Pengendalian Banjir	Persentase saranan dan prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (%)	100	85.200.000	DINAS PENGELOLAAN SDA
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (%)	100	10.200.000	
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase bangunan bersuplai air baku yang termanfaatkan (%)	20	8.000.000	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Daerah Irigasi yang memiliki nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) minimal baik (%)	75	38.530.000	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
	Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah layanan air minum dan sanitasi yang layak (%)	79,78	9.253.862	DINAS PERUMAHAN
	Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Persentase pengembangan luas wilayah strategis kawasan permukiman (%)	100	297.000	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase capaian pengembangan perumahan yang representatif (%)	100	7.734.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan (%)	100	25.000.000	
	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (%)	100	9.041.657	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Persentase peningkatan jumlah sarana infrastruktur perkotaan (%)	100	14.267.000	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	6.083.660	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda (%)	100	605.715	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			136.400	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	100	2.819.740	
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Cakupan ketersediaan logistik penanggulangan bencana (%)	100	404.988	BPRD
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana (%)	100	211.200	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Cakupan peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)	100	52.700	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data kejadian bencana penanggulangan bencana (%)	100	291.825	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan diklat aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana (%)	100	50.000	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Paska Bencana	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan paska bencana (%)	100	6.094.200	
	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	9.088.546	DINAS DAMKAR
	Sosial				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	96,55	932.000	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	87,15	1.120.000	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	50	204.000	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase disabilitas fisik dan mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (%)	65,05	241.500	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (%)	19,50	166.000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	6,06	690.000	
	Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial	Jumlah areal pemakaman yang ditangani (areal)	1	185.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
(1)	(2)	(3)	Target	Rp (000)	(6)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
	Tenaga Kerja				
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	2,17	500.000	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek (%)	74,05		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75,88	1.386.971	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	69,70		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencaker yang terdaftar dan yang ditempatkan (%)	78,49	1.520.724	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Program keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase ketersediaan kebijakan/regulasi daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (%)	14,95	145.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat kabupaten,kecamatan, desa dan kelurahan (%)	39,77	843.494	
		Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak (%)	58,97		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak (%)	100	794.390	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan (%)	53,33	847.160	
	Pangan				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Cakupan ketersediaan energi dan protein (perkapita/hari)	1132	1.235.029	DINAS KETAPANG
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	20		
		Tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	92		
		Tingkat Konsumsi Energi dan protein (perkapita/hari)	1.030		
	Lingkungan Hidup				
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan (%)	80	240.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampahkabupaten (%)	25	6.550.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data tingkat pencemaran lingkungan hidup (%)	65	955.000	
		Persentase pemenuhan kriteria penilaian adipura (%)	75		
		Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan (%)	85		
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase ketersediaan data informasi kualitas udara wilayah perkotaan (%)	75	65.000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA (%)	65	200.000	
		Persentase ketaatan pemrakarsa terhadap pengelolaan lingkungan (%)	85		
	Pertanahan				
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase peningkatan pemahaman tentang sistem pendaftaran tanah (%)	100	90.750	DINAS PERUMAHAN
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase peningkatan penataan dan penguasaan serta pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)	100	2.550.000	
	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian dan penanganan kasus/konflik tanah (%)	100	55.000	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai SOP (%)	85	3.039.081	DINAS DUK CAPIL
	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Indeks keberdayaan masyarakat pedesaan (%)	73	1.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Indeks partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	75	900.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturn Pemerintah Desa yang bersertifikat (%)	70	2.800.000	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase PKK aktif di desa (%)	100	2.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pembinaan Administrasi Pemerintah, Keuangan dan Aset Desa	Persentase ketepatan penyampaian dokumen administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa (%)	75	695.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Persentase KPMD aktif (%)	85	80.000	
	Program Peningkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status desa (%)	85	400.000	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (%)	90	5.025.000	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Program Penataan Pengendalian Penduduk	Cakupan dokumen data dan informasi KKBPK yang tersusun (%)	100	314.662	DINAS PENGENDALIAN DAN KB
	Program Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	0,69	10.238.392	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan kontrasepsi (%)	32,5	150.643	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	0,51		
	Program Pengembangan Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB (%)	37	152.214	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB (%)	43		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	56		
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan siswa yang telah diadvokasi (%)	75	612.360	
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja /mahasiswa (%)	100	155.000	
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan PUS yang telah mengikuti penyuluhan KHIBA (%)	100	178.000	
	Perhubungan				
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	415.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan realisasi peningkatan pelayanan angkutan (%)	100	143.100	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan realisasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	100	200.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan realisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)	150	1.114.900	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan realisasi rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ (%)	100	405.912	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Cakupan realisasi peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (%)	100	146.960	
	Komunikasi dan Informatika				
	Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan pengolahan komunikasi dan informasi publik (%)	100	148.500	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	3.332.700	
	Program Kerjasama dengan Mass Media	Cakupan pengembangan komunikasi dan media massa (%)	100	133.100	
	Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi (%)	100	38.500	
	Program Pengembangan dan Implementasi E-Government	Persentase pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (%)	100	72.600	
	Program Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengelolaan dokumen berita/ informasi layanan persandian (%)	100	121.000	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi (%)	80	786.000	DINAS KOPERASI & UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro (%)	80	150.000	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil menengah (%)	80	405.000	
	Penanaman Modal				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi (Milyar)	175	34.941	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor penanamanmodal (investor)	60	369.825	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase ketersediaan dokumendata base iklim investasi (%)	75	47.271	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur (%)	75	1.318.016	
	Kepemudaan dan Olahraga				
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	90	150.000	DINAS KEPENDUDAHAN DAN OLARAHAGA
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan pembinaan kepemudaan (%)	70	1.400.000	
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda (%)	99	325.000	
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase peningkatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba (%)	40	325.000	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	65	310.000	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	50	2.500.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)	35	1.460.000	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (%)	94	3.681.874	BADAN KESBANGPOL
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (%)	100	429.780	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan (%)	75	894.335	
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	Presentase keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara (%)	6,8	592.816	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
(1)	(2)	(3)	Target	Rp (000)	(6)
	Statistik				
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.	Persentase dokumen statistik daerah dirilis tepat waktu (%)	90	253.000	DINAS KOMINFO
	Kebudayaan				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)	100	612.020	DINAS KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase jumlah peningkatan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	1.709.976	
		Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi (%)	100		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat (%)	100	378.850	
	Perpustakaan				
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (%)	100	1.095.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Kearsipan				
	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan ketersediaan kebijakan sistem pengelolaan kearsipan (%)	100	180.000	
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	100	435.500	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase kualitas pelayanan kearsipan (%)	100	75.000	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan (%)	100	74.000	
	LAYANAN URUSAN PILIHAN				
	Pariwisata				
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (orang)	169	1.000.000	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase peningkatan objek daya tarik wisata (ODTW) (%)	100	9.300.000	
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) (%)	100	350.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020			
			Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Pertanian					
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani (%)	100	1.911.281	DINAS PERTANIAN TPHP	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah Produksi : - Padi (ton) - Jagung (ton) - Kedelai (ton) - Bawang Merah - Cabe (ton) - Sukun (ton) - Kelapa (Ton) - Kopi (ton) - Kakao (ton) - Cengkeh (ton) - Tebu (ton)	1.605.493 452.233 14.660 29 25 45 16.047 358 12.014 5.561 45.574	14.901.000		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Indeks Pertanaman Padi (IP)	1,76	42.682.150		
		Persentase peningkatan diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani (%)	17,5			
	Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan	Produksifitas : - Padi (Kw/Ha) - Jagung (Kw/Ha) - Kedelai (ton) - Bawang Merah (Kw/Ha) - Cabe Besar (Kw/Ha) - Sukun (Kw/Ha) - Kelapa (Kw/Ha) - Kopi ((Kw/Ha) - Kakao (Kw/Ha) - Cengkeh (Kw/Ha) - Tebu (Kw/Ha)	66,33 62,8 21,82 94,94 47,98 0,67 1452,81 471,91 563,9 751,17 42.137,76	1.009.054		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Persentase tenaga penyuluh yang terlatih (%)	100	895.981		
	Program Standarisasi Kualitas Bahan baku	Persentase peningkatan produksi produktifitas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)	100	130.000		
	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan	Persentase peningkatan pendapatan petani (%)	100	170.500		
	Peternakan					
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan (%)	100	399.143		DINAS PETERNAKAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase tingkat penurunan kasus kejadian penyakit ternak (%)	100	240.000		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kesejahteraan kelompok peternak (%)	90	507.423		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	95	490.000		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase ketersediaan produk peternakan unggulan (%)	85	375.000		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Persentase tingkat pemberdayaan penyuluh peternakan (%)	90	100.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
(1)	(2)	(3)	Target	Rp (000)	(6)
	Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase hasil produksi di bidang pertambangan (%)	90	740.000	DINAS PERINDUSTRIAN
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Cakupan pengadaan, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	90	1.405.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas	Cakupan peningkatan mutu pelayanan bagi pengusaha BBM dan Elpiji (%)	100	270.000	
	Program Pemetaan Geologi	Persentase pemetaan geologi (%)	100	690.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan AirTanah	Cakupan pembinaan pengembangan kegeologian dan air tanah (%)	100	1.960.000	
	Perdagangan				
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan rehabilitasi dan revitalisasi pasar (%)	12	6.854.715	DINAS PERDAGANGAN
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase ketersediaan data potensi unggulan (%)	85	170.914	
	Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Cakupan bina usaha /UKM (%)	30	24.200.000	
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina pedagang kaki lima dan asongan (%)	30	876.382	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	90	216.025	
	Perindustrian				
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi (%)	90	3.075.000	DINAS PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Cakupan peningkatan industri kecil dan menengah (%)	100	1.145.000	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan teknologi industri (%)	100	905.000	
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan peningkatan struktur industri (%)	100	1.035.000	
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PP)	Persentase pengembangan sentra-sentra industri potensial (%)	100	1.954.000	
	Kelautan dan Perikanan				
	Program	Produksi perikanan tangkap (ton)	49.112,29	2.057.740	DINAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan (ton)	34.378,61		KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	389.731,19	2.777.480	
		Jumlah produksi pokdakan (ton)	274.483		
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Persentase jumlah pengembangan kawasan berbasis kluster (%)	100	825.550	
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase jumlah nelayan yang terberdayakan (%)	100	330.000	
		Persentase jumlah legalitas usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi (%)	100	1.000.000	
	PENUNJANG URUSAN				
	Perencanaan Pembangunan				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan aparat perencana yang telah mengikuti Bimtek perencanaan (%)	80	96.800	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	744.051	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	100	520.300	
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	100	632.500	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)	100	888.800	
	Keuangan				
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar (%)	81,82	5.905.820	BADAN PENGKEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (%)	29,78		
		Ketetapan Waktu Penetapan APBD dan APBDP sesuai ketentuan	Tepat Waktu		
		Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	50		
		Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD (%)	50		
		Persentase Belanja Modal terhadap total APBD (%)	30		
		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,68		
		Persentase Belanja Pendidikan	21,85		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terhadap total APBD (%)			
		Persentase SILPA terhadap Total APBD (%)	2,76		
		Persentase penyaluran Belanja Daerah (%)	97,24		
		Persentase penyajian LKPD sesuai SAP berbasis Akruar (%)	93,74		
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan kurang 2 (dua) hari (%)	99	289.674	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR (%)	97	186.150	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase realisasi PAD terhadap pencapaian target (%)	100	6.054.224	
		Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan PAD yang tersusun setiap tahun (%)	100		
	Program Penatan PeraturanPerundang-Undangan	Persentase kenaikan objek pajak daerah setiap tahun (%)	0,18	201.054	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	80	3.363.032	BKPSDM
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kediklatan (%)	75	285.000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi (%)	80	100.500	
	Penelitian dan Pengembangan				
	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Persentase peningkatan hasil - hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan (%)	100	1.800.000	BALITBANGDA
	Program Pengembangan SIDA	Persentase cakupan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah (%)	100	742.000	
	Pengawasan				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas kinerja minimal B (>60 – 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (%)	65	2.540.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi (Skor)	>50-60		
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) (%)	60		
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI (%)	95		
		Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) (%)	85 85		
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	400		
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	95		
		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan (%)	95		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase jumlah aparat pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan (%)	60	395.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah elemen penilaian (Assessment) peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (%)	83	35.000	
	Pemerintahan Umum				
	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase pelayanan keagamaan yang terlaksana (%)	100	1.478.147	SEKRETARIS DAERAH
	Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Persentase kebijakan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan (%)	100	280.654	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang ditetapkan (%)	100	1.181.642	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terwujudnya pelaksanaan kebijakan KDH (%)	100	1.257.586	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase peningkatan kategori nilai LPPD (%)	100	844.771	
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina dalam bidang administrasi pemerintahan umum (%)	100	382.115	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah	Persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan penataan pemerintah (%)	100	737.729	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian dan penegasan batas wilayah antar daerah (%)	100	168.850	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana (%)	100	704.605	
	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang efisien (tender) (%)	100	1.735.800	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	100	872.319	
	Program Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya alam (%)	100	1.012.000	
	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perekonomian Daerah	100	1.430.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai SAKIP (%)	100	847.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur (%)	100	198.000	
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda	Persentase realisasi penataan administrasi kelembagaan Pemda (%)	100	1.489.346	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	100	262.662	
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Persentase realisasi pelayanan kegiatan kehumasan (%)	100	1.375.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)	100	9.650.333	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020		
			Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sekretariat Dewan				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	18.995.000	SEKRETARIAT DPRD
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Persentase Realisasi Rancangan Perda Inisiatif DPRD Yang tersusun (%)	100	310.000	
	Kecamatan				
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan system pengawasan internal kecamatan (%)	100	1.179.825	KECAMATAN
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (%)	100	24.039.876	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	233.987	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (%)	100	13.498.846	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	100	5.086.754	
	Program bersifat rutin dan pelayanan internal pada setiap PD				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	439.257.409	SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	47.924.519	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	100	1.444.053	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	1.943.145	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	1.803.334	
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)	100	4.224.863	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk Tahun Anggaran 2020.

Dokumen RKPD Tahun 2020 disusun sebagai pedoman dan acuan PD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Secara hirarki perencanaan pembangunan telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antara lembaga perencanaan dengan pemangku kepentingan pembangunan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Desa/Kelurahan (Musrembang Desa/Kelurahan), Kecamatan (Musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan), Forum Perangkat Daerah dan pada tingkat Kabupaten (Musrembang RKPD Kabupaten).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam pencapaian sasaran dan target pada periode tahun 2020 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah terutama yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.